LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Administrasi Jakarta Utara

Jl. Laksda Yos Sudarso No. 27 - 29
Tanjung Priok, Jakarta Utara

(62-21) 4303111

utara.jakarta.go.id

@kotajakartautara

@kotajakut

KATA PENGANTAR

”*Alhamdulillah*.....”

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya menghantarkan kami dalam menjalankan segala aktivitas kerja dan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan media pertanggungjawaban Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. LKIP berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara terkait pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, yang diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan anggaran pada setiap tahunnya.

Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara selama tahun 2024 baik di Sekretariat Kota maupun di Kecamatan dan Kelurahan dapat terselenggara dengan baik.

Pelaksanaan tugas tersebut tidak akan dapat terselenggara tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya melalui LKIP ini disampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya tugas-tugas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan baik.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Jakarta Utara.

Jakarta, Januari 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,

Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si.
NIP. 197204261991011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam suatu penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berusaha mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan baik, memiliki kinerja yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam bentuk laporan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 merupakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kedudukan, tugas dan fungsi yang menggambarkan secara transparansi capaian kinerja dan prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara terhadap tujuan dan sasaran sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Secara umum Kota Administrasi Jakarta Utara pada Tahun 2024 telah menunjukkan kinerja yang baik dan mencapai target, dengan Indikator Kinerja dalam Naskah Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Bapak Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si. dan sudah disetujui oleh Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada bulan Januri 2024 ada sebanyak 24 (dua puluh empat) Indikator kinerja yang terdiri dari 12 (dua belas) Sasaran Strategis, 9 (sembilan) Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Sasaran Operasional.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut, memiliki target capaian Perjanjian Kinerja pada masing-masing IKU di Perangkat Daerah, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

Beberapa hal yang dilaporkan pada LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2024 ini antara lain :

1. Terjadi penambahan dan pengurangan antara Penetapan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 dengan Tahun 2024, terlihat dalam e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 ada sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, sedangkan pada Tahun 2024 ada sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator kinerja, dengan data sebagai berikut :

o	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Sasaran Khusus	Sasaran Operasional	Jumlah
1	Tahun 2023	11	14	3	28
2	Tahun 2024	12	9	3	24

2. Berdasarkan data Tahun 2024 Penetapan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, terlihat dalam realisasi e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	SASARAN STRATEGIS					
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	93,79	96,80	103,21%
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	93,79	96,80	103,21%
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	95,28	97,22	102,04%
4		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	92,30	96,38	104,42%
5	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	Persentase	100	100	100%
6	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase	100	100	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya	Persentase	100	100	100%
8	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	Persentase	100	100	100%
9	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Persentase	100	100	100%
10	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	Persentase	100	100	100%
11	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase	100	100	100%
12	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persentase	100	100	100%
	SASARAN KHUSUS					
13	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persentase	80	96,44	120,44%
14	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase	100	100	100%
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
16	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100	100	100%
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program	Persentase	100	100	100%
18	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persentase	100	100	100%
19	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3.25	3.25	100%
20	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	89,81	126%
21	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Persentase	92	96,00	104%
	SASARAN OPERASIONAL					
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase	100	99,865	99,865%
23	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100%
24	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100%

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja dari e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

Berdasarkan data tahun 2024 pada tabel di atas, penjelasan tertuang dalam Bab III dalam Laporan LKIP tahun 2024 ini.

3. Sasaran Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 berasal dari Tujuan dan Sasaran Walikota, sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2023-2026, di mana didukung oleh 5 (lima) Program, yaitu :

No	Program	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.458.354.046	1.440.311.478	1.348.596.324	93,63%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	94.075.997.465	92.276.522.160	89.427.956.776	96,91%
	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	428.689.045.944	422.383.255.544	417.205.271.281	98,77%
	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	2.245.537.127	2.343.696.571	2.211.578.325	94,36%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	296.502.165.240	295.692.919.379	280.335.647.458	94,81%
	Total	**822.971.099.822**	**814.136.705.132**	**790.529.050.164**	**97,10%**

No.	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik - Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.692.919.379	280.335.647.458	94,81%
2	Program Pengelolaan Kota Administrasi	- Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan, - Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan, - Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	2.343.696.571	2.211.578.325	94,36%

No.	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
3	Program Pengelolaan Kecamatan	- Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	422.383.255.544	417.205.271.281	98,77%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	92.276.522.160	89.427.956.776	**96,91%**
5	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	1.440.311.478	1.348.596.324	**93,63 %**
	Total		**814.136.705.132**	**790.529.050.164**	**97,10%**

Sumber: Bagian P2Keuangan, monev2024.bapedadki.net/

Daftar Isi
LKIP 2024

COVER

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	**i**
IKHTISAR EKSEKUTIF	**iii**
DAFTAR ISI	**ix**

BAB I **PENDAHULUAN**

A.	Latar Belakang	1
B.	Tujuan dan Manfaat	3
C.	Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Utara	3
D.	Kedudukan	17
E.	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja	17
F.	Tugas Dan Fungsi	24
G.	Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	29
H.	Sumber Daya Manusia	46
I.	Landasan Hukum	66
J.	Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dari Inspektorat	67
K.	Sistematika Penulisan	73

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

A.	Rencana Strategis	79
B.	Tujuan dan Sasaran	85
C.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	91

DAFTAR ISI

Halaman

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja 109
   1. Perbandingan Target dengan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 111
   2. Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2024 dengan 1 Tahun Sebelumnya 304
   3. Perbandingan Target dengan Realisasi Selama 5 Tahun 360
   4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional 376
   5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 383
   6. Analisis Efisiensi Sumber Daya 386
   7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 387
B. Capaian Keuangan 395
C. Inovasi 402
D. Penghargaan / Prestasi 403

BAB IV **PENUTUP**

A. Kesimpulan 407
B. Saran 409

LAMPIRAN

I. Naskah Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024
II. Lampiran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024
III. Inovasi Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024
IV. Penghargaan/Prestasi Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara	12
Tabel 1.2.	Jumlah RT, RW dan LMK Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	13
Tabel 1.3.	Isu-isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara	43
Tabel 1.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026	45
Tabel 1.5.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Unit Kerja	47
Tabel 1.6.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Jenjang Jabatan	48
Tabel 1.7.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Golongan	49
Tabel 1.8.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Tingkat Pendidikan	53
Tabel 1.9.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Kelompok Usia	56
Tabel 1.10.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Jenis Kelamin	59
Tabel 1.11.	Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Agama	61
Tabel 1.12.	Rekapitulasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Pelaksana Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara Per 31 Desember 2024	64
Tabel 1.13.	Komponen dan Bobot Evaluasi AKIP Sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021	68

Halaman

Tabel 1.14.	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	69
Tabel 1.15.	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	69
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026	83
Tabel 2.2.	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026	84
Tabel 2.3.	Target dan Indikator Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026	85
Tabel 2.4.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 s.d Tahun 2026	87
Tabel 2.5.	Target IKU Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	87
Tabel 2.6.	Target Anggaran Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	90
Tabel 2.7.	Target Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	92
Tabel 3.1.	Interpretasi Kategori Nilai Capaian Kinerja	109
Tabel 3.2.	Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	110
Tabel 3.3.	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	111
Tabel 3.4.	Pelaksanaan SKM Semester II Tahun 2024	125
Tabel 3.5.	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I dan II Tahun 2024	126
Tabel 3.6.	Penilaian Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan	143
Tabel 3.7.	Penilaian Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian dan Pembangunan	144
Tabel 3.8.	Penilaian Asisten Sekretaris Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	145

Halaman

Tabel 3.9.	Penilaian Indeks Efektivitas Koordinasi Jakarta Utara	146
Tabel 3.10.	Penilaian Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan	148
Tabel 3.11.	Penilaian Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian dan Pembangunan	149
Tabel 3.12.	Penilaian Asisten Sekretaris Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	150
Tabel 3.13.	Penilaian Indeks Efektivitas Koordinasi Jakarta Utara	151
Tabel 3.14.	Progres Pelaksanaan Sub Kegiatan Dan Rencana Aksi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Triwulan I Tahun 2024	157
Tabel 3.15.	Progres Pelaksanaan Sub Kegiatan Dan Rencana Aksi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Triwulan II Tahun 2024	160
Tabel 3.16.	Progres Pelaksanaan Sub Kegiatan Dan Rencana Aksi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Triwulan III Tahun 2024	164
Tabel 3.17.	Progres Pelaksanaan Sub Kegiatan Dan Rencana Aksi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Triwulan IV Tahun 2024	167
Tabel 3.18.	Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Progres yang sudah mencapai 100% Triwulan I Tahun 2024	184
Tabel 3.19.	Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Progres yang sudah mencapai 100% Triwulan II Tahun 2024	186
Tabel 3.20.	Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Progres yang sudah mencapai 100% Triwulan III Tahun 2024	188
Tabel 3.21.	Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Progres yang sudah mencapai 100% Triwulan IV Tahun 2024	190

Halaman

Tabel 3.22.	Rekapitulasi Penyiapan dan Publikasi Materi Komunikasi Program Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan I Tahun 2024	238
Tabel 3.23.	Rekapitulasi Penyiapan dan Publikasi Materi Komunikasi Program Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan II Tahun 2024	242
Tabel 3.24.	Rekapitulasi Penyiapan dan Publikasi Materi Komunikasi Program Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan III Tahun 2024	246
Tabel 3.25.	Rekapitulasi Penyiapan dan Publikasi Materi Komunikasi Program Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2024	250
Tabel 3.26.	Daftar Capaian Target Sasaran Khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2024 Dengan Sasaran Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	254
Tabel 3.27.	Daftar Capaian Target Sasaran Khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024 Dengan Sasaran Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	259
Tabel 3.28.	Hasil Perhitungan Persentase Nilai Kinerja Anggaran Atas Implementasi Tahun 2024	268
Tabel 3.29.	Rekap Pengaduan Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I Tahun 2024	274
Tabel 3.30.	Rekap Pengaduan Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2024	275
Tabel 3.31.	Rekap Pengaduan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	277

Halaman

Tabel 3.32.	Daftar UKPD Dengan Jumlah Pengaduan CRM Tertinggi Pada Semester I Tahun 2024	278
Tabel 3.33.	Daftar UKPD Dengan Jumlah Pengaduan CRM Tertinggi Pada Semester II Tahun 2024	279
Tabel 3.34.	Daftar Kategori Aduan Tertinggi Tahun 2024	280
Tabel 3.35.	Daftar Kecamatan/Kelurahan dengan Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat dan Terlama Tahun 2024	281
Tabel 3.36.	Daftar Kecamatan/Kelurahan dengan Tindak Lanjut (TL) tidak mencapai target pada tahun 2024	289
Tabel 3.37.	Realisasi Tindak Lanjut Arahan Gubernur Tahun 2024	292
Tabel 3.38.	Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dengan Tahun 2023	305
Tabel 3.39.	Monitor Kegiatan Strategis Daerah 2024	315
Tabel 3.40.	Indikator Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir Tahun 2023 dan 2024	317
Tabel 3.41.	Indikator Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 dan 2024	319
Tabel 3.42.	Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya Tahun 2023 dan 2024	323
Tabel 3.43.	Indikator Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Tahun 2023 dan 2024	326
Tabel 3.44.	Indikator Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati Tahun 2023 dan 2024	329

Halaman

Tabel 3.45.	Indikator Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital Tahun 2023 dan 2024	332
Tabel 3.46.	Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati Tahun 2023 dan 2024	336
Tabel 3.47.	Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023 dan 2024	340
Tabel 3.48.	Perbandingan Antara Target Kinerja, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024	361
Tabel 3.49.	Tabel Kemajuan Capaian Strategis	375
Tabel 3.50.	Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Tahun 2024	377
Tabel 3.51.	Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024	380
Tabel 3.52.	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2024	383
Tabel 3.53.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Utara	386
Tabel 3.54.	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	388
Tabel 3.55.	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024	396

Halaman

Tabel 3.56.	Realisasi Anggaran dari Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024	396
Tabel 3.57.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024	400

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Nyamplung-Burung Raja Udang, Lambang Kota Administrasi Jakarta Utara	4
Gambar 1.2.	Dokumentasi Kota Administrasi Jakarta Utara Tempo Dulu	6
Gambar 1.3.	Dokumentasi Kota Administrasi Jakarta Utara Jaman Sekarang	6
Gambar 1.4.	Geografis Kota Administrasi Jakarta Utara	10
Gambar 1.5.	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	10
Gambar 1.6.	Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Utara	22
Gambar 1.7.	Struktur Organisasi Eselon 2 dan 3 Kota Administrasi Jakarta Utara	23
Gambar 1.8.	Dokumentasi Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	45
Gambar 1.9.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Unit Kerja	47
Gambar 1.10.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Jenjang Jabatan	48
Gambar 1.11.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Golongan	52
Gambar 1.12.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Tingkat Pendidikan	55
Gambar 1.13.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Kelompok Usia	58
Gambar 1.14.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Jenis Kelamin	60
Gambar 1.15.	Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Agama	63

Halaman

Gambar 1.16.	Grafik Rekapitulasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Pelaksana Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara Per 31 Desember 2024	66
Gambar 1.17.	Pola Pikir Penyusunan LKIP	77
Gambar 2.1.	Alur Keterkaitan Renstra dengan Dokrenda Kota Administrasi Jakarta Utara	80
Gambar 3.1.	Grafik Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024	137
Gambar 3.2.	Grrafik Nilai SKM Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2018 - 2024	139
Gambar 3.3.	Grafik Progres Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Utara s.d Bulan Desember Tahun 2024	399

NYAMPLUNG-BURUNG RAJA UDANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Salah satu dasar penyusunan LKIP adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah atas pencapaian sasaran strategis pada pemerintah daerah yang terdapat pada Perjanjian Kinerja yang telah disetujui bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pada Lampiran I peraturan tersebut di atas, menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada Lampiran II, dinyatakan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat Jakarta Utara. Secara periodik pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan hasil atas kinerja yang telah dilaksanakannya selama 1 (satu) tahun anggaran, ke dalam bentuk laporan kinerja, juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Penambahan anggaran yang dikeluarkan dari tahun ke tahun, harus dapat menjamin tingginya kepuasan masyarakat atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan ataupun disediakan oleh pemerintah.

Laporan kinerja diharapkan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Masyarakat Jakarta Utara mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengukur semua aktivitas kerja di lingkungannya, tidak hanya kepada *input* (masukan) dari program satuan kerja tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat dan dampak dari program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pejabat dan staf serta partisipasi Masyarakat.

B. Tujuan dan Manfaat

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara ini bertujuan untuk melaksanakan amanat dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Penyusunan LKIP tahun 2024 menggunakan data bulan Januari sampai dengan Desember 2024 sebagai bahan evaluasi dari kegiatan dan program serta rencana yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun baik di Bagian Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan sebagai bahan informasi dalam pembuatan kebijaksanaan dan pertimbangan serta pengambilan Keputusan Pimpinan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan dan atau kegagalan tentang kinerja tahun 2024 dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2024 baik di Bagian Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

C. Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Lambang Kota Administrasi Jakarta Utara

Kota Jakarta Utara mempunyai lambang Pohon Nyamplung dan Burung Raja Udang. Pohon Nyamplung sendiri memiliki nama ilmiah Calophyllum Inophyllum. Pohon yang satu ini termasuk tanaman industri yang dikembangkan karena baik dari buah, daun dan kayunya bermanfaat.

Gambar 1.1. Nyamplung-Burung Raja Udang, Lambang Kota Adm. Jakarta Utara

Daun nyamplung yang direndam satu malam mempunyai khasiat menyejukkan sehingga dapat digunakan untuk mencuci mata yang meradang. Kayu nyamplung juga sering digunakan sebagai papan, peti dan daun meja, pembuatan kapal, bejana, perabot rumah, bantalan kereta api dan sebagainya. Sedangkan buahnya bisa dijadikan minyak penyembuhan luka dan penyakit kulit.

Di Jawa, tanaman ini tumbuh liar, tinggi tanaman dapat mencapai 20 meter dan sangat subur di daerah pesisir pantai. Karena pohonnya juga bisa mencegah abrasi bibir pantai. Tidak heran bila dijadikan lambang Kota Jakarta Utara mengingat letaknya juga berdekatan dengan pesisir pantai.

Simbol Jakarta Utara selanjutnya adalah Burung Raja Udang. Burung ini punya bulu biru kehijauan yang berkilau seperti permata. Badannya tidak terlalu besar namun kepala dan paruhnya relatif besar. Sama seperti Pohon Nyamplung, habitat burung ini sebagian besar terdapat di tumbuhan pinggir pantai. Adapun makanan utamanya adalah ikan, kodok, serangga dan beberapa jenis reptil kecil.

2. Sejarah Kota Administrasi Jakarta Utara

Jakarta Utara, salah satu Kota Administratif di Provinsi DKI Jakarta, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan kota pelabuhan Sunda Kelapa. Wilayah ini menjadi saksi bisu peristiwa penting sejak zaman kerajaan, kolonial, hingga era modern.

Pada abad ke 14, wilayah ini dikenal sebagai Sunda Kelapa, pelabuhan utama Kerajaan Sunda yang berfungsi sebagai pusat perdagangan internasional. Para pedagang dari China, India, dan Timur Tengah menjadikan pelabuhan ini sebagai tujuan utama karena lokasinya

yang strategis di tepi Laut Jawa. Pada tahun 1522, Portugis tiba di Sunda Kelapa untuk menjalin aliansi dengan Kerajaan Sunda. Namun, kedatangan mereka menjadi pemicu konflik dengan Kesultanan Demak, yang kemudian merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fatahillah. Peristiwa ini menandai lahirnya nama baru, Jayakarta, yang berarti "kemenangan yang sempurna."

Pada abad ke 17, Belanda mengambil alih Jayakarta dan mengubahnya menjadi Batavia, pusat kekuasaan dan perdagangan mereka di Nusantara. Pelabuhan Sunda Kelapa terus berkembang sebagai pusat aktivitas maritim. Wilayah pesisir Jakarta Utara mulai dipenuhi oleh gudang-gudang, kanal-kanal, dan bangunan bergaya Eropa.

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Jakarta Utara berkembang pesat sebagai kawasan industri dan pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Priok, yang terletak di wilayah ini, menjadi pelabuhan utama negara. Modernisasi infrastruktur juga mengubah wajah Jakarta Utara menjadi kota metropolitan yang dinamis.

Tahun 1973 Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari 4 Kecamatan dan 24 Kelurahan. Kecamatan dimaksud yaitu Kecamatan Kep. Seribu, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Tanjung Priok, dan Kecamatan Koja.

Pada tahun 1986 dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1251/1986 dibentuklah dua perwakilan Kecamatan Koja di Kelapa Gading dan Perwakilan Kecamatan ini ditetapkan secara definitif sebagai Kecamatan Kelapa Gading dan Kecamatan Pademangan. Sebelum penetapan ini, di Jakarta Utara telah dibentuk Kecamatan baru yaitu Kecamatan Cilincing yang merupakan pemekaran Kecamatan Koja.

Pejabat Walikota yang pernah memegang tampuk pemerintahan daerah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :

Nama (Masa Jabatan)	Nama (Masa Jabatan)
1) Dwinanto Prodjo Supatmo (1966 - 1978) 2) Kustanto Wiryo Dihardjo (1978 – 1985) 3) R. Moeljadi (1985 – 1991) 4) H. Suprawito (1991 – 1997) 5) Drs. Soebagio, MM (1997 – 2003) 6) Drs. H.M. Effendi Anas, M.Si. (2003 – 2008) 7) H. Bambang Sugiyono, SE, M.Si. (2009 – 2013)	8) Heru Budi Hartono, SE, MM (2014 – 2015) 9) Rustam Effendi (2015 – 2016) 10) Wahyu Haryadi (2016 – 2016) 11) Drs. Husein Murad, M.Si. (2017 – 2018) 12) Syamsudin Lologau, M.Si. (2018 – 2019) 13) Sigit Wijatmoko (2019 – 2021) 14) Ali Maulana Hakim (2021 – sekarang)

Saat ini, Jakarta Utara adalah pusat ekonomi maritim dan budaya. Tempat-tempat bersejarah seperti Pelabuhan Sunda Kelapa, Kelurahan Tugu dan Museum Bahari menjadi destinasi wisata, sementara kawasan industri dan pelabuhan terus mendukung perekonomian nasional. Wilayah ini juga dikenal karena kekayaan kuliner dan tradisi masyarakat pesisirnya.

Pada akhir tahun 2023 jumlah penduduk kota Jakarta Utara berjumlah sebanyak 1.873.096 jiwa. Di Jakarta Utara terletak beberapa pelabuhan, diantaranya Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Gambar 1.2. Dokumentasi Kota Administrasi Jakarta Utara Tempo Dulu

Gambar 1.3. Dokumentasi Kota Administrasi Jakarta Utara Jaman Sekarang
Dari atas ke bawah, kiri ke kanan: Jakarta International Stadium (JIS),
Cove at Batavia PIK, destinasi ruang terbuka baru di kawasan Jakarta Utara,
dan Commuter Line Tanjung Priok

Sepanjang sejarah berdirinya Jakarta, sejak 22 Juli 1527 sistem pemerintahan telah beberapa kali mengalami perubahan, mencakup pergantian penguasa, nama serta pergantian luas wilayah administrasinya. Semula daerah ini bernama Jayakarta, yang terdiri dari tiga bentuk pemerintahan. **Pertama**, pemerintahan langsung yang dikendalikan oleh Penguasa Jayakarta dengan wilayahnya meliputi Pelabuhan Angke. **Kedua**, pemerintahan Negara Agung yang dikendalikan pembantu penguasa Jayakarta dengan wilayah meliputi Pasar Ikan Kali Ciliwung dan Jakarta Kota (saat ini). **Ketiga**, pemerintahan Mancanegara dengan cakupan wilayah Tanjung Priok.

Pada saat pemerintahan Hindia Belanda atau VOC (*Vereenigde Oostindische Compaigne*), sistem pemerintahan diatur dalam UU Comptabuliteit 1854 yang menetapkan pusat pemerintahan berada di Weltevreden. Wilayah di Teluk Jakarta termasuk dalam 3 kategori, yaitu wilayah Vorsteden (kota depan), Regentschap Batavia serta sebagian wilayah partikelir di bawah pengawasan Afdeling I (keamanan) yang membawahi Tanjung Priok serta pengawasan Resident Batavia melalui aparat Asisten Resident Batavia, Asisten Resident Meester Cornelis, serta aparat kontrolir Tanjung Priok, Penjaringan dan Bekasi. Sedangkan penguasa pribumi masa VOC adalah Bupati Tangerang, Bupati Bekasi, Batavia dan Meester Cornelis yang membawahi beberapa wedana.

Sistem pemerintahan berubah kembali pada tahun 1905, setelah dibentuk Gemeente Batavia, di mana wilayah di sekitar Teluk Jakarta ini berubah menjadi Distrik Batavia yang meliputi Onder Distrik Penjaringan, Tanjung Priok, Meester Cornelis dan Bekasi. Sedangkan Tanjung Priok berada di bawah pemerintahan Haven Directie KPM.

Ketika Jepang masuk ke wilayah ini, bentuk pemerintahan berubah menjadi shiku (setingkat kecamatan) dengan wilayah sekitar Teluk Jakarta, seperti Shiku Penjaringan, Tanjung Priok dan Bekasi. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Teluk Jakarta terbagi atas beberapa wilayah administratif, yaitu Kewedanan Penjaringan, Tanjung Priok dan Bekasi.

Ketiga daerah kawedanan ini berada di bawah Walikota Jakarta Raya dan termasuk dalam wilayah Jawa Barat. Kemudian, wilayah di Teluk Jakarta ini berubah menjadi wilayah administratif Kotamadya Jakarta Utara pada tahun 1957, setelah terbentuknya Kotapraja Jakarta Raya.

Sejak tahun 1966, Jakarta Utara mendapatkan status otonomi khusus sebagai Kota Administrasi yang merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Status tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pada bulan Agustus 1966 di DKI Jakarta dibentuk beberapa “Kota Administrasi”. Berbeda dengan kota Otonom yang dilengkapi dengan DPRD Tingkat II, maka kota-kota Administrasi di DKI Jakarta tidak memiliki DPRD Tingkat II yang mendampingi Walikota.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1b/3/1/2/1966 tanggal 22 Agustus 1966, maka Gubernur DKI Jakarta dalam Lembaran Daerah Nomor 5/1966 menetapkan 5 Kota Administrasi lengkap dengan wilayah dan batasnya masing-masing terhitung mulai 1 September 1966.

Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebuah kota administrasi di bagian Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara terletak di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 menetapkan wilayah DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) Wilayah Kotamadya yang tetap tanpa dilengkapi DPRD Tingkat II. Dengan demikian kedudukan Walikotamadya, Camat dan Lurah yang ada di DKI Jakarta semata-mata merupakan pembantu dan alat Pelaksanaan Gubernur. Dengan Undang-Undang ini istilah Kota Administratif yang ada di DKI Jakarta berubah menjadi Kotamadya, dan salah satu Kotamadya itu adalah Kotamadya Jakarta Utara.

Seiring dengan dinamika perubahan, pada tahun 2007 diterbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2008 tentang Perubahan Sebutan Kotamadya dan Walikotamadya, di mana sebutan Kotamadya berubah menjadi kota administrasi dan sebutan Walikotamadya menjadi Walikota.

Sebagai kota administrasi, Jakarta Utara bukanlah daerah otonom sehingga tidak memiliki DPRD tersendiri. Walikota Jakarta Utara diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta atas pertimbangan DPRD. Di sebelah utara Jakarta Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di sebelah selatan dengan Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Di sebelah barat Jakarta Utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Banten.

3. Kondisi Geografis

Jakarta Utara adalah bagian dari Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang terletak di sisi utara daratan Jakarta. Letak wilayah Jakarta Utara berada pada posisi 106°20’00’’ Bujur Timur (BT) dan 06°10’00’’ Lintang Selatan (LS). Luas dari wilayah ini adalah 146,66 Km yang berkontribusi pada 22,14% dari total luas wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Wilayah Jakarta Utara terletak dekat lautan sekaligus menjadi lokasi bagi pelabuhan utama di Jakarta dan tersibuk di Indonesia yaitu Pelabuhan Tanjung Priok. Jakarta Utara juga menjadi lokasi bagi berbagai situs bersejarah, salah satunya adalah Pelabuhan Sunda Kelapa.

Berdasarkan wilayah geografisnya, Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai Laut Jawa dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 Km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Jakarta Barat. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Kecamatan dan batas-batasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Utara	Kepulauan Seribu, Laut Jawa
Timur	Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bekasi)
Selatan	Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur
Barat	Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang)

Gambar 1.4. Geografis Kota Administrasi Jakarta Utara

Secara administratif, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara terbagi menjadi 6 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Penjaringan (40,272 Km²); Kecamatan Pademangan (13,238 Km²); Kecamatan Tanjung Priok (22,495 Km²); Kecamatan Koja (11,659 Km²); Kecamatan Kelapa Gading (15,906 Km²); dan Kecamatan Cilincing (43,560 Km²).

Gambar 1.5. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

Wilayah Jakarta Utara beriklim panas, suhu rata-rata sepanjang tahun yaitu 28,8º C karena letaknya didaerah Khatulistiwa. Adapun rata-rata kecepatan angin adalah 5 knot. Rata-rata kelembaban udara sebesar 77 persen dengan tingkat kelembaban udara terendah sebesar 64 persen dan tertinggi dapat mencapai 88 persen.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta, termasuk di Kota Administrasi Jakarta Utara. Mencermati data spasial penggunaan lahan (penutupan lahan) pada tahun 2018, pemanfaatan lahan DKI Jakarta didominasi oleh tiga peruntukan lahan yaitu lahan hunian, lahan usaha, dan penggunaan lain.

Lahan hunian termasuk guest house, paviliun, rumah, panti dan asrama. Lahan usaha merupakan lahan yang diusahakan untuk menggerakkan perekonomian seperti industri, hotel, perkantoran, restoran, dan sebagainya.

Sementara, yang dimaksud sebagai penggunaan lain adalah peruntukan bekas bangunan, danau, hijau lainnya, kebun, lahan kosong, rawa, situ/waduk, dan tegalan/ladang. Karena pemanfaatan lahan yang sebagian besar digunakan untuk hunian, hampir dapat dipastikan bahwa DKI Jakarta tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi alam dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan air.

Kota Administrasi Jakarta Utara tidak luput dari kerentanannya terhadap bencana, baik bencana alam/lingkungan, seperti banjir, land subsidence, dan gempa, serta bencana non-alam seperti kebakaran. Dari keseluruhan bencana tersebut, banjir dan kebakaran menjadi 2 bencana utama bagi Kota Administrasi Jakarta dengan frekuensi yang tinggi dan berulang.

Kota Administrasi Jakarta Utara berada di pesisir dengan dataran landai, maka potensi terjadinya rob juga cukup tinggi, yang menyebabkan ketinggian permukaan laut, sehingga bisa mengakibatkan jebolnya tanggul di Pantai. Kejadian rob akan terus terjadi seiring dengan perubahan iklim dan penurunan muka tanah terutama di pesisir Jakarta Utara. Hal lain yang dapat memperparah dampak banjir dan genangan adalah penurunan permukaan tanah (*land subsidence*).

Bencana lain yang sering terjadi di Jakarta adalah kebakaran. Bencana ini umumnya terjadi di lokasi permukiman padat penduduk dan lingkungan pasar yang pada umumnya disebabkan oleh arus pendek listrik. Bahaya kebakaran diperkirakan akan terus menjadi ancaman apabila tidak

tumbuh kesadaran masyarakat untuk hidup dengan budaya perkotaan. Oleh karena itu, bencana kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Utara harus diupayakan pencegahannya sedini mungkin.

4. Kondisi Demografis

Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan modal dasar dalam pembangunan. Namun demikian, jika jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik, dapat memicu permasalahan mengenai penyediaan sandang, pangan, dan papan yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya.

Berdasarkan data terakhir BPS tahun 2024, Jakarta Utara memiliki populasi sebanyak 1.839.801 dengan kepadatan penduduk 12.497,63 jiwa/Km².

Tabel berikut ini menggambarkan distribusi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk setiap kecamatan dengan penjelasan lebih lanjut dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

Kecamatan	Luas Area (Km²)	Penduduk (jiwa)			Kepadatan (jiwa/ Km²)	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total		
Penjaringan	40.272	164.000	162.282	326.282	8.101,89	101%
Pademangan	13.238	84.672	82.667	167.339	12.641,28	102%
Tanjung Priok	22.495	206.157	204.558	410.715	1.825,34	101%
Koja	11.659	173.978	170.284	344.262	29.528,30	102%
Kelapa Gading	15.906	70.569	74.490	145.059	9.119,91	95%
Cilincing	43.560	225.543	220.601	446.144	10.242,04	102%
Jumlah	**147,212**	**924.919**	**914.882**	**1.829.801**	**12.497,63**	**101%**

Sumber : BPS dan Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki kepadatan penduduk yang tinggi karena luas wilayahnya yang kecil dengan populasi penduduk yang cukup besar.

Jakarta Utara memiliki 6 Kecamatan, 31 Kelurahan, 460 RW, 5.315 RT dan 449 LMK yang tersebar di 6 Kecamatan pada 31 Kelurahan.

Tabel 1.2. Jumlah RT, RW dan LMK Wilayah
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

No	Unit Kerja	RT	RW	LMK	Keterangan
I	**KEC. PENJARINGAN**	**919**	**78**	**75**	
1	Kel. Kamal Muara	52	7	7	
2	Kel. Kapuk Muara	122	13	10	
3	Kel. Pejagalan	222	18	18	
4	Kel. Pluit	271	22	22	
5	Kel. Penjaringan	252	18	18	
II	**KEC. PADEMANGAN**	**458**	**35**	**34**	
1	Kel. Ancol	75	7	7	
2	Kel. Pademangan Barat	215	16	15	
3	Kel. Pademangan Timur	168	12	12	
III	**KEC. TANJUNG PRIOK**	**1.274**	**104**	**103**	
1	Kel. Tanjung Priok	158	16	16	
2	Kel. Kebon Bawang	195	16	16	
3	Kel. Sungai Bambu	104	10	10	
4	Kel. Papanggo	127	13	13	
5	Kel. Warakas	183	14	14	
6	Kel. Sunter Agung	279	20	20	
7	Kel. Sunter Jaya	228	15	14	
IV	**KEC. KOJA**	**903**	**82**	**82**	
1	Kel. Koja	144	13	13	
2	Kel. Lagoa	222	18	18	
3	Kel. Rawabadak Utara	119	14	14	
4	Kel. Rawabadak Selatan	109	11	11	
5	Kel. Tugu Utara	214	19	19	
6	Kel. Tugu Selatan	95	7	7	
V	**KEC. KELAPA GADING**	**713**	**70**	**64**	
1	Kel. Kelapa Gading Barat	214	21	16	
2	Kel. Kelapa Gading Timur	247	22	21	
3	Kel. Pegangsaan Dua	252	27	27	

No	Unit Kerja	RT	RW	LMK	Keterangan
VI	**KEC. CILINCING**	**1.048**	**91**	**91**	
1	Kel. Cilincing	139	11	11	
2	Kel. Kalibaru	172	14	14	
3	Kel. Semper Barat	249	17	17	
4	Kel. Semper Timur	107	11	11	
5	Kel. Marunda	111	12	12	
6	Kel. Rorotan	151	14	14	
7	Kel. Sukapura	119	12	12	
	JUMLAH TOTAL	**5.315**	**460**	**449**	

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

5. Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

Struktur perekonomian Kota Administrasi Jakarta Utara tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Lapangan usaha yang konsisten memberikan kontribusi terbesar adalah Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan. Lapangan Usaha Industri Pengolahan berkontribusi dimungkinkan karena di Kota Administrasi Jakarta Utara terdapat 782 industri berskala besar dan sedang. Kecamatan Penjaringan memiliki industri besar dan sedang paling banyak yaitu sebanyak 407 industri atau sebesar 52 persen dari total industri besar sedang di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Sebagai daerah yang berbatasan dengan laut, Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai potensi perikanan laut. Produksi ikan di Kota Administrasi Jakarta Utara terus mengalami kenaikan.

Kondisi ekonomi di Kota Administrasi Jakarta Utara tidak lepas dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari keseluruhan PKL yang ada, lokasi usaha yang digunakan para PKL ada yang permanen dan ada yang sudah tetap.

Angka kemiskinan pada Maret 2024 tercatat 6,44 persen, turun 0,34 persen poin dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 6,78 persen. Tren penurunan kemiskinan dalam kurun tiga tahun terakhir menjadi momentum keberhasilan program yang dijalankan pemerintah dalam upaya

pengentasan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin berkurang 5.470 jiwa pada periode Maret 2024. Menurunnya jumlah penduduk miskin didukung oleh membaiknya beberapa indikator makro. Pertumbuhan ekonomi Jakarta Utara Tahun 2023 tumbuh 4,16 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta Agustus 2023 turun 0,65 persen dibandingkan periode yang sama Tahun 2022. Demikian pula dengan laju inflasi pada periode ini masih terkendali di kisaran 2,18 persen.

Sulitnya pemulihan daya beli penduduk akan menyebabkan kesulitan pula bagi penduduk miskin untuk dapat melewati garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah.

Pembangunan manusia di Jakarta Utara terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Jakarta Utara sudah berada di level “sangat tinggi” (IPM ≥ 80). Selama 2020–2024, IPM Jakarta Utara rata-rata meningkat sebesar 0,33 persen per tahun, dari 81,04 pada tahun 2020 menjadi 82,13 pada tahun 2024.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai kota pantai, Jakarta Utara memiliki sejumlah pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, seperti pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Muara Angke dan Marunda. Jakarta Utara juga memiliki Kawasan Berikat Nasional sehingga wilayah Jakarta Utara mempunyai daya tarik yang cukup kuat bagi para pebisnis, baik pebisnis lokal maupun manca negara. Ketersediaan kawasan pelabuhan tersebut terus tingkatkan keberadaannya dengan harapan dapat mampu menampung arus barang dan kapal yang terus meningkat.

Sarana dan Prasarana yang telah dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Utara meliputi :

a. Prasarana Jalan.

b. Sarana Pendidikan yaitu TK, Raudatul Athfal, SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, Madrasah Tsanawiyah, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah.
c. Sarana Kesehatan yaitu Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Poliklinik dan Puskesmas.
d. Sarana Pembuangan Sampah yaitu sebanyak 237 titik lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan. Titik lokasi pembuangan sampah tersebut berupa depo, kontainer, pool gerobak, pool kontainer, dan bak beton. Adapun jumlah kendaraan operasional angkutan sampah yang terdiri dari berbagai moda angkutan.
e. Sarana Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yaitu sebanyak 77 unit. RPTRA terbanyak yaitu di Kecamatan Cilincing yaitu sebanyak 26 unit. RPTRA tersebut hingga saat ini masih terus dikelola oleh pengelola di masing-masing lokasi.
f. Hotel merupakan sarana penting untuk menunjang kegiatan ekonomi dan pariwisata di Kota Administrasi Jakarta, di antaranya adalah hotel berbintang dan hotel merupakan hotel melati.

7. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat di Jakarta Utara merupakan komunitas yang heterogen baik dari sisi sosial, budaya, etnis dan agama. Berbagai suku di negeri ini menetap di daratan Teluk Jakarta hingga puluhan tahun seperti etnis Sunda, Jawa, Bugis, Madura, dan lain-lain. Sedangkan Betawi adalah etnis asli di kawasan ini. Keragaman yang ada selama ini tidak menimbulkan konflik di masyarakat tetapi justru dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Warga binaan sosial di panti asuhan di Kota Administrasi Jakarta Utara di tampung dalam panti sosial. Adapun warga binaan sosial yang tidak di tampung dalam panti akan di tampung pada penampungan warga.

Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai organisasi masa yang terdaftar dan masih aktif tersebar di berbagai kelurahan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara. Selain itu, Jakarta Utara memiliki sanggar seni dan budaya seperti sanggar tari, sanggar bela diri, sanggar musik, dan sanggar sinematografi. Adapun lembaga budaya yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 3 lembaga. Keberadaan sanggar seni dan lembaga budaya ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk mempertahankan seni budaya khas Betawi.

8. Kondisi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif menjadi salah satu modal untuk meningkatkan daya saing daerah. Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Administrasi Jakarta Utara dilihat dari indikator penertiban pelanggaran Perda, jumlah sengketa lahan yang diselesaikan, dan jumlah kriminalitas yang terjadi.

D. Kedudukan

Berdasarkan ketentuan Bab I Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. Dalam penjelasan Bab I Definisi Operasional Lampiran XXXVII dinyatakan bahwa Kota Administrasi adalah wilayah kerja Walikota yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa Walikota adalah kepala pemerintahan Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

E. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Pada tahun 2023 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah berubah penyebutan. Sebelumnya pernah terjadi perubahan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Penyebutan Sub Bagian berubah menjadi Sub Koordinator Urusan.

Maka pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, penyebutan Sub Koordinator Urusan berubah menjadi Sub Kelompok dan tidak termasuk unit kerja struktural.

Bagan Struktur Organisasi Kota Administrasi di bawah ini sesuai Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, secara jelas dapat dilihat pada Laporan LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Bab I Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa pada ayat (13) Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penjelasan Bab I Definisi Operasional Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan bahwa pada ayat (1) Kota Administrasi adalah wilayah kerja Walikota yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan.

Pada ayat (4) dinyatakan bahwa Walikota adalah kepala pemerintahan Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pada Bab II Kota Administrasi Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Kota Administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kota Administrasi terdiri atas :

1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Sekretariat Kota
4. Kecamatan
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pada Poin C Susunan Organisasi Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa susunan organisasi struktural Kota Administrasi terdiri atas :

Pada ayat (1) Susunan organisasi struktural Kota Administrasi terdiri dari:

a. Sekretariat Kota, terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
   a) Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
      1) Subbagian Administrasi Pemerintahan.
   b) Bagian Hukum
   c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

   UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan meliputi :

   a) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi;
   b) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
   c) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi;
   d) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
   e) Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
   f) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi;
   g) Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
   a) Bagian Perekonomian
   b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup

   UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi :

   a) Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi;
   b) Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi;
   c) Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi;
   d) Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi;
   e) Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
   f) Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi;
   g) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
   h) Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi;
   i) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi;
   j) Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi;
   k) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi.

3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
   a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari :
      1) Subbagian Tata Usaha;
      2) Subbagian Rumah Tangga;
      3) Subbagian Protokol.
   b) Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, terdiri dari :
      1) Subbagian Tata Usaha Keuangan;
      2) Subbagian Perbendaharaan.
   c) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat meliputi :

a) Suku Dinas Sosial Kota Administrasi;
b) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi;
c) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi;
d) Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
e) Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi;
f) Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi;
g) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi;
h) Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi;
i) Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi;
j) Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi;
k) Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi.

b. Kecamatan, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
   a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b) Subbagian Program dan Anggaran;
   c) Subbagian Keuangan.
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
5. Kelurahan, terdiri dari :
   a) Sekretariat Kelurahan;
   b) Seksi Pemerintahan;
   c) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
   d) Seksi Kesejahteraan Rakyat.

c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa Pada Bagian di Sekretariat Kota Administrasi dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja non struktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangannya.

Pada Bab XVI Unit Kerja Non struktural Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ada 18 (delapan belas) Subkelompok yaitu :

1. Subkelompok Bina Pemerintahan ;
2. Subkelompok Tata Praja;
3. Subkelompok Pelayanan Hukum;
4. Subkelompok Bantuan Hukum;
5. Subkelompok Publikasi Hukum dan HAM;
6. Subkelompok Kepegawaian;
7. Subkelompok Ketatalaksanaan;
8. Subkelompok Pelayanan Publik;
9. Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
10. Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, UKM;
11. Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
12. Subkelompok Pekerjaan Umum;
13. Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan;
14. Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau;
15. Subkelompok Program dan Pelaporan;
16. Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual;
18. Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Bagan Struktur Organisasi Kota Administrasi di bawah ini sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, secara jelas dapat dilihat pada lampiran 1 Laporan LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

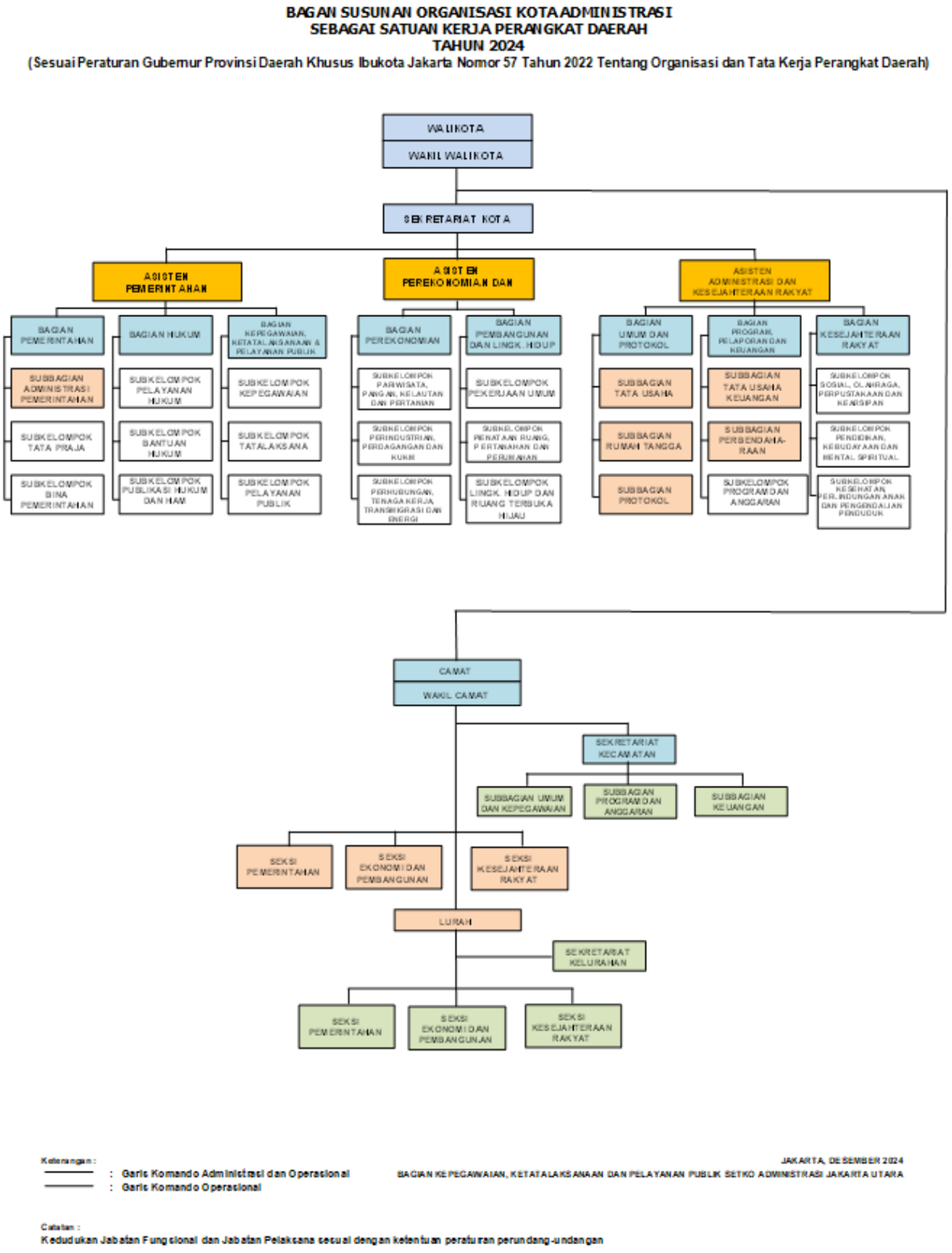

Gambar 1.6. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Utara

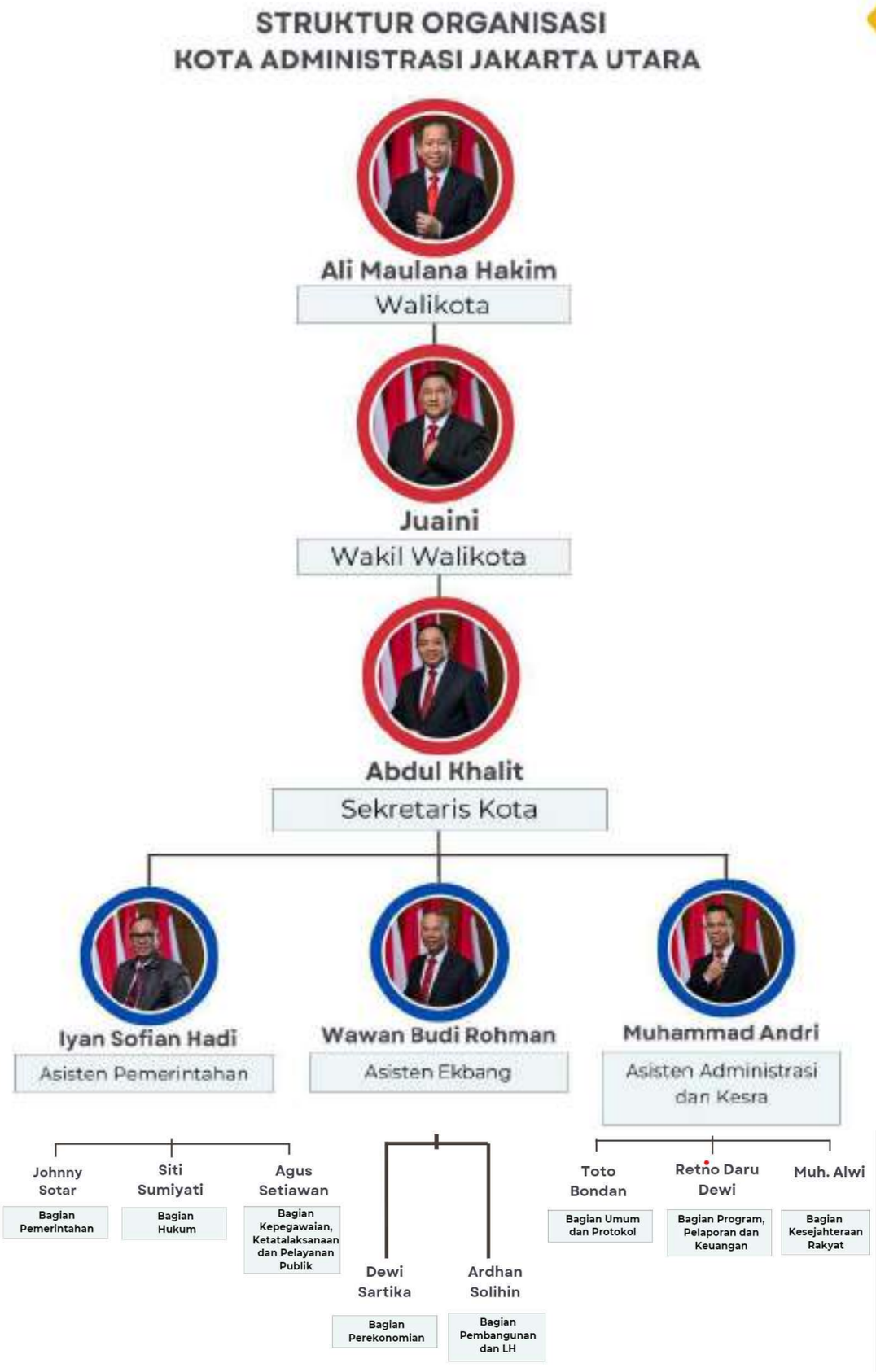

Gambar 1.7. Struktur Organisasi Eselon 2 dan 3 Kota Administrasi Jakarta Utara

F. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam Bab II Kota Administrasi Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan mengenai uraian tugas Kota Administrasi adalah :

1. Walikota

Dalam Poin A Kedudukan, ayat (1) disebutkan bahwa Kota Administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. Ayat (2) Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota. Ayat (3) Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pada ayat (4) Walikota mempunyai tugas :

a) Memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
b) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi;
c) Mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
d) Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi;
e) Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Pada ayat (5) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas, Walikota dibantu oleh Wakil Walikota.

2. Wakil Walikota

Dalam ayat (5) dan (6) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Walikota dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Wakil Walikota. Wakil Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Wakil Walikota mempunyai tugas :

a) Membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya;
b) Mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
c) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota.

Dalam Ayat (8) disebutkan bahwa Walikota dan Wakil Walikota merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kota Administrasi.

3. Kota Administrasi

Dalam Poin B Tugas dan Fungsi Ayat (1) Bab II Kota Administrasi Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
b) Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;

d) Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
e) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
g) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
i) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
j) Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
k) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
l) Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
m) Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
n) Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
o) Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
p) Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
q) Pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
r) Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
s) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
t) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Pada ayat (3) disebutkan bahwa Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi tambahan sebagai berikut :

a) Pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
b) Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
c) Fasilitasi pengawasan rumah kos dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
d) Fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
e) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
f) Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
g) Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga;
h) Fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

4. Sekretariat Kota

ABDUL KHALIT
Sekretaris Kota Adm. Jakarta Utara

Dalam Poin A Kedudukan Ayat (1) Bab III Sekretariat Kota Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Kota dipimpin oleh Sekretaris Kota.

Ayat (2) disebutkan bahwa Sekretariat Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada ayat (3) disebutkan bahwa Sekretaris Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Kota.

Dalam Poin B Tugas dan Fungsi Ayat (1) disebutkan bahwa Sekretariat Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi administrasi Kota Administrasi, mengoordinasikan

pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, Kelurahan dan UKPD di tingkat Kota Administrasi.

Dalam Ayat (2) Bab III Sekretariat Kota Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Kota menyelenggarakan fungsi :

a) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
b) Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja, Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
c) Pengoordinasian perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi;
d) Pengoordinasian dan pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik Kota Administrasi;
e) Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan Kota Administrasi;
f) Pengoordinasian dan penyusunan pelaporan Kota Administrasi;
g) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
h) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;
i) Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
j) Pengoordinasian dan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
k) Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD di tingkat Kota Administrasi;
l) Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi;
m) Pengoordinasian Dewan Kota;
n) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

G. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

1. Permasalahan

Permasalahan Kota Administrasi Jakarta Utara terbagi dalam :

1.1. Permasalahan Umum

Permasalahan umum yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Utara berdasar dari Kota Jakarta Utara Dalam Angka 2025 dari BPS Kota Jakarta Utara, antara lain :

a. Geografi dan Iklim

Kota Administrasi Jakarta Utara terbentang seluas 146,66 km² dan terbagi atas 6 kecamatan. Berdasarkan data jumlah Kelurahan di Bukan Tepi Laut lebih banyak dibandingkan di Tepi Laut, dan dilihat dari data unsur Iklim menurut bulan yang melebihi batas maksimal setiap bulannya baik Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, Jumlah Curah Hujan dan Penyinaran Matahari. Maka Kota Administrasi Jakarta Utara rentan terhadap terjadinya bencana banjir dan kebakaran.

b. Pemerintahan

Jumlah kelurahan di Kota Jakarta Utara pada tahun 2024 adalah sebanyak 31 kelurahan. Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara pada tahun 2024 adalah sebesar 614.313 KK, jumlah ini mengalami penurunan jika di banding tahun 2023. Beralih ke sisi politik dan pemerintahan, anggota DPRD di wilayah Jakarta Utara secara umum didominasi oleh anggota DPRD berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 13 orang, dengan anggota DPRD perempuan sejumlah 4 orang. Di sisi lain, ASN Pemerintah Kota Jakarta Utara pada tahun 2024 juga didominasi oleh ASN berjenis kelamin laki-laki.

Apabila dilihat dari Tingkat pendidikannya, sejak tahun 2023 sampai 2024, ASN Pemerintah Kota Jakarta Utara didominasi oleh ASN yang berpendidikan Sarjana (S1). Menariknya, terdapat satu orang ASN di Pemerintahan Kota Jakarta Utara yang berasal dari latar belakang pendidikan Sekolah Dasar.

c. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan data jumlah Penduduk Kota Jakarta Utara pada tahun 2024 mengalami peningkatan 1,67% dibanding tahun 2023. Dari sisi ketenagakerjaan, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang didominasi bekerja sebagai buruh/karyawan dan yang peringkat kedua penduduk berusaha sendiri. Maka laju pertumbuhan penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara yang cenderung meningkat dan tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi.

d. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Fasilitas sekolah telah tersedia tersebar di setiap kecamatan, kecuali fasilitas perguruan tinggi di Kecamatan Kelapa Gading tidak ada. Dinilai dari rasio murid terhadap guru dan sekolah, secara ratarata paling kecil di Kecamatan Kelapa Gading, karena jumlah murid yang tidak begitu banyak, atau jumlah guru dan sekolah yang sudah cukup banyak untuk menyediakan pendidikan terhadap murid di Kecamatan tersebut. Dari sisi kesehatan, jumlah tenaga kesehatan didominasi oleh tenaga keperawatan sebanyak 4.350 orang, disusul tenaga medis sebanyak 2.369 orang, dan tenaga psikologi klinis sebanyak 12 orang. Dengan jumlah penduduk 1.832.032 jiwa, maka layanan pendidikan dan kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara belum merata.

e. Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

Pada 2024, total luas panen tanaman di Jakarta Utara terbesar ada di Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Kelapa Gading. Untuk tanaman buah-buahan terbesar ada di Kecamatan Pademangan dan Kecamatan Penjaringan, untuk tanaman padi seluruhnya dari Kecamatan Cilincing.

Untuk subsektor perikanan, produksi ikan ada di TPI Kamal Muara dan di TPI Kalibaru.

Tidak ada masalah.

f. Industri, Pertambangan dan Energi

Pada 2024, terdapat 12 lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Jakarta Utara yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari sisi pelayanan ketatakotaan terdapat 185 pelayanan pengukuran di Kota Jakarta Utara, tertinggi ada di Kecamatan Kelapa Gading. Dari jumlah tersebut, 172 pelayanan berhasil diselesaikan. Sementara untuk pelayanan keterangan rencana kota, terdapat 285 permintaan yang masuk dengan total 265 pelayanan berhasil diselesaikan. Untuk data realisasi perizinan IMB, sepanjang 2024 terdapat 2.352 perizinan yang masuk melalui UP PM PTSP Kota Jakarta Utara dan terdapat 6 perizinan melalui PM PTSP Kecamatan Koja. Maka Infrastruktur dasar Kota Administrasi Jakarta Utara masih belum menjangkau seluruh Masyarakat.

g. Pariwisata

Pada 2024, jumlah rumah makan/restoran di Kota Jakarta Utara sebesar 3.734 lokasi, terbanyak ada di Kecamatan Penjaringan sebesar 704 restoran. Sementara untuk jumlah wisatawan mancanegara yang melalui Bandara Soekarno Hatta sebesar 2.524.253 wisatawan. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Agustus 2024 sebesar 272.849 wisatawan. Sementara jumlah wisatawan mancanegara yang melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sebesar 1.843 wisatawan, dan dari Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 9.473 wisatawan. Untuk jumlah kunjungan ke objek wisata, pada 2024, jumlah kunjungan di Taman Impian Jaya Ancol sebesar 9.797.419 wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara.

Untuk hotel berbintang, terdapat 38 hotel berbintang di Jakarta Utara. Sementara untuk hotel melati ada 34 hotel. Dari jumlah tersebut, terdapat 6.373 kamar dari 38 hotel berbintang. Sementara dari 34 hotel non bintang, terdapat 1.160 kamar hotel. Maka Kota Administrasi Jakarta Utara perlu adanya pengembangan organisasi sosial budaya seperti promosi.

h. Transportasi dan Komunikasi

Pada 2024, total panjang jalan di Kota Jakarta Utara yaitu 1.102,69 km, yang terdiri dari 249,48 km jalan nasional dan 853,21 km jalan provinsi. Selama tiga tahun terakhir, tidak ada penambahan maupun pengurangan panjang jalan. Jika dilihat dari jenis permukaan jalan, 341,28 km memiliki permukaan aspal, sementara 761,41 km memiliki permukaan beton. Pada 2024, jumlah penumpang kapal yang datang di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 484.362 penumpang. Sementara, penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 272.219 penumpang. Jadi yang datang lebih banyak ketimbang yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok.

i. Perbankan, Koperasi dan Harga-Harga

Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan indikator inflasi di Indonesia, sejak Januari 2014 dihitung dari 82 kota, mencakup sekitar 225 sampai 462 komoditas. IHK mencakup 7 kelompok yaitu: Bahan Makanan (makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau), Perumahan (air, listrik, gas, dan bahan bakar), Sandang, Kesehatan, Pendidikan (rekreasi, dan olahraga), Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Metoda yang digunakan dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdesaan (IHP) dan Indek Harga Perdagangan Besar (IHPB) adalah Formula Laspeyres yang telah dimodifikasi. Maka jumlah Jakpreneur yang cenderung menurun.

j. Pengeluaran Penduduk

Tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Jakarta Utara untuk komoditas makanan sebesar Rp 1.205.110. Angka ini meningkat jika dibandingkan perode tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.149.089. Sementara untuk komoditas bukan makanan, memiliki rata-rata per kapita sebulan sebesar Rp 1.840.628. Angka ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 2.033.340. Maka Kota Administrasi Jakarta Utara masih terdapatnya ketimpangan pendapatan.

k. Perdagangan

Pada 2024, berdasarkan data dari BPS terdapat 23 pasar di Kota Jakarta Utara. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir. Sementara untuk jumlah warung, pada 2024 tidak tersedia pada sumber data. Data arus barang perdagangan pada 2023 menunjukkan volume bongkar barang lebih banyak dibandingkan volume muat, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Volume bongkar perdagangan dalam negeri terbesar yaitu pada bulan Desember 2023, yaitu sebesar 509.572 ton. Sementara volume bongkar perdagangan dalam negeri terendah terdapat pada bulan Februari 2023 yaitu sebesar 333.644 ton. Volume muat perdagangan dalam negeri terbesar pada bulan Oktober 2023 sebesar 244.159 ton. Sementara volume muat perdagangan dalam negeri terendah terdapat pada bulan Februari 2023 sebesar 95.801 ton. Volume bongkar perdagangan luar negeri terbesar yaitu pada bulan Maret 2023, yaitu sebesar 837.162 ton. Sementara volume bongkar perdagangan luar negeri terendah terdapat pada bulan September 2023 yaitu sebesar 595.198 ton. Volume muat perdagangan luar negeri tersesar pada bulan Desember 2023 sebesar 1.280.563 ton. Sementara volume muat perdagangan luar negeri terendah terdapat pada bulan April 2023 sebesar 114.755 ton.

l. Sistem Neraca Nasional

Laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Utara pada tahun 2024 sebesar 4,29 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki laju pertumbuhan terbesar dengan perolehan 10,91 persen.

m. Perbandingan Antar Wilayah

Pada 2024, jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 10.677.975 jiwa. Wilayah dengan penduduk terbanyak yaitu Kota Jakarta Timur sebesar 3.086.010 jiwa. Sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 29.088 jiwa.

Kota Jakarta Utara pada 2024 memiliki jumlah penduduk 1.819.009 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin, pada Maret 2024 terdapat 464,93 ribu penduduk miskin di DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, Kota Jakarta Utara menyumbang 120,51 ribu penduduk miskin. Wilayah dengan penduduk miskin paling banyak yaitu Kota Jakarta Timur dengan total 121,52 penduduk miskin, sementara Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 3,49 ribu penduduk. namun, hal tersebut sejalan dengan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Jakarta Utara pada 2024 sebesar 82,13 (skala 0-100). Sementara IPM Provinsi DKI Jakarta sebesar 84,15. Wilayah dengan IPM tertinggi di DKI Jakarta yaitu Kota Jakarta Selatan, sebesar 87,57 dan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan IPM terendah sebesar 76,69 poin. Maka angka kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara masih tinggi.

1.2. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan terkait pelayanan kepada masyarakat yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

a. Keuangan masih terbatas.
b. Banyaknya mitra kerja yang harus dikoordinasi;
c. Masih belum optimalnya unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
d. Perlu peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan yang tidak masuk dalam penilaian indeks kepuasan Masyarakat;
e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.

1.3. Permasalahan Dominan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, diketahui bahwa permasalahan yang dominan di Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu :

a. Rentan terhadap terjadinya bencana banjir dan kebakaran;
b. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat dan tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi;
c. Layanan pendidikan dan kesehatan belum merata;
d. Infrastruktur dasar masih belum menjangkau seluruh Masyarakat;
e. Belum maksimal pengembangan organisasi sosial budaya seperti promosi;
f. Angka kemiskinan yang masih tinggi;
g. Masih terdapatnya ketimpangan pendapatan.

2. Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan janji Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta telaah kebijakan arah pengembangan kewilayahan Jakarta Utara berdasarkan RPD Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026.

Dalam rangka memberikan hasil pelayanan dengan amanah kepada masyarakat, maka dapat dihubungkan dengan isu-isu sebagai berikut yaitu:

a. Peningkatan kualitas pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara;
b. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pranata sosial;
c. Mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kota Administrasi Jakarta Utara.

Bersumber dari Renstra Jakarta Utara periode 2023-2026 maka Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara terbagi dalam :

2.1 Isu Global

Bersumber dari Renstra Jakarta Utara periode 2023-2026 maka Isu global di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

a. Global Teknologi

Globalisasi teknologi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kecepatan difusi teknologi di seluruh ekonomi global. Hal ini mengacu pada penyebaran teknologi di seluruh dunia, dan khususnya dari negara maju ke negara berkembang. Globalisasi teknologi terjadi pada tingkat yang lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini lantaran perkembangan yang pesat dalam inovasi teknologi di abad ke 21 dan adanya kemudahan akses untuk memindahkan teknologi ke seluruh ekonomi dunia. Kendati demikian, terdapat kekhawatiran bahwa globalisasi teknologi menimbulkan kesenjangan digital antara si kaya dan si miskin.

b. *Green Economy*

Green Economy berkaitan dengan pengembangan ekonomi yang bersifat ramah lingkungan. Hal ini dilakukan karena terjadinya degradasi lingkungan yang semakin lama semakin meluas dengan tingkat keparahan yang semakin tinggi. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan internasional ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat.

c. *Climate Change*

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan secara langsung/tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang di antaranya, terdiri dari Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen, dan sebagainya. Konsentrasi GRK

yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi, yang disebut dengan pemanasan global.

d. Covid-19

Hadirnya Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Covid-19 telah menjangkiti jutaan orang sejak kasus pertama diumumkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus Covid-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan sosial Masyarakat.

2.2. Isu Nasional

Bersumber dari Renstra Jakarta Utara maka Isu nasional di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

a. Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

b. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan meningkatnya urbanisasi.

c. **Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

d. **Transformasi Pelayanan Publik**

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lingkungan dan isu transformasi pelayanan publik ini mencakup profesionalitas ASN, pelayanan publik, kelembagaan, dan akuntabilitas.

e. **Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan**

Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

2.3. Isu Regional (Provinsi DKI Jakarta)

Bersumber dari Renstra Jakarta Utara maka Isu regional di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

a. **Ketahanan terhadap Bencana**

Provinsi DKI Jakarta rentan terhadap bencana banjir dan genangan. Hal ini disebabkan tingkat kemiringan lahan antara 0-3% dan terdapatnya 13 aliran sungai yang bermuara di laut utara Jakarta. Adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi berskala besar di wilayah ibukota serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan.

Selain itu juga ditambah dengan kondisi di mana sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan.

b. Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta termasuk kategori sangat tinggi. Namun demikian, kualitas pendidikan dan kesehatan di DKI Jakarta tetap harus ditingkatkan pada beberapa aspek seperti peningkatan literasi dan kualitas PAUD pada pendidikan serta pengendalian penyakit dan masalah gizi masyarakat pada kesehatan.

c. Ekonomi Inklusif

Tahun 2023 merupakan tahun pemulihan dari Pandemi Covid-19, di mana tahun 2021 dan 2022 saat pandemi memberikan dampak dan perubahan yang besar bagi perekonomian Indonesia tidak terkecuali bagi Provinsi DKI Jakarta.

Selama pandemi, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta sempat melambat dan bahkan mengalami kontraksi, namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta kembali positif yang merupakan sinyal baik untuk pemulihan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

d. Kota Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya memperhatikan daya dukung lingkungan namun juga menaruh perhatian besar pada daya dukung sosial. Daya dukung sosial ini memerlukan komitmen Pemerintah dan seluruh pihak untuk memastikan adanya keseimbangan antara proses pembangunan yang secara lingkungan lestari dengan pembangunan yang menghormati ruang hidup sosial masyarakat yang dulu ada.

e. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik

Birokrasi di Jakarta harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur negara juga tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

f. Pemerataan Pembangunan

Ketimpangan antar wilayah dapat terlihat secara jelas melalui besaran tingkat kemiskinan antar wilayah yang tidak seimbang. Tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencapai 14,87 persen dan di wilayah administrasi Kota Jakarta Utara mencapai 6,78 persen pada tahun 2020, jauh di bawah tingkat kemiskinan Provinsi yang mencapai 4,69 persen.

Sedangkan wilayah lain di bawah rata-rata Provinsi yaitu Jakarta Pusat sebesar 4,51 persen, Jakarta Timur sebesar 4,16 persen, Jakarta Selatan 4,34 persen dan Jakarta Barat sebesar 4,25 persen. Disparitas lainnya yang menjadi parameter adalah nilai IPM antar wilayah. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah yang masih pada angkat kisaran 70 yaitu sebesar 72,10, di mana IPM Provinsi sebesar 81,11. Sedangkan wilayah lain nilai IPM sudah berada di atas 80.

2.4. Isu Lokal (Kota Administrasi Jakarta Utara)

Bersumber dari Renstra Jakarta Utara maka Isu lokal di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

a. Pengelolaan Lingkungan Pesisir

Kota Administrasi Jakarta Utara rentan terhadap terjadinya bencana banjir, penurunan muka tanah dan kebakaran.

Secara geografis, Jakarta Utara berada di wilayah pesisir landai, dengan area daratan berada di bawah rata-rata muka laut, dilewati setidaknya 13 sungai besar yang sebagian di antaranya mempunyai hulu sungai di selatan luar wilayah Jakarta. Seiring perubahan iklim, cuaca ekstrem kerap terjadi hingga menimbulkan curah hujan tinggi dan menyebabkan banjir. Sesuai dengan tren penurunan muka tanah yang terdeteksi sekitar 1-15 cm per tahun, luasan daerah terdampak akan semakin luas dan diproyeksikan pada 2025 sebagian besar wilayah utara Jakarta berada pada zona merah.

b. Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Dalam kurun waktu tahun 2021, kasus kriminal yang terjadi di wilayah Jakarta Utara menurun hingga 28 persen dibandingkan tahun 2020. Di tahun 2020, terdapat 1.113 laporan kasus kriminal yang diterima Polres Metro Jakarta Utara, dengan penyelesaian sebanyak 1.756 kasus. Sementara tahun 2021, tindakan kriminal yang dilaporkan sebanyak 800 kasus dan laporan kasus kriminal yang diselesaikan sebanyak 1.618 kasus. Meskipun angka kriminalitas cenderung menurun, namun tetap diperlukan berbagai upaya untuk menjadikan Jakarta Utara sebagai kota yang ramah, aman, dan berbudaya bagi warganya.

c. Permukiman Kumuh

Perhitungan Kementerian ATR/BPN, ada sekitar 118 kelurahan yang kumuh dari 267 kelurahan di Jakarta. Daerah kumuh tersebar di enam kabupaten/kota administrasi di Jakarta, paling banyak di Jakarta Utara. Kawasan kumuh di Jakarta Utara sebesar 39 persen, Jakarta Barat 28 persen dan Jakarta Selatan 19 persen. Kemudian Jakarta Timur 12 persen, Jakarta Pusat 11 persen dan Kepulauan Seribu 1 persen. Faktor yang menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh seperti pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali, tingkat kemiskinan dan layanan perkotaan yang belum mencakup seluruh lapisan Masyarakat.

d. Ekonomi dan Wisata Pesisir

Selain terdapat 3 (tiga) pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Muara Baru yang melayani lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang, di Jakarta Utara juga terdapat pusat wisata sejarah, bahari, budaya dan berbagai pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, sektor pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan ekonomi untuk wilayah Jakarta Utara sesuai dengan karakteristiknya sebagai daerah pesisir adalah melalui optimalisasi kawasan pariwisata pesisir. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, di mana rencana pembangunan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (2) huruf k untuk Pola Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, diarahkan untuk pengembangan kawasan tujuan wisata pesisir.

e. Kewenangan Penyelenggaraan Kota Administrasi

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Sementara itu, Kota Administrasi Jakarta Utara berkedudukan sebagai perangkat yang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan warga masyarakat sehingga keterbatasan kewenangan tersebut berdampak pada pemberian pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Utara.

2.5. Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara

Bersumber dari Renstra Jakarta Utara maka Isu strategis Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

Berdasarkan permasalahan yang dominan dan isu-isu lingkungan strategis, dan potensi daerah, maka isu strategis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3. Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara

Permasalahan Dominan	Isu-Isu Lingkungan				Isu Strategis Jakarta Utara
	Global	Nasional	Regional (DKI Jakarta)	Lokal (Jakarta Utara)	
Rawan bencana banjir dan kebakaran	Climate change		Ketahanan terhadap bencana	Pengelolaan lingkungan pesisir	Pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan
	Covid-19	Peningkatan SDM	Pembangunan manusia		
Infrastruktur kota belum merata		Pembangunan infrastruktur	Kota berkelanjutan	Permukiman kumuh	
Angka kemiskinan masih tinggi	Green economy	Percepatan pemulihan ekonomi	Ekonomi inklusif	Ekonomi dan wisata pesisir	Pemberdayaan masyarakat
Tingkat Pengangguran terbuka masih tinggi					
Angka kriminalitas masih tinggi		Stabilitas politik dan keamanan		Gangguan keamanan dan ketertiban	
Partisipasi masyarakat belum optimal			Pembangunan budaya multikultur		
Kewenangan terbatas hanya koordinasi, evaluasi, dan pengendalian	Globalisasi teknologi	Transformasi pelayanan publik	Pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik	Kewenangan penyelenggaraan kota administrasi	Kolaborasi pelayanan publik
Banyaknya mitra kerja yang harus dikoordinasikan					

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026

Adapun penjelasan isu strategis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan

Pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan merupakan hal yang harus dilakukan Kota Administrasi Jakarta Utara mengingat kondisi fisik geografis yang rentan terhadap bencana.

Pengelolaan kawasan pesisir mencakup juga pengelolaan sarana dan prasaran yang ada. Hal ini ditujukan agar seluruh masyarakat dapat mengakses dan merasakan sarana dan prasarana tersebut terutama sarana pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar seperti air bersih dan sanitasi.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat terutama ditujukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk berdaya secara ekonomi, seni budaya, dan sosial kemasyarakatan. Hal ini penting karena citra Kota Administrasi Jakarta Utara selama ini dianggap “keras dan tidak ramah”.

c. Kolaborasi pelayanan publik

Kolaborasi pelayanan publik dengan berbagai pihak merupakan cara yang paling ideal dilakukan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka meningkatkan dan mengakselerasi kualitas pelayanan publik. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan UKPD, dunia pendidikan, perusahaan yang melaksanakan TSLDU, dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kota Administrasi Jakarta Utara harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut didasarkan pada rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan yang lebih operasional.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 1.4. Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026

Tujuan RPD :	**Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas**		
Sasaran RPD :	**Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat**		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan manajemen pengelolaan Kota Administrasi Jakarta Utara
			Meningkatkan manajemen pengelolaan kecamatan dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara
			Meningkatkan kolaborasi dalam pemberian pelayanan publik

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026

H. Sumber Daya Manusia

Gambar 1.8. Dokumentasi Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

Data Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara periode tahun 2024 (per 31 Desember 2024) ada sebanyak 392 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT UNIT KERJA

Ditinjau berdasarkan unit kerja, sebagian besar pegawai berada pada Kelurahan, yakni sebanyak 216 orang (55%) dari total pegawai sebanyak 392 orang, hal ini karena banyaknya kelurahan berjumlah 31 Kelurahan. Urutan kedua terbesar adalah pegawai berada pada Sekretariat Kota, yakni sebanyak 97 orang (25%) dari total pegawai, hal ini karena banyaknya Bagian di Sekretariat Kota berjumlah 8 Bagian. Sedangkan urutan ketiga adalah pegawai berada pada Kecamatan, yakni sebanyak 79 orang (20%) dari total pegawai, hal ini karena banyaknya Kecamatan berjumlah 6 Kecamatan.

Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	
1	Walikota	1	Orang
2	Wakil Walikota	1	Orang
3	Sekretariat Kota	1	Orang
4	Asisten Sekretaris Kota	3	Orang
5	Bagian Pemerintahan	10	Orang
6	Bagian Hukum	8	Orang
7	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	13	Orang
8	Bagian Umum dan Protokol	22	Orang
9	Bagian Perekonomian	9	Orang
10	Bagian Program, Pelaporan Dan Keuangan	9	Orang
11	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	9	Orang
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	11	Orang
13	Kecamatan	79	Orang
14	Kelurahan	216	Orang
	Jumlah	**392**	**Orang**

Sumber : Bagian KKPP Setko Adm. JU Bulan November 2024

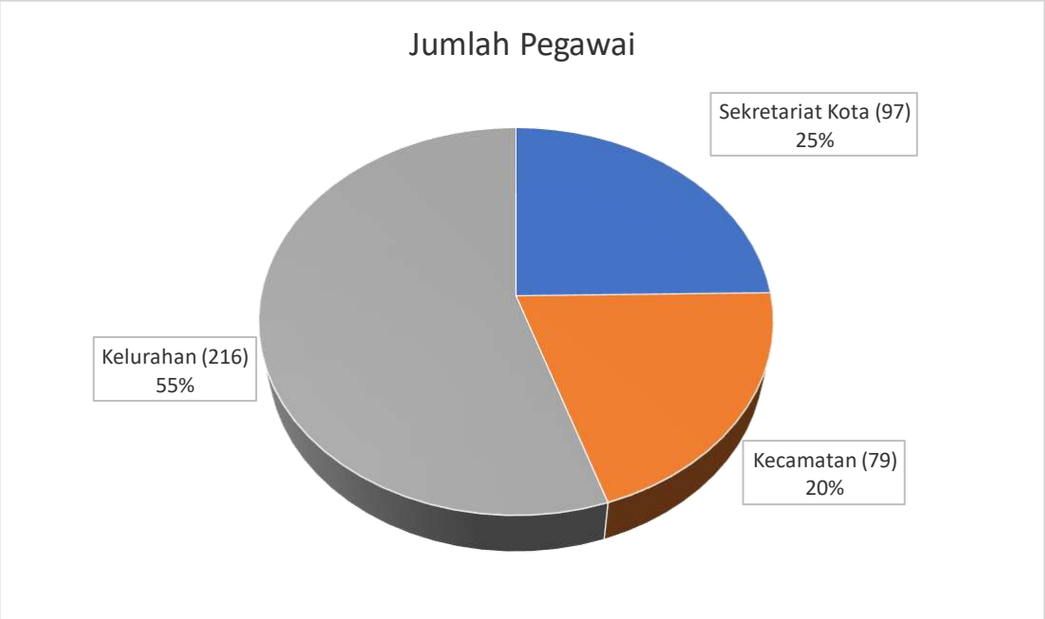

Gambar 1.9. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Unit Kerja

2. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT JENJANG JABATAN

Ditinjau berdasarkan jenjang jabatan, sebagian besar jabatan berada pada jabatan Pengawas, yakni sebanyak 178 orang (45%) dari total pegawai sebanyak 392 orang. Urutan kedua terbesar adalah pada jabatan Pelaksana, yakni sebanyak 161 orang (41%) dari total pegawai. Sedangkan urutan ketiga, keempat, kelima dan keenam adalah jabatan Administrasi (7%), jabatan Fungsional Kasubkel (5%), dan sama untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (1%) dan Jabatan Arsiparis Ahli Pertama (1%).

Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Jenjang Jabatan

No	Jabatan	Unit Kerja			Jumlah Pegawai
		Sekretariat Kota	Kecamatan	Kelurahan	
1	Pimpinan Tinggi Pratama	3	-	-	3
2	Administrator	11	18	-	29
3	Pengawas	6	34	138	178
4	Fungsional (Ketua Subkelompok)	18	-	-	18
5	Arsiparis Ahli Pertama	-	3	-	3
6	Pelaksana	59	24	78	161
	Jumlah	**97**	**79**	**216**	**392**

Sumber : Bagian KKPP Setko Adm. JU Bulan November 2024

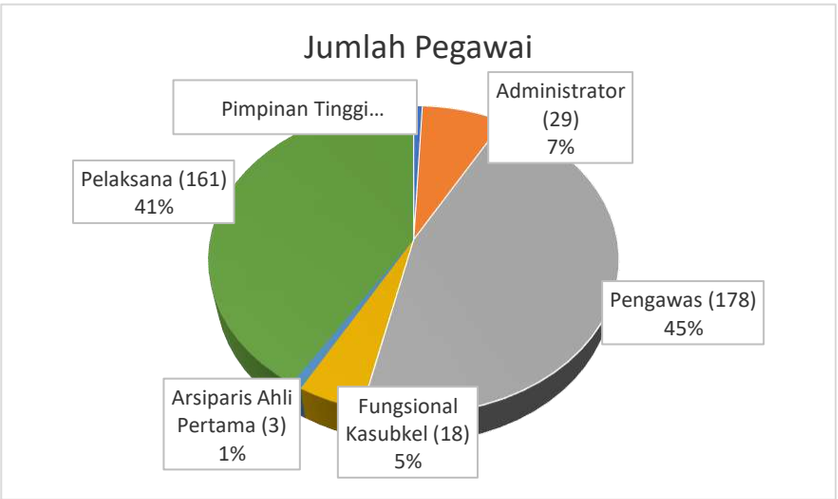

Gambar 1.10. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Jenjang Jabatan

3. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

Ditinjau berdasarkan golongan, sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebanyak 285 orang (72,70%) dari total pegawai atau sebanyak 392 orang. Urutan kedua terbesar adalah Golongan IV sebanyak 67 orang (17,09%). Data ini menunjukkan 89,80% pegawai berada pada golongan IV dan III. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki Pegawai Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dan perlu dikembangkan melalui pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
	Sekretariat Kota																	
1	Walikota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Wakil Walikota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Sekretaris Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Asisten Sekko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
5	Kepala Bagian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	8
6	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	**6**
7	Ketua Sub Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	11	-	-	-	23
8	Pelaksana																	
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli																	
	1.1) Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
	1.2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
	1.3) Pengurus Barang Pengguna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	**1**
	1.4) Analis	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	12	-	-	-	-	**20**
	1.5) Pengelola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	**3**
	1.6) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	**1**
	1.7) Penyusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	**1**
	1.8) Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	**1**
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil																	
	2.1) Pengolah Data	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	4	1	-	-	-	-	**13**
	2.2) Pengolah Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
	2.3) Verifikator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	**1**

No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
3)	Staf Administrasi Tk Terampil																	
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	-	-	-	1	7	1	-	2	-	-	2	-	-	-	**13**
4)	Staf Pelayanan Tk Ahli																	
	4.1) Penyiap Berkas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
5)	Staf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**
Sub Jumlah 1		**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**11**	**1**	**6**	**10**	**13**	**29**	**19**	**3**	**3**	**-**	**97**
Sub Jumlah 2		**1**				**13**				**58**				**25**				**97**
Jumlah Pegawai di Sekretariat Kota		**97**																

No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
	Kecamatan																	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	**6**
2	Wakil Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	**6**
3	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	**6**
4	Kepala Seksi																	
	4.1) Kasie Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	**6**
	4.2) Kasie Ekbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	**6**
	4.3) Kasie Kesra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	**6**
5	Kepala Subbagian																	
	5.1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	**6**
	5.2) Kasubbag Program dan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	**6**
	5.3) Kasubbag Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	**6**
6	Arsiparis Ahli Pertama (PPPK)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	**3**
7	Pelaksana																	
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli																	
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	**6**
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	**6**
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil																	
	2.1) Pengolah Data	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-	**6**
3)	Administrasi Tingkat Terampil																	
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	**4**
4)	Pelayanan Tingkat Terampil																	
	4.1) Caraka	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**

No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
Sub Jumlah 1		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**2**	**8**	**16**	**2**	**27**	**18**	**5**	**-**	**-**	**79**
Sub Jumlah 2		**-**				**3**				**53**				**23**				**79**
Jumlah Pegawai di Kecamatan		**79**																
No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
	Kelurahan																	
1	Lurah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	14	8	-	-	-	**29**
2	Sekretaris Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	17	4	-	-	-	**29**
3	Kepala Seksi																	
	3.1) Kasie Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	8	2	-	-	-	**24**
	3.2) Kasie Ekbang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	13	2	-	-	-	**29**
	3.3) Kasie Kesra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	11	3	-	-	-	**27**
4	Pelaksana																	
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli																	
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	-	-	-	-	1	8	1	7	9	2	-	-	-	-	-	**28**
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	-	-	-	-	1	2	2	2	7	13	2	1	-	-	-	-	**30**
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil																	
	2.1) Pengolah Data	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	**6**
3)	Administrasi Tingkat Terampil																	
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	3	-	-	-	-	-	**12**
4)	Pelayanan Tingkat Terampil																	
	4.1) Caraka	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
5)	Staf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	**1**
Sub Jumlah 1		**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**4**	**13**	**4**	**18**	**46**	**45**	**65**	**19**	**-**	**-**	**-**	**216**
Sub Jumlah 2		**1**				**22**				**174**				**19**				**216**
Jumlah Pegawai di Kelurahan		**216**																
Sub Jumlah Setko		**1**				**13**				**58**				**25**				**97**
Sub Jumlah Kecamatan		**-**				**3**				**53**				**23**				**79**
Sub Jumlah Kelurahan		**1**				**22**				**174**				**19**				**216**
Jumlah Pegawai JU Per Golongan		**2**				**38**				**285**				**67**				**216**

No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
Persentase		**0,51%**				**9,69%**				**72,70%**				**17,09%**				**100%**
Total Jumlah Pegawai JU		**392**																

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bulan November 2024

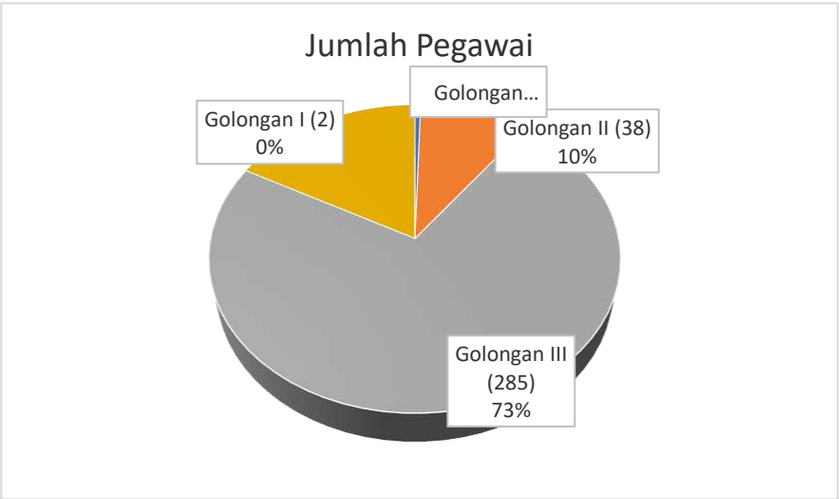

Gambar 1.11. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Golongan

4. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berada pada Pendidikan S1, yakni sebanyak 205 orang pegawai (52,30%) dari total pegawai atau sebanyak 392 orang. Urutan kedua terbesar adalah tingkat pendidikan S2 sebanyak 99 orang pegawai (25,26%). Data ini menunjukkan 77,55% pegawai berada pada tingkat pendidikan S1 dan S2, sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dalam hal pelayanan masyarakat terutama dalam menggunakan data dan informasi, menemukenali permasalahan, dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sebanyak 37 orang pegawai (9,44%) adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma 3 (D.III), yang berarti masih ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan sebanyak 48 orang pegawai (12,24%) berpendidikan SMA. Sementara untuk tingkat pendidikan SD, SMP dan S3 masing-masing sebanyak 1 (0,26%) orang pegawai.

Jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara pada saat ini mengalami kekurangan terutama pada tingkat kelurahan, sehingga belum dapat dikatakan bahwa pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan. Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D.III	S1	S2	S3	
1	Walikota	-	-	-	-	-	-	1	**1**
2	Wakil Walikota	-	-	-	-	-	1	-	**1**
3	Sekretaris Kota	-	-	-	-	-	1	-	**1**
4	Asisten Sekko	-	-	-	-	1	2	-	**3**
5	Camat	-	-	-	-	3	3	-	**6**
6	Kepala Bagian	-	-	-	-	4	4	-	**8**
7	Wakil Camat	-	-	-	-	2	4	-	**6**
8	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	2	4	-	**6**
9	Kepala Subbagian Setko	-	-	-	-	5	1	-	**6**
10	Ketua Subkelompok Setko	-	-	-	1	6	11	-	**18**
11	Lurah	-	-	-	1	16	12	-	**29**
12	Kepala Seksi Kecamatan :								
1)	Kasie Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	-	6	-	-	**6**
2)	Kasie Ekbang Kecamatan	-	-	-	-	5	1	-	**6**
3)	Kasie Kesra Kecamatan	-	-	-	-	3	3	-	**6**
13	Kepala Subbagian Kecamatan :								
1)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan	-	-	-	-	1	5	-	**6**
2)	Kasubbag Program dan Anggaran Kecamatan	-	-	-	-	2	3	-	**5**
3)	Kasubbag Keuangan Kecamatan	-	-	-	-	3	2	-	**5**
14	Sekretaris Kelurahan	-	-	-	-	17	12	-	**29**
15	Kepala Seksi Kelurahan :								
1)	Kasie Pemerintahan Kelurahan	-	-	-	-	15	9	-	**24**
2)	Kasie Ekbang Kelurahan	-	-	2	1	19	7	-	**29**

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D.III	S1	S2	S3	
3)	Kasie Kesra Kelurahan	-	-	2	1	18	6	-	**27**
16	PPPK (Arsiparis Ahli Pertama)	-	-	-	-	3	-	-	**3**
17	Pelaksana Sekretariat Kota :								
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :								
	1.1) Bendahara Pengeluaran	-	-	-	1	-	-	-	**1**
	1.2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	-	1	1	-	-	-	**2**
	1.3) Pengurus Barang Pengguna	-	-	-	-	1	-	-	**1**
	1.4) Analis	-	-	-	-	18	3	-	**21**
	1.5) Pengelola	-	-	-	-	3	-	-	**3**
	1.6) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	-	-	-	-	-	1	-	**1**
	1.7) Pengawas Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	1	-	**1**
	1.8) Penyusun Bantuan Hukum	-	-	-	-	1	-	-	**1**
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :								
	2.1) Pengolah Data	-	-	-	3	9	-	-	**12**
	2.2) Pengolah Pimpinan	-	-	-	-	1	-	-	**1**
	2.3) Verifikator	-	-	-	-	1	-	-	**1**
3)	Staf Administrasi Tk Terampil :								
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	11	-	-	2	-	**13**
4)	Staf Pelayanan Tk Ahli :								
	4.1) Penyiap Berkas	-	1	-	-	-	-	-	**1**
5)	Staf	-	-	-	-	-	-	-	**0**
18	Pelaksana Kecamatan :								
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :								
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	-	-	3	3	-	-	**6**
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	-	-	2	2	2	-	-	**6**
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil								
	2.1) Pengolah Data	-	-	-	2	5	-	-	**7**
3)	Administrasi Tingkat Terampil :								
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	3	-	1	-	-	**4**
4)	Pelayanan Tingkat Terampil :								
	4.1) Caraka	-	-	-	1	-	-	-	**1**
19	Pelaksana Kelurahan :								
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :								
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	-	8	9	11	-	-	**28**
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	-	-	7	9	14	-	-	**30**
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :								

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D.III	S1	S2	S3	
	2.1) Pengolah Data	-	-	-	2	4	-	-	**6**
3)	Administrasi Tingkat Terampil :								
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	12	-	-	-	-	**12**
4)	Pelayanan Tingkat Terampil :								
	4.1) Caraka	1	-	-	-	-	-	-	**1**
5)	Staf	-	-	-	-	-	1	-	**1**
Total Jumlah Pegawai JU Menurut Tingkat Pendidikan		**1**	**1**	**48**	**37**	**205**	**99**	**1**	**392**
Persentase		0.26%	0.26%	12.24%	9.44%	52.30%	25.26%	0.26%	100%

Sumber : Bagian KKPP Setko Adm. JU Bulan November 2024

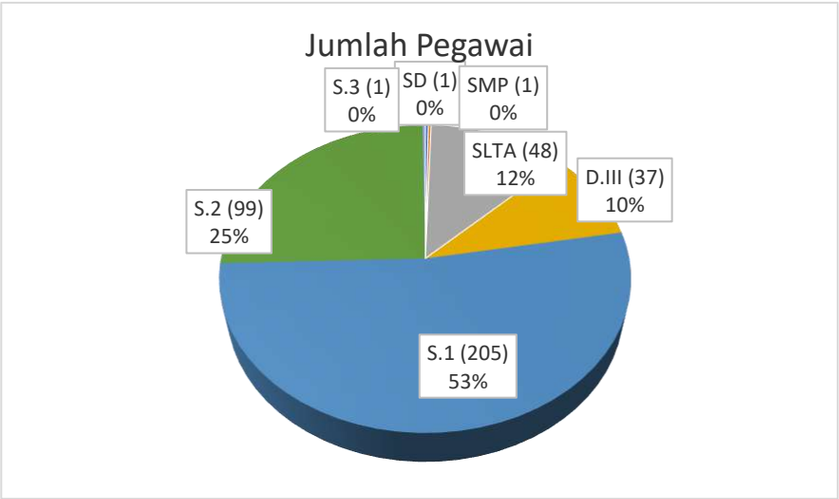

Gambar 1.12. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Tingkat Pendidikan

5. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT KELOMPOK USIA

Ditinjau berdasarkan Kelompok Usia, sebagian besar pegawai berada pada kelompok umur antara 40-49 tahun yaitu sebesar 117 orang pegawai (29,85%). Kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur kurang dari 25 tahun, yaitu hanya sebanyak 3 orang (0,77%).

Tabel di bawah menunjukkan bahwa antara 2 s.d. 4 tahun (2024-2028) yang akan datang terdapat 54 orang pegawai (13,78%) yang akan pensiun. Hal ini harus segera diantisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan analisis beban kerja. Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Kelompok Usia

No.	Jabatan	Kelompok Usia					Jumlah
		>25	26-39	40-49	50-55	< 56	
	Sekretariat Kota						
1	Walikota	-	-	-	1	-	1
2	Wakil Walikota	-	-	-	-	1	1
3	Sekretaris Kota	-	-	1	-	-	1
4	Asisten Sekko	-	-	1	2	-	3
5	Kepala Bagian	-	1	-	5	2	8
6	Kepala Sub Bagian	-	3	1	2	-	**6**
7	Ketua Sub Kelompok	-	2	6	7	3	23
8	Pelaksana						
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :						
	1.1) Bendahara Pengeluaran	-	-	1	-	-	**1**
	1.2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	2	-	-	-	**2**
	1.3) Pengurus Barang Pengguna	-	-	1	-	-	**1**
	1.4) Analis	-	7	6	6	1	**20**
	1.5) Pengawas Pelayanan Publik	-	1	-	-	-	**1**
	1.6) Penyusun	-	-	-	-	1	**1**
	1.7) Pengelola	-	2	1	-	-	**3**
	1.8) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	-	1	-	-	-	**1**
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :						
	2.1) Pengolah Data	2	4	2	2	2	**12**
	2.2) Pengolah Pimpinan	-	1	-	-	-	**1**
	2.3) Verifikator	-	-	-	1	-	**1**
3)	Staf Administrasi Tk Terampil :						
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	1	6	4	2	**13**
4)	Staf Pelayanan Tk Ahli :						
	4.1) Penyiap Berkas	-	-	-	1	-	**1**
5)	Staf	-	-	1	-	-	**1**
	Jumlah Pegawai Setko	**2**	**25**	**27**	**31**	**12**	**97**

No.	Jabatan	Kelompok Usia					Jumlah
		>25	26-39	40-49	50-55	< 56	
	Kecamatan						
1	Camat	-	-	2	3	1	**6**
2	Wakil Camat	-	2	2	2	-	**6**
3	Sekretaris Kecamatan	-	2	1	2	1	**6**
4	Kepala Seksi						
	4.1) Kasie Pemerintahan	-	4	-	-	2	**6**
	4.2) Kasie Ekbang	-	-	3	2	1	**6**
	4.3) Kasie Kesra	-	-	2	3	1	**6**
5	Kepala Subbagian						
	5.1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	2	-	2	2	**6**
	5.2) Kasubbag Program dan Anggaran	-	1	2	2	-	**5**
	5.3) Kasubbag Keuangan	-	-	1	2	2	**5**
6	Arsiparis Ahli Pertama (PPPK)	-	1	2	-	-	**3**
7	Pelaksana						
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :						
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	5	1	-	-	**6**
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	-	3	2	-	1	**6**
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :						
	2.1) Pengolah Data	-	5	1	-	1	**7**
3)	Administrasi Tingkat Terampil :						
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	1	1	2	**4**
4)	Pelayanan Tingkat Terampil :						
	4.1) Caraka	-	-	1	-	-	**1**
	Jumlah Pegawai Kecamatan	**0**	**12**	**15**	**18**	**10**	**79**
	Kelurahan						
1	Lurah	-	5	5	12	7	**29**
2	Sekretaris Kelurahan	-	7	8	8	6	**29**
3	Kepala Seksi						
	3.1) Kasie Pemerintahan	-	7	7	8	2	**24**
	3.4) Kasie Ekbang	-	6	13	7	3	**29**
	3.5) Kasie Kesra	-	2	11	10	4	**27**
4	Pelaksana						
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :						
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	11	12	2	2	**28**
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	-	14	10	3	3	**30**

No.	Jabatan	Kelompok Usia					Jumlah
		>25	26-39	40-49	50-55	< 56	
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :						
	2.1) Pengolah Data	-	1	4	-	1	**6**
3)	Administrasi Tingkat Terampil :						
	3.1) Pengadministrasi Umum	-	-	5	3	4	**12**
4)	Pelayanan Tingkat Terampil :						
	4.1) Caraka	-	-	-	1	-	**1**
5)	Staf	-	-	-	1	-	**1**
	Jumlah Pegawai Kelurahan	**1**	**53**	**75**	**55**	**32**	**216**
	Total Jumlah Pegawai JU Menurut Kelompok Usia	**3**	**90**	**117**	**104**	**54**	**392**
	Persentase	**0,77%**	**22,96%**	**29,85%**	**26,53%**	**13,78%**	**100%**

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bulan September 2024

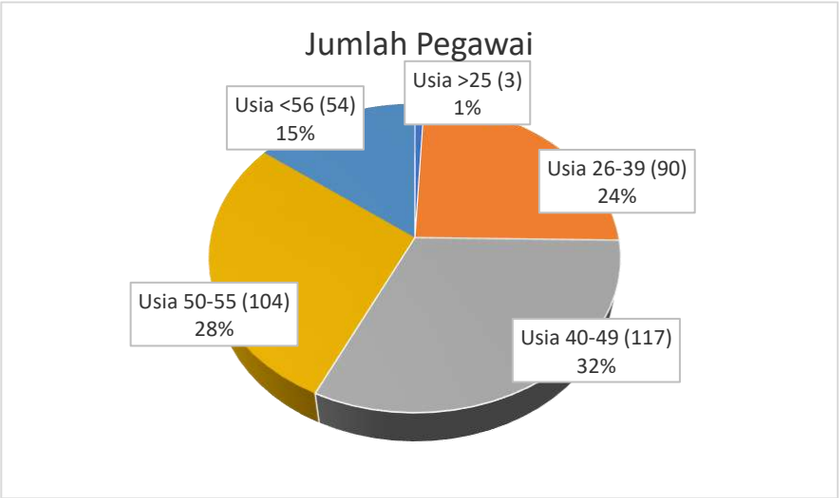

Gambar 1.13. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Kelompok Usia

6. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

Ditinjau berdasarkan Jenis Kelamin, sebagian besar pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara adalah Laki-Laki yaitu sebesar 235 orang pegawai (59,95%). Sedangkan pegawai Perempuan sebanyak 157 orang pegawai (40,05%). Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Kelompok Usia

No.	Unit Kerja	L	P	Jumlah
	Sekretariat Kota			
1	Walikota	1	-	1
2	Wakil Walikota	1	-	1
3	Sekretaris Kota	1	-	1
4	Asisten Sekretaris Kota	3	-	3
5	Bagian Pemerintahan	8	2	10
6	Bagian Hukum	4	4	8
7	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	7	6	13
8	Bagian Umum dan Protokol	10	12	22
9	Bagian Perekonomian	5	4	9
10	Bagian Program, Pelaporan Dan Keuangan	4	5	9
11	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	5	4	9
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	5	11
	Jumlah Pegawai Setko	**55**	**42**	**97**
	Kecamatan			
1	Camat	5	1	**6**
2	Wakil Camat	5	1	**6**
3	Sekretaris Kecamatan	5	1	**6**
4	Kepala Seksi Pemerintahan	4	2	**6**
5	Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan	3	3	**6**
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	3	3	**6**
7	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	2	4	**6**
8	Kepala Subbagian Program Dan Anggaran	2	3	**5**
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	4	**5**
10	Arsiparis Ahli Pertama (PPPK)	3	-	**3**
11	Pelaksana	16	8	**24**
	Jumlah Pegawai Kecamatan	**49**	**30**	**79**
	Kelurahan			
1	Lurah	25	4	**29**
2	Sekretaris Kelurahan	22	7	**29**
3	Kepala Seksi Pemerintahan	15	9	**24**
4	Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan	15	14	**29**
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	10	17	**27**

No.	Unit Kerja	L	P	Jumlah
6	Pelaksana	44	34	**78**
	Jumlah Pegawai Kelurahan	**131**	**85**	**216**
	Total Jumlah Pegawai JU Menurut Jenis Kelamin	**235**	**157**	**392**
	Persentase	**59,95%**	**40,05%**	**100%**

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bulan September 2024

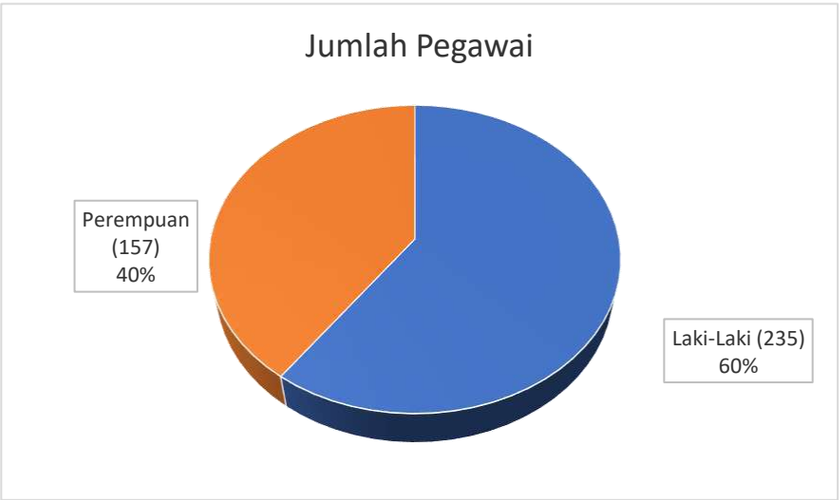

Gambar 1.14. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Jenis Kelamin

7. DISTRIBUSI PEGAWAI MENURUT AGAMA

Ditinjau berdasarkan Agama, sebagian besar pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara memeluk agama Islam sebanyak 344 orang pegawai (87,76%). Untuk urutan kedua pegawai memeluk agama Kristen Protestan sebanyak 41 orang pegawai (10,46%). Untuk urutan ketiga adalah memeluk agama Katolik sebanyak 7 orang (1,79%). Sementara pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara tidak ada yang memeluk agama Hindu dan Budha. Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11. Data Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Menurut Agama

No.	Jabatan	Agama					Jumlah
		Islam	Kristen Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
	Sekretariat Kota						
1	Walikota	1	-	-	-	-	1
2	Wakil Walikota	1	-	-	-	-	1
3	Sekretaris Kota	1	-	-	-	-	1
4	Asisten Sekko	3	-	-	-	-	3
5	Kepala Bagian	8	-	-	-	-	8
6	Kepala Sub Bagian	4	2	-	-	-	**6**
7	Ketua Sub Kelompok	14	3	1	-	-	**18**
8	Pelaksana						
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :						
	1.1) Bendahara Pengeluaran	1	-	-	-	-	**1**
	1.2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	2	-	-	-	-	**2**
	1.3) Pengurus Barang Pengguna	-	1	-	-	-	**1**
	1.4) Analis	16	3	1	-	-	**20**
	1.5) Pengelola	3	-	-	-	-	**3**
	1.6) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	1	-	-	-	-	**1**
	1.7) Penyusun Bantuan Hukum	1	-	-	-	-	**1**
	1.8) Pengawas Pelayanan Publik	1	-	-	-	-	**1**
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :						
	2.1) Pengolah Data	9	2	1	-	-	**12**
	2.2) Pengolah Pimpinan	1	-	-	-	-	**1**
	2.3) Verifikator	1	-	-	-	-	**1**
3)	Staf Administrasi Tk Terampil :						
	3.1) Pengadministrasi Umum	13	-	-	-	-	**13**
4)	Staf Pelayanan Tk Ahli :						
	4.1) Penyiap Berkas	1	-	-	-	-	**1**
5)	Staf Pelayanan Tk Ahli :						
	5.1) Staf	1	-	-	-	-	**1**
	Jumlah Pegawai Setko	**83**	**11**	**3**	**0**	**0**	**97**
	Kecamatan						
1	Camat	6	-	-	-	-	**6**
2	Wakil Camat	5	1	-	-	-	**6**
3	Sekretaris Kecamatan	6	-	-	-	-	**6**

No.	Jabatan	Agama					Jumlah
		Islam	Kristen Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
4	Kepala Seksi						
	4.1) Kasie Pemerintahan	4	2	-	-	-	**6**
	4.2) Kasie Ekbang	4	2	-	-	-	**6**
	4.3) Kasie Kesra	6	-	-	-	-	**6**
5	Kepala Subbagian						
	5.1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian	6	-	-	-	-	**6**
	5.2) Kasubbag Program dan Anggaran	3	2	-	-	-	**5**
	5.3) Kasubbag Keuangan	4	1	-	-	-	**5**
6	Arsiparis Ahli Pertama (PPPK)	2	-	1	-	-	**3**
7	Pelaksana						
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :						
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	5	1	-	-	-	**6**
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	6	-	-	-	-	**6**
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :						
	2.1) Pengolah Data	6	1	-	-	-	**7**
3)	Administrasi Tingkat Terampil :						
	3.1) Pengadministrasi Umum	4	-	-	-	-	**4**
4)	Pelayanan Tingkat Terampil :						
	4.1) Caraka	1	-	-	-	-	**1**
	Jumlah Pegawai Kecamatan	**68**	**10**	**1**	**0**	**0**	**79**
	Kelurahan						
1	Lurah	25	4	-	-	-	**29**
2	Sekretaris Kelurahan	25	4	-	-	-	**29**
3	Kepala Seksi						
	3.1) Kasie Pemerintahan	19	4	1	-	-	**24**
	3.2) Kasie Ekbang	27	1	1	-	-	**29**
	3.3) Kasie Kesra	25	2	-	-	-	**27**
4	Pelaksana						
1)	Staf Teknis Tingkat Ahli :						
	1.1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	26	1	1	-	-	**28**
	1.2) Pengurus Barang Pembantu	28	2	-	-	-	**30**
2)	Staf Teknis Tingkat Terampil :						
	2.1) Pengolah Data	5	1	-	-	-	**6**
3)	Administrasi Tingkat Terampil :						
	3.1) Pengadministrasi Umum	12	-	-	-	-	**12**

No.	Jabatan	Agama					Jumlah
		Islam	Kristen Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
4)	Pelayanan Tingkat Terampil :						
	4.1) Caraka	1	-	-	-	-	**1**
5)	Staf	-	1	-	-	-	**1**
	Jumlah Pegawai Kelurahan	**193**	**20**	**3**	**0**	**0**	**216**
	Total Jumlah Pegawai JU Menurut Kelompok Usia	**344**	**41**	**7**	**0**	**0**	**392**
	Persentase	**87,76%**	**10,46%**	**1,79%**	**0%**	**0%**	**100%**

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bulan November 2024

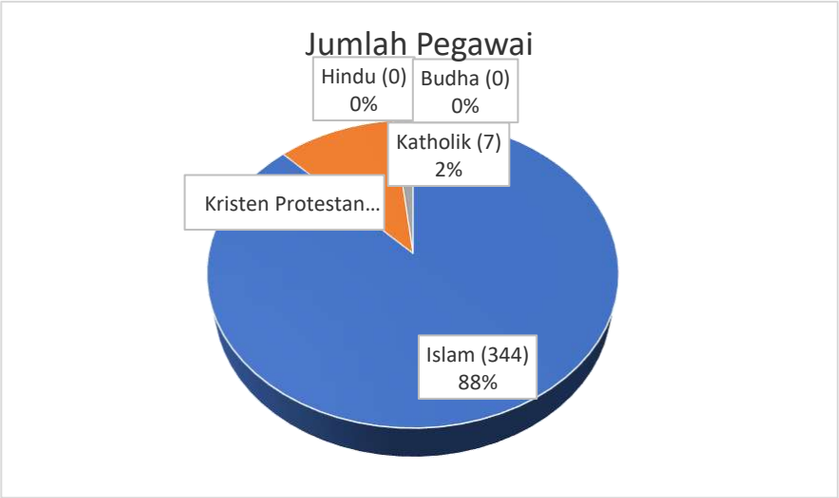

Gambar 1.15. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Agama

8. REKAPITULASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA

Ditinjau berdasarkan tabel rekapitulasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Pelaksana Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara Per 31 Desember 2024 di bawah ini, ada selisih pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara antara ABK Kebutuhan (880 orang pegawai) dengan Jumlah PNS Eksisting (392 orang pegawai) sebanyak 448 orang pegawai. Dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.12. Rekapitulasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Pelaksana
Sekretariat, Kecamatan Dan Kelurahan
Di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara
Per 31 Desember 2024

No	SKPD/UKPD	Jumlah PNS Eksisting	ABK Kebutuhan	Selisih	Jumlah CPNS Eksisting	Jumlah PNS Eksisting JP	Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV	Sub Jumlah	Sub Total
1	**Sekretariat Kota**								
1.1	Bagian Pemerintahan	10	22	**-12**	0	6	4	10	
1.2	Bagian Hukum	8	23	**-15**	0	4	4	8	
1.3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	12	23	**-11**	0	8	4	12	
1.4	Bagian Umum dan Protokol	9	23	**-14**	0	5	4	9	
1.5	Bagian Perekonomian	9	23	**-14**	0	5	4	9	**96**
1.6	Bagian Keuangan	9	22	**-13**	0	5	4	9	
1.7	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	22	31	**-9**	0	18	4	22	
1.8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	11	30	**-19**	0	7	4	11	
2	**Kecamatan Tanjung Priok**								
2.1	Kelurahan Warakas	7	17	**-10**	0	3	4	7	
2.2	Kelurahan Tanjung Priok	4	17	**-13**	0	1	3	4	
2.3	Kelurahan Sunter Jaya	7	17	**-10**	0	2	5	7	
2.4	Kelurahan Sunter Agung	7	17	**-10**	0	2	5	7	**57**
2.5	Kelurahan Sungai Bambu	6	17	**-11**	0	3	3	6	
2.6	Kelurahan Papanggo	5	17	**-12**	0	1	4	5	
2.7	Kelurahan Kebon Bawang	8	17	**-9**	0	3	**5**	8	
3	**Kecamatan Cilincing**								
3.1	Kelurahan Kalibaru	7	17	**-10**	0	3	4	7	
3.2	Kelurahan Sukapura	7	17	**-10**	0	2	**5**	7	
3.3	Kelurahan Semper Timur	7	17	**-10**	0	2	5	7	
3.4	Kelurahan Semper Barat	8	17	**-9**	0	3	5	8	**68**
3.5	Kelurahan Rorotan	9	17	**-8**	0	4	**5**	9	
3.6	Kelurahan Marunda	8	17	**-9**	0	3	**5**	8	
3.7	Kelurahan Cilincing	9	17	**-8**	0	4	5	9	
4	**Kecamatan Pademangan**								
4.1	Kelurahan Ancol	7	17	**-10**	0	2	5	7	
4.2	Kelurahan Pademangan Barat	7	17	**-10**	0	2	**5**	7	**34**
4.3	Kelurahan Pademangan Timur	7	17	**-10**	0	4	**3**	7	
5	**Kecamatan Kelapa Gading**								
5.1	Kelurahan Kelapa Gading Timur	7	17	**-10**	0	2	5	7	
5.2	Kelurahan Kelapa Gading Barat	7	17	**-10**	0	3	4	7	**37**
5.3	Kelurahan Pegangsaan Dua	8	17	**-9**	0	3	5	8	

No	SKPD/UKPD	Jumlah PNS Eksisting	ABK Kebutuhan	Selisih	Jumlah CPNS Eksisting	Jumlah PNS Eksisting JP	Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV	Sub Jumlah	Sub Total
6	**Kecamatan Koja**								
6.1	Kelurahan Tugu Utara	6	17	**-11**	0	2	4	6	
6.2	Kelurahan Tugu Selatan	7	17	**-10**	0	3	4	7	
6.3	Kelurahan Rawa Badak Utara	8	17	**-9**	0	3	5	8	
6.4	Kelurahan Rawa Badak Selatan	6	17	**-11**	0	2	4	6	**54**
6.5	Kelurahan Lagoa	7	17	**-10**	0	2	5	7	
6.6	Kelurahan Koja	7	17	**-10**	0	2	5	7	
7	**Kecamatan Penjaringan**								
7.1	Kelurahan Kapuk Muara	5	17	**-12**	0	2	3	5	
7.2	Kelurahan Kamal Muara	7	17	**-10**	0	2	5	7	
7.3	Kelurahan Pluit	7	17	**-10**	0	**3**	4	7	**46**
7.4	Kelurahan Penjaringan	7	17	**-10**	0	2	5	7	
7.5	Kelurahan Pejagalan	8	17	**-9**	0	3	**5**	8	
	Jumlah	**392**	**880**	**-488**	**0**	**166**	**226**		**392**

Sumber : Bagian KKPP Setko Adm. JU Bulan Desember 2024

Jumlah Pegawai :	
Sekretariat Kota	96
Kecamatan	79
Kelurahan	217
Total	**392**

Jumlah Pegawai :	Pejabat	Pelaksana
Sekretariat Kota	38	58
Kecamatan	4	30
Kelurahan	139	78
Total	**226**	**166**

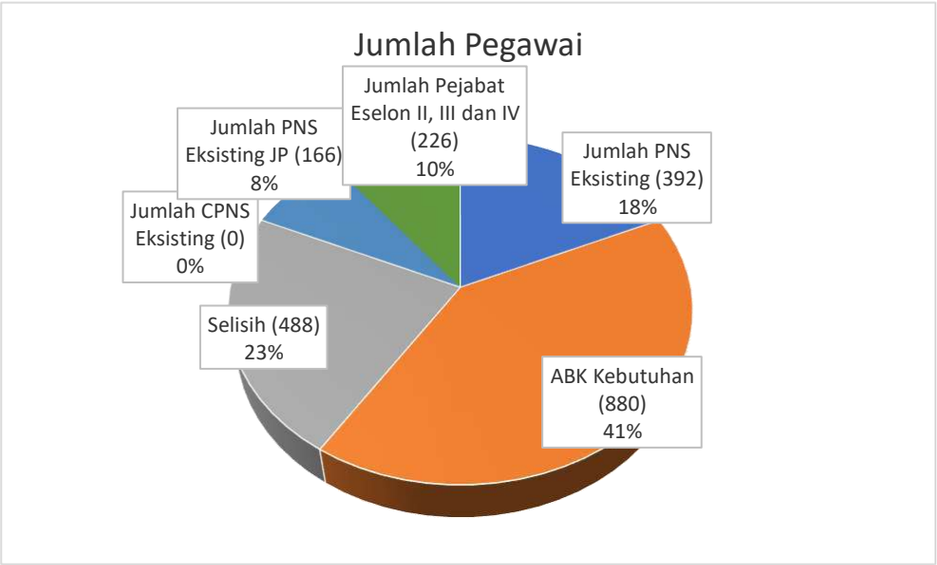

Gambar 1.16. Grafik Rekapitulasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Pelaksana Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara Per 31 Desember 2024

I. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara mengacu pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi AKIP.

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (dalam proses integrasi).
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Surat Tugas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0009/OT.05.00 tentang Tim Penyelenggara Penyuluhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023.

J. Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dari Inspektorat

I. Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dari Inspektorat

Berdasarkan surat Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 0897/PA.01.00 tanggal 2 Desember 2024 Perihal Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Evaluasi dilakukan untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga dapat mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan 4 (empat) komponen yang menjadi sasaran evaluasi. Hasil evaluasi Inspektorat menunjukkan bahwa capaian SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Utara adalah **85,75** dengan predikat A kategori Baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.13. Komponen dan Bobot Evaluasi AKIP Sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021

No	Komponen	Bobot
a	Perencanaan Kinerja	30%
b	Pengukuran Kinerja	30%
c	Pelaporan Kinerja	15%
d	Evaluasi Internal	25%
	Nilai Hasil Evaluasi	100%

4. Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas implementasi SAKIP agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat selaku evaluator bertanggung jawab untuk memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP tahun 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja untuk meyakini bahwa bukti evaluasi yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan nilai/predikat.

5. Evaluasi dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur evaluasi berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja Evaluasi. Inspektorat meyakini bahwa bukti evaluasi yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan nilai/predikat.

6. Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Utara memperoleh nilai 87,25% dengan predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil di Kota Administrasi Jakarta Utara telah menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.14. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30%	25,50
b	Pengukuran Kinerja	30%	25,50
c	Pelaporan Kinerja	15%	12,75
d	Evaluasi Internal	25%	22,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	**85,75**

7. Lampiran Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 :

Tabel 1.15. Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,50	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa: a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformal-kan. b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasi-kan tepat waktu. c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggam-barkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformal-kan. b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasi-kan tepat waktu. c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggam-barkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				d. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformal-kan. e. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasi-kan tepat waktu. f. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggam-barkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. g. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggam-barkan kondisi kinerja yang akan dicapai. h. Ukuran Keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. i. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable). j. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (on the right track), menantang, dan realistis. k. Setiap dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading). l. Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan(crosscutting).	d. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformal-kan. e. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasi-kan tepat waktu. f. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggam-barkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. g. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. h. Ukuran Keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. i. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggam-barkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable). j. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (on the right track), menantang, dan realistis. k. Setiap dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading). l. Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan(crosscutting).
2	Pengukuran Kinerja	30%	25,50	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa: a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				c. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. d. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. e. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. f. Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang. g. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).	c. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. d. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. e. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. f. Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang. g. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)..
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,75	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa: a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja). b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/ kegagalan mencapai target kinerja. c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. e. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian Perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja). b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/ kegagalan mencapai target kinerja. c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. e. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian Perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				f. Informasi dalam Laporan Kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	f. Informasi dalam Laporan Kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
3	Evaluasi Internal	25%	22,00	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	**100%**	**85,75**		

II. Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dari Inspektorat

Berdasarkan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 695/PA.02.02 tanggal 4 Juli 2024 hal Jawaban Evaluasi Implementasi SAKIP 2023 kepada Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Menindaklanjuti surat dari Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5029/PA.02.02 tanggal 27 Desember 2023 perihal hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan ini disampaikan tanggapan terkait tindak lanjut atas rekomendasi dari Inspektur sebagai berikut :

   1. Perjanjian Kinerja berjenjang dan monev berkala sudah dilaksanakan oleh Kata Administrasi Jakarta Utara dengan mengunggah bukti Perjanjian Kinerja, laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut pada tautan : shorturl.at/7SujN.

2. Sosialisasi Perencanaan Kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian sudah dilaksanakan oleh Kata Administrasi Jakarta Utara dengan mengunggah SK Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0047 Tahun 2024 Tentang Penanggung Jawab indikator Rencana Kinerja Kata Administrasi Jakarta Utara dan Laporan Sosialisasi dalam Penyusunan SKP dan Matriks Pembagian Peran Hasil Tahun 2023 tersebut pada tautan : shorturl.at/7SujN.
3. Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkala dengan melampirkan screenshoot validasi renkin sudah dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Utara -dengan mengunggah berupa laporan Evaluasi Perkin TW I s.d. TW4 Tahun 2023 dan bukti screenshoot validasi Renkin Tahun 2023 tersebut pada tautan: shorturl.at/7SujN.
4. Pengukuran kinerja dan melampirkan rencana aksi/strategi setiap kegiatan sudah dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Utara dengan mengunggah berupa Perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan bukti screenshoot validasi Renkin Tahun 2023 tersebut pada tautan : shorturl.at/U7SujN.
5. Melakukan review internal dalam penyusunan LKIP kegiatan sudah dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Utara dengan mengunggah berupa Laporan LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 dan Laporan Rapat Evaluasi LKIP tersebut pada tautan : shorturl.at/7SujN.

K. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya, di mana setiap tahun Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam kerangka tersebut, Kota Administrasi Jakarta Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada garis besarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Utara sudah mengikuti sistematika yang ada, meskipun ada penambahan seperti yang tertera dalam daftar isi sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif Mengemukakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana tercapainya tujuan/sasaran utama serta kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

Bab I **Pendahuluan**

Merupakan pendahuluan yang memuat hal-hal umum tentang Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi, yaitu :

A. Latar Belakang
B. Tujuan dan Manfaat
C. Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Utara
D. Kedudukan
E. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
F. Tugas dan Fungsi
G. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
H. Sumber Daya Manusia
I. Landasan Hukum
J. Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dari Inspektorat
K. Sistematika Penulisan.

Bab II **Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, yaitu :

A. Rencana Strategis
B. Tujuan dan Sasaran
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini meliputi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Merupakan kinerja yang memuat uraian :

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan dengan penjelasan detail terkait dengan capaian kinerja di masing-masing indikator.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sasaran khusus maupun sasaran operasional tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai berikut :

1. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
2. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.

C. Inovasi

Pada sub bab ini diinformasikan mengenai inovasi yang sudah dilakukan olah Kota Administrasi Jakarta Utara.

D. Prestasi

Pada sub bab ini diinformasikan mengenai prestasi yang diraih olah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Bab IV **Penutup**

Pada bab ini diuraikan :

A. Kesimpulan

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Saran merupakan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja
2) Penghargaan
3) Dan lain-lain yang dianggap perlu.

Dengan menggunakan sistematika tersebut di atas dan pola pikir penyusunan LKIP seperti gambar di bawah ini, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah tersusun diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif terhadap capaian kinerja tahun 2024.

Berikut ini adalah pola pikir dalam penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024, yaitu :

Gambar 1.17. Pola Pikir Penyusunan LKIP

Sumber : Paparan Diklat Lakip 1 Tahun 2022

NYAMPLUNG-BURUNG RAJA UDANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan didahului menyusun suatu '*strategic plan*' atau Rencana Strategis (Renstra).

Renstra merupakan suatu proses tahap awal dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra yang disusun setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalan.

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur, Kota Administrasi Jakarta Utara wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026 sangat terkait dengan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Renstra ini juga akan dijadikan pedoman bagi Kota Administrasi Jakarta Utara dalam penyusunan rencana kerja mulai tahun 2024. Untuk lebih jelasnya keterkaitan Renstra dengan Dokumen Rencana Daerah (Dokrenda) lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1. Alur Keterkaitan Renstra dengan Dokrenda
Kota Administrasi Jakarta Utara

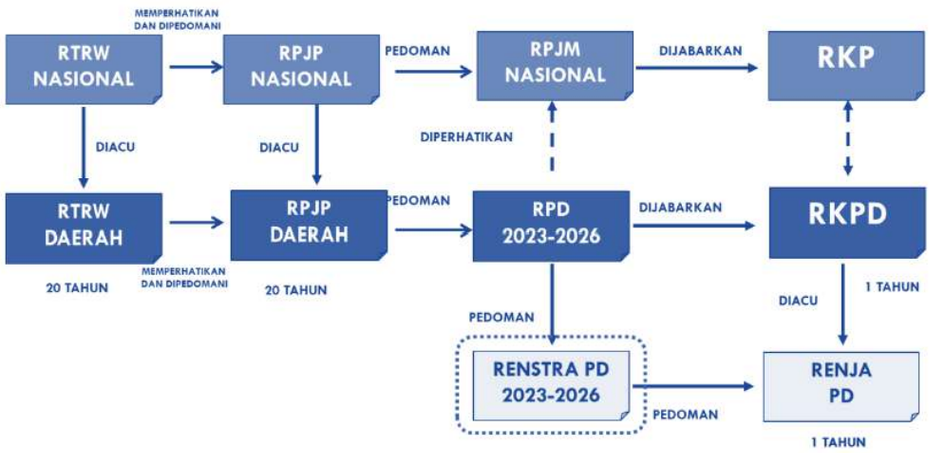

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2023-2026

Visi dan Misi

Visi adalah suatu pandangan yang sifatnya sangat umum tetapi mengandung suatu arti yang cukup dalam sehingga di dalam membuat suatu uraian mengenai VISI harus benar-benar dipikirkan artinya yang lebih filosofis tetapi terungkap dalam kata yang sederhana.

Misi mempunyai arti yang sangat berlainan dengan kata visi karena di dalam kata misi terkandung suatu pesan kemanusiaan yang tinggi dan juga terkandung suatu aktivitas yang mengarah kepada suatu tujuan dari aktivitas tersebut dalam kaitan dengan kemanusiaan.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan tujuan yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

a. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta per Senin, 21 Maret 2022 tercatat bahwa:

1) Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah:

"Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua".

2) Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Adapun Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah :

a) Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

b) Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

c) Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

d) Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

e) Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Utara dalam menyusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Perubahan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 otomatis mempengaruhi perubahan pada Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026.

Adapun dalam misi tersebut, Kota Administrasi Jakarta Utara mengemban misi nomor C yakni :

"Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas".

b. Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Utara

1) Visi Kota Administrasi Jakarta Utara

Yaitu :

"Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal"

2) Misi Kota Administrasi Jakarta Utara

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang tersebut di atas, Misi Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026 yaitu:

"Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal"

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta visi dan misi Kota Administrasi Jakarta Utara selama Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran dari Kota Administrasi Jakarta Utara yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Utara 2023-2026, yang secara bertahap akan direalisasikan pada setiap tahun, yaitu “Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal”.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Kota Administrasi Jakarta Utara adalah “Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal”.

Di bawah ini adalah tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Renstra 2023-2026 yaitu :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR
1	2	3	4
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal			**Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi**
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal		• Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi • Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk Kelurahan)
		Pengelolaan Kota Administrasi	• Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan • Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan • Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
		Pengelolaan Kecamatan	• Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) • Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR
1	2	3	4
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	• Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA
		Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	• Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	• Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi yang dalam Kondisi Baik • Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026

Sementara itu, target indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026 telah mempertimbangkan situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 dan merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Adapun target kinerja tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 – 2026

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2021	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	N/A	86,75	87,3	87,85	89,5
Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang optimal	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	N/A	85	86	87	88,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk Kelurahan)	Nilai	N/A	88,5	88,6	88,7	88,8

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026

Pada RPD target Indeks Kepuasan Masyarakat dalam jangka waktu 4 tahun menggunakan nilai konversi IKM (skala 1-100) yaitu 88,5; 88,6; 88,7; dan 88,8. Sementara pada Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Utara 2023 – 2026 target dimulai dari tahun kedua dan menggunakan indeks (skala 1-4).

Tabel 2.3. Target dan Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 – 2026

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
		2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal	86,75	87,3	87,85	89,5

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026

B. Tujuan dan Sasaran

Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Utara akan diukur melalui terwujudnya atau tidaknya target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2026.

Sasaran strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan berikut dengan indikator kinerja dari program dan kegiatan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kota Administrasi Jakarta Utara harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kota Administrasi Jakarta Utara periode 2013-2026 dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis serta kebijakan.

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kota Administrasi Jakarta Utara menetapkan strategi di antaranya :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat dan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perlengkapannya dalam mendukung pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama ke dalam program jangka menengah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Tujuan dan Sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 s.d Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2023	2024	2025	2026
1	Program Pengelolaan Kecamatan	- Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM); - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU.	4	4	4	4
2	Program Pengelolaan Kota Administrasi	- Nilai efektivitas koordinasi Bidang Pemerintahan - Nilai efektivitas koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan - Nilai efektivitas koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	85 85 85	86 86 86	87 87 87	88,5 88,5 88,5
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Indeks kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah - Persentase Gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota administrasi dalam kondisi baik	4 90%	4 95%	4 95%	4 100%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumatik, RPTRA	4	4	4	4
5	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	4	4	4	4

Sumber : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2023-2026

Tabel 2.5. Target IKU Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
	SASARAN STRATEGIS				
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Unsur Kecamatan	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat	93.79	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
			terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei		
2	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Unsur Kota Adm.	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi. SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	93.79	Nilai
3	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat	95.28	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
			kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei di antaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, di mana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. SUMBER DATA : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei		
4	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	92.30	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target	Satuan
			DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. METODE PENGUKURAN : Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektivitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei		

Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, besaran anggaran pada PD/UKPD di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara target sebesar Rp 814.136.705.132 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6. Target Anggaran Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	1.440.311.478
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	92.276.522.160

No.	Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	* Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) * Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	422.383.255.544
4	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Pengoordinasian, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi yang Optimal	2.343.696.571
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	* Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat * Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	295.692.919.379
	Total		**814.136.705.132**

Sumber: *monev2024.bapedadki.net*

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), maka disusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan Rencana kinerja ini kemudian ditetapkan dibuat Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 tersebut, ditetapkan 3 (tiga) jenis sasaran yaitu :

- Sasaran Strategis
- Sasaran Khusus
- Sasaran Operasional.

Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2024 dengan indikator kinerja sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator yang terdiri dari 12 (dua belas) Sasaran Strategis, 9 (sembilan belas) Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Sasaran Operasional. Dengan target masing-masing, yaitu :

Tabel 2.7. Target Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
	SASARAN STRATEGIS			
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Unsur Kecamatan	93.79	Nilai
2	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Unsur Kota Adm.	93.79	Nilai
3	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	95.28	Nilai
4	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	92.30	Nilai
5	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	100	Persentase
6	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	Persentase
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya	100	Persentase
8	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
9	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100	Persentase
10	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100	Persentase
11	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	Persentase
12	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	Persentase
	SASARAN KHUSUS			
13	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	Persentase
14	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	Persentase
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	Persentase
16	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	Persentase
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program	100	Persentase
18	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
19	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3.25	Nilai
20	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	Persentase
21	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	Nilai
	SASARAN KHUSUS			
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100	Persentase
23	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	Persentase
24	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	100	Persentase

Sumber : Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

Penjelasan singkat mengenai indikator kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara :

1. Indikator kinerja yang pertama dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, unsur Kecamatan. Indikator kinerja pertama ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal.

   Target tahun 2024 dengan nilai sebesar 93,79.

   Sumber data yaitu e-SAKIP.

   Pengukuran Kinerja :

   Definisi :

   Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.

Metode Pengukuran :

Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi.

2. Indikator kinerja yang kedua dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, unsur Kota Administrasi. Indikator kinerja kedua ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal.

   Target tahun 2024 dengan nilai sebesar 93,79.

   Sumber data yaitu e-SAKIP.

   Pengukuran Kinerja :

   Definisi :

   Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.

   Metode Pengukuran :

   Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi.

3. Indikator kinerja yang ketiga dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan. Indikator kinerja ketiga ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal.

   Target tahun 2024 dengan nilai sebesar 95,28.

   Sumber data yaitu e-SAKIP.

   Pengukuran Kinerja :

Definisi :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun unsur layanan yang di survei di antaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, di mana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut :

a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99;
b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60;
c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30;
d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).

Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.

Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei.

4. Indikator kinerja yang keempat dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Indeks Efektivitas Koordinasi Kota administrasi. Indikator kinerja keempat ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal.

   Target tahun 2024 dengan nilai sebesar 92,30.
   Sumber data yaitu e-SAKIP.
   Pengukuran Kinerja :
   Definisi :
   Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.
   Metode Pengukuran :
   Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.

5. Indikator kinerja yang kelima sampai dengan kedelapan, merupakan Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD), dimana **Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara** yang diamanatkan kepada Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah :

   a. Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir. Indikator kinerja kelima ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang ketiga yaitu Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota.
      Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.
      Sumber data yaitu e-Monev KSD.

Metode Pengukuran :

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir.

b. Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Indikator kinerja keenam ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang keempat yaitu Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial.

   Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.

   Sumber data yaitu e-Monev KSD.

   Metode Pengukuran :

   Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

c. Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya. Indikator kinerja ketujuh ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kelima yaitu Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit.

   Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.

   Sumber data yaitu e-Monev KSD.

   Metode Pengukuran :

   Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya.

d. Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Indikator kinerja kedelapan ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang keenam yaitu Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota.

   Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.

   Sumber data yaitu e-Monev KSD.

Metode Pengukuran :

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu.

e. Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati. Indikator kinerja kesembilan ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang ketujuh yaitu Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.

   Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.

   Sumber data yaitu e-Monev KSD.

   Metode Pengukuran :

   Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati.

f. Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital. Indikator kinerja kesepuluh ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kedelapan yaitu Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas.

   Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.

   Sumber data yaitu e-Monev KSD.

   Metode Pengukuran :

   Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital.

g. Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Indikator kinerja kesebelas ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kesembilan yaitu Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.

   Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.

Sumber data yaitu e-Monev KSD.

Metode Pengukuran :

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

g. Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta. Indikator kinerja kedua belas ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kesepuluh yaitu Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur.

   Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.

   Sumber data yaitu e-Monev KSD.

   Metode Pengukuran :

   Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta.

6. Indikator kinerja yang ketiga belas dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

   Indikator kinerja ketiga belas ini merupakan ukuran dari sasaran khusus yang pertama yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 80.

   Sumber data berasal dari Tingkat Komponen Dalam Negeri.

   Pengukuran Kinerja :

   a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self-declare).
   b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening :

5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa
5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.06 - Belanja Modal Lainnya

Metode Pengukuran :

Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.

7. Indikator kinerja yang keempat belas dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun. Indikator kinerja keempat belas ini merupakan ukuran dari sasaran khusus yang kedua yaitu Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun.

Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.

Sumber data berasal dari e-Kinerja.

Pengukuran Kinerja :

Definisi :

Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekda Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklatbpsdm.jakarta.go.id.

Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama 2024.

Metode Pengukuran :

[(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)}.

8. Indikator kinerja yang kelima belas dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko. Indikator kinerja kelima belas ini merupakan ukuran dari sasaran khusus yang ketiga yaitu Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.

   Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.

   Sumber data berasal dari e-Kinerja.

   Pengukuran Kinerja :

   Penerapan Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra dan Renja PD yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan :

   a. Komunikasi dan konsultasi;
   b. Penetapan konteks;
   c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);
   d. Penanganan Risiko; dan
   e. Pemantauan.

   Formula Pengukuran :

   [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%.

9. Indikator kinerja yang keenam belas dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Indikator kinerja keenam belas ini merupakan ukuran dari sasaran khusus yang keempat yaitu Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel.

   Target tahun 2024 dengan predikat sebesar 100.

   Sumber data berasal dari e-Kinerja.

   Pengukuran Kinerja :

   (Melalui sistem e-Inventarisasi)

   a. Bobot 5%: PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD.
   b. Bobot 85%: PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki.
   c. Bobot 10%: PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).

10. Indikator kinerja yang ketujuh belas dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program. Indikator kinerja ketujuh belas ini merupakan ukuran dari sasaran khusus yang kelima yaitu Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah.

    Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.

    Sumber data berasal dari e-Kinerja.

    Pengukuran Kinerja :

    a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
    b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.
    c. Persentase respons terhadap krisis komunikasi.
    d. Persentase respons interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.

    Metode Pengukuran :

    a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
    b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.
    c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respons terhadap krisis komunikasi.
    d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respons interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.

11. Indikator kinerja yang kedelapan belas dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan. Indikator kinerja kedelapan belas ini merupakan ukuran dari sasaran khusus yang keenam yaitu terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah.

    Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.

Sumber data berasal dari e-Kinerja.

Pengukuran Kinerja :

Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id.

Metode Pengukuran :

Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).

12. Indikator kinerja yang kesembilan belas dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Nilai kualitas data SDI. Indikator kinerja kesembilan belas ini merupakan ukuran dari sasaran khusus yang ketujuh yaitu Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas.

    Target tahun 2024 dengan nilai sebesar 3,25.

    Sumber data berasal dari e-Kinerja.

    Pengukuran Kinerja :

    Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu :

    a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
    b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
    c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.
    d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data.

13. Indikator kinerja yang kedua puluh dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi. Indikator kinerja kedua puluh ini merupakan ukuran dari sasaran khusus yang kedelapan yaitu Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.

    Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 71.

Sumber data berasal dari e-Kinerja.

Pengukuran Kinerja :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi :

a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

14. Indikator kinerja yang kedua puluh satu dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Survei Kepuasan Layanan Masyarakat. Indikator kinerja kedua puluh ini merupakan ukuran dari sasaran khusus yang kesembilan yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat.

    Target tahun 2024 dengan nilai sebesar 92.

    Sumber data berasal dari e-Kinerja.

    Pengukuran Kinerja :

    Definisi :

    Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing.

    Metode Pengukuran:

    Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei.

15. Indikator kinerja yang kedua puluh dua dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat. Indikator kinerja kedua puluh dua ini merupakan ukuran dari sasaran operasional yang pertama yaitu Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.

    Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.

    Sumber data berasal dari TL Aduan Masyarakat (CRM).

    Pengukuran Kinerja :

    Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%.

16. Indikator kinerja yang kedua puluh tiga dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur. Indikator kinerja kedua puluh tiga ini merupakan ukuran dari sasaran operasional yang kedua yaitu Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur.
    Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.
    Sumber data berasal dari Arahan Gubernur (e-Kinerja).
    Pengukuran Kinerja :
    Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%.

17. Indikator kinerja yang kedua puluh empat dari Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 adalah Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK). Indikator kinerja kedua puluh empat ini merupakan ukuran dari sasaran operasional yang ketiga yaitu Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).
    Target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.
    Sumber data berasal dari Inspektorat (e-Kinerja).
    Pengukuran Kinerja :
    (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD di bawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat).

Setiap sasaran memiliki indikator kinerja dan targetnya masing-masing. Penjabaran lengkap mengenai sasaran dan indikator kinerja akan tersaji pada Bab III Laporan ini.

NYAMPLUNG-BURUNG RAJA UDANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan penyimpulan capaian kinerja organisasi secara keseluruhan dan capaian masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja organisasi merupakan nilai rata-rata dari seluruh capaian sasaran strategis. Penyimpulan dilakukan dengan memberi interpretasi atau makna atas nilai rata-rata yang diperoleh.

Makna dari nilai tersebut diambil dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dapat digambarkan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Interpretasi Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	Keterangan
1	AA	> 85 - 100	**Memuaskan**	
2	A	> 75 - 85	**Sangat Baik**	
3	B	> 65 - 75	**Baik**	Perlu sedikit perbaikan
4	CC	> 50 - 65	**Cukup**	Memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	> 30 - 50	**Kurang**	Perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0 - 30	**Sangat Kurang**	Perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Sumber : Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja, pada Kota Administrasi Jakarta Utara secara keseluruhan dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan pada setiap kriteria. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya dan tervalidasi. Konsistensi hasil analisis capaian kinerja dengan hasil pada setiap kriteria penilaian dipastikan dengan cara melakukan pengecekan kembali hasil (dari Pengukuran Kinerja) pada setiap kriteria dan kesesuaiannya dengan hasil analisis.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai atas sasaran dan program dan dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (atau realisasi tahun 2024 dan dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (yang ditandatangani antara Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta) dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 tersebut, ditetapkan 3 (tiga) jenis sasaran yaitu :

- Sasaran Strategis
- Sasaran Khusus
- Sasaran Operasional.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Kota Administrasi. Pengukuran ini dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Kota Administrasi, dan menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan memilih Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dominan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut di atas, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara didukung dengan 5 (lima) Program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2. Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024

No	Program	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.458.354.046	1.440.311.478	1.348.596.324	93,63%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	94.075.997.465	92.276.522.160	89.427.956.776	96,91%
	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	428.689.045.944	422.383.255.544	417.205.271.281	98,77%
	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	2.245.537.127	2.343.696.571	2.211.578.325	94,36%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	296.502.165.240	295.692.919.379	280.335.647.458	94,81%
	Total	**822.971.099.822**	**814.136.705.132**	**790.529.050.164**	**97,10%**

Hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada Sub bab ini membandingkan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN STRATEGIS						
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	93,79	96,80	103,21%	e-Sakip
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	93,79	96,80	103,21%	e-Sakip
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	95,28	97,22	102,04%	e-Sakip
4		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	92,30	96,38	104,42%	e-Sakip
5	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD
6	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD
9	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD
10	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD
11	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD
12	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD
	SASARAN KHUSUS						
13	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persentase	80	96,44	120,55%	Tingkat Komponen Dalam Negeri
14	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase	100	100	100%	Pengem-bangan Kompetensi ASN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100%	Manajemen Risiko
16	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100	100	100%	Inventari-sasi Barang Milik Daerah
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program	Persentase	100	100	100%	Strategi Komunikasi
18	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persentase	100	100	100%	Manaje-men Pengeta-huan
19	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3.25	3.25	100%	Satu Data Indonesia
20	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	89,81	126%	Kinerja Anggaran
21	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	92	96	104%	Indikator Khusus
	SASARAN OPERASIONAL						
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase	100	99,87	99,87%	TL Aduan Masyarakat (CRM)
23	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100%	Arahan Gubernur (e-Kinerja)
24	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100%	Inspektorat (e-Kinerja)

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja dari e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing Indikator Kinerja, terdiri dari :

1) **Capaian Indikator Kinerja Pertama :**

Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi

Indikator kinerja pertama ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal. (Unsur Kecamatan Administrasi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN STRATEGIS						
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	93,79	96,80	103,21%	e-Sakip

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (unsur Kecamatan Administrasi) telah dilaksanakan dengan realisasi melebihi target sebesar 96,80 dari target 93,79 sehingga capaian kinerja sebesar 103,21%. Sumber data dari e-SAKIP.

Pengukuran Kinerja :

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definisi :

Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.

Metode Pengukuran :

Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Adm.

Sumber Data :

Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei.

Hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan nota dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 676/PU.00 tanggal 28 Juni 2024 hal Laporan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I Tahun 2024, adalah :
   - a.1. Dasar hukum Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
   - a.2. Survei Kepuasan Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik telah dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) bidang pelayanan yakni :
     - a.2.1. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)
     - a.2.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
     - a.2.3. Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
     - a.2.4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
     - a.2.5. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
     - a.2.6. Ketertiban Umum (Tibum)
     - a.2.7. Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM).
   - a.3. Dilaksanakan tanggal 1 April s.d 7 Mei 2023 di 31 (tiga puluh satu) Kelurahan wilayah kota Administrasi Jakarta Utara.
   - a.4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester 1 Tahun 2024 sebesar 97,10 dan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi pada Kota Administrasi Kota Jakarta Utara mempunyai Penilaian Indeks Efektivitas Koordinasi Jakarta Utara sebesar 95,58.

a.5. Berdasarkan hasil nilai agregat dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Utara mendapatkan nilai agregat sebesar 96,34.

b. Berdasarkan nota dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2403/PU.07.00 tanggal 24 Desember 2024 hal Laporan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2024, adalah :

b.1. Dasar hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

b.2. Survei Kepuasan Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik telah dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) bidang pelayanan yakni :

a.2.1. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)
a.2.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
a.2.3. Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
a.2.4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
a.2.5. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
a.2.6. Ketertiban Umum (Tibum)
a.2.7. Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM).

b.3. Dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 30 Agustus 2024 di 31 (tiga puluh satu) Kelurahan yang ada di wilayah kota Administrasi Jakarta Utara.

b.4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Tahun 2024 sebesar 97,34 dan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi pada Kota Administrasi Kota Jakarta Utara mempunyai Penilaian Indeks Efektivitas Koordinasi Jakarta Utara sebesar 97,18.

b.5. Berdasarkan hasil nilai agregat dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Utara mendapatkan nilai agregat sebesar 97,26.

2) Capaian Indikator Kinerja Kedua :

Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi

Indikator kinerja kedua ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal (Unsur Kota Administrasi).

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN STRATEGIS						
2	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	93,79	96,80	103,21%	e-Sakip

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (unsur Kota Administrasi) telah dilaksanakan dengan realisasi melebihi target sebesar 96,80 dari target 93,79 sehingga capaian kinerja sebesar 103,21%. Sumber data dari e-SAKIP.

Pengukuran Kinerja :

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Definisi :

Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.

Metode Pengukuran :

Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi.

Sumber Data :

Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei.

Hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan nota dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 676/PU.00 tanggal 28 Juni 2024 hal Laporan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I Tahun 2024, adalah :

   a.1. Dasar hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

   a.2. Survei Kepuasan Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik telah dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) bidang pelayanan yakni :

      a.2.1. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)
      a.2.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
      a.2.3. Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
      a.2.4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
      a.2.5. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
      a.2.6. Ketertiban Umum (Tibum)
      a.2.7. Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM).

   a.3. Dilaksanakan pada tanggal 1 April s.d 7 Mei 2023 di 31 (tiga puluh satu) Kelurahan yang ada di wilayah kota Administrasi Jakarta Utara.

   a.4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester 1 Tahun 2024 sebesar 97,10 dan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi pada Kota Administrasi Kota Jakarta Utara mempunyai Penilaian Indeks Efektivitas Koordinasi Jakarta Utara sebesar 95,58.

a.5. Berdasarkan hasil nilai agregat dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Utara mendapatkan nilai agregat sebesar 96,34.

b. Berdasarkan nota dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2403/PU.07.00 tanggal 24 Desember 2024 hal Laporan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2024, adalah :

b.1. Dasar hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

b.2. Survei Kepuasan Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik telah dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) bidang pelayanan yakni :

a.2.1. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)
a.2.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
a.2.3. Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
a.2.4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
a.2.5. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
a.2.6. Ketertiban Umum (Tibum)
a.2.7. Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM).

b.3. Dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 30 Agustus 2024 di 31 (tiga puluh satu) Kelurahan yang ada di wilayah kota Administrasi Jakarta Utara.

b.4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Tahun 2024 sebesar 97,34 dan Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi pada Kota Administrasi Kota Jakarta Utara mempunyai Penilaian Indeks Efektivitas Koordinasi Jakarta Utara sebesar 97,18.

b.5. Berdasarkan hasil nilai agregat dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Utara mendapatkan nilai agregat sebesar 97,26.

3) **Capaian Indikator Kinerja Ketiga :**

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

Indikator kinerja ketiga ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN STRATEGIS						
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	95,28	97,22	102,04%	e-Sakip

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi melebihi target sebesar 97,22 dari target 95,28 sehingga capaian kinerja sebesar 102,04%. Sumber data dari e-SAKIP.

Pengukuran Kinerja :

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Definisi :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei di antaranya Kegiatan Penyelenggaraan

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, di mana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut:

a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99;
b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60;
c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30;
d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).

Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.

Sumber Data :

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei

Hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih perlu ditingkatkan.

Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih adanya pengaduan atau keluhan masyarakat dan baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut sumber daya manusia yang kurang kompeten, informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, penyelesaian pelayanan yang tidak tepat waktu dan standar biaya pelayanan.

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6897);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 708);
f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2007);

g. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
h. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 72130);
i. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
j. Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
k. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0038 Tahun 2024 Tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Kota Adm. Jakarta Utara.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:

a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sejak tahun 2019 hal ini berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kata Administrasi Jakarta Utara Jakarta dilaksanakan di 31 (tiga puluh satu) Kelurahan.

Stakeholder pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:

a. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi selaku pembina, perumusan kebijakan dan pendamping dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.
b. 31 Kelurahan, selaku pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan penyusunan laporan Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat.
c. 6 Kecamatan, selaku penyusun laporan Survei Kepuasan Masyarakat, Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat.

d. Dinas Kominfotik selaku pengembangan aplikasi Jaksurevi-Jaki, penentuan sampling, verifikasi setting kuesioner, grouping verifikasi responden, helpdesk, monev, cleansing serta analisis data.

SEMESTER II

Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2024 dilakukan secara periodik dengan jangka waktu pelaksanaan tanggal 12 s.d 30 Agustus 2024. Adapun timeline kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4. Pelaksanaan SKM Semester II Tahun 2024

No	Kegiatan	SKPD	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Rapat persiapan Wilayah	Biro ORB	29 Juli	1
2	Persiapan dan uji coba kuesioner	Diskominfotik	30 Juli - 9 Agustus	9
3	Pelaksanaan SKM	Kelurahan	12 - 30 Agustus	15
4	Pengolahan data dan hasil	Diskominfotik	2 - 4 September	3
5	Distribusi Hasil Analisis dan waktu Sanggah	Diskominfotik	5 - 11 September	5
6	Membuat laporan SKM dan RTL	Kota	9 - 30 September Kelurahan: 9 - 13 September; Kecamatan: 16 - 20 September Kota: 23 - 30 September	12
7	Mengirim laporan SKM dan Rencana Tindak Lanjut ke Biro ORB	Kota	1 Oktober	1
8	Menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut	Kelurahan	11 - 31 Oktober	15
9	Membuat laporan hasil tindak lanjut SKM	Kota	1 - 13 November Kelurahan: 1 - 6 November; Kecamatan: 7 - 11 November Kota: 12 - 13 November	8
10	Mengirim laporan SKM dan Rencana Tindak Lanjut ke Biro ORB	Kota	14 - 15 November	2

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang sudah dilakukan, di 31 Kelurahan dan 6 Kecamatan, Kota Administrasi Jakarta Utara pada Semester I dan II Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I dan II Tahun 2024

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									/KM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
1	Kecamatan Tanjung Priok	Semester I (Januri – Juni)	95, 41	95, 96	96, 13	96, 33	96, 23	96, 28	95, 59	96, 31	96, 36	96,18	A (Sangat Baik)	5.607	SKM Online	1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu	**Persyaratan** : Persyaratan Layanan akan dibuat keseragaman di setiap kelurahan yang ada di kecamatan Tanjung Priok. **Prosedur:** akan dibuatkan prosedur layanan terbaru dengan memangkas beberapa langkah pelayanan **Waktu:** Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan	100%

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									/KM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
		Semester II (Juli – September)	96,78	96,47	96,82	97.08	96,07	96,89	96,98	96,84	96,81	96,75	A (Sangat Baik)	5.983	SKM Online	1. Petugas 2. Prosedur 3. Persyaratan	**Persyaratan** : Hasil Kerja Petugas masih belum di rasa maksimal oleh masyarakat. **Prosedur:** Prosedur layanan belum dibuatkan prosedur layanan terbaru dengan memangkas beberapa langkah pelayanan **Waktu:** Persyaratan belum adanya keseragaman persyaratan pelayanan di kelurahan-kelurahan.	100%
		Rata-Rata Tahunan	96,06	96,48	96,71	96,15	96,15	96,59	96,79	96,58	96,59	96,47	A (Sangat Baik)	5.795	SKM Online	-	-	**100%**

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									/KM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
2	Kecamatan Penjaringan	Semester I (Januri – Juni)	97, 25	97, 50	96, 75	97, 25	97, 50	96, 25	97, 50	97, 00	96, 75	96,75	A (Sangat Baik)	852	SKM Online	1. Kompetensi 2. Produk 3. Jangka Waktu	**Kompetensi :** Melakukan pembinaan kepada Kader Jumantik. **Produk:** - Monitoring dan Pengawasan Produk Layanan - Sosialisasi Produk Layanan **Jangka Waktu:** - Monitoring dan Evaluasi - Sosialisasi Jangka Waktu Layanan	100%

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									/KM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
		Semester II (Juli – Des)	95,50	96,25	96,25	96.35	96,45	96,40	94,70	96,55	94,70	95,91	A (Sangat Baik)	3.985	SKM Online	1. Perilaku Petugas Pelayanan 2. Sarana Pendukung Pelayanan 3. Persyaratan	**Petugas** : Melakukan Evaluasi dan Pembinaan kepada Petugas Pelayanan. **Sarana Pendukung Pelayanan:** Berkoordinasi dengan Kelurahan untuk mengevaluasi Sarana Pelayanan yang ada dan mempersiapkan peningkatan Sarana Pelayanan. **Persyaratan:** Berkoordinasi dengan kelurahan dalam pembuatan pedoman layanan (SOP) pelayanan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan.	100%
		Rata-Rata Tahunan	96,37	96,87	96,50	96,80	96,47	96,32	96,10	96,77	95,72	96,44	A (Sangat Baik)	4.117	SKM Online	-	-	**100%**

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									/KM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
3	Kecamatan Pademangan	Semester I (Januri – Juni)	95, 38	98, 37	98, 68	99, 18	98, 76	98, 65	99, 21	99, 14	99, 09	98,50	A (Sangat Baik)	2.365	SKM Online	1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Kompetensi	**Persyaratan :** Peningkatan sosialisasi terkait persyaratan pelayanan. **Prosedur:** Mempermudah akses pelayanan **Kompetensi :** Memberikan Pelatihan kepada Petugas RT/RW	100%
		Semester II (Juli – Des)	98, 12	96, 28	97, 21	98, 06	98, 47	98, 46	98, 60	98, 78	98, 81	98,09	A (Sangat Baik)	2.242	SKM Online	1. Sistem Mekanisme Prosedur 2. Waktu Layanan 3. Biaya Layanan	**Prosedur** : Membuat prosedur layanan terbaru dengar memanfaatkan teknologi digital. **Waktu:** Melakukan sosialisasi terhadap warga terkait wakil pelayanan. **Biaya:** Melakukan sosialisasi terhadap warga terkait biaya pelayanan.	100%
		Rata-Rata Tahunan	96, 75	95, 82	97, 94	98, 62	98, 61	98, 55	98, 90	98, 96	98, 95	98,29	A (Sangat Baik)	2.303	SKM Online	-	-	**100%**

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									/KM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
4	Kecamatan Koja	Semester I (Januri – Juni)	98,58	98,55	98,62	98,66	98,61	98,59	98,65	98,65	98,61	98,61	A (Sangat Baik)	4.841	SKM Online	1. Prosedur 2. Persyaratan 3. Kompetensi	**Prosedur :** - Monitoring dan Evaluasi **Persyaratan :** - Sosialisasi - Monitoring dan Evaluasi **Kompetensi :** - Pembinaan dan Pelatihan - Monitoring dan Evaluasi	100%
		Semester II (Juli – Des)	97,83	97,96	97,85	98,03	97,88	97,95	97,97	97,98	97,85	97,92	A (Sangat Baik)	4.606	SKM Online	1. Persyaratan 2. Waktu 3. Produk	**Persyaratan :** Melakukan Sosialisasi **Waktu :** Monitoring dan Evaluasi **Produk :** Pelatihan khusus service excellent	100%
		Rata-Rata Tahunan	98,21	98,26	98,24	98,35	98,25	98,27	98,31	98,32	98,23	98,27	A (Sangat Baik)	4.723	SKM Online	-	-	**100%**

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									/KM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
5	Kecamatan Kelapa Gading	Semester I (Januri – Juni)	98, 65	98, 72	98, 50	98, 75	98, 70	98, 54	98, 71	98, 66	98, 75	98,66	A (Sangat Baik)	2.367	SKM Online	1. Jangka Waktu 2. Kompetensi 3. Persyaratan	**Jangka Waktu :** Pembinaan dan Sosialisasi **Kompetensi :** - Sosialisasi **Persyaratan :** - Monitoring dan Evaluasi	100%
		Semester II (Juli – Des)	98, 57	98, 58	98, 49	98, 56	98, 66	98, 60	98, 74	98, 73	98, 73	98,63	A (Sangat Baik)	2.216	SKM Online	1. Jangka Waktu 2. Biaya 3. Persyaratan	**Jangka Waktu :** Berkoordinasi dengan kelurahan untuk memberikan pembinaan atau sosialisasi kepada petugas agar lebih kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan agar tetap melakukan pengawasan di lapangan. **Biaya :** Berkoordinasi dengan kelurahan agar mensosialisasi-kan kepada tokoh masyarakat,	100%

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									/KM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
																	perwakilan masyarakat/pengguna layanan kelurahan terkait pemahaman semua pelayanan tidak dikenakan tarif (gratis). **Persyaratan :** Berkoordinasi dengan kelurahan dalam pembuatan pedoman layanan (SOP) pelayanan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan	
		Rata-Rata Tahunan	98,61	98,65	98,50	98,66	98,68	98,57	98,73	98,70	98,74	98,65	A (Sangat Baik)	2.291	SKM Online	-	-	**100%**

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									/KM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
6	Kecamatan Cilincing	Semester I (Januri – Juni)	97, 15	97, 21	97, 11	97, 19	97, 17	97, 25	97, 30	97, 24	97, 26	97,21	A (Sangat Baik)	5.786	SKM Online	1. Persyaratan 2. Jangka Waktu 3. Tarif/Biaya	**Persyaratan :** Sosialisasi kepada Petugas Pelayanan **Jangka Waktu :** - Sosialisasi - Pembinaan kepada petugas pelayanan **Tarif :** - Sosialisasi kepada Masyarakat	100%
		Semester II (Juli – Des)	96, 54	96, 69	96, 67	96, 87	96, 79	96, 75	96, 77	96, 80	96, 78	96,74	A (Sangat Baik)	5.085	SKM Online	1. Persyaratan 2. Waktu 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	**Persyaratan :** Melakukan koordinasi dgn kelurahan untuk melakukan sosialisasi kepada petugas pelayanan tentang Standar Prosedur Pelayanan (SOP).	100%

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									/KM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
																	Waktu : Melakukan Sosialisasi kepada petugas tentang waktu pelayanan efektif. **Sistem, Mekanisme dan Prosedur :** Melakukan Pembinaan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas dan kinerja petugas.	
		Rata-Rata Tahunan	96,84	96,95	96,89	97,03	96,98	97,00	97,04	97,02	97,02	96,98	A (Sangat Baik)	5.085	SKM Online	-	-	**100%**

No	OPD/Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur **									/KM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
7	IKM Kota Administrasi Jakarta Utara	Semester I (Januri – Juni)	97, 10	97, 73	97, 64	97, 93	97, 69	97, 60	98, 01	97, 85	97, 84	97,71	A (Sangat Baik)	25.216	SKM Online	1. Persyaratan 2. Kompetensi 3. Jangka Waktu	**Persyaratan :** Melakukan rapat evaluasi **Kompetensi :** Melakukan Pembinaan terhadap Kelurahan dan Kecamatan **Jangka Waktu :** Melakukan Monitoring dan Evaluasi	100%
		Semester II (Juli – Des)	97, 22	97, 05	97, 22	97, 49	97, 38	97, 50	97, 29	97, 62	97, 28	97,34	A (Sangat Baik)	24.117	SKM Online	1. Prosedur 2. Persyaratan 3. Waktu	**Prosedur :** Melakukan Pembinaan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas dan kinerja **Persyaratan :** Melakukan rapat evaluasi secara rutin kepada Kecamatan dan Kelurahan. **Waktu :** Melakukan Monitoring dan Evaluasi	1000/4
		Rata-Rata Tahunan	97, 16	97, 61	97, 43	97, 71	97, 53	97, 55	97, 65	97, 73	97, 56	97,52	A (Sangat Baik)	24.666	SKM Online	-	-	**100%**

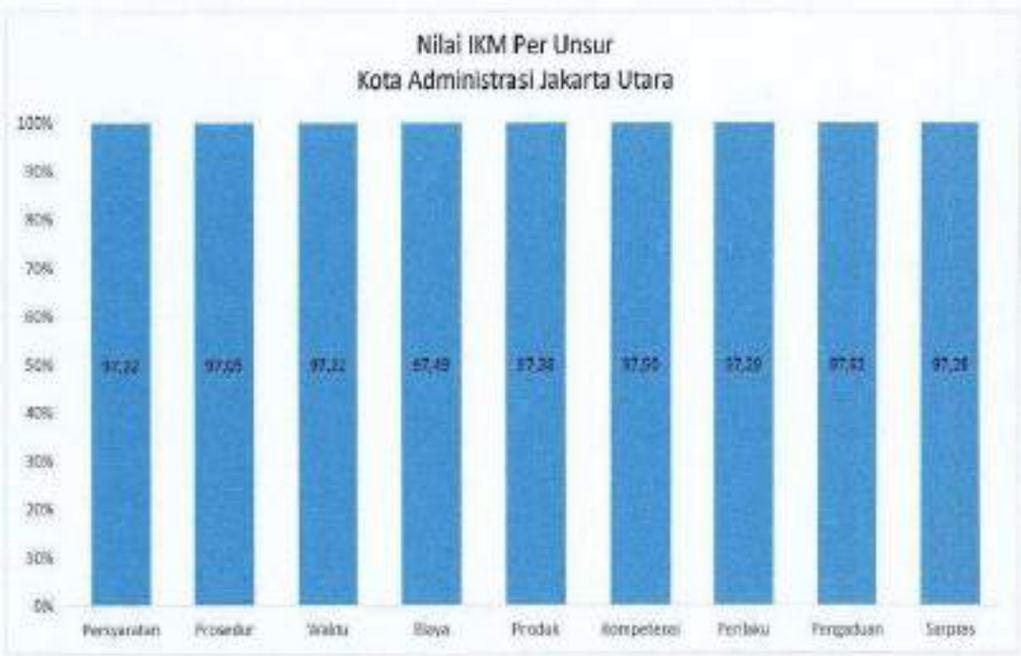

Gambar 3.1. Grafik Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Unsur Layanan Semester I dari tabel di atas adalah :

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh IKM Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I yaitu 97,71, dapat diketahui bahwa:

a. Tiga unsur layanan dengan **nilai terendah** yaitu :
   - a.1. Unsur Persyaratan dengan nilai 97,10;
   - a.2. Unsur Kompetensi dengan nilai 97,60;
   - a.3. Unsur Jangka Waktu dengan nilai 97,64.

b. Tiga unsur layanan dengan **nilai tertinggi** yaitu :
   - b.1. Unsur Tarif dengan nilai 97,93;
   - b.2. Unsur Pengaduan dengan nilai 97,85;
   - b.3. Unsur Pengaduan dengan nilai 97,84.

Unsur Layanan Semester II dari tabel di atas adalah :

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh IKM Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II yaitu 97,34, dapat diketahui bahwa:

a. Tiga unsur layanan dengan **nilai terendah** yaitu :
   a.1. Unsur Prosedur dengan nilai 97,05;
   a.2. Unsur Persyaratan dengan nilai 97,22;
   a.3. Unsur Jangka Waktu dengan nilai 97,22.

b. Tiga unsur layanan dengan **nilai tertinggi** yaitu :
   b.1. Unsur Biaya dengan nilai 97,49;
   b.2. Unsur Kompetensi dengan nilai 97,50;
   b.3. Unsur Pengaduan dengan nilai 97,62.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

a. Semester I :

- "Melakukan rapat evaluasi terhadap kecamatan dan kelurahan terkait dengan persyaratan pelayanan yang harus sesuai dengan standar pelayanan dan di publikasikan/sosialisasi kepada Masyarakat.
- Mengarahkan Kelurahan dan Kecamatan untuk menganggarkan peningkatan kompetensi petugas pelayanan.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan.

b. Semester II :

- Sosialisasi prosedur/pelayanan;
- Sosialisasi persyaratan/pelayanan;
- Lebih diperhatikan waktu penyelesaian pelayanan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Persyaratan dalam pelayanan masih menjadi kendala karena kurangnya sosialisasi dari kelurahan dan kecamatan kepada Masyarakat.
b. Masih terdapat petugas yang kurang cekatan dan kurang ramah dalam melayani masyarakat.
c. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh Masyarakat, layanan yang diberikan oleh petugas dirasakan oleh Masyarakat belum cepat tindaklanjutnya.

Tren Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan.

Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, dapat dilihat melalui grafik berikut :

Keterangan:
Nilai SKM Semester I 2024: 97,71
Nilai SKM Semester II 2024: 97,34

Gambar 3.2. Grafik Nilai SKM Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2018 - 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2024 di lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam melaksanakan tugas SKM selama Semester I (Januari s.d Juni 2024) dan Semester II (12 s.d 30 Agustus 2024) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM Semester I yaitu 97,10 dan nilai SKM Semester II yaitu 97,34. Nilai IKM di lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 s.d. 2024.

b. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan pada Semester II tahun 2024, Kelurahan yang termasuk 8 (Delapan) Kelurahan terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kelurahan Cilincing (95.07), Kelurahan Kalibaru (93,39), Kelurahan Marunda (96.09), Kelurahan Lagoa (91,49), Kelurahan Kamal Muara (94,70), Kelurahan Kapuk Muara (90,98), Kelurahan Sungai Bambu (93,89) dan Kelurahan Tanjung Priok (93,74).

c. Sedangkan 3 (Tiga) Kelurahan dengan nilai mencapai nilai tertinggi yaitu Kelurahan Pegangsaan Dua (100), Kelurahan Warakas (100), dan Kelurahan Semper Timur (99,99).

d. Dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Kelurahan Kata Administrasi Jakarta Utara, agar unsur pelayanan yang termasuk 3 (tiga) unsur terendah menjadi prioritas perbaikan dan untuk unsur pelayanan yang memperoleh unsur tertinggi agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan. inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

4) Capaian Indikator Kinerja Keempat :

Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

Indikator kinerja keempat ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN STRATEGIS						
4	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	92,30	96,38	104,42%	e-Sakip

Indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi melebihi target sebesar 96,38 dari target 92,30 sehingga capaian kinerja sebesar 104,42%. Sumber data dari e-SAKIP.

Pengukuran Kinerja :

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Definisi :

Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.

Metode Pengukuran :

Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota/ Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.

Sumber Data :

Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektivitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei.

Hal-hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

a. Hasil Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I Tahun 2024, dengan laporan:

a.1. Berdasarkan nota dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 677/PU.00 tanggal 28 Juni 2024 hal Laporan Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara.

a.2. Dasar hukum Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

a.3. Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara dimulai pada tanggal 27 Mei sampai dengan 7 Juni 2024.

a.4. Jumlah total responden Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 30 Responden dengan rincian :

a.4.1. 7 Responden untuk Koordinasi di bawah Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Jakarta Utara;

a.4.2. 11 Responden untuk Koordinasi di bawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Utara;

a.4.3. 12 Responden untuk Koordinasi di bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara.

a.5. Terdapat 6 (enam) tujuan survei yaitu :

a.5.1. Terukurnya kepuasan pelayanan koordinasi;

a.5.2. Teridentifikasi keluhan mitra koordinasi (Para Unit Kerja Perangkat Daerah);

a.5.3. Terpetakan kelebihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat memformulasikan rencana tindak lanjut dan perbaikannya;

a.5.4. Diperolehnya data pendukung untuk mendorong unit pelayanan koordinasi;

a.5.5. Diperolehnya data pendukung dalam penentuan kebijakan terkait pelayanan koordinasi;

a.5.6. Diperolehnya ukuran dasar dalam menilai pencapaian.

a.6. Standar penilaian Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

a.7. Rincian Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Semester I Tahun 2024 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan sasaran Kepala Suku Dinas dan Kepala Suku Badan pada masing-masing satuan kerja di bawah koordinasi Asisten Sekretaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Penilaian Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	100	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	100
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	96,43	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	96,43
WAKTU	100	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	100
BIAYA	96,43	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	96,43
PRODUK PELAYANAN	98,21	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	100
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	96,43

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
KOMPETENSI PELAKSANA	100	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	100
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	100
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	100
PERILAKU PELAKSANA	100	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	100
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	100
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	100	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	100
SARANA DAN PRASARANA	100	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	100
Indeks Kepuasan			**99,01**

Sumber : e-Monev Kota Administrasi Jakarta Utara, 2024

Tabel 3.7. Penilaian Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian dan Pembangunan

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	97,73	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	97,73
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	97,73	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	97,73
WAKTU	97,73	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	97,73
BIAYA	97,73	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	97,73
PRODUK PELAYANAN	96,59	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	97,73
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	95,45
KOMPETENSI PELAKSANA	96,97	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	95,45
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	97,73
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	97,73
PERILAKU PELAKSANA	93,18	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	97,73
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	88,64
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	93,18	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	93,18

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
SARANA DAN PRASARANA	97,73	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	97,73
Indeks Kepuasan			**96,51**

Sumber : e-Monev Kota Administrasi Jakarta Utara, 2024

Tabel 3.8. Penilaian Asisten Sekretaris Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	94,23	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	94,23
SISTEM, MEKANISME & PROSEDUR	92,31	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	92,31
WAKTU	94,23	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	94,23
BIAYA	98,08	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	98,08
PRODUK PELAYANAN	92,31	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	92,31
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	92,31
KOMPETENSI PELAKSANA	90,38	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	90,38
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	90,38
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	90,38
PERILAKU PELAKSANA	86,54	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	90,38
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	82,69
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	86,54	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	86,54
SARANA DAN PRASARANA	86,54	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	86,54
Indeks Kepuasan			**91,24**

Sumber : e-Monev Kota Administrasi Jakarta Utara, 2024

Tabel 3.9. Penilaian Indeks Efektivitas Koordinasi Jakarta Utara

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	97,32	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	97,32
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	95,49	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	95,49
WAKTU	97,32	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	97,32
BIAYA	97,41	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	97,41
PRODUK PELAYANAN	95,70	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	87,72
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	89,35
KOMPETENSI PELAKSANA	95,78	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	95,28
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	96,04
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	96,04
PERILAKU PELAKSANA	93,24	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	96,04
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	90,44
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	93,24	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	93,24
SARANA DAN PRASARANA	94,76	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	94,76
Indeks Kepuasan			**95,58**

Sumber : e-Monev Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, 2024

b. Hasil Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2024

b.1. Berdasarkan nota dinas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2448/PU.07.00 tanggal 30 Desember 2024 hal Laporan Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2024.

b.2. Dasar hukum Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

b.3. Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara dimulai pada tanggal 18 s.d. 29 November 2024.

b.4. Jumlah total responden Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 30 Responden dengan rincian :

b.4.1. 7 Responden untuk Koordinasi di bawah Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Jakarta Utara;

b.4.2. 11 Responden untuk Koordinasi di bawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Utara;

b.4.3. 12 Responden untuk Koordinasi di bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara.

b.5. Terdapat 6 (enam) tujuan survei yaitu :

b.5.1. Terukurnya kepuasan pelayanan koordinasi;

b.5.2. Teridentifikasi keluhan mitra koordinasi (Para Unit Kerja Perangkat Daerah);

b.5.3. Terpetakan kelebihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat memformulasikan rencana tindak lanjut dan perbaikannya;

b.5.4. Diperolehnya data pendukung untuk mendorong unit pelayanan koordinasi;

b.5.5. Diperolehnya data pendukung dalam penentuan kebijakan terkait pelayanan koordinasi;

b.5.6. Diperolehnya ukuran dasar dalam menilai pencapaian.

b.6. Standar penilaian Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,599	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,065 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,539 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

b.7. Rincian Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Semester II Tahun 2024 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan responden Kepala Suku Dinas dan Kepala Suku Badan di bawah koordinasi Asisten Sekretaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, adalah sebagai berikut:

No.	Koordinasi Asisten Sekretaris Kota	Indeks Kepuasan	Keterangan
1	Bidang Pemerintahan	99,27	Mutu A
2	Bidang Perekonomian dan Pembangunan	98,74	Mutu A
3	Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	93,18	Mutu A
Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Utara		**97,18**	**Mutu A**

b.8. Agregat Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 yaitu 96,38, dengan rincian sebagai berikut :

b.8.1. Semester I Nilai Indeks: 95,58;

b.8.2. Semester II Nilai Indeks: 97,18.

b.9. Rincian Hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Semester II Tahun 2024 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan sasaran Kepala Suku Dinas dan Kepala Suku Badan di bawah koordinasi Asisten Sekretaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10. Penilaian Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	100	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	100
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	100	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	100
WAKTU	100	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	100
BIAYA	100	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	100
PRODUK PELAYANAN	96,43	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	96,43
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	96,43

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
KOMPETENSI PELAKSANA	98,81	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	100
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	96,43
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	100
PERILAKU PELAKSANA	98,21	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	100
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	96,43
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	100	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	100
SARANA DAN PRASARANA	100	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	100
Indeks Kepuasan			**99,27**

Sumber : e-Monev Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, 2024

Tabel 3.11. Penilaian Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian dan Pembangunan

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	100,00	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	100,00
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	100,00	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	100,00
WAKTU	100,00	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	100,00
BIAYA	100,00	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	100,00
PRODUK PELAYANAN	98,86	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	100,00
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	90,91
KOMPETENSI PELAKSANA	97,73	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	97,73
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	97,73
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	97,73
PERILAKU PELAKSANA	96,59	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	97,73
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	95,45
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	97,73	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	97,73

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
SARANA DAN PRASARANA	97,73	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	97,73
Indeks Kepuasan			**98,74**

Sumber : e-Monev Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, 2024

Tabel 3.12. Penilaian Asisten Sekretaris Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	95,83	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	95,83
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	93,75	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	93,75
WAKTU	91,67	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	91,67
BIAYA	93,75	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	93,75
PRODUK PELAYANAN	94,79	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	93,75
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	95,83
KOMPETENSI PELAKSANA	93,05	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	93,75
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	95,83
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	91,67
PERILAKU PELAKSANA	90,63	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	91,67
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	89,58
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	93,75	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	93,75
SARANA DAN PRASARANA	93,75	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	93,75
Indeks Kepuasan			**93,52**

Sumber : e-Monev Kota Administrasi Jakarta Utara, 2024

Tabel 3.13. Penilaian Indeks Efektivitas Koordinasi Jakarta Utara

INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	VARIABEL	NILAI VARIABEL
PERSYARATAN PELAYANAN	98,61	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	98,61
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	97,92	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	97,92
WAKTU	97,22	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	97,22
BIAYA	97,92	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	97,92
PRODUK PELAYANAN	96,69	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	96,73
		Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati Bersama	96,66
KOMPETENSI PELAKSANA	96,76	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	97,16
		Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	96,66
		Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	96,46
PERILAKU PELAKSANA	95,14	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	96,46
		Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	93,82
PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	97,16	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	97,16
SARANA DAN PRASARANA	94,28	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	94,28
Indeks Kepuasan			**97,18**

Sumber : e-Monev Kota Administrasi Jakarta Utara, 2024

5) Capaian Indikator Kinerja Kelima :

Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir

Indikator kinerja kelima ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang ketiga yaitu Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota. Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN STRATEGIS						
5	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Waduk	Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B06	100%

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir di Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari e-Monev KSD.

Pengukuran Kinerja :

Metode Pengukuran :

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir.

KEGIATAN SUB KSD24B1K3S1RA761 :

SUB KSD TA24-B06

Nama Renaksi : Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Waduk

Penanggung Jawab : Kota Administrasi Jakarta Utara

Kriteria Keberhasilan : Terbitnya SK Walikota u/ Penetapan Loksem di Waduk Sunter Selatan

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Dinas Sumber Daya Air, Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kota Administrasi Jakarta Utara telah membuat surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0060 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Sementara (Loksem) Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) Danau Sunter di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, yang isinya antara lain :

a. Dalam rangka mencegah dampak negatif atas pemanfaatan prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya, serta untuk meningkatkan pembinaan terhadap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu adannya penetapan lokasi Usaha Mikro PKL, agar terciptanya ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
b. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi Jakarta Utara serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1381/KU.00 Tanggal 30 November 2023 Perihal Pelaksanaan Program Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara telah diusulkan penetapan Lokasi PKL di Danau Sunter yang telah disetujui.
c. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara :
   c.1. Mengeluarkan Tanda Daftar Usaha (TDU) bagi setiap pedagang yang menempati Lokasi Sementara (Loksem) Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL).
   c.2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap para pedagang di Lokasi Sementara (Loksem) Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL).
   c.3. Melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk membayar retribusi melalui Bank DKI.

d. Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) berkewajiban :

d.1. Menempatkan dan Menyusun barang dagangan secara teratur pada batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan.

d.2. Memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

d.3. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.

d.4. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d.5. Menyerahkan tempat usaha atau Lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apa pun, apabila Lokasi usaha tidak ditempati selama 1 satu bulan atau sewaktu-waktu Lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

d.6. Menempati tempat atau Lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai Tanda Daftar Usaha (TDU) yang dimiliki Pedagang Kaki Lima (PKL).

e. Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) dilarang mengubah bentuk dan fungsi tempat usaha, memperdagangkan barang terlarang, melakukan perbuatan asusila di tempat usaha dan melakukan transaksi perdagangan pada prasarana, sarana dan utilitas umum.

f. Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dihapus/dicabut kembali sebelum batas waktunya apabila prasarana/ sarana kota tersebut akan digunakan untuk kepentingan Provinsi DKI Jakarta dan/atau apabila mengganggu ketertiban umum dan meresahkan Masyarakat tanpa persetujuan dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lokasi usaha dimaksud.

g. Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) yang lokasinya dihapuskan/dibatalkan tidak memperoleh penggantian dalam bentuk adapun.

6) Capaian Indikator Kinerja Keenam :

Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Indikator kinerja keenam ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang keempat yaitu Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial. Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN STRATEGIS						
6	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
1	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B03 TA24-B06 TA24-B09 TA24-B012	100% 100% 100% 100%

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari e-Monev KSD.

Pengukuran Kinerja :

Metode Pengukuran :

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

KEGIATAN SUB KSD24B4K10RA13 :

SUB KSD TA24-B03

Kriteria Keberhasilan : Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Biro Kesejahteraan Sosial, Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian Dan Keuangan, Badan Pendapatan Daerah, Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup.

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0160/PU.04.00 tanggal 20 Maret 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut rencana aksi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat pada Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 untuk target B-03, dilaporkan terdapat sebanyak 3 (tiga) Sub Kegiatan dan 6 (enam) Rencana Aksi Penunjang yang diampu oleh Kota Administrasi Jakarta Utara beserta jajarannya yang terkait penanggulangan kemiskinan dan tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026.

b. Detail terkait progres pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang sebagaimana telah diunggah dalam pranala berikut https://bit.ly/KK_BiroPemerintahan.

c. Progres Pelaksanaan Sub Kegiatan Dan Rencana Aksi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Triwulan I Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14. Progres Pelaksanaan Sub Kegiatan Dan Rencana Aksi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Triwulan I Tahun 2024

No	Level	Nomenklatur Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Satuan	Target Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan I	Realisasi Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan I	Keterangan
1	Sub Kegiatan	a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pakmas/ Ormas	5.557	5.557	
2	Sub Kegiatan	b. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasya-rakatan	34	34	
3	Sub Kegiatan	c. Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kata Administrasi	Dokumen	2	2	
4	Rencana Aksi Penunjang	a. Pemberian Makan Tambahan Balita dalam rangka penyuluhan Penanggulangan Balita Stunting	Jumlah Balita	76.101	76.101	
5	Rencana Aksi Penunjang	b. Penyusunan konsep penanganan stunting di Wilayah dalam rangka membangun Ketahanan Keluarga	Konsep	0	0	Triwulan IV
6	Rencana Aksi Penunjang	c. Panduan kolaborasi pentahelix antara Pemerintah dengan Organisasi/Mitra yang inklusif dan partisipatif khususnya untuk saling gotong royong menurunkan angka stunting	Panduan	0	0	Triwulan IV
7	Rencana Aksi Penunjang	d. Penyusunan Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Konvergensi Program dalam Rangka Membangun Ketahanan Keluarga	Laporan	0	0	Triwulan II dan IV

No	Level	Nomenklatur Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Satuan	Target Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan I	Realisasi Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan I	Keterangan
8	Rencana Aksi Penunjang	e. Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program "Masa Depan Jakarta" berupa bantuan biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa	Laporan	1	1	
9	Rencana Aksi Penunjang	f. Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program Bedah Rumah untuk menciptakan rumah layak huni bagi Masyarakat	Laporan	0	0	Triwulan II dan IV

Keterangan:

a. Seluruh sub kegiatan dan rencana aksi penunjang yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 untuk target tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PD/UKPD pada sektor terkait.

   Akses dokumen RPKD dapat dilakukan melalui: https://jdih.jakarta.go.id/dokumenPeraturanDirectory/0031/2023KEPGUB0031862.pdf.

   Matriks Program Prioritas yang memuat daftar sub kegiatan dan rencana aksi penunjang dalam format MS Excel dapat diakses melalui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eByVNIziadsuvRMQaUDDbXM1ajikpDJw/edit#gid=140551678.

b. Program penanggulangan kemiskinan (sub kegiatan dan rencana aksi penunjang) yang memiliki sasaran rumah tangga, keluarga, dan/atau individu berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diprioritaskan pada kelompok kesejahteraan terendah sesuai ketersediaan kuota.

   DTKS yang telah dipadankan dengan data sesuai kebutuhan (prioritas pada kelompok kesejahteraan terendah) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

b.1. Kepala Perangkat Daerah (Pemohon) bersurat kepada Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta u.p. Sekretariat SDI Provinsi dan tembusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

b.2. Sekretariat SDI Provinsi mengadakan rapat terkait permohonan data tersebut. Adapun muatan pembahasan meliputi namun tidak terbatas pada:

- Pemohon memaparkan kebutuhan data
- Diskominfotik menampilkan data-data sesuai kebutuhan Pemohon
- Forum memberikan tanggapan terkait kebutuhan Pemohon
- Forum menyepakati elemen data dan jumlah baris data yang dapat diberikan kepada Pemohon.

b.3. Hasil dari rapat tersebut akan dibuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Sekretariat SDI Provinsi, Pemohon, dan Dinas Sosial selaku Produsen Data.

b.4. Diskominfotik memfasilitasi penyerahan data kepada Pemohon.

c. Pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang agar berorientasi pada pencapaian output dan outcome.

Contoh:

- Untuk sub kegiatan pelatihan agar dipastikan pelatihan dapat terlaksana sesuai target, dan lebih lanjut diidentifikasi jumlah peserta pelatihan yang telah bekerja, dsb.
- Untuk rencana aksi penunjang terkait penyusunan konsep pemberdayaan masyarakat yang memiliki kendala perolehan data pada Triwulan 1 (B03), agar dipastikan kendala tersebut dapat di atasi atau diminimalisir pada periode berikutnya.

KEGIATAN SUB KSD24B4K10RA13 :

SUB KSD TA24-B06

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0302/PU.04.00 tanggal 12 Juni 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut rencana aksi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat pada Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 untuk target B-06, dilaporkan terdapat sebanyak 3 (tiga) Sub Kegiatan dan 6 (enam) Rencana Aksi Penunjang yang diampu oleh Kota Administrasi Jakarta Utara beserta jajarannya yang terkait penanggulangan kemiskinan dan tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 s.d. 2026.
b. Detail terkait progres pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang sebagaimana telah diunggah dalam pranala berikut https://bit.ly/KK_BiroPemerintahan.
c. Progres Pelaksanaan Sub Kegiatan Dan Rencana Aksi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15. Progres Pelaksanaan Sub Kegiatan Dan Rencana Aksi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Triwulan II Tahun 2024

No	Level	Nomenklatur Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Satuan	Target Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan II	Realisasi Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan II	Keterangan
1	Sub Kegiatan	a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pakmas/ Ormas	5.557	5.557	
2	Sub Kegiatan	b. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasya-rakatan	34	34	

No	Level	Nomenklatur Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Satuan	Target Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan II	Realisasi Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan II	Keterangan
3	Sub Kegiatan	c. Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kata Administrasi	Dokumen	2	2	
4	Rencana Aksi Penunjang	a. Pemberian Makan Tambahan Balita dalam rangka penyuluhan Penanggulangan Balita Stunting	Jumlah Balita	76.101	76.101	
5	Rencana Aksi Penunjang	b. Penyusunan konsep penanganan stunting di Wilayah dalam rangka membangun Ketahanan Keluarga	Konsep	0	0	Triwulan IV
6	Rencana Aksi Penunjang	c. Panduan kolaborasi pentahelix antara Pemerintah dengan Organisasi/Mitra yang inklusif dan partisipatif khususnya untuk saling gotong royong menurunkan angka stunting	Panduan	0	0	Triwulan IV
7	Rencana Aksi Penunjang	d. .Penyusunan Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Konvergensi Program dalam Rangka Membangun Ketahanan Keluarga	Laporan	0	0	Triwulan II dan IV
8	Rencana Aksi Penunjang	e. Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program "Masa Depan Jakarta" berupa bantuan biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa	Laporan	1	1	
9	Rencana Aksi Penunjang	f. Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program Bedah Rumah untuk menciptakan rumah layak huni bagi Masyarakat	Laporan	0	0	Triwulan II dan IV

Keterangan:

a. Seluruh sub kegiatan dan rencana aksi penunjang yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 untuk target tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PD/UKPD pada sektor terkait.

Akses dokumen RPKD dapat dilakukan melalui: https://jdih.jakarta.go.id/dokumenPeraturanDirectory/0031/2023KEPGUB0031862.pdf.

Matriks Program Prioritas yang memuat daftar sub kegiatan dan rencana aksi penunjang dalam format MS Excel dapat diakses melalui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eByVNIziadsuvRMQaUDDbXM1ajikpDJw/edit#gid=140551678.

b. Program penanggulangan kemiskinan (sub kegiatan dan rencana aksi penunjang) yang memiliki sasaran rumah tangga, keluarga, dan/atau individu berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diprioritaskan pada kelompok kesejahteraan terendah sesuai ketersediaan kuota.

   DTKS yang telah dipadankan dengan data sesuai kebutuhan (prioritas pada kelompok kesejahteraan terendah) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

   b.1. Kepala Perangkat Daerah (Pemohon) bersurat kepada Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta u.p. Sekretariat SDI Provinsi dan tembusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

   b.2. Sekretariat SDI Provinsi mengadakan rapat terkait permohonan data tersebut. Adapun muatan pembahasan meliputi namun tidak terbatas pada:
   - Pemohon memaparkan kebutuhan data
   - Diskominfotik menampilkan data-data sesuai kebutuhan Pemohon
   - Forum memberikan tanggapan terkait kebutuhan Pemohon
   - Forum menyepakati elemen data dan jumlah baris data yang dapat diberikan kepada Pemohon.

   b.3. Hasil dari rapat tersebut akan dibuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Sekretariat SDI Provinsi, Pemohon, dan Dinas Sosial selaku Produsen Data.

   b.4. Diskominfotik memfasilitasi penyerahan data kepada Pemohon.

c. Pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang agar berorientasi pada pencapaian output dan outcome.

Contoh:

- Untuk sub kegiatan pelatihan agar dipastikan pelatihan dapat terlaksana sesuai target, dan lebih lanjut diidentifikasi jumlah peserta pelatihan yang telah bekerja, dsb.
- Untuk rencana aksi penunjang terkait penyusunan konsep pemberdayaan masyarakat yang memiliki kendala perolehan data pada Triwulan 1 (B03), agar dipastikan kendala tersebut dapat di atasi atau diminimalisir pada periode berikutnya.

KEGIATAN SUB KSD24B4K10RA13 :

SUB KSD TA24-B09

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0484/PU.04.00 tanggal 17 September 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut rencana aksi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat pada Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 untuk target B-09, dilaporkan terdapat sebanyak 3 (tiga) Sub Kegiatan dan 6 (enam) Rencana Aksi Penunjang yang diampu oleh Kota Administrasi Jakarta Utara beserta jajarannya yang terkait penanggulangan kemiskinan dan tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 s.d. 2026.
b. Detail terkait progres pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang sebagaimana telah diunggah dalam pranala berikut https://bit.ly/KK_BiroPemerintahan.
c. Progres Pelaksanaan Sub Kegiatan Dan Rencana Aksi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Triwulan III Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16. Progres Pelaksanaan Sub Kegiatan Dan Rencana Aksi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Triwulan III Tahun 2024

No	Level	Nomenklatur Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Satuan	Target Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan III	Realisasi Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan III	Keterangan
1	Sub Kegiatan	a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pakmas/ Ormas	5.557	5.557	
2	Sub Kegiatan	b. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasya-rakatan	34	34	
3	Sub Kegiatan	c. Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kata Administrasi	Dokumen	2	2	
4	Rencana Aksi Penunjang	a. Pemberian Makan Tambahan Balita dalam rangka penyuluhan Penanggulangan Balita Stunting	Jumlah Balita	76.101	76.101	
5	Rencana Aksi Penunjang	b. Penyusunan konsep penanganan stunting di Wilayah dalam rangka membangun Ketahanan Keluarga	Konsep	0	0	Triwulan IV
6	Rencana Aksi Penunjang	c. Panduan kolaborasi pentahelix antara Pemerintah dengan Organisasi/Mitra yang inklusif dan partisipatif khususnya untuk saling gotong royong menurunkan angka stunting	Panduan	0	0	Triwulan IV
7	Rencana Aksi Penunjang	d. Penyusunan Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Konvergensi Program dalam Rangka Membangun Ketahanan Keluarga	Laporan	0	0	Triwulan II dan IV
8	Rencana Aksi Penunjang	e. Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program "Masa Depan Jakarta" berupa bantuan biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa	Laporan	1	1	
9	Rencana Aksi Penunjang	f. Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program Bedah Rumah untuk menciptakan rumah layak huni bagi Masyarakat	Laporan	0	0	Triwulan II dan IV

Keterangan:

a. Seluruh sub kegiatan dan rencana aksi penunjang yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 untuk target tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PD/UKPD pada sektor terkait.

   Akses dokumen RPKD dapat dilakukan melalui: https://jdih.jakarta.go.id/dokumenPeraturanDirectory/0031/2023KEPGUB0031862.pdf.

   Matriks Program Prioritas yang memuat daftar sub kegiatan dan rencana aksi penunjang dalam format MS Excel dapat diakses melalui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eByVNIziadsuvRMQaUDDbXM1ajikpDJw/edit#gid=140551678.

b. Program penanggulangan kemiskinan (sub kegiatan dan rencana aksi penunjang) yang memiliki sasaran rumah tangga, keluarga, dan/atau individu berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diprioritaskan pada kelompok kesejahteraan terendah sesuai ketersediaan kuota.

   DTKS yang telah dipadankan dengan data sesuai kebutuhan (prioritas pada kelompok kesejahteraan terendah) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

   b.1. Kepala Perangkat Daerah (Pemohon) bersurat kepada Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta u.p. Sekretariat SDI Provinsi dan tembusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

   b.2. Sekretariat SDI Provinsi mengadakan rapat terkait permohonan data tersebut. Adapun muatan pembahasan meliputi namun tidak terbatas pada:

   - Pemohon memaparkan kebutuhan data
   - Diskominfotik menampilkan data-data sesuai kebutuhan Pemohon
   - Forum memberikan tanggapan terkait kebutuhan Pemohon
   - Forum menyepakati elemen data dan jumlah baris data yang dapat diberikan kepada Pemohon.

b.3. Hasil dari rapat tersebut akan dibuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Sekretariat SDI Provinsi, Pemohon, dan Dinas Sosial selaku Produsen Data.

b.4. Diskominfotik memfasilitasi penyerahan data kepada Pemohon.

c. Pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang agar berorientasi pada pencapaian output dan outcome.

Contoh:

- Untuk sub kegiatan pelatihan agar dipastikan pelatihan dapat terlaksana sesuai target, dan lebih lanjut diidentifikasi jumlah peserta pelatihan yang telah bekerja, dsb.
- Untuk rencana aksi penunjang terkait penyusunan konsep pemberdayaan masyarakat yang memiliki kendala perolehan data pada Triwulan 1 (B03), agar dipastikan kendala tersebut dapat di atasi atau diminimalisir pada periode berikutnya.

KEGIATAN SUB KSD24B4K10RA13 :

SUB KSD TA24-B12

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0641/PU.04.00 tanggal 16 Desember 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut rencana aksi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat pada Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 untuk target B-09, dilaporkan terdapat sebanyak 3 (tiga) Sub Kegiatan dan 6 (enam) Rencana Aksi Penunjang yang diampu oleh Kota Administrasi Jakarta Utara beserta jajarannya yang terkait penanggulangan kemiskinan dan tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 s.d. 2026.

b. Detail terkait progres pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang sebagaimana telah diunggah dalam pranala berikut https://bit.ly/KK_BiroPemerintahan.

c. Progres Pelaksanaan Sub Kegiatan Dan Rencana Aksi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Triwulan IV Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17. Progres Pelaksanaan Sub Kegiatan Dan Rencana Aksi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Triwulan IV Tahun 2024

No	Level	Nomenklatur Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Satuan	Target Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan IV	Realisasi Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan IV	Keterangan
1	Sub Kegiatan	c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pakmas/ Ormas	5.557	5.557	
2	Sub Kegiatan	d. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasya-rakatan	34	34	
3	Sub Kegiatan	c. Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kata Administrasi	Dokumen	2	2	
4	Rencana Aksi Penunjang	d. Pemberian Makan Tambahan Balita dalam rangka penyuluhan Penanggulangan Balita Stunting	Jumlah Balita	76.101	76.101	
5	Rencana Aksi Penunjang	e. Penyusunan konsep penanganan stunting di Wilayah dalam rangka membangun Ketahanan Keluarga	Konsep	0	0	Triwulan IV
6	Rencana Aksi Penunjang	c. Panduan kolaborasi pentahelix antara Pemerintah dengan Organisasi/Mitra yang inklusif dan partisipatif khususnya untuk saling gotong royong menurunkan angka stunting	Panduan	0	0	Triwulan IV
7	Rencana Aksi Penunjang	d. Penyusunan Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Konvergensi Program dalam Rangka Membangun Ketahanan Keluarga	Laporan	0	0	Triwulan II dan IV

No	Level	Nomenklatur Sub Kegiatan dan Rencana Aksi Penunjang	Satuan	Target Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan IV	Realisasi Kinerja RPKD Tahun 2024 per Triwulan IV	Keterangan
8	Rencana Aksi Penunjang	e. Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program "Masa Depan Jakarta" berupa bantuan biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa	Laporan	1	1	
9	Rencana Aksi Penunjang	f. Kolaborasi dengan BASNAZ dalam melaksanakan program Bedah Rumah untuk menciptakan rumah layak huni bagi Masyarakat	Laporan	0	0	Triwulan II dan IV

Keterangan:

a. Seluruh sub kegiatan dan rencana aksi penunjang yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 untuk target tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PD/UKPD pada sektor terkait.

   Akses dokumen RPKD dapat dilakukan melalui: https://jdih.jakarta.go.id/dokumenPeraturanDirectory/0031/2023KEPGUB0031862.pdf.

   Matriks Program Prioritas yang memuat daftar sub kegiatan dan rencana aksi penunjang dalam format MS Excel dapat diakses melalui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eByVNIziadsuvRMQaUDDbXM1ajikpDJw/edit#gid=140551678.

b. Program penanggulangan kemiskinan (sub kegiatan dan rencana aksi penunjang) yang memiliki sasaran rumah tangga, keluarga, dan/atau individu berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diprioritaskan pada kelompok kesejahteraan terendah sesuai ketersediaan kuota.

   DTKS yang telah dipadankan dengan data sesuai kebutuhan (prioritas pada kelompok kesejahteraan terendah) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

b.1. Kepala Perangkat Daerah (Pemohon) bersurat kepada Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta u.p. Sekretariat SDI Provinsi dan tembusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

b.2. Sekretariat SDI Provinsi mengadakan rapat terkait permohonan data tersebut. Adapun muatan pembahasan meliputi namun tidak terbatas pada:

- Pemohon memaparkan kebutuhan data
- Diskominfotik menampilkan data-data sesuai kebutuhan Pemohon
- Forum memberikan tanggapan terkait kebutuhan Pemohon
- Forum menyepakati elemen data dan jumlah baris data yang dapat diberikan kepada Pemohon.

b.3. Hasil dari rapat tersebut akan dibuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Sekretariat SDI Provinsi, Pemohon, dan Dinas Sosial selaku Produsen Data.

b.4. Diskominfotik memfasilitasi penyerahan data kepada Pemohon.

c. Pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang agar berorientasi pada pencapaian output dan outcome.

Contoh:

- Untuk sub kegiatan pelatihan agar dipastikan pelatihan dapat terlaksana sesuai target, dan lebih lanjut diidentifikasi jumlah peserta pelatihan yang telah bekerja, dsb.
- Untuk rencana aksi penunjang terkait penyusunan konsep pemberdayaan masyarakat yang memiliki kendala perolehan data pada Triwulan 1 (B03), agar dipastikan kendala tersebut dapat di atasi atau diminimalisir pada periode berikutnya.

7) **Capaian Indikator Kinerja Ketujuh :**

Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya

Indikator kinerja ketujuh ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kelima yaitu Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit. Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN STRATEGIS						
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
1	Penyelesaian Trotoar Complete Street Di Provinsi DKI Jakarta	Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B06	100%

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya di Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari e-Monev KSD.

Pengukuran Kinerja :

Metode Pengukuran :

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya.

KEGIATAN SUB KSD24B3K8S19 :

SUB KSD TA24-B06

Kriteria Keberhasilan : Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembangunan dan terbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPR/IPPT di sekitar lokasi pembangunan trotoar.

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Target Capaian :

- Terbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPR/IPPT di sekitar lokasi pembangunan trotoar (Mei 2024).
- Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi pembangunan trotoar dan kelengkapannya (Juni 2024).

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Target B-06 KSD Nomor e-0198/PU.10.00 tanggal 23 April 2024

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Target B-06 KSD tentang Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Rencana Aksi Penyelesaian Complete Street di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0198/PU.10.01 tanggal 23 April 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2024 tentang Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Perkotaan Sub Kegiatan Strategis Daerah Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya Rencana Aksi Penyelesaian Complete Street di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :
    1. Bahwa salah satu target Rencana Aksi Penyelesaian Complete Street terbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPT/IPPR di sekitar pembangunan trotoar;
    2. Bahwa lokasi penataan trotoar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang menjadi Rencana Aksi KSD Penyelesaian Complete Street terletak di Jalan Kapuk Kamal Raya Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan kriteria keberhasilan terbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPR/IPPT di sekitar lokasi Pembangunan trotoar;
    3. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Utara telah melaksanakan pendataan (inventarisasi) dan penelitian melalui Sistem Penataan Ruang Jakarta (SIPRAJA) terkait keberadaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) di Jalan Kapuk Kamal Raya Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
    4. Bahwa berdasarkan hasil penelitian lokasi untuk penataan trotoar yang terletak di sekitar area Jalan Kapuk Kamal Raya Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak terdapat Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Lokasi tersebut sudah merupakan aset yang tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kode Barang 131010307002 dan Registrasi 000257 seluas 22.848 m² serta tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) D Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kode Barang 134010102001 dan Registrasi 000303 seluas 16.320 m².

SUB KSD TA24-B06

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Target B-06 KSD Nomor e-0306/PU.10.00 tanggal 13 Juni 2024

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Target B-06 KSD tentang Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0306/PU.10.00 tanggal 13 Juni 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2024 tentang Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Perkotaan Sub Kegiatan Strategis Daerah Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya Rencana Aksi Penyelesaian Complete Street di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu target Rencana Aksi Penyelesaian *Complete Street* adalah terfasilitasinya kegiatan Sosialisasi pembangunan trotoar dan kelengkapannya;
2. Bahwa lokasi penataan trotoar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang menjadi Rencana Aksi KSD Penyelesaian *Complete Street* terletak di Jalan Kapuk Kamal Raya Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Terkait kegiatan sosialisasi penataan trotoar di atas dengan ini dilaporkan :
   a) Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan surat kepada Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor e-0212/PU.10.00, tanggal 3 Mei 2024 Hal Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan Trotoar Jalan Kapuk Kamal Raya Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.
   b) Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara telah menjawab Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Surat Nomor 1395/-KK.02, Hal Balasan Surat Sosialisasi Pembangunan Trotoar Jalan Kapuk Kamal Raya. Dalam surat tersebut disampaikan :
      - Bahwa pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi antar UKPD dan stakeholder akan dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 6 Juni 2024;
      - Pelaksanaan sosialisasi kepada Masyarakat akan dilaksanakan Bersama Penyedia Jasa Konstruksi sebelum pelaksanaan Pembangunan trotoar dimulai, dengan berkoordinasi Bersama Camat dan Lurah;

- Pemilihan Penyedia akan dilaksanakan pada Bulan Juli 2024, dan Pembangunan trotoar akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024.

4. Telah dilaksanakan Sosialisasi dan koordinasi membahas pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap di Jalan Kapuk Kamal Raya pada tanggal 6 Juni 2024 bertempat di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

8) Capaian Indikator Kinerja Kedelapan :

Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu

Indikator kinerja ketujuh ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang keenam yaitu Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota. Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN STRATEGIS						
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
1	Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai	Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B03	100%

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu di Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari e-Monev KSD.

Pengukuran Kinerja :

Metode Pengukuran :

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu.

KEGIATAN SUB KSD24B3K2RA765 :

SUB KSD TA24-B03

Kriteria Keberhasilan : Pendataan estimasi jumlah KK terdampak pembangunan tanggul NCICD Klaster Muara Angke.

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian, Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

Target Capaian :

Pendataan estimasi jumlah KK terdampak pembangunan tanggul NCICD Klaster Muara Angke disampaikan ke Biro PLH dan ditembuskan ke DPRKP dan DSDA (Maret).

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan KSD B.03 pendataan KK terdampak pembangunan tanggul NCICD Klaster Muara Angke di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0163/PU.04.00 tanggal 22 Maret 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut Kegiatan Strategis Daerah (KSD) B.03 Kegiatan Penanggulangan Banjir dan Rob dengan kriteria keberhasilan pendataan estimasi jumlah Kepala Keluarga (KK) terdampak pembangunan tanggul NCICD klaster Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan tanggul NCICD klaster Kali Adem Kelurahan Muara Angke direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026 oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Terlaksananya rapat koordinasi bersama dengan UKPD/SKPD terkait pada tanggal 6 Maret 2024 bertempat di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara yang membahas pendataan estimasi jumlah Kepala Keluarga (KK) terdampak pembangunan tanggul NCICD klaster Muara Angke;
3. Lokasi rencana pembangunan tanggul NCICD Muara Angke adalah merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat di dalam KIB. A Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
4. Terdapat sejumlah bangunan yang ditempati oleh Kepala Keluarga (KK) di sepanjang bantaran kali Adem Muara Angke di RW. 01, RW. dan RW. 22;
5. Lurah Kelurahan Pluit beserta jajaran telah melaksanakan pendataan Kepala Keluarga (KK) di lokasi yang dimaksud berdasarkan trase yang disampaikan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Dari hasil pendataan tersebut, terdapat 576 Kepala Keluarga (KK) sesuai dengan surat Lurah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 112/pu.04.00 tanggal 21 Maret 2024 hal Data Warga Terdampak Pembangunan Tanggul.

9) Capaian Indikator Kinerja Kesembilan :

Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati

Indikator kinerja ketujuh ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang ketujuh yaitu Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat. Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Adm Jakarta Utara.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN STRATEGIS						
7	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
1	Penataan RW kumuh sebagai pilot project Penataan Kawasan	Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B06 TA24-B12	100% 100%
2	Implementasi Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan	Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B03 TA24-B06 TA24-B09 TA24-B12	100% 100% 100% 100%
3	Implementasi Hasil Kajian Penataan Kawasan	Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B06 TA24-B12	100% 100%

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati di Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari e-Monev KSD.

Pengukuran Kinerja :

Metode Pengukuran :

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati.

A. KEGIATAN SUB KSD24B3K20RA32 :

Kriteria Keberhasilan : Penataan RW Kumuh sebagai *Pilot Project* di Kelurahan Pegangsaan Dua RW 03.

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian, Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perumda Pasar Jaya, Biro Pemerintahan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

Target Capaian :

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di Jakarta Utara.

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
1	Penataan RW kumuh sebagai pilot project Penataan Kawasan	Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B06 TA24-B12	100% 100%

SUB KSD TA24-B06

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan Nota Dinas Laporan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) B06 Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di Kelurahan Pegangsaan Dua RW 03 kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0008/PU.04.00 tanggal 21 Juni 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 806 Peningkatan Kualitas lnfrastruktur dan Layanan Perkotaan dengan Rencana Aksi Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project Penataan Kawasan. Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :
   1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penataan Kawasan yang di Koordinasikan oleh Walikota/Bupati dengan rencana aksi Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project Penataan Kawasan pada hari Kamis, 7 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Kota I Lantai 2 Gedung Blok P Kantor Walikota Jakarta Utara.
   2. Dilanjutkan dengan peninjauan lapangan bersama dengan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait pada hari Selasa, 28 Mei 2024. Adapun lokasi penataan kawasan RW Kumuh berada di RW 03 / RT 03 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.
   3. Lokasi yang dimaksud berada di bantaran kali cakung lama dengan kondisi kali yang menyempit dan rawan longsor. Di saat hujan sering terjadi banjir diakibatkan oleh meluapnya air dikali tersebut.

4. Sehubungan dengan poin ke 3 di atas, dapat dilaporkan bahwa sampai dengan saat ini kegiatan Collaborative Implementation Program (CIP) di lokasi yang dimaksud (pembangunan jalan dan saluran) belum bisa dilaksanakan. Hal tersebut diakibatkan karena di lokasi dibutuhkan untuk dibangun turap terlebih dahulu untuk menghindari erosi.
5. Sesuai dengan informasi dari Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kata Administrasi Jakarta Utara, bahwa Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan membangun turap sepanjang ±200 meter di lokasi yang dimaksud pada tahun 2024. Dan untuk pembangunan jalan akan dilaksanakan di tahun 2025 (menunggu kepastian pembangunan turap).
6. Sebagai pemenuhan laporan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) untuk Triwulan II Tahun 2024, titik yang akan digunakan sebagai lokasi penataan kawasan RW Kumuh berada di RW 03 / RT 07. Di mana pinggiran kali sudah dibuat turap sepanjang ± 150 meter dengan swadaya masyarakat.
7. Untuk selanjutnya akan dilakukan Peninggian turap oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Kata Administrasi Jakarta Utara dan Peninggian Jalan oleh Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kata Administrasi Jakarta Utara.

SUB KSD TA24-B12

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan Nota Dinas Laporan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) B12 Penataan RW Kumuh sebagai *Pilot Project* di Kelurahan Pegangsaan Dua RW 03 kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0639/PU.04.00 tanggal 13 Desember 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut Kegiatan Strategis Daerah (KSD) B12 Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Perkotaan dengan Rencana Aksi Penataan RW Kumuh sebagai *Pilot Project* Penataan Kawasan. Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Lokasi Penataan RW Kumuh sebagai *Pilot Project* Penataan Kawasan adalah yang beririsan dengan Program Penataan Kawasan Kelurahan, program *Community Action Plan* (CAP) dan *Collaborative Implementation Program* (CIP) serta termasuk di dalam Kawasan RW Kumuh sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
2. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) terkait Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di RW 03 RT 07 Kelurahan Pegangsaan Dua Jakarta Utara pada hari Selasa, 19 November 2024 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Kata I Lantai 2 Gedung Kantor Walikota Jakarta Utara;
3. Kegiatan yang dilaksanakan di lokasi *Pilot Project* antara lain :
   a) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kata Administrasi Jakarta Utara telah melakukan Penataan Jalan, Saluran, Penerangan Jalan Umum, Vertikal Garden dan Septic tank;
   b) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara telah melakukan kegiatan berupa peninggian turap di sepanjang kali dengan ketinggian 50 cm dan panjang 50 m;
   c) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara akan menjadikan RW 03 Kelurahan Pegangsaan Dua Program Kampung lklim (Proklim) yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat supaya bisa beradaptasi dengan Pengendalian Perubahan lklim. Adapun beberapa kegiatan Program Kampung lklim yaitu :
      - Pengelolaan sampah dan limbah padat;
      - Pengalahan dan pemanfaatan limbah cair;
      - Penghijauan hutan rakyat.

B. KEGIATAN SUB KSD24B3K20RA33 :

Kriteria Keberhasilan : Tertatanya 124 Kawasan Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian , Satuan Polisi Pamong Praja, Perumda Pasar Jaya, Biro Pemerintahan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

Target Capaian :

Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 31 Lokasi.

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
2	Implementasi Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan	Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B03 TA24-B06 TA24-B09 TA24-B12	100% 100% 100% 100%

SUB KSD TA24-B03

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Laporan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penataan Kawasan Kelurahan Triwulan I Tahun 2024 kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0164/PU.04.00 tanggal 25 Maret 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut program Penataan Kawasan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara serta memperhatikan arahan Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait Penataan Kawasan berbasis Kelurahan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlaksananya Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Triwulan I Tahun 2024 di 31 Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan progres yang sudah mencapai 100%, dengan lokasi penataan sebagai berikut :

Tabel 3.18. Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Progres yang sudah mencapai 100% Triwulan I Tahun 2024

No	Kelurahan	Lokasi
1.	Semper Barat	Gang Swadaya RT 018 RW 012
2.	Semper Timur	Gang Merpati Ket Semper Timur RT 003 RW 003
3.	Marunda	Jl. Sungai Tiram RT 03 RW 06
4.	Cilincing	Jl. Cakung Drain RT.011 RW 006
5.	Kalibaru	Jl. Kalibaru Barat IV RT 14 RW 12
6.	Rorotan	Jl. Rorotan III RT 012 RW 010
7.	Sukapura	Jl. Syekh Nawawi Albantani RT 004 RW 003
8.	Lagoa	Jl. Lagoa Terusan Gg. I Buntu C 2 RT. 008 RW. 01
9.	Koja	Jl. Cipeucang I RT.003 RW 012
10.	Tugu Utara	Jl. Walang Dalam RT.002 RW.12
11.	Tugu Selatan	Jl. Balai Rakyat Raya RW. 03 dan RW. 04
12.	Rawa Sadak Utara	Jl. Dewi-Dewi RT. 006 RW. 01
13.	Rawa Sadak Selatan	Jl. Bandar RT 006 RW 06
14.	Tanjung Priok	Jl. Kamp Bahari Gang 5 A10 RT 001 RW 03
15.	Warakas	Jl. Warakas III RT 004 RW 003
16.	Sunter Jaya	Jl. Bina Husada RT. 08 RW. 03
17.	Sunter Agung	RPTRA Sutra 1, Jalan Sunter Karya Selatan II No.09 RT 009 RW013
18.	Kebon Bawang	Jl. Kebon Bawang X RT 011 RW 001
19.	Sungai Bambu	Jl. Ganggeng Raya Terusan RT.003 RW.007
20.	Papanggo	Jl. Warakas I Gg. Belimbing RT.001, RT.005, dan RT.011 RW.08
21.	Pluit	Jl. Pluit barat RT 018 RW 007
22.	Kamal Muara	Jl. Kapuk Kamal Raya RT 002 RW 002

No	Kelurahan	Lokasi
23.	Kapuk Muara	Belakang Jembatan OHi Rt 001 Rw 02
24.	Penjaringan	Jl. Inspeksi Waduk Pluit Utara RT 019/RW 017
25.	Pejagalan	Jl. Jembatan Tiga RT 003 RW 011 (Kolong Fly Over Jembatan Tiga)
26.	Pademangan Barat	Jl. Hidup Baru RT 005 RW 03
27.	Pademangan Timur	Jl. Pademangan Raya RT.004 RW.06
28.	Ancel	Jalan Lodan Dalam VI RT 001 RW 01
29.	Kelapa Gading Timur	Jalan Pelepah RT 010 RW 001
30.	Kelapa Gading Barat	Jl. Jalan Tangguh Kelapa Gading Barat (Belakang Kantor Sekretariat RW 02)
31.	Pegangsaan Dua	Lahan kosong belakang SMPN 270 Jl. Kompi Udin RT 006 RW 05

2. Lokasi Penataan Kawasan Kelurahan telah diatur dalam SK Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2024 tentang Lokasi Penataan Kawasan tingkat Kelurahan Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024;
3. Di dalam melakukan kegiatan Penataan Kawasan Kelurahan, dapat terlaksana dengan baik atas kerja sama dengan Unit Perangkat Kerja Daerah (UKPD) terkait serta melibatkan masyarakat.

SUB KSD TA24-B06

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Laporan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penataan Kawasan Kelurahan Triwulan II Tahun 2024 kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0318/PU.04.00 tanggal 21 Juni 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut program Penataan Kawasan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara serta memperhatikan arahan Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait Penataan Kawasan berbasis Kelurahan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlaksananya Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Triwulan II Tahun 2024 di 31 Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan progres yang sudah mencapai 100%, dengan lokasi penataan sebagai berikut :

Tabel 3.19. Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Progres yang sudah mencapai 100% Triwulan II Tahun 2024

No	Kelurahan	Lokasi
1.	Penjaringan	JI. Wacung RT 010 / RW 16
2.	Pluit	JI. Pluit Barat Raya RW.07
3.	Kamal Muara	Jalan Kamal Muara Raya - Jalan Raya Dadap Perbatasan antara Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan Kota Tangerang RT 007 RW 001
4.	Pejagalan	Jalan Kapuk Raya Jembatan DHI RT01/RW02
5.	Kapuk Muara	JI. Kalibaru Barat IV RT 14 RW 12
6.	Pademangan Timur	JI. Pademangan V Gg.32
7.	Ancol	Jalan Lodan Dalam RT 004 RW 08
8.	Pademangan Barat	JI. Hidup Baru RT 001 RW 09
9.	Sunter Jaya	JI Kedondong RT 010 RW 006
10.	Sungai Bambu	JI. Ganggeng Raya Rt 006, RW 007
11.	Tanjung Priok	JI. Kampung Bahari Gang V ,RT 007 RW 01
12.	Papanggo	JI. Warakas VI Gg. 21 RT.008/05
13.	Kebon Bawang	JI. Kebon Bawang VI
14.	Sunter Agung	JI Sunter Karya Timur Raya 018 Rw 013
15.	Warakas	JI. Warakas 5 Gang 10
16.	Rawa Sadak Utara	JI. Pembangunan I RT. 008 RW. 003
17.	Tugu Selatan	RPTRA Sutra 1, Jalan Sunter Karya Selatan II No.09 Rt 009 Rw013
18.	Rawa Badak Selatan	JI. K2 Gg. Mawar RT 09 RW 05
19.	Tugu Utara	JL.KAV KAMP MANGGA RT.010 RW.02

No	Kelurahan	Lokasi
20.	Lagoa	Jl. Lagoa Terusan Gg. IV C 2 RT. 016 RW. 03
21.	Koja	Jl. Pluit barat RT 018 RW 007
22.	Semper Timur	Gang Hijau RT 03 RW 07
23.	Kalibaru	Jl. Kalibaru Barat I RT 03,04 RW 008
24.	Rorotan	Jl. Rorotan III RT 012 RW 10
25.	Cilincing	Jalan Baru Gang 2 Dalam Rt. 003 Rw. 002
26.	Semper Barat	Jl. Syech Nawawi Al Bantani RT 017 RW 01
27.	Sukapura	Jl. Syehk Nawawi Al Bantani
28.	Marunda	Jl. Sungai Tiram RT 002 RW 06
29.	Pegangsaan Dua	Jl. Kompi Udin Kebun Samping SMPN 270
30.	Kelapa Gading Timur	Jl. Pelepah Raya Rw 001
31.	Kelapa Gading Barat	Jl. Taman Penyengat 3 RT 04 RW 03 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara

2. Lokasi Penataan Kawasan Kelurahan telah diatur dalam SK Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2024 tentang Lokasi Penataan Kawasan tingkat Kelurahan Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024. Total penataan kawasan sejak dimulai tahun 2022 sudah mencapai 217 lokasi penataan kawasan dengan rincian sebagai berikut :
   a. Tahun 2022 31 lokasi penataan kawasan;
   b. Tahun 2023 124 lokasi penataan kawasan;
   c. Tahun 2024 62 lokasi penataan kawasan.

3. Di dalam melakukan kegiatan Penataan Kawasan Kelurahan, dapat terlaksana dengan baik atas kerja sama dengan Unit Perangkat Kerja Daerah (UKPD) terkait serta melibatkan masyarakat.

SUB KSD TA24-B09

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Laporan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penataan Kawasan Kelurahan Triwulan III Tahun 2024 kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0509/PU.04.00 tanggal 25 September 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut program Penataan Kawasan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara serta memperhatikan arahan Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait Penataan Kawasan berbasis Kelurahan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Terlaksananya Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Triwulan III Tahun 2024 di 31 Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan progres yang sudah mencapai 100%, dengan lokasi penataan sebagai berikut :

Tabel 3.20. Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Progres yang sudah mencapai 100% Triwulan III Tahun 2024

No	Kelurahan	Lokasi
1.	Penjaringan	JI. Pluit Raya RT 007/RW 007
2.	Pluit	JI. Pluit Karang Barat (Belakang Kantor Kelurahan Pluit)
3.	Kamal Muara	Jalan Kapuk Kamal Raya RT 002 RW 02
4.	Pejagalan	JI. Teluk Gong Raya RW.010 (Area depan Puskesmas Kecamatan Penjaringan)
5.	Kapuk Muara	Urban Farming Taman Grisenda (Jalan Kapuk Raya Komplek Grisenda RT 08 / RW 10
6.	Pademangan Timur	JI. Pademangan Raya RT 01 RW 09
7.	Ancol	RT 008 RW001
8.	Pademangan Barat	JI. Hidup Baru RT 011 RW 03
9.	Sunter Jaya	JI. Sunter Kirana Ill RT 017 RW 10, Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14360

No	Kelurahan	Lokasi
10.	Sungai Bambu	Jl. Ganggeng VIII RT 003 RW 07
11.	Tanjung Priok	Jl. Kp Bahari I RT 07/09
12.	Papanggo	Jl. Warakas VI Gg. 21 RT.008/05
13.	Kebon Bawang	Jl. Upaya Utara RT 013 RW 006
14.	Sunter Agung	Jalan Ancol Selatan RT 06 dan RT 09 RW 07 Kelurahan Sunter Agung
15.	Warakas	Jl. Warakas 5 gang 10 - 11, RW 10
16.	Rawa Sadak Utara	Jl. Pembangunan I RT 009 RW 003
17.	Tugu Selatan	Jl. Plumpang Semper RT.005/01
18.	Koja	Jl. Raya Pelabuhan RW 004
19.	Lagoa	Jl. Mawar Dalam Timur RT 001 & 002 RW 018 Kelurahan Lagoa
20.	Tugu Utara	Jl. Cemara Ujung RT 003 RW 01
21.	Semper Timur	Jalan Peralihan RT 08 RW 03
22.	Kalibaru	Jl. Kalibaru Barat IV RT 08,12 RW 007
23.	Rorotan	Jl. Rorotan IX RT. 018 RW. 09
24.	Cilincing	Jalan Bakti I Rt. 014 Rw. 005
25.	Semper Barat	Jl. Gereja Tugu RT 010 RW 06
26.	Sukapura	Jl. Tipar Cakung
27.	Marunda	Kp. Bidara RT 007 RW 01
28.	Pegangsaan Dua	Lahan kosong samping SMPN 270 (sisi depan) Jl. Kompi Udin RT005 RW05
29.	Kelapa Gading Timur	Kelapa Gading Timur
30.	Kelapa Gading Barat	Jl. Sentosa Raya RT 08 RW 010 Komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading Barat Jakarta Utara
31.	Koja	Jl. Raya Pelabuhan RW 004

2. Total Lokasi Penataan Kawasan Kelurahan sejak dimulai tahun 2022 sudah mencapai 248 lokasi penataan Kawasan dengan rincian sebagai berikut :
   a. Tahun 2022 31 lokasi penataan kawasan;
   b. Tahun 2023 124 lokasi penataan kawasan;
   c. Tahun 2024 93 lokasi penataan kawasan.

3. Di dalam melakukan kegiatan Penataan Kawasan Kelurahan, dapat terlaksana dengan baik atas kerja sama dengan Unit Perangkat Kerja Daerah (UKPD) terkait serta melibatkan masyarakat.

SUB KSD TA24-B12

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Laporan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penataan Kawasan Kelurahan Triwulan IV Tahun 2024 kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0651/PU.04.00 tanggal 23 Desember 2024, yang isinya antara lain:

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut program Penataan Kawasan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara serta memperhatikan arahan Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait Penataan Kawasan berbasis Kelurahan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

   1. Terlaksananya Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Triwulan IV Tahun 2024 di 31 Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan progres yang sudah mencapai 100%, dengan lokasi penataan sebagai berikut :

Tabel 3.21. Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Progres yang sudah mencapai 100% Triwulan IV Tahun 2024

No	Kelurahan	Lokasi
1.	Penjaringan	Jl. Sukarela I RT 001 / RW 010
2.	Pluit	Jl. Kerapu 1 RT 07 RW 01
3.	Kamal Muara	Jalan Kapuk Kamal Kayu Besar RT 002 RW 002
4.	Pejagalan	Jl. Gusti Permata 1 RT.014 RW.015 (tepi sungai)
5.	Kapuk Muara	Urban Farming Taman Grisenda (Jalan Kapuk Raya Komplek Grisenda RT 08 / RW 10
6.	Pademangan Timur	Jl. Pademangan V Raya RT.01 RW.08 Kelurahan Pademangan Timur
7.	Ancel	Jl. Kencur RT 001 RW 08

No	Kelurahan	Lokasi
8.	Pademangan Barat	Jl. Hidup Baru RT 001 RW 03
9.	Sunter Jaya	Taman Posyantek Kelurahan Sunter Jaya
10.	Sungai Bambu	Jl. Jati 8 RT.08 RW.09
11.	Tanjung Priok	Jl Kp Bahari I RT 07/09
12.	Papanggo	Jl. Warakas X Gg. 21 RT.001/07
13.	Kebon Bawang	Jl. Kebon Bawang IV RT. 008 RW. 008
14.	Sunter Agung	Jl Ancel Selatan dh/ Rs Paru RT 024 RW 001
15.	Warakas	Jalan Warakas 5 gang 10-11 RT 11 & RT 12 RW 10
16.	Rawa Badak Utara	Jl. Berdikari RT. 004 RW. 014
17.	Tugu Selatan	Jl. H.Tiung
18.	Rawa Sadak Selatan	Gang Waru RT 006 RW 03
19.	Koja	Jl. Cikijang Barat RW.011
20.	Lagoa	Jl. Cakrawala I Gg. I RW. 017
21.	Tugu Utara	Jalan Mahoni Selatan No.1 Taman Kantor Kelurahan Tugu Utara
22.	Semper Timur	Jl Peralihan RT 06 RW 03
23.	Kalibaru	Jl Kalibaru Barat RT 03 RW 06
24.	Rorotan	Jl. Rorotan IX RT.018 RW.007
25.	Cilincing	Jl. Cilincing Bakti VI Rt. 008 RW. 06
26.	Semper Barat	Jl. Tipar Cakung RW 05 Kelurahan Semper Barat
27.	Marunda	Kp.Bidara RT 010 RW 01
28.	Sukapura	Jl. Terusan Kelapa Hibrida
29.	Pegangsaan Dua	Jl. Raya Kelapa Nias RW 17
30.	Kelapa Gading Timur	Jl. Maengket Rw 07
31.	Kelapa Gading Barat	Jl. Raya Kelapa Hybrida RW 017 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara

2. Total Lokasi Penataan Kawasan Kelurahan sejak dimulai tahun 2022 sudah mencapai 279 lokasi penataan Kawasan dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 2022 31 lokasi penataan kawasan;
b. Tahun 2023 124 lokasi penataan kawasan;
c. Tahun 2024 124 lokasi penataan kawasan.

3. Di dalam melakukan kegiatan Penataan Kawasan Kelurahan, dapat terlaksana dengan baik atas kerja sama dengan Unit Perangkat Kerja Daerah (UKPD) terkait serta melibatkan masyarakat.

C. KEGIATAN SUB KSD24B3K20RA785 :

Kriteria Keberhasilan : Penataan Kawasan GOR Bahtera Jaya dan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang.

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian, Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perumda Pasar Jaya, Biro Pemerintahan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

Target Capaian :

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan di Jakarta Utara.

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
3	Implementasi Hasil Kajian Penataan Kawasan	Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B06 TA24-B12	100% 100%

SUB KSD TA24-B06

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Laporan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) B06 Penataan Kawasan GOR Bahtera Jaya dan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0337/PU.04.00 tanggal 28 Juni 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut Kegiatan Strategis Daerah (KSD) B06 Penataan kawasan tahun 2024 Penataan Kawasan GOR Bahtera Jaya di kawasan Ancol Kecamatan Pademangan dan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati dengan Rencana Aksi Implementasi Hasil Kajian Penataan Kawasan. Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :
    1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penataan Kawasan yang di Koordinasikan oleh Walikota/Bupati dengan rencana Aksi Implementasi Hasil Kajian Penataan Kawasan, pada hari Jumat, 12 Januari 2024 bertempat di Ruang Rapat Inspirasi Subanppeda Lantai 3 Gedung Kantor Walikota Jakarta Utara;
    2. Terwujudnya grand design penataan kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Bahtera dan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
    3. Terlaksananya pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penataan kawasan pada tahun 2025;
    4. Penataan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang akan di pusatkan di jalan Yos Sudarso dan di Jalan Deli (Depan RSUD Koja) oleh Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara.

SUB KSD TA24-B12

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Laporan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) B12 Penataan Kawasan GOR Bahtera Jaya dan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0638/PU.04.00 tanggal 13 Desember 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut Kegiatan Strategis Daerah (KSD) B12 Penataan kawasan tahun 2024 Penataan Kawasan GOR Bahtera Jaya di kawasan Ancol Kecamatan Pademangan dan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati dengan Rencana Aksi Implementasi Hasil Kajian Penataan Kawasan. Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

    1. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Terkait Penataan Kawasan GOR Bahtera Jaya Kelurahan Ancel Kecamatan Pademangan dan Kawasan Ruang Bawah Toi Layang Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, pada hari Rabu, 20 November 2024 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Kota I Blok P Lantai 2 Gedung Kantor Walikota Jakarta Utara;

    2. Penataan Kawasan GOR Bahtera Jaya :
        a. GOR Bahtera merupakan aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat di KIB Gelanggang Remaja Jakarta Utara (GRJU);
        b. Ditahun 2025 akan dilakukan Penataan di Kawasan GOR Bahtera yaitu berupa peninggian akses jalan menuju GOR Bahtera (Jalan Ketel) yang selama ini sering tergenang air dan sudah dianggarkan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara.

    3. Penataan Kawasan Ruang Bawah Jalan Toi Layang:
        a. Penataan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang dilaksanakan di jalan Yos Sudarso (depan Polres Metro

Jakarta Utara) dan di Jalan Jampea (Depan RSUD Koja) oleh Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara. Program Penataan Kawasan tersebut akan dibangun taman, sarana olah raga dan ruang interaksi warga;

b. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan ditahun 2025 oleh Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara.

10) Capaian Indikator Kinerja Kesepuluh :

Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital

Indikator kinerja kesepuluh ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kedelapan yaitu Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas. Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN STRATEGIS						
8	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
1	Implementasi Manajemen Risiko SPBE	Transformasi Digital	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B12	100%

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital di Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari e-Monev KSD.

Pengukuran Kinerja :

Metode Pengukuran :

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital.

KEGIATAN SUB KSD24B1K23RA112 :

SUB KSD TA24-B12

Kriteria Keberhasilan : Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah.

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Biro Hukum, Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Aset Daerah, Inspektorat, Biro Pemerintahan.

Target Capaian :

Rancangan Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah.

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Dokumen Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat 2404/OT.05.00 tanggal 24 Desember 2024, yang isinya antara lain :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Implementasi Manajemen Risiko SPBE pada Kota Administrasi Jakarta Utara yang ditargetkan selesai pada Bulan Desember 2024. Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam Fakta Integritas Manajemen Risiko SPBE Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Nomor : 2405/OT.05.00 yaitu :
   a) Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Walikota menyatakan bahwa:
      1) Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
      2) Rencana penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
      3) Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

2. Dalam Dokumen Manajemen Risiko SPBE Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 sebagai berikut :
   a) Konteks Risiko SPBE (Informasi Umum) :

Nama Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE	Kota Administrasi Jakarta Utara
Tugas Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.
Fungsi Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE	1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi 2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya 4. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya 5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan keten-teraman dan ketertiban umum 6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

	7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan 9. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi 10. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi 11. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi 13. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi 14. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota 15..Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi 16. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi 17. Pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi 18. Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD 19. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi 20. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah

b) Konteks Risiko SPBE (Sasaran SPBE) :

No	Sasaran Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE
1	Meningkatnya Kualitas, aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Peningkatan Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	93.79 Nilai
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	95.28 Nilai

c) Konteks Risiko SPBE (Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE) :

Pemilik Risiko SPBE	Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Koordinator Risiko SPBE	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Pengelola Risiko SPBE	1. Kepala Bagian Pemerintahan 2. Kepala Bagian Hukum 3. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 4. Kepala Bagian Perekonomian 5. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 7. Kepala Bagian Umum dan Protokol 8. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

11) Capaian Indikator Kinerja Kesebelas :

Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Indikator kinerja kesebelas ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kesembilan yaitu Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah. Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN STRATEGIS						
9	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B03 TA24-B06 TA24-B09	100% 100% 100%
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B03 TA24-B06 TA24-B09 TA24-B12	100% 100% 100% 100%
3	Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B03	100%
4	Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B09	100%

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari e-Monev KSD.

Pengukuran Kinerja :

Metode Pengukuran :

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

A. KEGIATAN SUB KSD24B1K24RA15 :

Kriteria Keberhasilan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025.

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat.

Target Capaian :

- Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2).
- 1. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024;
- 2. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2024.
- Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2025 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2024).

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B03 TA24-B06 TA24-B09	100% 100% 100%

SUB KSD TA24-B03

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025, yaitu :

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Ali Maulana Hakim
NIP : 197204241991011001
Jabatan : Walikota
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Keterangan
Sasaran Strategis										
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pasar yang memberikan Pelayanan Layanan Publik serta Pemerintah Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang urusan Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jakarwi	N/A	93,285	N/A	93,285	93,285	Nilai
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi Kota/Kabupaten administrasi Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang urusan Kota Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jakarwi	N/A	93,285	N/A	93,285	93,285	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Keterangan
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) mengukur hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengembalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengembun Jiu Pemberantasan sarang nyamuk), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu, PPSU, BKPRM, dan Penyelenggaraan Kelurahan Lestari dan Umum, serta kepuasan terhadap penyelenggaraan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran : Metoda pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam skoring angka dari 1 (satu) hingga dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00 Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian dubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) Hasil diperoleh dengan cara survei terhadap kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil kepuasan seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Sumber data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jakarwi	N/A	90,375	N/A	90,375	90,375	Nilai
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap SKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi dilapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi SKPD pada urusan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala SKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jakarwi	N/A	92,3	N/A	92,3	92,3	Nilai
Sasaran Khusus										
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon penduduk daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Definisi : a. Persentase terlaksanaanya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase tersebarluasnya nuansa komunikasi publik melalui media internal Pemerintah Daerah seperti situs media massa atau media sosial atau aktivitas kunjungan lapangan. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan nuansa komunikasi melalui media internal Pemerintah Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas kunjungan lapangan. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan data data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] / (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan: a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Seruan Gubernur nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jakarwi	92	N/A	92	N/A	92	Nilai
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Perhitungan melalui sistem e-Inventarisasi a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 95% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kartu kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dan hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembinaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia dibuktikan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang diekluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dan hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SP-2) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. Bejelex LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) PDN Kemendagri Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD	N/A	30	N/A	60	90	Persen
8	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi (PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 305 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi Terselenggarakannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat.kepeg.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Sensitivitas BPSDM dan Prestasi BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km.bpdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km.bpdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan Kategori Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : (Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)) x 100% Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Terusipnya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat: Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
11	Terusipnya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan dokumenlain kepada masyarakat dan lainnya diperlukan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dikurung atas aspek implementasi: a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian kelompok-yang dukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang diukur atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e-SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksi.bpdd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran sehemanya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran sehemanya merupakan jumlah anggaran yang dimenyalakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan - dilakukan dengan mempertimbangkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% BKK = 43,5% BE = 28,8% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan BKK : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dikaitkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	80	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (notim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (80% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2020 dan sebelumnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah dari rekomendasi yang belum diselesaikan dari LHP BPK RI tahun 2020 dan sebelumnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Jakarta, Januari 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Provinsi DKI Jakarta

Ali Maulana Hakim
NIP 197204261991021001

SUB KSD TA24-B06

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Laporan pegawai yang telah menyusun SKP awal tahun 2024 kepada Yth. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat 600/KG.05.00 tanggal 10 Juni 2024, yaitu :

a. Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/SE/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penyusunan Dokumen Matriks Pembagian Peran dan Hasil, Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Rencana Aksi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024.

b. Rekapitulasi ASN Kota Administrasi Jakarta Utara yang sudah menyusun SKP Awal Tahun 2024, yaitu :

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Sudah Menyusun SKP Awal 2024
1	Sekretariat Kota Adm.	99	99
2	Kecamatan Penjaringan	11	11
3	Kelurahan Kamal Muara	7	6
4	Kelurahan Kapuk Muara	7	7
5	Kelurahan Pejagalan	8	8
6	Kelurahan Penjaringan	7	7
7	Kelurahan Pluit	7	7
8	Kecamatan Tanjung Priok	10	10
9	Kelurahan Sunter Jaya	7	7
10	Kelurahan Papanggo	6	6
11	Kelurahan Sungai Bambu	8	8
12	Kelurahan Kebon Bawang	10	6
13	Kelurahan Tanjung Priok	7	7
14	Kelurahan Sunter Agung	9	9
15	Kecamatan Koja	13	13
16	Kelurahan Koja	7	7

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Sudah Menyusun SKP Awal 2024
17	Kelurahan Lagoa	7	7
18	Kelurahan Tugu Utara	9	9
19	Kelurahan Tugu Selatan	7	7
20	Kelurahan Rawa Badak Utara	8	8
21	Kelurahan Rawa Badak Selatan	8	8
22	Kecamatan Cilincing	12	12
23	Kelurahan Kalibaru	8	8
24	Kelurahan Cilincing	8	8
25	Kelurahan Semper Barat	7	7
26	Kelurahan Semper Timur	7	7
27	Kelurahan Marunda	7	7
28	Kelurahan Sukapura	7	7
29	Kelurahan Rorotan	9	9
31	Kecamatan Pademangan	13	13
32	Kelurahan Ancol	7	7
33	Kelurahan Pademangan Barat	7	7
34	Kelurahan Pademangan Timur	7	7
35	Kecamatan Kelapa Gading	15	15
36	Kelurahan Kelapa Gading Timur	7	7
37	Kelurahan Kelapa Gading Barat	6	6
38	Kelurahan Pegangsaan Dua	9	9

SUB KSD TA24-B09

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 kepada Yth. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat 830/RB.02.03 tanggal 31 Juli 2024, yaitu :

Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut Rencana Aksi Strategis Daerah (KSD) 39 yaitu Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA, maka perlu dilakukan penyusunan Rancangan Cascading Kinerja dan Matriks Peran Hasil Perangkat Daerah (eselon 2, 3, 4, fungsional dan perencana tahun 2025) pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

B. KEGIATAN SUB KSD24B10K1S24RA16 :

Kriteria Keberhasilan : Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat.

Target Capaian :

- Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2023.
- 1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2024;
- 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2024.
- Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024.
- 1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2024;
- 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2024.

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B03 TA24-B06 TA24-B09 TA24-B12	100% 100% 100% 100%

SUB KSD TA24-B03

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023 kepada Yth. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV merupakan amanat Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemda, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemda.

Pelaksanaan evaluasi hasil Renja-PD dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Renja-PD terutama evaluasi terhadap capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan penyerapan dana/ anggaran indikatif kegiatan Renja-PD.

Adapun tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah adalah untuk:

1. Menilai keselarasan program Renja-PD dengan Renstra-PD
2. Mengidentifikasi capaian pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan program / kegiatan /sub kegiatan dengan target yang sudah direncanakan.
4. Menjadi bahan masukan bagi penyusunan Renja-PD tahun berikutnya.

SUB KSD TA24-B06

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyelesaikan Laporan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) untuk Triwulan I Tahun 2024. Evaluasi Rencana Kerja merupakan amanat Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemda, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemda.

Pelaksanaan evaluasi hasil Renja-PD dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Renja-PD terutama evaluasi terhadap capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan penyerapan dana/ anggaran indikatif kegiatan Renja-PD.

Adapun tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah adalah untuk:

1. Menilai keselarasan program Renja-PD dengan Renstra-PD
2. Mengidentifikasi capaian pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan program / kegiatan /sub kegiatan dengan target yang sudah direncanakan.
4. Menjadi bahan masukan bagi penyusunan Renja-PD tahun berikutnya.

Kota Administrasi Jakarta Utara juga telah menyelesaikan Laporan Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2024. Maksud dari pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui pemahaman terhadap kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja sehingga menjadi masukan penyempurnaan perencanaan ke depan serta meningkatkan kinerja organisasi.

Sedangkan tujuan dari evaluasi kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memahami perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
2. Mengetahui kualitas *cascading* Perangkat Daerah, minimal secara telaah cepat (*quick assessment*). Kualitas *cascading* kinerja Perangkat Daerah dinilai dari kausalitas antar sasaran dan indikator kinerja dari level tertinggi sampai level terendah, kualitas sasaran dan indikator, target, trajektori target, pemilihan konsolidasi periode dan polarisasi target yang tepat;

3. Mengetahui capaian kinerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari proses pemantauan kinerja organisasi; dan
4. Menjadi bahan masukan bagi peningkatan manajemen kinerja perangkat daerah khususnya aspek perencanaan dan pengukuran kinerja.

SUB KSD TA24-B09

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyelesaikan Laporan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) untuk Triwulan II Tahun 2024. Evaluasi Rencana Kerja merupakan amanat Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemda, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemda.

SUB KSD TA24-B12

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyelesaikan Laporan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) untuk Triwulan III Tahun 2024. Evaluasi Rencana Kerja merupakan amanat dari Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemda, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemda.

Evaluasi hasil Renja-PD mencakup penilaian terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Penilaian dimaksud meliputi:

1. Realisasi Pencapaian Target Indikator Kinerja: Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja perangkat daerah dapat tercapai.
2. Kelompok Sasaran: Analisis terhadap kelompok sasaran program dan kegiatan, mencakup jumlah, jenis, dan tingkat kepuasan kelompok sasaran yang menerima manfaat.
3. Penyerapan Dana: Evaluasi tingkat penyerapan anggaran, yang menjadi indikator efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan.
4. Kendala yang Dihadapi: Identifikasi hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Pelaksanaan evaluasi hasil Renja-PD dilakukan oleh Perangkat Daerah setiap triwulan dalam Tahun Anggaran.

Pelaksanaan evaluasi hasil Renja-PD dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Renja-PD terutama evaluasi terhadap capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan penyerapan dana/ anggaran indikatif kegiatan Renja-PD.

Adapun tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah adalah untuk:

1. Menilai keselarasan program Renja-PD dengan Renstra-PD
2. Mengidentifikasi capaian pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan program / kegiatan /sub kegiatan dengan target yang sudah direncanakan.
4. Menjadi bahan masukan bagi penyusunan Renja-PD tahun berikutnya.

Kota Administrasi Jakarta Utara juga telah menyelesaikan Laporan Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2024. Maksud dari pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui pemahaman terhadap kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja sehingga menjadi masukan penyempurnaan perencanaan ke depan serta meningkatkan kinerja organisasi.

Sedangkan tujuan dari evaluasi kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memahami perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
2. Mengetahui kualitas *cascading* Perangkat Daerah, minimal secara telaah cepat (*quick assessment*). Kualitas *cascading* kinerja Perangkat Daerah dinilai dari kausalitas antar sasaran dan indikator kinerja dari level tertinggi sampai level terendah, kualitas sasaran dan indikator, target, trajektori target, pemilihan konsolidasi periode dan polarisasi target yang tepat;
3. Mengetahui capaian kinerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari proses pemantauan kinerja organisasi; dan
4. Menjadi bahan masukan bagi peningkatan manajemen kinerja perangkat daerah khususnya aspek perencanaan dan pengukuran kinerja tahun berikutnya.

C. KEGIATAN SUB KSD24B1K24RA17 :

Kriteria Keberhasilan : Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu.

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat.

Target Capaian :

- Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.
- Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id.

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
3	Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B03	100%

SUB KSD TA24-B03

Kota Administrasi Jakarta Utara telah berhasil tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan media pertanggungjawaban Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. LKIP berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara terkait pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, yang diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan anggaran pada setiap tahunnya.

Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. KEGIATAN SUB KSD24B1K24RA18 :

SUB KSD TA24-B09

Kriteria Keberhasilan : Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Inspektorat.

Target Capaian :

Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
4	Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B09	100%

Kota Administrasi Jakarta Utara telah berhasil tersusunnya Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023. Terselesainya Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu sebagai berikut :

SISTA AKHIR PENGELOLAAN TINDAK LANJUT HASIL WALIKOTA SAKIP TAHUN 2023
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Verifikasi		Keterangan
				Telah sesuai	Belum sesuai	
I	Perencanaan Kinerja					
	Perencanaan Kinerja masih belum sesuai ketentuan					
	a. Belum seluruh perjanjian kerja telah menyusun dan publik, serta berkontribusi dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Melaksanakan perjanjian kinerja secara berjenjang dan ditetapkan secara berhasil untuk mencapai kinerja yang direncanakan	Walikota Jakarta Utara telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja pada eselon II, eselon III dan IV Menggunakan dalam bentuk KIP pada Tahun 2024, hal ini telah dilampirkan bukti dukung berupa, (antara Walikota, KIP eselon II, III dan Staf (dokumen terlampir)	✓		Dokumen Matriks Perjanjian Kinerja Berubah Tujuan dan SOP
			Telah di tindak lanjuti dengan mengadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Perjanjian Kinerja di Lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan I dengan dilampirkan bukti surat undangan kepada para Kabdan, Camat, Kepala Bagian dan Lurah Nomor e-0865/07.35.00 tanggal 23 Mei 2023, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Notu Dinas Hasil Rapat Monev Perjanjian Kinerja Nomor 235/NK.03 tanggal 30 Mei 2023	✓		
			Telah di tindak lanjuti dengan mengadakan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Perjanjian Kinerja di Lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan II dengan dilampirkan bukti surat undangan kepada para Kabdan, Camat dan Kepala Bagian e-0816/07.06.00 tanggal 11 Juni 2023, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Notu Dinas Hasil Rapat Monev Perjanjian Kinerja Nomor 470/NK.03 tanggal 12 Juni 2023	✓		
			Telah di tindak lanjuti dengan mengadakan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Perjanjian Kinerja di Lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan III dengan dilampirkan bukti surat undangan kepada para Kabdan, Camat dan Kepala Bagian e-0815/07.06.00 tanggal 26 Agustus 2023, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Notu Dinas Hasil Rapat Monev Perjanjian Kinerja Nomor 676/NK.03 tanggal 4 September 2023	✓		
			Telah di tindak lanjuti dengan mengadakan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Perjanjian Kinerja di Lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV dengan dilampirkan bukti surat undangan kepada para Kabdan, Camat dan Kepala Bagian e-0813/07.35.00 tanggal 6 Desember 2023, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Notu Dinas Hasil Rapat Monev Perjanjian Kinerja Nomor 916/NK.03 tanggal 13 Desember 2023			
	b. Seluruh pegawai belum menandatani dan publik, serta berkontribusi dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Melaksanakan sosialisasi mengenai penyusunan kinerja dan evaluasi dan monev secara berhasil pos capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang direncanakan	Telah di tindak lanjuti dengan mengadakan rapat Penyusunan IKP dan Matriks Perjanjian Kinerja Hasil Tahun 2023 di Lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dengan dilampirkan bukti surat undangan kepada para Kabdan/Unsur dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Dokumentasi Kegiatan e-0869/06.13.00 tanggal 23 Juni 2023, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Notu Dinas Hasil Rapat Monev Perjanjian Kinerja Nomor [illegible] tanggal 27 Juni 2023. Telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja di lingkup Walikota Jakarta Utara, kecuali dapat berikut cetak capaian monev triwulan I, II, III dan IV tahun 2023 dengan bukti dokumen pendukung terlampir.	✓		Dokumen IKI, Rencana Kerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Undangan PUCC Kegiatan dan Notu Dinas

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Verifikasi		Keterangan
				Telah sesuai	Belum sesuai	
II	Pengukuran Kinerja					
	Pengukuran Kinerja masih belum sesuai ketentuan					
	a. Pengukuran kinerja belum menggambarkan secara efektif dan efisien serta belum dilakukan secara berjenjang dan berhasil	Melaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berhasil untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dengan mencantumkan bukti evaluasi pertiap triwulan dan melampirkan screenshot bukti validasi nilai di dalam e-TPP di setiap jenjang (eselon II, III, IV dan staf)	Telah ditindak lanjuti dengan melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berhasil dengan bukti dukung berupa Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I s.d IV dan melampirkan screenshot bukti validasi nilai di dalam e-TPP di setiap jenjang (eselon II, III, IV dan Staf)	✓		Dokumen Laporan Evaluasi Pertiap TW I, II, III dan IV dan Screenshot
	b. Pengukuran kinerja belum menggambarkan pencapaian sasaran dalam mewujudkan kinerja efektif dan efisien	Melakukan pengukuran kinerja dan memanfaatkannya untuk perbaikan sasaran dengan cara lebih baik secara efektif sehingga mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien	Telah ditindak lanjuti dengan melakukan pengukuran kinerja baik dan eselon II, III, dan IV serta telah melakukan kinerja yang melebihi kinerja triwulan (lima) cabutan tinggi tahun 2024 dengan bukti dukung terlampir	✓		Dokumen Laporan Kinerja Walikota Tahun 2023 dan 2024
	III Pelaporan Kinerja					
	Dokumen laporan kinerja masih terdapat pelaporan yang dokumen laporan kinerja belum menyajikan hasil reviu internal dalam penyusunan LKIP	Dimana mendorong agar menyajikan hasil reviu internal dalam penyusunan LKIP	Telah ditindak lanjuti dengan melakukan rapat penyusunan LKIP di lingkungan wil Kota jakarta utara, dengan bukti dukung berupa Nota Dinas No. 880/PA.02.02 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil evaluasi dan Data yang ada di SKIP tahun 2023 dan undangan No. e-0813/07/05.01 tanggal 6 Desember 2023 hal undangan rapat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Nota Dinas No. 913/07/06.01 tanggal 14 Desember 2023 Hal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota administrasi Jakarta Utara	✓		Dokumen LKIP dan Nota Dinas
			Telah menyajikan hasil reviu laporan kinerja pada e-SAKIP REVIU	✓		Screenshot e-SAKIP

Petugas Verifikator
Pemantauan Tindak Lanjut

Yoga Mahyana
NIP 197206021998021001

Ketua Tim
Pemantauan Tindak Lanjut

Bintang
Audit Kinerja
NIP 198109282000011001

Jakarta, 8 Juli 2024
Walikota Kota Administrasi
Jakarta Utara

Dr. H. Abdulah Hakim, S.H., M.M.
NIP 197204241993031001

Pengendali Tindak
Pemantauan Tindak Lanjut

Maria Rosita
NIP 198005121989012003

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Jawaban Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023 kepada Yth. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat 695/PA.02.02 tanggal 4 Juli 2024, yaitu :

a. Surat penyampaian jawaban merupakan tindak lanjut surat dari Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5029/PA.02.02 tanggal 27 Desember 2023 perihal hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan ini disampaikan tanggapan terkait tindak lanjut atas rekomendasi dari Inspektur sebagai berikut :

1. Perjanjian kinerja berjenjang dan monev berkala sudah dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Utara dengan mengunggah bukti Perjanjian Kinerja, laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut.
2. Sosialisasi Perencanaan Kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian sudah dilaksanakan oleh Kata Administrasi Jakarta Utara dengan mengunggah SK Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0047 Tahun 2024 Tentang Penanggung Jawab Indikator Rencana Kinerja Kata Administrasi Jakarta Utara dan Laporan Sosialisasi dalam Penyusunan SKP dan Matriks Pembagian Peran Hasil Tahun 2023 tersebut.
3. Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkala dengan melampirkan screenshoot validasi renkin sudah dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Utara dengan mengunggah berupa laporan Evaluasi Perkin TW I s.d. TW4 Tahun 2023 dan bukti screenshoot validasi Renkin Tahun 2023 tersebut.
4. Pengukuran kinerja dan melampirkan rencana aksi/strategi setiap kegiatan sudah dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Utara dengan mengunggah berupa Perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan bukti screenshoot validasi Renkin Tahun 2023 tersebut.
5. Melakukan review internal dalam penyusunan LKIP kegiatan sudah dilaksanakan oleh Kota Adm. Jakarta Utara dengan mengunggah berupa Laporan LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 dan Laporan Rapat Evaluasi LKIP tersebut.

Kota Administrasi Jakarta Utara juga telah menyampaikan Laporan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023 kepada Yth. Asisten Pemerintahan Sekretariat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat 1.082/PA.02.02 tanggal 27 September 2024, yaitu :

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP berdasarkan Surat dari Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5029/PA.02.02 Tanggal 27 Desember 2022 dan telah dilakukan Jawaban Evaluasi Implementasi SAKIP 2023 oleh Walikota Kata Administrasi Jakarta Utara Nomor 695/PA.02.02 Tanggal 4 Juli 2024.

12) Capaian Indikator Kinerja Kedua belas :

Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta

Indikator kinerja kedua belas ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kesepuluh yaitu Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur. Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN STRATEGIS						
10	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persentase	100	100	100%	e-Monev KSD

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
1	Penyusunan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B03	100%
2	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B06 TA24-B12	100%

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
Sumber data dari e-Monev KSD.

Pengukuran Kinerja :
Metode Pengukuran :
Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta.

A. KEGIATAN SUB KSD24B1K25RA19 :

SUB KSD TA24-B03

Kriteria Keberhasilan : Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025.

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Biro Hukum, Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

Target Capaian :

Laporan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN PJLP Tahun 2025 sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022.

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
1	Penyusunan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B03	100%

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyusun Laporan Analisis Jenis Pekerjaan, Beban Kerja, dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Kota Administrasi Jakarta Utara, kepada Yth. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0024/KG.01.00 tanggal 27 Maret 2024, yaitu :

Surat penyampaian laporan merupakan tindak lanjut Kegiatan Strategis Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini saya sampaikan laporan analisis jenis pekerjaan, beban kerja, dan evaluasi jenis pekerjaan penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025.

B. KEGIATAN SUB KSD24B1K25RA19 :

Kriteria Keberhasilan : Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024.

Instansi/Unit Kerja Koordinasi : Inspektorat.

Target Capaian :

- TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 90%;
- TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 95%.

No	Rencana Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Periode	Capaian
2	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	TA24-B06 TA24-B12	100%

SUB KSD TA24-B06

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyelesaikan Berita Acara Kegiatan Strategis Daerah per tanggal 3 Juni 2024, TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 90% yaitu :

BERITA ACARA KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024

Perangkat Daerah: Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHP APIP s.d. Semester I Tahun 2024

NO	PENILAIAN KPI		PENYELESAIAN TLHP APIP		TINDAK LANJUT SKPD	HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT		
			BOK					
	URAIAN		Jumlah	Nilai (Rp)		Setuju	Tidak	Catatan
1	Jumlah Rekomendasi		14	15,200,000.00	BOK: Berita Acara KSD telah diverifikasi sesuai Berita Acara Penyelesaian TLHP APIP	V		BOK: Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, realisasi masih dengan target waktu 90%
2	Target (Jumlah penyelesaian yang direncanakan secara rasionalisasi terukur setiap semester dalam satu tahun)	Persentase	90.00%					
		Jumlah	12.60	13,770,000.00				
3	Realisasi (Hasil yang diperoleh pada Semester I 2024)	Persentase	90.00%	90.00%				
		Jumlah	14.00	15,200,000.00				
4	Capaian Realisasi KSD BOK Tahun 2024	Persentase	90.00%					
5	Capaian Realisasi Dibandingkan Target	Persentase	100.00%	100.00%				
6	Capaian Akhir Perhitian KSD	Persentase	100.00%					

Keterangan:
- Jumlah rekomendasi adalah seluruh rekomendasi atas LHP yang terbit pada tahun 2019.
- Target adalah jumlah rekomendasi yang harus diusaha yang ditetapkan setiap semester dalam satu tahun sehingga mencapai 90% dari jumlah rekomendasi.
- Realisasi adalah jumlah rekomendasi yang selesai di TL setiap semester.
- Capaian adalah persentase realisasi terhadap target. Jika realisasi melebihi target maka capaian tetap 100%.
- Penambahan rekomendasi pada semester berjalan (referensi LHP baru) yang akan menambah jumlah rekomendasi yang belum di TL, tidak mengubah persentase target yang sudah di tetapkan.

Petugas Inspektorat Pembantu I,

Yeni Mulyani
NIP 197206131998031009

Inspektur Pembantu I,

Aldi Siboro
NIP 197404219911101

Jakarta, 3 Juni 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Provinsi DKI Jakarta,

Muslimin Hakim, S.IP, M.Si.
NIP 197[illegible]

Mengetahui,
Plt. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Puji Widiyadi Gita
NIP 197[illegible]

SUB KSD TA24-B12

Target Capaian :

TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 95%.

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyelesaikan Berita Acara Kegiatan Strategis Daerah per tanggal 3 Juni 2024, Berita Acara Hasil Verifikasi Inspektorat. Catatan untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi hasil pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100% yaitu :

BERITA ACARA KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024
Perangkat Daerah: Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHP APIP s.d. Semester II Tahun 2024

NO	PENILAIAN KPI		PENYELESAIAN TLHP APIP			HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT		
			B12		TINDAK LANJUT SKPD			
	URAIAN		Jumlah	Nilai (Rp)		Setuju	Tidak	Catatan
1	Jumlah Rekomendasi		14	15.330.000,00	B13: Berita Acara KSD telah diverifikasi sesuai Berita Acara Pemantauan TLHP APIP.	V		B12: Bagi Perangkat Daerah yang tidak memiliki temuan dan atau yang harus ditindaklanjuti, realisasi satuan dengan target yaitu 95%.
2	Target (Jumlah pencapaian yang diwesenakan secara upaya dan terahar setiap semester dalam satu tahun)	Persentase	95,00%					
		Jumlah	13,30	14.535.000,00				
3	Realisasi (Hasil yang diperoleh pada Semester II 2024)	Persentase	95,00%	95,00%				
		Jumlah	14,00	15.330.000,00				
4	Capaian Realisasi KSD B12 Tahun 2024	Persentase	95,00%					
5	Capaian Realisasi Dibandingkan Target	Persentase	100,00%	100,00%				
6	Capaian Akhir Penilaian KSD	Persentase	100,00%					

Keterangan:
- Jumlah rekomendasi adalah seluruh rekomendasi atas LHP yang terbit mulai tahun 2019
- Target adalah jumlah rekomendasi yang harus dicapai yang ditetapkan setiap semester dalam satu tahun sehingga mencapai 95% dari jumlah rekomendasi
- Realisasi adalah jumlah rekomendasi yang selesai di TL setiap semester
- Capaian adalah persentase realisasi terhadap target. Jika realisasi melebihi target maka capaian tetap 100%
- Penambahan rekomendasi pada semester berjalan (terbitnya LHP baru) yang akan menambah sisa rekomendasi yang belum di TL, tidak mengubah persentase target yang sudah ditetapkan

Petugas Inspektorat Pembantu I,

Yaya Mulyana
NIP 197[illegible]

Inspektor Pembantu I,

Ayuli Wibawo
NIP 197[illegible]

Jakarta, Desember 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Provinsi DKI Jakarta,

Dr. Ali [illegible], S.IP., M.Si.
NIP 197[illegible]

Mengetahui,
Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta,

Dina Hiriawati
NIP 197[illegible]

13) Capaian Indikator Kinerja Ketiga belas :

Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri

Indikator kinerja ketiga belas ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kesebelas yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN KHUSUS						
11	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persentase	80	96,44	120,55%	Tingkat Komponen Dalam Negeri

Indikator kinerja Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri di Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan dengan realisasi melebihi target sebesar 96,44 dengan target sebesar 80, sehingga capaian kinerja sebesar 120,55%. Sumber data dari Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
d. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Definisi :

a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (*self-declare*).
b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening :

   5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa

   5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

   5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.06 - Belanja Modal Lainnya

Pengukuran Kinerja :

Metode Pengukuran :

Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.

Sumber Data :

a. Bigbox LKPP
b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

Triwulan II :

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Laporan Capaian P3DN Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda pada Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 kepada Yth. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0613/PI.03 tanggal 2 Juli 2024, yaitu :

Sehubungan dengan target belanja Produk Dalam Negeri dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sasaran Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan indikator kinerja “Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri” yang harus dicapai pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 30%.

2. Formula pengukuran sasaran P3DN dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri} = \frac{\text{Jumlah realisasi belanja pengadan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri}}{\text{Realisasi pembayaran (SPJ) belanja pengadaan}} \times 100\%$$

3. Adapun hasil perhitungan capaian P3DN pada masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana telah dilakukan verifikasi oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada 1 Juli 2024.

b. Atas capaian sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas, maka disampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Bapak/Ibu Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda beserta jajaran yang telah menyukseskan program P3DN pada pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Triwulan IV :

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Laporan Capaian P3DN Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda pada Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 kepada Yth. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Plt. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0005/PI.03 tanggal 3 Januari 2025, yaitu :

Sehubungan dengan target Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa formula pengukuran sasaran P3DN dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	=	Jumlah realisasi belanja pengadan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri / Realisasi pembayaran (SPJ) belanja pengadaan	x 100%

c. Adapun hasil perhitungan capaian P3DN pada masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana telah dilakukan verifikasi oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, 30 Desember 2024 dan hari Kamis, tanggal 3 Januari 2025.

d. Atas capaian sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), saya menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Bapak/Ibu Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda beserta jajaran yang telah menyukseskan program P3DN pada pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

e. Selanjutnya, dengan ini diharapkan bantuan Bapak/Ibu Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda untuk :

   1. Melaksanakan penginputan sesuai dengan angka capaian P3DN sebagaimana data terlampir. Selanjutnya, akan dilakukan validasi oleh Asisten Sekda masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
   2. Melanjutkan penginputan data capaian dan pencatatan pelaksanaan non penyedia (swakelola) Tahun Anggaran 2024 pada aplikasi yang telah ditentukan sampai dengan 31 Januari 2025 (dalam rangka peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dan Penilaian Penghargaan P3DN Tingkat Nasional).

f. Bagi Bapak/Ibu Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda yang belum dapat memenuhi capaian Perjanjian Kinerja P3DN sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), dengan ini diharapkan agar Bapak/Ibu dapat melaporkan ke Asisten Sekda masing-masing beserta dengan alasan dan kronologisnya. Di samping hal tersebut, kami menghimbau agar Bapak/Ibu Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda tidak melakukan permohonan penyesuaian capaian indikator kinerja, dengan pertimbangan bahwa :

1. Program P3DN merupakan salah satu kebijakan tingkat nasional yang secara nyata mendorong Asta-Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, dalam misi : melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2. Program P3DN menjadi salah satu pengungkit *(leverage factors)* dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, dalam hal peningkatan investasi, pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara/daerah.
3. Program P3DN merupakan komitmen seluruh Kepala Daerah di Indonesia dan jajarannya dalam rangka melindungi dan membela produk dalam negeri berjaya di Indonesia.
4. Program P3DN merupakan salah satu faktor evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penilaian kinerja kepemimpinan Bapak Pj. Gubernur.
5. Program P3DN telah memasuki tahun ke 3 (ketiga) dalam penilaian kinerja P3DN Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda; dan
6. Kepala Perangkat Daerah/UKPD bertanggungjawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dan mengoptimalkan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

14) Capaian Indikator Kinerja Keempat belas :

Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun

Indikator kinerja keempat belas ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kedua belas yaitu Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN KHUSUS						
12	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase	100	100	100%	Pengem-bangan Kompetensi ASN

Indikator kinerja Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari Pengembangan Kompetensi ASN.

Pengukuran Kinerja :

Dasar Hukum :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

b. Instruksi Sekda Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per tahun.

Definisi :

Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekda Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklatbpsdm.jakarta.go.id.

Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama 2024.

Metode Pengukuran :

Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.

[(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)}

Sumber Data :

a. Bigbox LKPP

b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD.

15) Capaian Indikator Kinerja Kelima belas :

Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Indikator kinerja kelima belas ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang ketiga belas yaitu Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN KHUSUS						
13	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100%	Manajemen Risiko

Indikator kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari Pengembangan Kompetensi ASN.

Pengukuran Kinerja :

Dasar Hukum:

a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Definisi :

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra dan Renja PD yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan :

a. Komunikasi dan konsultasi;
b. Penetapan konteks;
c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);
d. Penanganan Risiko; dan
e. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.

Formula Pengukuran :

[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%

Output Sasaran :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II
Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV

Metode Pengukuran :

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :
Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II
Triwulan IV : Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV
Sumber Data : Hasil Verifikasi Inspektorat.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

Triwulan II :

BERITA ACARA REALISASI SASARAN KHUSUS PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian implementasi manajemen risiko s.d. Triwulan II Tahun 2024:

NO	PENILAIAN PERKIN		PENYELESAIAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO			HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT		
			TW II		TINDAK LANJUT SKPD			
	URAIAN		Ada	Tidak Ada		Setuju	Tidak	Catatan
1	Dokumen Laporan Pemantauan Risiko TW II		v		Terlampir Laporan Pemantauan Risiko Triwulan II			
2	Dokumen Laporan Pemantauan Risiko TW IV							
3	Target (Jumlah pencapaian yang diharapkan secara nyata dan terukur pada rentang waktu dalam satu tahun)	Presentase	50%					
4	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap triwulan)	Presentase	50%					
5	Capaian (Jumlah kumulatif realisasi setiap triwulan)	Presentase	50%					

Keterangan :
- Target Dokumen setiap Triwulan bersifat kumulatif dan berkesinambungan
- Pemenuhan target dokumen TW II s.d. TW IV merupakan hasil download dari sistem Si-Perisai

Petugas Verifikasi

Muhammad Iqbal Nasbitok
NIP 199900082014011001

Jakarta, Juni 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

Dr. Hendratta Hakim, S.IP.,M.Si
NIP 197606262010011001

Mengetahui,
Inspektur Pembantu I
selaku Sertifikator

Andi Wilowo
NIP 197704262998111001

LAPORAN PEMANTAUAN TRIWULAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023

Unit Organisasi : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Periode Pelaporan : 2023

Prioritas Risiko	Penanganan Risiko						Status Risiko	
	Aksi / Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Tren	Outlook Berakhir Level Risiko
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prioritas Risiko	Penanganan Risiko						Status Risiko	
	Aksi / Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Tren	Outlook Berakhir Level Risiko
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Jakarta, [illegible] 2024
Pimpinan Kota
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

[illegible], M.Si
NIP [illegible]

LAPORAN PEMANTAUAN TRIWULAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023

Unit Organisasi : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Periode Pelaporan : 2023

Peristiwa Risiko	Penanganan Risiko						Status Risiko	
	Aksi / Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Tren	Outlook Sesaran Level Risiko
1	MENGURANGI KEMUNGKINAN PENANGANAN TERADAP TERJADINYA	Laporan Hasil Inspektor Pelaksana	2 Laporan	Laporan Pengaduan Konsumen	09-11-2023	Kepala Bagian Pelayanan Tata Laksana dan Pelayanan Publik, selaku UKPS Kotamadya Kota Administrasi	TURUN	16 / Sedang
2	MENGURANGI KEMUNGKINAN PENANGANAN TERADAP TERJADINYA	Laporan hasil kesimpulan	12 Laporan	Laporan Pengaduan Masyarakat	09-10-2023	Kepala Bagian Pelayanan Tata Laksana dan Pelayanan Publik dan UKPD/SKPD Kotamadya yang terkait	TETAP	20 / Tinggi
3	MENGURANGI KEMUNGKINAN PENANGANAN TERADAP TERJADINYA	Hasil kuesioner	2 Kuesioner	Laporan Hasil Survey 2 semester	30-11-2023	Kepala Bagian Pelayanan Tata Laksana dan Pelayanan Publik	TETAP	20 / Sedang
4	MENGURANGI KEMUNGKINAN PENANGANAN TERADAP TERJADINYA	Surat pemberitahuan pengajuan komponen insentif	1 dokumen	Data Pengajuan Komponen insentif	09-11-2023	Kepala Bagian Keuangan	TURUN	20 / Sangat Tinggi
5	MENGURANGI KEMUNGKINAN PENANGANAN TERADAP TERJADINYA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 dokumen	Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan APA	09-11-2023	Kepala Bagian Keuangan, Kepala Subbagian	TURUN	20 / Tinggi
6	MENGURANGI KEMUNGKINAN PENANGANAN TERADAP TERJADINYA	Hasil saja kesimpulan	1 dokumen	Data Kinerja Pegawai SKPD	09-12-2023	Kepala Bagian Keuangan, Kepala Subbagian Akuntansi, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	TETAP	20 / Tinggi

Peristiwa Risiko	Penanganan Risiko						Status Risiko	
	Aksi / Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Tren	Outlook Sesaran Level Risiko
7	MENGURANGI KEMUNGKINAN PENANGANAN TERADAP TERJADINYA	Laporan pemeliharaan a-cuba	4 laporan	Laporan Pemeliharaan a-cuba	30-12-2023	Kepala Bagian Keuangan, Subbagian Aset	TURUN	16 / Sedang

Jakarta, 30 [illegible] 2024
Dinas [illegible]
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
[illegible]
[illegible] S.IP., M.Si
NIP [illegible]

Triwulan IV :

BERITA ACARA REALISASI SASARAN KHUSUS PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Bersama ini kami sampaikan progres pelaksanaan implementasi manajemen risiko s.d. Triwulan IV Tahun 2024

NO	PENILAIAN PEKKIN		PRAWELESRAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO			HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT		
			TW IV		TINDAK LANJUT SKPD			
	URAIAN		Ada	Tidak Ada		Sesuai	Tidak	Catatan
1	Dokumen Laporan Pemantauan Risiko TW II				1. Telah dituntut IK Walikotamenur e-IDG tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024, tentang tindakan Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepemilikan Internal di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara	Y		
2	Dokumen Laporan Pemantauan Risiko TW IV dan Laporan Pemantauan Risiko Tahunan		Y					
3	Target (Jumlah pencapaian yang direncanakan secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Prosentase	50%		2. Telah dilakukan Pemantauan Risiko Tahun 2024	Y		
4	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap triwulan)	Prosentase	50%					
5	Capaian (Jumlah kumulatif realisasi setiap triwulan)	Prosentase	100%					

Keterangan :
- Target Dokumen setiap Triwulan bersifat kumulatif dan berkelanjutan.
- Pencapaian target dokumen TW II s.d. TW IV merupakan hasil download dari sistem SiPerisai

Petugas Verifikator
Yiyn Mulyati
NIP 197006231988031008

Mengetahui,
Inspektur Pembantu I
selaku Pengendali
Tedi Wibowo
NIP 197302[illegible]

Jakarta, Desember 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
[illegible] Hakim, S.IP., M.Si
NIP [illegible]

LAPORAN PENILAIAN RISIKO
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2024

Unit Organisasi : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Periode Penerapan : 2024

Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian Yang dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Bobotan Risiko	Prioritas Risiko	Kepatuhan Penerapan
	No	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KECAMATAN	2	Adanya keluhan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di kecjar.	Ketidakmampuan pegawai	Kepuasan masyarakat di kecjar kecamatan dan kelurahan terhadap layanan	RISIKO OPERASIONAL	Aplikasi CRM	5	HAMPIR PASTI TERJADI	4	SIGNIFIKAN	Sangat Tinggi	22	1	Ya
INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	2	Adanya pelaku masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan dan pelayanan publik	Kualitas pelayanan publik rendah	Hasil evaluasi kinerja Walikota dan wilayah kurang baik dan tidak	RISIKO REPUTASI	Pemantauan berkelanjut, Koordinasi dan evaluasi antar SKPD Adm	4	SERING TERJADI	4	SIGNIFIKAN	Tinggi	20	2	Ya
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KECAMATAN	2	[illegible]	Kurangnya pemahaman pegawai saat adanya masyarakat pelak	Ketidakmampuan masyarakat akses masyarakat	RISIKO OPERASIONAL	Monitoring aplikasi CRM yang dilakukan setiap hari	3	KADANG TERJADI	4	SIGNIFIKAN	Tinggi	17	3	Ya
INDEKS EFEKTIFITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI	4	Keterlambatan pelaporan progres [illegible]	[illegible]	[illegible]	RISIKO OPERASIONAL	Mengadakan monitoring secara [illegible]	3	JARANG TERJADI	3	MODERAT	Rendah	11	4	Ya
PERSENTASE IMPLEMENTASI SONCANA STRATEGI KOMUNIKASI	2	[illegible]	Tidak ada data akurat sebagai sumber [illegible]	Informasi akurat tidak tersampaikan dengan baik	RISIKO REPUTASI	Media [illegible] online	3	HAMPIR TIDAK TERJADI	4	SIGNIFIKAN	Rendah	8	5	Tidak
NILAI KUALITAS DATA SDI	1	Tidak terpenuhinya [illegible]	[illegible]	Informasi akurat tidak tersampaikan dengan baik	RISIKO REPUTASI	Media [illegible] online	3	JARANG TERJADI	1	TIDAK SIGNIFIKAN	Sangat Rendah	3	6	Tidak

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			TIDAK SIGNIFIKAN	MINOR	MODERAT	SIGNIFIKAN	SANGAT SIGNIFIKAN
Level Kemungkinan	5	HAMPIR PASTI TERJADI	9	15	18	☆ 23	25
	4	SERING TERJADI	6	12	16	☆ 19	24
	3	KADANG TERJADI	4	10	14	☆ 17	22
	2	JARANG TERJADI	☆ 2	7	☆ 11	13	21
	1	HAMPIR TIDAK TERJADI	1	3	5	☆ 8	20

Jakaria, 17 Desember 2024
Ditetapkan oleh:
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

DR. ALI MAULANA HAKIM, S.IP., M.SI
NIP 197204251991011001

LAPORAN PENANTAUAN TAHUNAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2024

Unit Organisasi : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Periode Penerapan : 2024

Prioritas Risiko	Level Risiko Sebelumnya			Risiko Residual Harapan			Level Risiko Aktual			Tren Risiko	Deviasi/Kesenjangan	Rekomendasi
	LK	LD	LR	LK	LD	LR	LK	LD	LR			
1	5	4	23	3	4	17	4	4	20	TURUN	TURUN	Tidak dilakukan peringkasan komponen pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi regulasi terkait pelayanan publik serta Evaluasi Standar Operasional
2	4	4	19	3	4	17	3	4	17	TURUN	TURUN	Tidak dengkatkan koordinasi, kolaborasi dan evaluasi antar SKPD dalam penerbitan layanan publik yang prima
3	3	1	17	1	4	8	1	4	8	TURUN	TURUN	Dari Daftar rekapitulasi tidak menyarakat dalam CRN per periode tertentu berkurang
4	2	3	11	1	3	5	1	3	5	TURUN	TURUN	Laporan Evaluasi dan koordinasi Ketua UKPD

Keterangan: LK : Level Kemungkinan, LD : Level Dampak, LR : Level Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			TIDAK SIGNIFIKAN	MINOR	MODERAT	SIGNIFIKAN	SANGAT SIGNIFIKAN
Level Kemungkinan	5	HAMPIR PASTI TERJADI	8	15	18	23	25
	4	SERING TERJADI	6	12	16	19	24
	3	KADANG TERJADI	4	10	14	17	22
	2	JARANG TERJADI	2	7	11	13	21
	1	HAMPIR TIDAK TERJADI	1	3	5	8	20

Jakarta, 19 Desember 2024
Ditetapkan oleh:
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

DR. ALI MAULANA HAKIM, S.IP., M.SI
NIP 197204261991011001

16) Capaian Indikator Kinerja Keenam belas :

Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

Indikator kinerja keenam belas ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang keempat belas yaitu Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN KHUSUS						
14	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100	100	100%	Inventari-sasi Barang Milik Daerah

Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Pengukuran Kinerja :

Definisi :

Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB.

Penghitungan :

(Melalui sistem e-Inventarisasi)

a. Bobot 5%: PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD.
b. Bobot 85%: PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki.

c. Bobot 10%: PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).

17) Capaian Indikator Kinerja Ketujuh belas :

Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program

Indikator kinerja ketujuh belas ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kelima belas yaitu Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN KHUSUS						
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program	Persentase	100	100	100%	Strategi Komunikasi

Indikator kinerja Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari Strategi Komunikasi.

Pengukuran Kinerja :

Definisi :

a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivasi komunikasi lainnya.
c. Persentase respons terhadap krisis komunikasi.

d. Persentase respons interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.

Metode Pengukuran :

a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.
c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respons terhadap krisis komunikasi.
d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respons interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

Triwulan I :

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Nota Dinas Laporan Publikasi Materi Komunikasi Rencana Kinerja (Renkin) Strategi Komunikasi Tahun 2024 kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-000/PU.04.00 tanggal 27 Maret 2024, yaitu :

a. Sehubungan dengan pembuatan Rencana Kinerja Strategi Komunikasi Program Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara telah mempublikasikan Program/ Kegiatan Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
    2. Terkait program dimaksud, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara telah berupaya melakukan kegiatan-kegiatan secara teknis yaitu perbaikan saluran, normalisasi sungai, pengerukan lumpur pada saluran, turap, penanaman pohon dan beberapa hal lainnya. Publikasi materi kegiatan dimaksud

dilakukan dalam bentuk pembuatan, penyebarluasan press release, produksi dan penayangan materi infografis, produksi materi motion gratis;

3. Materi-materi komunikasi dimaksud telah berupaya menjelaskan antara lain : bahwa dalam rangka Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir genangan dan sejumlah titik yang terdampak banjir serta ROB seperti membersihkan saluran/tali air, melakukan pengerukan atau normalisasi sungai, serta pengaktifan rumah-rumah pompa masih menjadi kegiatan yang dilakukan secara terus menerus serta berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Tabel 3.22. Rekapitulasi Penyiapan dan Publikasi Materi Komunikasi Program Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan I Tahun 2024

No	Tanggal	Judul	Media dan Tautan	Foto
1.	22 Januari 2024	Peninggian Saluran Turap di JI. Kapuk Raya	Instagram: https://www.instagram.com/p/C2ZNGNMyw70/?utm_source=ig_web copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==	
2	24 Januari 2024	Pengurasan Saluran JI. Muara Anke Blok D	Instagram: https://www.instagram.com/p/C2d8zopxcCu/?utm_source=ig web copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==	
3	28 Januari 2024	Pengurasan Saluran PHB	Instagram: https.//www.mstagram.com/p/C2odQyARmMw/?utm source=ig web copy link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==	

No	Tanggal	Judul	Media dan Tautan	Foto
4	7 Februari 2024	Pengurasan Saluran Jl. Bandengan Raya	Instagram: https://www.instagram.com/p/C388kxoxDeA/?utm_source""Ig_web copy link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==	
5.	15 Februari 2024	Perbaikan Turap Saluran Jl. Pluit Sakti 1 RW 07 Penjaringan	Instagram : https://www.instagram.com/p/C3XMjsJPBzs/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==	
6.	19 Februari 2024	Pengurasan Saluran Jl. Muara Karang Barat Rw.8 Pluit, Penjaringan	Instagram: https://www.instagram.com/p/C3haPmvAWO/?utm_source=ig_web_copy link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==	
7.	22 Februari 2024	Pengerukan Waduk Pluit	Youtube: https://youtu.be/n4UpN Fy7FU	
8.	29 Februari 2024	Pompa Waduk Pluit	Youtube: https.//youtu.be/6H tXZn9YsY	
9.	1 Maret 2024	Perbaikan Turap Saluran Jl. Pluit Sakti 1 Rw 07, Penjaringan	Facebook: https://www.facebook.com/share/p/uYN2pvrMrNiCB3Vb/?mibextid=xfx F2i	

No	Tanggal	Judul	Media dan Tautan	Foto
10.	1 Maret 2024	Perbaikan Turap Saluran Jl. Pluit Sakti 1 Rw 07, Penjaringan	Yuutube:: https://youtu.be/Qkek4-Thdh4	
11.	8 Maret 2024	Pengurasan Saluran Jl. Lempuk Teluk Gong RT 011 Rw 013	Instagram: https://www.instagram.com/p/C4PkV0Jvsyo/?igsh=M3FIOG53czV4ZGm	
12.	11 Maret 2024	Pengurasan Saluran di jl Pluit Selatan RW 017	Facebook: https://www.facebook.com/share/4eAi1YDgAMcXgdjs/?mibextid=xfxF2i	
13.	15 Maret 2024	Progres Pengerukan Waduk Pluit	Youtube: https://youtu.be/OVEjXNrtlGY?si=3IQ4zi5y_6xxQHa3O	
14.	20 Maret 2024	Pengerukan dan Operasional Pompa Pasar Ikan	Youtube : https://youtu.be/az6dWJ2U4C4	
15.	26 Maret 2024	Rakor Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembersih Saluran Air	Instagram : https://www.instagram.com/p/C49nof_x-dA/?img_index=1	

Triwulan II :

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Nota Dinas Laporan Publikasi Materi Komunikasi Rencana Kinerja (Renkin) Strategi Komunikasi Triwulan II Tahun 2024 kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0009/PU.04.00 tanggal 26 Juni 204, yaitu :

a. Sehubungan dengan pembuatan Rencana Kinerja Strategi Komunikasi Program Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :

    1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara telah mempublikasikan Program/ Kegiatan Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
    2. Terkait program dimaksud, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara telah berupaya melakukan kegiatan-kegiatan secara teknis yaitu perbaikan saluran, normalisasi sungai, pengerukan lumpur pada saluran, turap, penanaman pohon dan beberapa hal lainnya. Publikasi materi kegiatan dimaksud dilakukan dalam bentuk pembuatan, penyebarluasan press release, produksi dan penayangan materi infografis, produksi materi motion gratis;
    3. Materi-materi komunikasi dimaksud telah berupaya menjelaskan antara lain : bahwa dalam rangka Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir genangan dan sejumlah titik yang terdampak banjir serta ROB seperti membersihkan saluran/tali air, melakukan pengerukan atau normalisasi sungai, serta pengaktifan rumah-rumah pompa masih menjadi kegiatan yang dilakukan secara terus menerus serta berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Tabel 3.23. Rekapitulasi Penyiapan dan Publikasi Materi Komunikasi Program Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan II Tahun 2024

No	TANGGAL	JUDUL	MEDIA & TAUTAN	FOTO
1.	1 April 2024	Perbaikan Turap di Jalan Puskesmas 6, Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading	Instagram : https://www.instagram.com/p/C5NdVBQROmh/?igsh=MWwzaG8zbm52OXF0cQ==	
2.	5 April 2024	Perbaikan Turap Jalan Giring-Giring, Kecamatan Kelapa Gading	Instagram : https://www.instagram.com/p/C5XWXdGRXfX/	
3.	7 April 2024	Perbaikan Saluran Jalan Sengon Gading Kirana no. 8	Instagram : https://www.instagram.com/p/C5dxGEeyQnC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==	
4.	17 April 2024	Pengurasan Saluran Jl. Bandengan Raya	Instagram : https://www.facebook.com/share/p/UEAy76yL9FVuyNdJ/?mibextid=xfxF2I	

No	TANGGAL	JUDUL	MEDIA & TAUTAN	FOTO
5.	25 April 2024	Pengurasan Saluran PHB Jalan Tabah1 (PHB 1)	Instagram : https://www.instagram.com/p/C6LL-JqRZbd/?igsh=MWY3Y29nenpmcHljaQ==	
6.	3 Mei 2024	Pengerukan Saluran PHB Nias, Kelapa Gading	Youtube : https://youtu.be/KnKuFcPnb3U?si=QDmvpswGAaEMtxQx	
7.	8 Mei 2024	Pengerukan Saluran PHB Kirana, Kelapa Gading	Youtube : https://youtu.be/yS_HEKhUAmk?si=gIPbZSoC_zlT5Hof	
8.	14 Mei 2024	Pengurasan Saluran Jalan Boulevard Raya Rw 12	Instagram : https://www.instagram.com/p/C671oRgvOw-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==	

No	TANGGAL	JUDUL	MEDIA & TAUTAN	FOTO
9.	17 Mei 2024	Pengecekan Pompa Kali Betik	Youtube : : https://youtu.be/s73tCA_ekmE	
10.	28 Mei 2024	Perbaikan saluran PHB Jalan Raya Hibrida, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading	Instagram : https://www.instagram.com/p/C7gN6HvxoIC/?igsh=MTd1N3Jhc24ya210NQ==	
11.	6 Juni 2024	Perbaikan Saluran Jalan Yos Sudarso 1, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading	Facebook : https://www.facebook.com/share/p/idPto6hCnTa3g5Ez/?mibextid=oFDknk	
12.	11 Juni 2024	Pembuatan Crossingan Saluran Jalan Pulau Raya Rw 03, Kelapa gading	Facebook : https://www.facebook.com/share/p/kisPzMWZ2nsVHvZS/?mibextid=xfxF2i	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA & TAUTAN	FOTO
13.	14 Juni 2024	Pompa Kelapa Gading Don Bosco	Youtube : https://youtu.be/9RIANsLqRJU?si=Hb4J746o29lpsg1J	
14.	20 Juni 2024	Rumah Pompa Artha Gading	Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=_bZ_mWV1uAEs	
15.	23 Juni 2024	Aksi bersih-bersih massal yang melibatkan 110 petugas gabungan dan masyarakat dilaksanakan di Jalan Raya Kelapa Hybrida RW 015 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa	Instagram : https://www.instagram.com/reel/C8oC__nvgrr/?igsh=dDJmeDFiZC2VwaDNg	

Triwulan III :

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Nota Dinas Laporan Publikasi Materi Komunikasi Rencana Kinerja (Renkin) Strategi Komunikasi Triwulan III Tahun 2024 kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0012/PU.04.00 tanggal 24 September 2024, yaitu :

a. Sehubungan dengan pembuatan Rencana Kinerja Strategi Komunikasi Program Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kata Administrasi Jakarta Utara, telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :
   1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara telah mempublikasikan Program/ Kegiatan Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;

2. Terkait program dan Materi komunikasi dimaksud, Walikota Kata Administrasi Jakarta Utara telah berupaya melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kata Administrasi Jakarta Utara, telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir genangan dan sejumlah titik yang terdampak banjir serta ROB seperti membersihkan saluran/tali air, melakukan pengerukan atau normalisasi sungai, serta pengaktifan rumah-rumah pompa masih menjadi kegiatan yang dilakukan secara terus menerus serta berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendapatkan hasil yang optimal. Publikasi materi kegiatan dimaksud dilakukan dalam bentuk pembuatan, penyebarluasan press release, produksi dan penayangan materi infografis, produksi materi motion gratis;

Tabel 3.24. Rekapitulasi Penyiapan dan Publikasi Materi Komunikasi Program Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan III Tahun 2024

No	TANGGAL	JUDUL	MEDIA & TAUTAN	FOTO
1.	8 Juli 202	Pengurasan Saluran di Jalan Agung Niaga Rt 14 RW 13 Sunter Agung,Tanjung Priok	Instagram : https://www.instagram.com/p/C9EGBeTSIRW/?utm_source=ig_web_copy_link&gsh=MzRlODBiNWFlZA==	
2.	8 Juli 2024	Perbaikan Saluran Jalan Agung Tengah	Instagram : https://www.instagram.com/p/C9JUssnSTpq/?igshmbDZacTN1N2lxMDB4)	
3.	16 Juli 2024	Pengurasan Saluran Swasembada Barat 7 RT 012 RW 09, Tanjung Priok	Facebook : https://www.facebook.com/share/p/r1DNMxcwfV7SEcqH/?mibextid=oFDknk	
4.	24 Juli 2024	Perbaikan Turap Saluran di Jalan Griya Molek Rw 20, Sunter Agung, Tanjung Priok	Facebook : https://www.facebook.com/share/p/1s1hntNXGtZVhk1P/?mibextid=oFDknk	

No	TANGGAL	JUDUL	MEDIA & TAUTAN	FOTO
5.	30 Juli 2024	Pengurasan Saluran Jalan Sunter Hijau Rw 010 Kel. Sunter Jaya, Tanjung Priok	Instagram : https://www.instagram.com/p/C-CBBiFSKGD/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==	
6.	6 Agustus 2024	Pengerukan Waduk Cincin	**Youtube :** https://youtu.be/nUTBIs3e-Qg	
7.	12 Agustus 2024	Pengurasan saluran Jalan Sunter karya Selatan Rt 017 Rw 013	**Instagram;** https://www.instagram.com/p/C-mGc-pPAYV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==	
8.	16 Agustus 2024	Pengurasan saluran Jalan Sunter Agung Tengah Rw 16	Instagram : https://www.instagram.com/p/C-t8UfapPpZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==	

No	TANGGAL	JUDUL	MEDIA & TAUTAN	FOTO
9.	20 Agustus 2024	Pompa Sunter Selatan	Youtube : https://youtu.be/6pEI3yhiSQQ	
10.	28 Agustus 2024	Pengurasan Saluran Jalan Sunter Indah Rw 03 Rw 13 Kel. Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok	Instagram : https://www.instagram.com/p/C_HlrpGyYkf/?igsh=MWI2a3dlempoZHBsdA%3D%3D	
11.	2 September 2024	Pengurasan Saluran Jalan Bisma RT 012 RW 009 Kelurahan Papanggo	Facebook : https://www.facebook.com/share/p/8D9kcth9AWNhXRZj/?mibextid=qi2Omg	
12.	6 September 2024	Pengurasan Saluran Jalan Sunter Mas Timur Rt 009 RW 008 Kelurahan	Facebook : https://www.facebook.com/share/p/vGRtoTUEPdN1Ruvs/?mibextid=xfxF2j	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA & TAUTAN	FOTO
13.	10 September 2024	Pompa Sunter Utara	Youtube : https://youtu.be/3NXpBTaspag	
14.	17 September 2024	Perbaikan Turap Saluran	Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=s7OTUtwH6C0	
15.	22 September 2024	Antisipasi Musim Penghujan, Kecamatan Tanjung Priok mengadakan kerja bakti massal	Instagram : https://www.instagram.com/p/DANrvUeP7sB/?igsh=MWdObG93cXM0c2t5Nw==	

Triwulan IV :

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Nota Dinas Laporan Publikasi Materi Komunikasi Rencana Kinerja (Renkin) Strategi Komunikasi Triwulan IV Tahun 2024 kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0014/PU.04.00 tanggal 23 Desember 2024, yaitu :

a. Sehubungan dengan pembuatan Rencana Kinerja Strategi Komunikasi Program Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :
   1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara telah mempublikasikan Program/ Kegiatan Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB Terkait program dan Materi komunikasi dimaksud, Walikota Kata Administrasi Jakarta Utara telah berupaya melakukan kegiatan-

kegiatan dalam rangka Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kata Administrasi Jakarta Utara, telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir genangan dan sejumlah titik yang terdampak banjir serta ROB seperti membersihkan saluran/tali air, melakukan pengerukan atau normalisasi sungai, serta pengaktifan rumah-rumah pompa masih menjadi kegiatan yang dilakukan secara terus menerus serta berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendapatkan hasil yang optimal. Publikasi materi kegiatan dimaksud dilakukan dalam bentuk pembuatan, penyebarluasan press release, produksi dan penayangan materi infografis, produksi materi motion gratis.

Tabel 3.25. Rekapitulasi Penyiapan dan Publikasi Materi Komunikasi Program Antisipasi Genangan dan Banjir Serta ROB di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2024

No	Tanggal	Judul	Media dan Tautan	Foto
1.	9 Oktober 2024	Pengurasan Saluran di Jl. Alur Laut 1, Koja	Instagram: https://www.instagram.com/p/DA5CIwiSfiu/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==	
2	14 Oktober 2024	Perbaikan saluran di Jalan Pasar Bendungan Melayu, Koja	Instagram: https://www.instagram.com/p/DBFxFqtyEyB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA	
3	17 Oktober 2024	Pengurasan Saluran Jl. Bendungan Melayu Pasar Kaget, Koja Jakarta Utara	Facebook: https://www.facebook.com/share/p/QWQADbLGDeWfMA7b/	

No	Tanggal	Judul	Media dan Tautan	Foto
4.	22 Oktober 2024	Pengerukan PHB Bendungan Melayu	Youtube: https://youtu.be/21u6nwp U8I	
5	30 Oktober 2024	Pengurasan Saluran Jalan Lagoa Terusan C1	Instagram: https://www.instagram.com/p/DBwOa0tyJxJ/?igsh=MXZrbWc3aGp0Y3QyeA==	
6	5 November 2024	Perbaikan Saluran Jl. Alur Laut Rt.001 Rw. 003 Rawabadak Selatan, Koja	Facebook: https://www.facebook.com/share/p/14X2rniND9/	
7.	8 November 2024	Pengurasan Saluran Jalan Bhayangkara Pasar Koja	Instagram: https://www.instagram.com/p/OCGwwVDPHra/?igsh=MWQOMmt6dnU2bzVqbq==	
8.	13 November 2024	Pengecekan dan Operasional Pompa Koja di Kec. Koja	Youtube; https://youtube.com/shorts/PuWkYEUse_k?si=fl5KEg_iKTKjKaaS	
9.	20 November 2024	Pengurasan di Jalan Gereja RW.07, Koja	Facebook: https://www.facebook.com/share/p/14CNSkaSmA I	

No	Tanggal	Judul	Media dan Tautan	Foto
10.	26 Desember 2024	Perbaikan Turap Saluran Jl. Dahlia II Rt.004 Rw.13	Instagram: https://www.instagram.com/shar	
11.	5 Desember 2024	Pengecekan dan Operasional Pompa Koja di Kec. Koja	Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Qs4udzgPdes	
12.	9 Desember 2024	Pengurasan Saluran Jalan Anggrek Tugu Permai Rw 12, Tugu Utara Koja	Facebook: https://www.facebook.com/share/4eAi1YDgAMcXgdjs/?mibextid=xfxF2i	
13.	12 Desember 2024	Perbaikan Saluran Jalan H. Murtado Rw 12 Kelurahan Tugu Utara, Koja	Instagram: https://www.instagram.com/p/ODeOKpmS1uK/?igsh=MWU2ZDU1aXl2MmlodA	
14.	17 Desember 2024	Pengurasan Jalan Komplek UK RW 03 RW 08, Koja	Facebook: https://www.facebook.com/share/p/1KjtYmYG3j/	
15.	22 Desember 2024	Antisipasi Banjir, Ratusan Petugas Gabungan Bersihkan Kali Bendungan Melayu	Instagram: https://www.instagram.com/p/DDlnCHRp9oH/?img ndex=1	

18) Capaian Indikator Kinerja Kedelapan belas :

Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan

Indikator kinerja kedelapan belas ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang keenam belas yaitu Meningkatnya Manajemen Pengetahuan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN KHUSUS						
16	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persentase	100	100	100%	Manajemen Pengetahuan

Indikator kinerja Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari Strategi Komunikasi.

Pengukuran Kinerja :

Dasar Hukum :

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

Definisi :

Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id

Metode Pengukuran :

Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).

Sumber Data :

https://km-bpsdm.jakarta.go.id

Manajemen Pengetahuan

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

Triwulan I : -

Triwulan II : -

Triwulan III :

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Nota Dinas Laporan Capaian Target Sasaran Khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 TW III Dengan Sasaran Meningkatnya Manajemen Pengetahuan kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0057/PU.04.02 tanggal 30 September 2024, yaitu :

a. Dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan dan menindaklanjuti target sasaran khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan sasaran Meningkatnya Manajemen Pengetahuan dengan target realisasi berupa 4 laporan berbentuk video maupun tulisan dikumpulkan pada triwulan III dan triwulan IV, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan penghimpunan 2 (dua) aset pengetahuan dalam bentuk artikel tulisan dan/atau video;
   2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kurasi seluruh aset pengetahuan dan akan mengunggah aset pengetahuan yang terhimpun pada Portal KM https://km-bpsdm.jakarta.go.id/.

Tabel 3.26. Daftar Capaian Target Sasaran Khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2024 Dengan Sasaran Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

No.	Perangkat Daerah	Format Aset	Konten
1	Inspektorat	Video	Simantab Fitur Baru Tahun 2024
		PDF	Dokumentasi Pengalaman Panduan Pejabat dan Sekolah Menggunakan Sistem Ajar Pendidikan Anti Korupsi (SAPA)
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Video	Satu Menit Statistik Jakarta Dalam Peringkat Kota Global
		Video	Upaya Strategis Dalam Menuju Jakarta Kota Global

No.	Perangkat Daerah	Format Aset	Konten
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Video	Penyusunan Perubahan APBD
		Video	Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4	Badan Kepegawaian Daerah	PDF	Dokumentasi Pengalaman Sosialisasi Peraturan UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
		PDF	Dokumentasi Pengalaman Rapat Teknis Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PDF	Format Form Dokumentasi Pengetahuan
		PDF	Format Form Dokumentasi Pengalaman
		PDF	Format Form Penyusunan Kurikulum
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Video	Jelajah Jejak Batavia
		Video	Pameran Jakarta Tangguh Tahun 2024
7	Badan Pendapatan Daerah	Video	Video Sosialisasi Pajak Alat Berat
		Video	Video Retribusi Online Sistem
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Video	Definisi dan Asas Pemilihan Umum
		PDF	Jurnal Demokrasi Volume 01 Edisi April 2024
9	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Video	Progres Pembangunan LRT Fase 1S Rute Velodrom Manggarai
		PDF	Dokumentasi Pengalaman Sosialisasi Terkait Skrining Kesehatan Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Bagi Pegawai BUMD
10	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Video	Sistem E-Persediaan
		Video	Panduan Penempelan QR Code Pada BMD
		Video	Sistem Penatausahaan Aset Lancar (E-Persediaan) Part 1
		Video	Sistem Penatausahaan Aset Lancar (E-Persediaan) Part 2
		Video	Jejaka - Halte TJ Bundaran HI
		Video	Jejaka - Taman Literasi Martha Tiahahu
11	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	PDF	Prosedur Pengusulan Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		PDF	Potensi Jenis Sengketa Dan Pencegahan Permasalahan Hukum Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
12	Satuan Polisi Pamong Praja	Video	Aturan Dalam Hari bebas kendaraan bermotor
		Video	Fungsi Trotoar Untuk Pejalan Kaki
13	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Video	Udara Bersih Untuk Jakarta
		Video	Posyandu Mawar Melati Rawasari
14	Kota Administrasi Jakarta Utara	Video	Video Proklim Tahun 2024 RW 08 Ancol
		Video	Video Proklim Tahun 2024 RW 01 Tugu Utara

No.	Perangkat Daerah	Format Aset	Konten
15	Kota Administrasi Jakarta Barat	Video	Beranda Baca Kantor Walikota Jakarta Barat
		Video	Jelajah Jakarta Barat (Hutan Kota Srengseng)
		Video	Jelajah Jakarta Barat (Museum Fatahilah)
		Video	Jelajah Jakarta Barat (Toko Merah)
		Video	Jelajah Jakarta Barat (Gedung Candranaya)
		Video	Jelajah Jakarta Barat (Kali Besar Kota Tua)
		Video	Jelajah Jakarta Barat (Museum Wayang)
		Video	Jelajah Jakarta Barat (Vihara Hemadhiro)
16	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Video	Posyandu Remaja Bagus
		Video	Website Kelurahan Pengadegan
17	Kota Administrasi Jakarta Timur	Video	Atasi Permasalahan Genangan Saat Hujan Deras
		Video	Kelompok Tani RT 05 Kelurahan Setu Panen 50 Kg ikan Berbagai Jenis
18	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Video	Liputan Wisata Pulau Harapan
		Video	Destinasi Wisata Kepulauan Seribu
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Video	Apa itu Reses
		Video	Penjelasan Tentang Sekretariat DPRD
20	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Video	Cara Mengurus NIK Yang Terkena Penataan Dan Penertiban Dokumen Kependudukan
		Video	Cara Mengatasi NIK Yang Tidak Ditemukan Saat Akses Pelayanan Publik
21	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Video	Cegah Kebakaran
		Video	Pemadaman Kebakaran Sederhana
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan	Video	Laboratorium UPPISP Pengujian Anti Slip Alas Kaki
		Video	Seberapa tahu masyarakat mengenai meteorologi
23	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	PDF	Dokumentasi Pengetahuan Pembelajaran Budidaya ikan laut dan ikan hias laut
		Video	PBKL Pulau Tidung
		PDF	Dokumentasi Pengetahuan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban
		Video	Pelayanan Am Pm Idul Adha Tahun 2024
		PDF	Dokumentasi Pengetahuan Produksi Trichoderma Semi Padat
		Video	Trichoderma Semi Padat
		PDF	Dokumentasi Pengetahuan Cara Budidaya ikan Yang Baik
		Video	Budidaya ikan Nila

No.	Perangkat Daerah	Format Aset	Konten
24	Dinas Kebudayaan	Video	Museum Sejarah Jakarta
		Video	Telusur Kampung Budaya Jakarta
25	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Video	Bimtek Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pariwisata Jenis Usaha Restoran 5 Maret Tahun 2024
		Video	Bimtek Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pariwisata Jenis Usaha Restoran 6 Maret Tahun 2024
26	Dinas Perhubungan	PDF	Upaya Dishub Untuk Menjadikan Jakarta Sebagai Kota Global
		PDF	Tarif Terintegrasi
27	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi	Video	Implementasi Konservasi Energi Jakarta
		Dokumen	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Ketenagakerjaan
28	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Video	Izin Usaha Klinik Hewan
		Video	Tutorial Layanan Jasa Desain Gambar Teknik Perizinan dan Non perizinan Gratis
29	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	Video	Aplikasi SEPAKAT
		Video	Kajian Penataan Kawasan Interconnecting Community Market Kota Adm. Jakarta Timur (Kawasan Pasar Pramuka, Pasar Burung, dan Pasar Matraman)
30	Dinas Sumber Daya Air	Video	Paparan Pemerataan Infrastruktur Air Jakarta
		Video	Stasiun Penurunan Air Tanah
31	Dinas Lingkungan Hidup	Video	Udara- Dinas Lingkungan Hidup
		Video	Retribusi Pelayanan Kebersihan
32	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Video	Layanan Restorasi Arsip Dispusip
		Video	Pengolahan Bahan Pustaka
33	Dinas Sosial	Dokumen	Penyaluran ABF
		Dokumen	Penyaluran Alat Bantu Fisik bagi Penyandang Disabilitas/Lansia
34	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Video	Tutorial Registrasi & Approval Anggota TP PKK DKI Jakarta Pada Website SIM PKK
		Video	Fenomena All Male Panels
35	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Video	Digitalisasi Kesehatan Pohon Terintegrasi (Di-Kepo-In)
		Video	Pengolahan Pupuk Kompos
36	Dinas Bina Marga	Video	Kelengkapan Alat Penertiban Kabel Udara
		Video	Uji Slump Beton
37	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Video	Aset pembelajaran (Akbar bidang perumahan)
		Video	Aset pembelajaran HTM
38	Dinas Pendidikan	Video	Mekanisme Pendaftaran PPDB Bersama Tahun 2024
		Video	Tutorial Pengisian Rekrutmen KKI untuk Tendik dari Formasi Tenaga Honorer

No.	Perangkat Daerah	Format Aset	Konten
39	Dinas Kesehatan	Video	Bantuan Hidup Dasar
		Video	Stroke tanah abang
40	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Video	Panduan Pengajuan Layanan Virtual Meeting
		Video	Panduan Pengajuan Pengaduan
41	Dinas Olahraga Dan Pemuda	Video	Tutorial Dasar Bermain Basket
		Video	Tutorial Dasar Bermain Bulu tangkis
42	Biro Pemerintahan	Video	Daerah Khusus Jakarta Video 1
		Video	Penanganan Pengaduan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta Melalui Aplikasi CRM
43	Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi	Video	Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (RBBK II)
		Video	Pertimbangan Dalam Menentukan Arah Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Provinsi Daerah Khusus Jakarta
44	Biro Kerja Sama Daerah	Video	Kegiatan Biro Kerja Sama Daerah Tahun 2024
		Video	Event Crisis Management Conference Tahun 2024
45	Biro Perekonomian Dan Keuangan	Dokumen	Laporan TPID Triwulan I Tahun 2024
		Dokumen	Paparan Sharing Session ini Menjelaskan Terkait Perkembangan Perekonomian Dan lsu-isu Terkait Perekonomian Terkini Di Jakarta
46	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	Video	Penghematan Energi Dan Listrik Di Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah
		Video	Perawatan Gedung Di Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah
47	Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup	Dokumen	Pengelolaan Kawasan Transit Oriented Development
		Dokumen	Persepsi Masyarakat Terhadap Trotoar Dengan Penghijauannya Dan Strategi Pencapaiannya Di Jakarta
48	Biro Kesejahteraan Sosial	Video	Penyediaan Ruang Laktasi
		Video	Pemantauan & Evaluasi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
49	Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual	Video	Rekrutmen PHO Tahun 2024
		Video	Cagar Budaya
50	Biro Kepala Daerah	Dokumen	Infografis Ketentuan Pengajuan Piagam/Sertifikat yang Ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Berdasarkan SE Sekda Nomor 21 Tahun 2023
		Video	Penerimaan Surat yang ditujukan untuk Gubernur Melalui Loket
51	Biro Hukum	Video	Website pencarian produk hukum
		Video	E-Produk Hukum

Triwulan IV :

Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Nota Dinas Laporan Capaian target sasaran khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah triwulan IV Tahun 2024, dengan sasaran Meningkatnya Manajemen Pengetahuan kepada Yth. Bapak Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-03133/PU.01.01 tanggal 27 Desember 2024, yaitu :

a. Dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan dan menindaklanjuti target sasaran khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024, yang berfokus pada Meningkatnya Manajemen Pengetahuan, berupa 4 laporan aset pengetahuan berbentuk video maupun tulisan dikumpulkan pada Triwulan Ill dan Triwulan IV, dengan hormat kami informasikan hal-hal sebagai berikut, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan penghimpunan 2 (dua) aset pengetahuan dalam bentuk artikel tulisan dan/atau video;
   2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kurasi seluruh aset pengetahuan dan akan mengunggah aset pengetahuan yang terhimpun pada Portal KM https://km-bpsdm.jakarta.go.id/.

Tabel 3.27. Daftar Capaian Target Sasaran Khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024 Dengan Sasaran Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

No.	Perangkat Daerah	Format Aset	Konten
1	Inspektorat	Video	Edukasi Gerakan Anti Korupsi
		Video	Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Video	Apa Itu Kemiskinan Ekstrem
		Video	Keluarga Dokumen Perencanaan
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	Dokumentasi Pengetahuan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
		Video	Suku Saku Pedoman penyampaian SPM
		Video	Penerbitan SP2D dalam pencairan Anggaran

No.	Perangkat Daerah	Format Aset	Konten
4	Badan Kepegawaian Daerah	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Raih Peringkat ke 3 Audit Sistem Kearsipan Internal Tahun 2024
		Dokumen	Bimbingan Teknis Metode Pemeriksaan dalam Pemberian Sanksi terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara
		Video	Peningkatan Kinerja Layanan Administrasi Daerah Melalui Digitalisasi Naskah Dinas
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dokumen	Pengembangan Kompetensi (Pemagangan)
		Dokumen	Menjadi Widyaiswara Tangguh Dalam Penyiapan ASN Unggul Untuk Jakarta Kota Global Yang Menyejahterakan
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Video	Kenai Lebih Dalam Layanan Dukungan Psikososial (LDP)
		Infografis	Mengenal Fitur dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Bencana (SIMSA)
7	Badan Pendapatan Daerah	Dokumen	Jenis Cuti Pegawai Negeri Sipil
		Video	Sosialisasi PBB-P2
		Video	Cara mendaftarkan PBJT atas Jasa Makanan dan Minuman Melalui Pajak Online
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Video	Identitas Negara sebagai Pemersatu Bangsa
		Video	Wawasan Kebangsaan
9	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Video	Rumah Susun Sewa Pasar Rumput
		Video	Hunian Nyaman dan Terjangkau
10	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Video	Tutorial Sistem Penatausahaan Aset Lancar (E-Persediaan) Part 1
		Video	Tutorial Sistem Penatausahaan Aset Lancar (E-Persediaan) Part 2
11	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Video	Panduan Penggunaan Sistem Informasi E-Lang
		Video	Panduan Mengumumkan Rencana Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP
12	Satuan Polisi Pamong Praja	Video	Sosialisasi Bahaya Narkoba
		Video	Satpol PP Goes to School
13	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Video	Profil Kota Administrasi Jakarta Pusat
		Video	Penerapan Manajemen Talenta di Kota Administrasi Jakarta Pusat
14	Kota Administrasi Jakarta Utara	Video	Pengamanan Pangan
		Video	inovasi Belanja Kelurahan
15	Kota Administrasi Jakarta Barat	Video	Penataan Kawasan Kelurahan Kembangan Selatan
		Video	Botanical Garden Kelurahan Kamal
16	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Video	Cikoko Bio Farm Education Dari Persoalan Menjadi Peluang
		Video	Oemar Mini Zoo

No.	Perangkat Daerah	Format Aset	Konten
		Video	Mengenal Bahaya Asbes
17	Kota Administrasi Jakarta Timur	Video	Mengenal Jenis Tempat Sampah
18	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Video	Kilas Balik Tentang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
		Video	Destinasi Desa Wisata Pulau Pramuka di saat Liburan bersama Keluarga
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Video	Pelantikan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
		Video	Aplikasi SILEGDA
20	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Dokumen	Dashboard Profil Kependudukan Tingkat RW
		Video	Anjungan Dukcapil Mandiri
21	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Video	Giat Woro-Woro
		Video	Aksi Tanggap Pemadam Kebakaran
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan	Video	Tips Cerdas Transaksi Online
		Video	Cara Mendaftar Kurasi Terbuka
23	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Video	Penanganan Hewan Penular Rabies
		Video	Pembuatan Spring Roll dan Salad Sayur
		Video	Budidaya Tanaman Alpukat
24	Dinas Kebudayaan	Video	Kopi Jahe Betawi
		Video	Gambus Betawi
25	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	Tutorial Pembuatan Informasi Wisata pada Media Sosial
		Dokumen	Pengembangan Travel Pattern Jakarta
26	Dinas Perhubungan	Dokumen	Sosialisasi Strategi Transportasi Push
		Dokumen	Sosialisasi Disinsentif Tarif Parkir
27	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi	Video	Pelatihan Kerja Reguler Kejuruan Operator Komputer Khusus Disabilitas Tuli
		Video	Jaknaker Al Chatbot
28	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Video	Tutorial Pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame Kelas C Melalui Jakevo
		Video	Tutorial Validasi Notifikasi Pembayaran Tenaga Kerja Asing Melalui Jakevo
29	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	Video	Safety Induction Gedung Dinas Teknis Jatibaru Jakarta
		Video	Kajian Penataan Kawasan Sentra Mebel Klender Kota Administrasi Jakarta Timur
30	Dinas Sumber Daya Air	Video	Pengerukan lumpur sedimen untuk mengatasi banjir
		Video	Jakarta Sewerage Development Project

No.	Perangkat Daerah	Format Aset	Konten
31	Dinas Lingkungan Hidup	Video	Dari Sampah Menjadi Cuan
		Video	Pentingnya Memilah Sampah Makanan
32	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Video	Tutorial Penginputan SIKIN
		Video	Prosedur Pengolahan Bahan Perpustakaan
33	Dinas Sosial	Dokumen	Pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai
		Dokumen	Pelayanan Awai Orang Terlantar di Panti Sosial
34	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Video	Gentle Parenting
		Video	15 Langkah Menjaga Kesehatan Alat Reproduksi Wanita
		Video	Cegah Stunting Dengan ABCDE
35	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Video	Uji Laboratorium Kesuburan Tanah
		Video	Proses Perbanyakan Tanaman
36	Dinas Bina Marga	Video	Layanan UP.PPP Dengan Tarif dan Retribusi Terbaru
		Video	Skema Baru Penertiban Jaringan Utilitas
37	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Video	Perbaikan Rumah dan KTV
		Video	Penghunian Rusunawa
38	Dinas Pendidikan	Video	Aplikasi SELARAS JakEdu untuk Orang Tua
		Video	Tutorial Penggunaan Aplikasi SELARAS untuk Orang Tua
39	Dinas Kesehatan	Video	Edukasi Stunting
		Video	Imunisasi Anak Sekolah
40	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Video	Laman informasi Khusus Disabilitas pada Portal Resmi Pemprov DKI Jakarta
		Dokumen	Profil Statistik Jakarta Vol. 6
41	Dinas Olahraga Dan Pemuda	Video	Penanganan Cedera Saat Berolahraga
		Video	Pemanasan yang Baik dan Benar
42	Biro Pemerintahan	Video	Peran Biro Pemerintahan
		Video	Status Laporan Pada Sistem CRM
43	Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi	Video	Menindaklanjuti Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 10 Tahun 202 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas ASN Di Lingkungan Kemendagri Dan Pemda
		Video	Penyusunan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan PJLP Keria PJLP berdasarkan Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022
44	Biro Kerja Sama Daerah	Dokumen	Peran Biro Pemerintahan Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Jakarta
		Dokumen	Recap Event Juni - Desember 2024

No.	Perangkat Daerah	Format Aset	Konten
45	Biro Perekonomian Dan Keuangan	Dokumen	Sharing Session - Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam Mengelola Inflasi di DKI Jakarta
		Dokumen	Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II Tahun 2024
46	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	Video	Layanan Tamu Digital Balai Kota DKI Jakarta
		Video	Pengaduan Digital Balai Kota DKI Jakarta
47	Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup	Video	Jakarta Information and Knowledge Access
		Video	Penyelesaian Kewajiban SIPPT Melalui Skema Pembangunan Rumah Susun Murah Sederhana
48	Biro Kesejahteraan Sosial	Video	Penyelenggaraan Kantin Sekolah Sehat
		Video	Aset Pengetahuan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Tim Percepatan Penurunan Stunting
49	Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual	Video	Mengenai SRIKANDI
		Video	Perpustakaan Berbasis inklusi Sosial
50	Biro Kepala Daerah	Video	Peningkatan Kinerja Layanan Administrasi Daerah Melalui Digitalisasi Naskah Dinas
		Video	Pendistribusian dokumen fisik surat yang telah didisposisi Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Organisasi Perangkat Daerah
51	Biro Hukum	Dokumen	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Gubernur (PROPEMPERGUB)
		Dokumen	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)

19) Capaian Indikator Kinerja Kesembilan belas :

Nilai kualitas data SDI

Indikator kinerja kesembilan belas ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang ketujuh belas yaitu Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN KHUSUS						
17	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	3,25	100%	Satu Data Indonesia

Indikator kinerja Nilai kualitas data SDI telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 3,25, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari Strategi Komunikasi.

Pengukuran Kinerja :

Dasar Hukum :

a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024.

Definisi :

Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu :

a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.
d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data.

Formula Perhitungan :

Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]

(Rentang nilai kualitas data SDI : 0 - 4)

Sumber Data :

Satu Data Indonesia

20) Capaian Indikator Kinerja Kedua puluh :

Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi

Indikator kinerja kedua puluh ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kedelapan belas yaitu Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN KHUSUS						
18	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	89,81	126%	Kinerja Anggaran

Indikator kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi telah dilaksanakan dengan realisasi melebihi target sebesar 89,91 dari target 71, sehingga capaian kinerja sebesar 126%. Sumber data dari Strategi Komunikasi.

Pengukuran Kinerja :

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."

Definisi :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.

a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :

1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/sub kegiatan:
   - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.

     Sumber Data : e- SAKIP

2) Penyerapan Anggaran:
   - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

     Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id

3) Efisiensi keluaran kegiatan/sub kegiatan:
   - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.
   - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.
   - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.

     Sumber Data :

     a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Sub kegiatan sumber data e-sakip;
     b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
     c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.

4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
   - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

     Sumber Data : proyeksi APBD

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:

Bp = 9,7%
BK = 18,2%
Bckk = 43,5%
BE = 28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran
BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bckk : Bobot capaian keluaran
BE : Bobot efisiensi

Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
≤ 60 = Rendah
> 60 s.d 70 = cukup
> 70 s.d 90 = Baik
> 90 s.d 100 = Sangat Baik

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0011/UD.09.00 tanggal 6 Januari 2024 Hal Penyampaian Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tahun Anggaran 2024 yaitu :

a. Sehubungan perjanjian kinerja sasaran khusus Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi yang merupakan target pada triwulan IV, berikut disampaikan hasil perhitungan Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Tabel 3.28. Hasil Perhitungan Persentase Nilai Kinerja Anggaran Atas Implementasi Tahun 2024

No	Kode	Nama Perangkat Daerah	Bobot Capaian Keluaran atas Kegiatan (BCKK)			Bobot Efisiensi (BE)			Bobot Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan (BK)			Bobot Penyerapan Anggaran (BP)			Nilai Kinerja Anggaran Aspek Implementasi
			BCKK	Bobot BCKK	Nilai BCKK	BE	Bobot BE	Nilai BE	BK	Bobot BK	Nilai BK	BP	Bobot BP	Nilai BP	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14	15=13x14	16=6+9+12+15
1	10101000	DINAS PENDIDIKAN	100,00%	43,50%	43,50%	74,51%	28,60%	21,31%	92,10%	18,20%	16,76%	86,43%	9,70%	8,38%	89,98%
2	10201000	DINAS KESEHATAN	100,00%	43,50%	43,50%	83,60%	28,60%	23,93%	98,48%	18,20%	17,92%	90,38%	9,70%	8,77%	94,12%
3	10302000	DINAS SUMBER DAYA AIR	100,00%	43,50%	43,50%	76,86%	28,60%	21,99%	85,23%	18,20%	15,51%	88,98%	9,70%	8,63%	89,63%
4	10303000	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	100,00%	43,50%	43,50%	71,59%	28,60%	20,47%	89,43%	18,20%	16,28%	70,42%	9,70%	6,83%	87,08%
5	10402000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	99,87%	43,50%	43,44%	75,93%	28,60%	21,72%	77,57%	18,20%	14,12%	93,64%	9,70%	9,10%	88,38%
6	10501000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00%	43,50%	43,50%	76,60%	28,60%	21,99%	97,80%	18,20%	17,80%	94,10%	9,70%	9,13%	92,42%
7	10503000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	72,67%	28,60%	20,78%	89,81%	18,20%	16,34%	93,77%	9,70%	9,10%	89,69%
8	10502000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	100,00%	43,50%	43,50%	80,30%	28,60%	22,97%	88,63%	18,20%	17,04%	96,84%	9,70%	9,39%	93,70%
9	10904000	DINAS SOSIAL	100,00%	43,50%	43,50%	73,30%	28,60%	20,96%	97,84%	18,20%	17,77%	95,70%	9,70%	9,28%	91,52%
10	50100000	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU	100,00%	43,50%	43,50%	77,28%	28,60%	22,10%	95,26%	18,20%	17,34%	95,08%	9,70%	9,22%	92,16%
11	20101000	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	100,00%	43,50%	43,50%	72,56%	28,60%	20,75%	84,62%	18,20%	15,29%	94,42%	9,70%	9,16%	88,71%
12	20201000	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	100,00%	43,50%	43,50%	65,13%	28,60%	18,63%	97,99%	18,20%	17,83%	98,22%	9,70%	9,53%	89,49%
13	20301000	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	100,00%	43,50%	43,50%	75,68%	28,60%	21,64%	91,04%	18,20%	16,57%	97,96%	9,70%	9,50%	91,22%
14	20500000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100,00%	43,50%	43,50%	82,91%	28,60%	23,71%	70,26%	18,20%	12,79%	95,81%	9,70%	9,27%	89,28%
15	30401000	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	100,00%	43,50%	43,50%	78,98%	28,60%	22,58%	86,00%	18,20%	15,65%	94,45%	9,70%	9,16%	90,87%
16	30601000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100,00%	43,50%	43,50%	77,22%	28,60%	22,09%	88,92%	18,20%	16,18%	94,78%	9,70%	9,19%	90,96%
17	20901000	DINAS PERHUBUNGAN	100,00%	43,50%	43,50%	77,78%	28,60%	22,24%	88,49%	18,20%	16,11%	91,34%	9,70%	8,86%	90,71%
18	21001000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	100,00%	43,50%	43,50%	86,06%	28,60%	24,61%	89,88%	18,20%	16,36%	85,94%	9,70%	8,34%	92,81%
19	21101000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	100,00%	43,50%	43,50%	84,62%	28,60%	24,20%	91,59%	18,20%	16,67%	93,65%	9,70%	9,08%	93,46%
20	21201000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100,00%	43,50%	43,50%	84,97%	28,60%	24,30%	96,18%	18,20%	17,50%	96,25%	9,70%	9,34%	94,64%
21	21301000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	100,00%	43,50%	43,50%	72,84%	28,60%	20,83%	29,57%	18,20%	5,38%	96,11%	9,70%	9,32%	79,04%
22	21501000	DINAS KEBUDAYAAN	100,00%	43,50%	43,50%	79,78%	28,60%	22,81%	79,97%	18,20%	14,54%	91,92%	9,70%	8,92%	89,78%
23	21701000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100,00%	43,50%	43,50%	73,68%	28,60%	21,07%	94,42%	18,20%	17,18%	96,53%	9,70%	9,36%	81,12%
24	30204000	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100,00%	43,50%	43,50%	75,92%	28,60%	21,71%	92,57%	18,20%	16,85%	93,01%	9,70%	9,02%	91,10%
25	40601903	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	100,00%	43,50%	43,50%	68,82%	28,60%	19,69%	95,30%	18,20%	17,36%	98,50%	9,70%	9,55%	90,10%
26	40601901	BIRO PEMERINTAHAN	100,00%	43,50%	43,50%	76,15%	28,60%	21,78%	97,59%	18,20%	17,76%	98,28%	9,70%	9,53%	92,57%
27	40601908	BIRO KERJASAMA DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	77,71%	28,60%	22,22%	91,95%	18,20%	16,73%	95,75%	9,70%	9,29%	91,75%
28	40601905	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	100,00%	43,50%	43,50%	65,71%	28,60%	18,79%	75,85%	18,20%	13,80%	98,39%	9,70%	9,54%	85,64%
29	40601904	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	100,00%	43,50%	43,50%	81,96%	28,60%	23,42%	77,98%	18,20%	14,12%	97,38%	9,70%	9,45%	90,49%
30	40601902	BIRO HUKUM	100,00%	43,50%	43,50%	76,28%	28,60%	21,79%	86,53%	18,20%	15,75%	94,69%	9,70%	9,19%	90,23%
31	40601909	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN	100,00%	43,50%	43,50%	72,78%	28,60%	20,82%	91,92%	18,20%	16,67%	95,22%	9,70%	9,24%	90,23%
32	40600000	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	83,37%	28,60%	23,84%	97,78%	18,20%	17,80%	95,98%	9,70%	9,31%	94,45%
33	40605000	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	100,00%	43,50%	43,50%	77,88%	28,60%	22,18%	98,72%	18,20%	17,97%	95,21%	9,70%	9,24%	92,68%
34	40601910	BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00%	43,50%	43,50%	91,38%	28,60%	26,11%	69,37%	18,20%	12,63%	94,22%	9,70%	9,14%	91,38%
35	40603000	SEKRETARIAT DPRD	100,00%	43,50%	43,50%	73,97%	28,60%	21,15%	95,07%	18,20%	17,30%	95,25%	9,70%	9,24%	91,28%
36	40101000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	70,58%	28,60%	20,19%	95,34%	18,20%	17,33%	93,84%	9,70%	9,10%	90,13%
37	40201000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	66,88%	28,60%	19,69%	89,18%	18,20%	16,23%	97,72%	9,70%	9,48%	88,90%
38	40202000	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	74,58%	28,60%	21,31%	94,39%	18,20%	17,18%	95,98%	9,70%	9,34%	90,33%
39	40203000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	66,89%	28,60%	18,84%	69,11%	18,20%	12,58%	88,20%	9,70%	8,56%	83,48%

40	40301000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	98,64%	28,60%	19,63%	97,97%	18,20%	17,83%	87,58%	9,70%	8,53%	89,46%
41	40302000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100,00%	43,50%	43,50%	80,75%	28,60%	23,00%	97,22%	18,20%	17,69%	92,56%	9,70%	8,98%	93,27%
42	40604000	INSPEKTORAT	100,00%	43,50%	43,50%	71,46%	28,60%	20,44%	93,49%	18,20%	17,69%	82,14%	9,70%	7,97%	90,92%
43	50110000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	100,00%	43,50%	43,50%	70,57%	28,60%	20,18%	83,93%	18,20%	15,28%	95,69%	9,70%	9,28%	88,24%
44	50120000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	100,00%	43,50%	43,50%	70,34%	28,60%	20,12%	92,17%	18,20%	16,78%	97,18%	9,70%	9,42%	89,81%
45	50150000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	100,00%	43,50%	43,50%	62,06%	28,60%	18,01%	92,41%	18,20%	16,82%	98,35%	9,70%	9,54%	87,87%
46	50130000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	100,00%	43,50%	43,50%	70,98%	28,60%	20,29%	93,02%	18,20%	16,93%	96,88%	9,70%	9,40%	90,12%
47	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	100,00%	43,50%	43,50%	69,59%	28,60%	19,90%	94,35%	18,20%	17,17%	97,48%	9,70%	9,40%	90,03%
48	40501000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100,00%	43,50%	43,50%	65,56%	28,60%	18,75%	86,86%	18,20%	14,71%	96,25%	9,70%	9,53%	86,58%
49	10301000	DINAS BINA MARGA	100,00%	43,50%	43,50%	89,96%	28,60%	25,73%	83,82%	18,20%	11,83%	88,88%	9,70%	8,52%	89,47%
50	40601907	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	85,55%	28,60%	24,47%	98,56%	18,20%	17,57%	95,89%	9,70%	9,30%	94,84%
51	40601906	BIRO KEPALA DAERAH	100,00%	43,50%	43,50%	72,87%	28,60%	20,84%	89,06%	18,20%	16,21%	94,77%	9,70%	9,19%	88,74%

Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP 196902031989031001

21) Capaian Indikator Kinerja Kedua puluh satu :

Survei Kepuasan Layanan Masyarakat

Indikator kinerja kedua puluh satu ini merupakan ukuran dari sasaran strategis yang kesembilan belas yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN KHUSUS						
19	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	92	96,00	104%	Indikator Khusus

Indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat telah dilaksanakan dengan realisasi melebihi target sebesar 96,00 dari target 92, sehingga capaian kinerja sebesar 104%. Sumber data dari Strategi Komunikasi.

Pengukuran Kinerja :

Dasar Hukum:

a. Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

b. Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah

Definisi:

Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing.

Metode Pengukuran:

Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei.

No	KECAMATAN	TW1 2024						TW2 2024						TW 3 2024					
		Nilai_Dimensi Kepemimpinan Birokrasi	Nilai_Dimensi kepemimpinan sosial	Nilai	responden	target	response rate	Nilai_Dimensi Kepemimpinan Birokrasi	Nilai_Dimensi kepemimpinan sosial	Nilai	responden	target	response rate	Nilai_Dimensi Kepemimpinan Birokrasi	Nilai_Dimensi kepemimpinan sosial	Nilai	responden	target	response rate
13	KECAMATAN DUNDING - JAKUT	59.82	39.72	99.54	19	19	100%	59.79	39.85	99.65	19	19	100%	60	40	100.00	19	19	100.00%
14	KECAMATAN KOJA - JAKUT	55.87	39.83	99.50	16	16	100%	58.62	39.11	97.73	15	17	88%	55.22	40	99.22	17	18	94.44%
24	KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT	58.44	39.11	97.56	18	18	100%	58.85	39.70	98.55	18	18	100%	58.28	38.81	97.09	19	19	100.00%
39	KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT	57.95	38.35	96.29	16	21	76%	58.00	38.46	96.46	19	21	90%	55.81	37.45	93.30	18	21	85.71%
43	KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT	55.13	38.33	93.46	16	16	100%	58.50	39.00	97.50	16	16	100%	58.33	39	97.33	16	16	100.00%
44	KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT	54.81	38.19	93.00	14	14	100%	56.62	37.71	94.33	14	14	100%	56.92	38.15	95.08	13	14	92.86%
INDEKS KEPUASAN LAYANAN MASYARAKAT		57.04	38.25	95.69				58.40	38.97	97.37				58.09	38.91	97			

Sumber : Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Utara, 2024

22) Capaian Indikator Kinerja Kedua puluh dua :

Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Indikator kinerja kedua puluh dua ini merupakan ukuran dari Sasaran Operasional yang pertama yaitu Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN OPERASIONAL						
20	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase	100	99,865	99,87%	TL Aduan Masyarakat (CRM)

Indikator kinerja Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat telah dilaksanakan dengan realisasi tidak memenuhi target sebesar 99,865 dari target 100, sehingga capaian kinerja sebesar 99,87%. Sumber data dari Strategi Komunikasi.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM);
2. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan Masyarakat di Kantor Walikota/Bupati, Camat dan Lurah;
3. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM.

Tugas pokok Aparatur Negara sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat antara lain tercermin dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat terdapat dalam segala bentuk kegiatan pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan bentuk aktivitas pelayanan dapat bersifat kegiatan administratif, penyediaan barang/jasa, pengayoman dan lain sebagainya.

Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Utara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat di wilayah Kota Administrasi.

Salah satu tugas dari Subbag Pelayanan Publik adalah menghimpun dan mengelola pengaduan masyarakat untuk dikoordinasikan dari berbagai media informasi. Hasil dari menghimpun dan mengelola pengaduan tersebut dituangkan dalam bentuk rekapitulasi laporan pengaduan setiap bulan untuk dijadikan bahan masukan sekaligus evaluasi kepada para UKPD.

Penanganan pengaduan masyarakat dengan mensinergikan prosedur, sistem, sarana dan kewenangan SKPD/UKPD, BUMD. Penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi CRM dengan 13 kanal pengaduan resmi sebagai berikut :

1. JAKI (Jakarta Kini)
2. Twitter (@DKIJakarta)
3. Facebook (Pemprov DKI Jakarta)
4. Surat Elektronik/Email (dki@jakarta.go.id)
5. Media Sosial Pribadi Gubernur/Wakil Gubernur
6. SMS (08111272206)
7. Penerimaan Pengaduan di Pendopo Balai Kota
8. Penerimaan Pengaduan di Kantor Inspektorat
9. Penerimaan Pengaduan di Kantor Walikota
10. Penerimaan Pengaduan di Kantor Camat
11. Penerimaan Pengaduan di Kantor Lurah
12. Aspirasi Publik Media Massa
13. LAPOR 1708.

Tujuan CRM :

1. Peningkatan kualitas pelayanan informasi, kebijakan dan pelayanan publik yang cepat, mudah, tepat dan transparan.
2. Mensinergikan prosedur, sistem, sarana dan kewenangan SKPD/UKPD, BUMD dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
3. Menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan saran, pendapat dan laporan terhadap kebijakan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
4. Mempermudah koordinasi penanganan pengaduan masyarakat antar SKPD/UKPD adan atau BUMD.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap penyelenggara pelayanan publik harus melaporkan hasil pelayanan yang diselenggarakannya. Pelaporan dari hasil tindak lanjut setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke dalam Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan evaluasi bersama para Lurah dan Camat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pengukuran Kinerja :

Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

a. Indikator kinerja kedua puluh tiga Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat telah dilaksanakan pada triwulan I, II, III dan IV tahun 2024 dengan realisasi masing-masing triwulan berbeda, selain pada triwulan I dan III yang realisasinya mencapai target 100%, untuk triwulan II dan IV belum memenuhi target sebesar 99,98% dan 99,87%.

b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap penyelenggara pelayanan publik harus melaporkan hasil pelayanan yang diselenggarakannya. Pelaporan dari hasil tindak lanjut setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke dalam Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan evaluasi bersama para Lurah dan Camat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

c. Berdasarkan jumlah laporan dari tingkat Walikota dan 31 Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara dari 13 kanal aduan dalam aplikasi CRM didapat hasil Rekapitulasi Tingkat Pengaduan Masyarakat selama Bulan Januari s.d. Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29. Rekap Pengaduan Kota Administrasi Jakarta Utara Semester I Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Bulan						Jumlah Semester I
		Jan	Febr	Mart	Apr	Mei	Jun	
A	Kecamatan Tanjung Priok	5	2	0	2	3	6	18
1	Kelurahan Papanggo	5	6	4	1	5	6	27
2	Kelurahan Kebon Bawang	7	10	8	2	12	5	44
3	Kelurahan Warakas	10	13	9	2	4	1	39
4	Kelurahan Sungai Bambu	11	8	6	4	4	6	39
5	Kelurahan Sunter Agung	18	21	18	16	11	15	99
6	Kelurahan Sunter Jaya	21	35	19	35	28	7	145
7	Kelurahan Tanjung Priok	3	0	1	6	3	4	17
B	Kecamatan Pademangan	3	0	1	0	0	4	8
1	Kelurahan Pademangan Barat	16	17	7	15	19	5	79
2	Kelurahan Pademangan Timur	12	20	6	8	7	3	56
3	Kelurahan Ancol	0	17	7	2	1	5	32
C	Kecamatan Kelapa Gading	0	0	0	0	0	3	3
1	Kelurahan Kelapa Gading Timur	12	14	12	6	13	14	71
2	Kelurahan Kelapa Gading Barat	20	7	13	16	3	21	80
3	Kelurahan Pegangsaan Dua	33	21	32	19	32	9	146
D	Kecamatan Penjaringan	0	0	0	0	21	2	23
1	Kelurahan Kapuk Muara	2	4	3	19	6	2	36
2	Kelurahan Kamal Muara	4	3	4	2	5	4	22
3	Kelurahan Pejagalan	29	25	30	20	28	16	148
4	Kelurahan Penjaringan	11	27	12	13	21	13	97
5	Kelurahan Pluit	13	7	6	2	10	3	41
E	Kecamatan Koja	2	2	2	1	1	1	9
1	Kelurahan Tugu Utara	28	22	13	8	29	9	109
2	Kelurahan Tugu Selatan	16	12	14	6	26	4	78
3	Kelurahan Rawa Badak Utara	17	5	6	3	7	2	40
4	Kelurahan Rawa Badak Selatan	8	6	3	6	5	10	38
5	Kelurahan Lagoa	13	8	2	12	8	4	47
6	Kelurahan Koja	2	4	2	0	3	2	13

No.	Unit Kerja	Bulan						Jumlah Semester I
		Jan	Febr	Mart	Apr	Mei	Jun	
F	Kecamatan Cilincing	1	1	1	0	1	12	16
1	Kelurahan Semper Barat	11	24	9	12	8	11	75
2	Kelurahan Semper Timur	16	21	16	6	8	1	68
3	Kelurahan Sukapura	13	19	14	19	23	14	102
4	Kelurahan Marunda	14	9	4	4	5	5	41
5	Kelurahan Rorotan	7	11	7	3	9	1	38
6	Kelurahan Kalibaru	16	31	4	9	12	5	77
7	Kelurahan Cilincing	11	11	7	26	13	12	80
F	Kota Administrasi Jakarta Utara	16	17	4	18	4	14	73
	TOTAL	**426**	**460**	**306**	**323**	**378**	**249**	**2142**
	Persentase	**100%**	**100%**	**95,18%**	**99,94%**	**100%**	**100%**	**595.12%**

Tabel 3.30. Rekap Pengaduan Kota Administrasi Jakarta Utara Semester II Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Bulan						Jumlah Semester II
		Jul	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	
A	Kecamatan Tanjung Priok	2	3	2	2	0	5	14
1	Kelurahan Papanggo	7	4	8	5	12	3	39
2	Kelurahan Kebon Bawang	15	7	4	10	2	9	70
3	Kelurahan Warakas	12	13	13	7	15	10	70
4	Kelurahan Sungai Bambu	6	8	10	7	1	15	47
5	Kelurahan Sunter Agung	12	7	13	15	8	18	73
6	Kelurahan Sunter Jaya	31	28	26	28	33	10	156
7	Kelurahan Tanjung Priok	4	4	2	3	2	5	20
B	Kecamatan Pademangan	0	0	0	0	1	0	1
1	Kelurahan Pademangan Barat	21	13	10	7	11	12	74
2	Kelurahan Pademangan Timur	25	9	12	8	6	15	75
3	Kelurahan Ancol	12	5	3	6	8	8	42

No.	Unit Kerja	Bulan						Jumlah Semester II
		Jul	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	
C	Kecamatan Kelapa Gading	0	1	0	1	1	0	3
1	Kelurahan Kelapa Gading Timur	20	23	11	11	10	13	88
2	Kelurahan Kelapa Gading Barat	15	10	5	9	7	9	55
3	Kelurahan Pegangsaan Dua	20	18	6	25	38	23	130
D	Kecamatan Penjaringan	1	0	0	1	2	2	6
1	Kelurahan Kapuk Muara	9	13	5	11	10	7	55
2	Kelurahan Kamal Muara	7	5	9	5	12	1	39
3	Kelurahan Pejagalan	20	13	31	27	37	35	1163
4	Kelurahan Penjaringan	4	5	18	23	17	10	77
5	Kelurahan Pluit	8	4	5	13	11	6	47
E	Kecamatan Koja	0	2	0	0	11	1	14
1	Kelurahan Tugu Utara	25	9	11	25	18	10	98
2	Kelurahan Tugu Selatan	16	5	12	11	34	14	92
3	Kelurahan Rawa Badak Utara	2	8	6	4	1	7	28
4	Kelurahan Rawa Badak Selatan	10	3	2	10	6	1	32
5	Kelurahan Lagoa	7	1	2	10	3	7	30
6	Kelurahan Koja	3	2	2	5	2	0	14
F	Kecamatan Cilincing	0	0	2	1	0	0	3
1	Kelurahan Cilincing	8	26	14	23	9	24	104
2	Kelurahan Marunda	2	4	9	10	3	3	31
3	Kelurahan Kalibaru	12	13	14	8	9	8	64
4	Kelurahan Sukapura	16	18	4	10	7	15	70
5	Kelurahan Rorotan	7	8	4	14	5	9	47
6	Kelurahan Semper Barat	13	26	14	23	14	22	112
7	Kelurahan Semper Timur	8	5	5	10	3	11	42
F	Kota Administrasi Jakarta Utara	3	11	5	7	6	0	32
	TOTAL	**381**	**319**	**294**	**396**	**363**	**348**	**2101**
	Persentase	**100%**	**100%**	**99,99%**	**98,96%**	**100%**	**99,98%**	**599%**

Tabel 3.31. Rekap Pengaduan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jumlah Semester I	Jumlah Semester II	TOTAL
A	Kecamatan Tanjung Priok	18	14	32
1	Kelurahan Papanggo	27	39	66
2	Kelurahan Kebon Bawang	44	70	114
3	Kelurahan Warakas	39	70	109
4	Kelurahan Sungai Bambu	39	47	86
5	Kelurahan Sunter Agung	99	73	172
6	Kelurahan Sunter Jaya	145	156	301
7	Kelurahan Tanjung Priok	17	20	37
B	Kecamatan Pademangan	8	1	9
1	Kelurahan Pademangan Barat	79	74	153
2	Kelurahan Pademangan Timur	56	75	131
3	Kelurahan Ancol	32	42	74
C	Kecamatan Kelapa Gading	3	3	6
1	Kelurahan Kelapa Gading Timur	71	88	159
2	Kelurahan Kelapa Gading Barat	80	55	135
3	Kelurahan Pegangsaan Dua	146	130	276
D	Kecamatan Penjaringan	23	6	29
1	Kelurahan Kapuk Muara	36	55	91
2	Kelurahan Kamal Muara	22	39	61
3	Kelurahan Pejagalan	148	1163	1311
4	Kelurahan Penjaringan	97	77	174
5	Kelurahan Pluit	41	47	88
E	Kecamatan Koja	9	14	23
1	Kelurahan Tugu Utara	109	98	207
2	Kelurahan Tugu Selatan	78	92	170
3	Kelurahan Rawa Badak Utara	40	28	68
4	Kelurahan Rawa Badak Selatan	38	32	70
5	Kelurahan Lagoa	47	30	77
6	Kelurahan Koja	13	14	27

No.	Unit Kerja	Jumlah Semester I	Jumlah Semester II	TOTAL
F	Kecamatan Cilincing	16	3	19
1	Kelurahan Cilincing	75	104	179
2	Kelurahan Marunda	68	31	99
3	Kelurahan Kalibaru	102	64	166
4	Kelurahan Sukapura	41	70	111
5	Kelurahan Rorotan	38	47	85
6	Kelurahan Semper Barat	77	112	189
7	Kelurahan Semper Timur	80	42	122
F	Kota Administrasi Jakarta Utara	73	32	105
	TOTAL	**2142**	**2101**	**4243**
	Persentase	**595.12%**	**599%**	**1194,12%**

Berdasarkan hasil rekapitulasi Laporan Pengaduan Masyarakat melalui CRM dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.32. Daftar UKPD Dengan Jumlah Pengaduan CRM Tertinggi Pada Semester I Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Bulan						Jumlah Semester I
		Jan	Febr	Mart	Apr	Mei	Jun	
1	Kelurahan Pegangsaan Dua	33	21	32	19	32	31	168
2	Kelurahan Pejagalan	29	25	30	20	-	-	104
3	Kelurahan Tugu Utara	28	22	13	-	29	28	120
4	Kelurahan Sunter Jaya	21	35	19	35	28	23	161
5	Kelurahan Kelapa Gading Barat	20	-	-	-	-	-	20
6	Kelurahan Sunter Agung	18	-	18	16	-	-	52
7	Kelurahan Rawa Badak Utara	17	-	-	-	-	-	17
8	Kelurahan Kalibaru	-	31	-	-	-	-	31
9	Kelurahan Penjaringan	-	27	-	-	21	20	68
10	Kelurahan Semper Barat	-	24	-	-	-	-	24
11	Kelurahan Semper Timur	-	-	16	-	-	-	16
12	Kelurahan Tugu Selatan	-	-	14	-	26	22	62
13	Kelurahan Cilincing	-	-	-	26	-	-	26

No.	Unit Kerja	Bulan						Jumlah Semester I
		Jan	Febr	Mart	Apr	Mei	Jun	
14	Kelurahan Kapuk Muara	-	-	-	19	-	-	19
15	Kota Adm. Jakarta Utara	-	-	-	18	-	-	18
16	Kelurahan Sukapura	-	-	-	-	23	21	44
17	Kelurahan Pademangan Barat	-	-	-	-	19	19	38
	TOTAL	**166**	**185**	**142**	**153**	**178**	**164**	**988**

Tabel 3.33. Daftar UKPD Dengan Jumlah Pengaduan CRM Tertinggi Pada Semester II Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Bulan						Jumlah Semester II
		Jul	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Kelurahan Pegangsaan Dua	20	18	-	-	38	23	99
2	Kelurahan Pejagalan	20	-	31	27	37	35	150
3	Kelurahan Tugu Utara	25	-	-	25	18	-	68
4	Kelurahan Sunter Jaya	31	28	26	28	33	-	146
5	Kelurahan Kelapa Gading Barat	-	-	-	-	-	-	0
6	Kelurahan Sunter Agung	-	-	13	15	-	-	28
7	Kelurahan Rawa Badak Utara	-	-	-	-	-	-	0
8	Kelurahan Kalibaru	-	13	14	-	-	-	27
9	Kelurahan Penjaringan	-	-	18	23	17	-	58
10	Kelurahan Semper Barat	-	26	14	23	-	22	85
11	Kelurahan Semper Timur	-	-	-	-	-	-	0
12	Kelurahan Tugu Selatan	-	-	-	-	34	-	34
13	Kelurahan Cilincing	-	-	-	24	-	24	48
14	Kelurahan Kapuk Muara	-	13	-	-	-	-	13
15	Kota Adm. Jakarta Utara	-	-	-	-	-	-	0
16	Kelurahan Sukapura	-	18	-	-	-	15	33
17	Kelurahan Pademangan Barat	21	-	-	-	-	-	21
18	Kelurahan Pademangan Timur	25	-	-	-	-	-	25
19	Kelurahan Kelapa Gading Timur	20	23	-	-	-	-	43
20	Kelurahan Warakas	-	-	-	-	-	15	15
21	Kelurahan Sungai Bambu	-	-	-	-	-	15	15

No.	Unit Kerja	Bulan						Jumlah Semester II
		Jul	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	
22	Kelurahan Pademangan Timur	-	-	-	-	-	15	15
	TOTAL	**162**	**139**	**116**	**165**	**177**	**164**	**923**

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, 2024

Tabel 3.34. Daftar Kategori Aduan Tertinggi Tahun 2024

No	Kategori Aduan	Bulan												Total Aduan
		Jan	Febr	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Sampah	156	144	104	170	151	151	113	134	119	160	159	139	**1700**
2	Jalan	68	82	53	32	60	60	38	27	22	32	30	31	**535**
3	Parkir Liar	54	52	43	32	48	48	75	54	31	46	61	45	**589**
4	Penanganan Banjir	34	41	-	-	48	48	-	-	-	-	-	-	**171**
5	Gangguan dan Kebisingan	24	21	20	-	28	28	28	-	23	34	22	19	**247**
6	Keluhan Fasilitas Gedung Pemda (Sekolah, Kantor)	-	-	16	-	-	-	42	14	12	-	-	17	**101**
7	PPSU	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	**16**
8	Pencemaran Lingkungan	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	**10**
9	Saluran Air, Kali/Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	**18**
10	Keluhan Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	**11**
	Total Aduan	**336**	**340**	**236**	**260**	**335**	**335**	**296**	**229**	**207**	**290**	**283**	**251**	**3398**

Berikut daftar Kecamatan/Kelurahan dengan waktu tercepat dan terlama dalam penyelesaian pengaduan :

Tabel 3.35. Daftar Kecamatan/Kelurahan dengan Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat dan Terlama Tahun 2024

Pada Bulan Januari Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
1	Kelurahan Cilincing	Fasilitas Gedung Pemda	0		1	Kelurahan Cilincing	Sampah	74
2	Kelurahan Ancol	Sampah	0		2	Kelurahan Kebon Bawang	PPSU	69
3	Kelurahan Cilincing	Parkir Liar	0		3	Kelurahan Pejagalan	Gangguan Kebisingan	30
4	Kelurahan Cilincing	Parkir Liar	0		4	Kelurahan Sukapura	Sampah	27
5	Kelurahan Kalibaru	Jalan	0		5	Kelurahan Sunter Agung	Sampah	25
6	Kelurahan Kamal Muara	Sampah	0		6	Kota Adm. Jakarta Utara	Jalan	23
7	Kelurahan Kapuk Muara	Sampah	0		7	Kelurahan Pegangsaan Dua	Jalan	16
8	Kelurahan Kelapa Gading Barat	PPSU	0		8	Kelurahan Papanggo	Fasilitas Gedung Pemda	13
9	Kelurahan Kelapa Gading Timur	Gangguan Kebisingan	0		9	Kelurahan Penjaringan	Pohon	12
10	Kelurahan Kelapa Marunda	Parkir Liar	0		10	Kelurahan Kamal Muara	Sampah	12
Pengaduan masyarakat untuk UKPD dengan **jumlah aduan yang tertinggi** adalah **Kelurahan Pegangsaan Dua** dengan jumlah **33** aduan (7.74%) dari jumlah **426** total pengaduan selama bulan Januari 2024					Pengaduan masyarakat yang tertinggi adalah terkait dengan **Sampah** dengan jumlah **156** aduan (36.61%) dari jumlah **426** total pengaduan selama bulan Januari 2024			
Untuk pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bulan Januari 2024 nilai TL nya mencapai 100%								

Pada Bulan Februari Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
1	Kecamatan Koja	Keluhan Fasilitas Gedung Pemda (Sekolah, Kantor)	0		1	Kelurahan Sukapura	Sampah	130
2	Kelurahan Ancol	Pohon	0		2	Kelurahan Semper Timur	Sampah	96
3	Kelurahan Kalibaru	Rusun/Hunian Vertikal	0		3	Kota Administrasi Jakarta Utara	Penanganan Banjir	86
4	Kelurahan Kamal Muara	Sampah	0		4	Kelurahan Sunter Agung	Parkir Liar	84
5	Kelurahan Kelapa Gading Barat	Perizinan	0		5	Kelurahan Cilincing	Pohon	65

Pada Bulan Februari Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
6	Kelurahan Lagoa	Penanganan Banjir	0		6	Kelurahan Koja	Jalan	60
7	Kelurahan Pademangan Barat	Perlengkapan Lalu Lintas	0		7	Kelurahan Sunter Jaya	Parkir Liar	58
8	Kelurahan Pluit	Gangguan dan Kebisingan	0		8	Kelurahan Kebon Bawang	Parkir Liar	57
9	Kelurahan Tugu Selatan	Parkir Liar	0		9	Kelurahan Pademangan Timur	Parkir Liar	53
10	Kota Administrasi Jakarta Utara	Arus Lalu Lintas	0		10	Kelurahan Penjaringan	Sampah	52
Untuk pengaduan masyarakat dengan **jumlah aduan yang tertinggi** adalah **Kelurahan Sunter Jaya** dengan jumlah **35** aduan (7.60%) dari jumlah **460** total pengaduan selama bulan Februari 2024					Pengaduan masyarakat yang tertinggi adalah terkait dengan **Sampah** dengan jumlah **144** aduan (31.30%) dari jumlah **460** total pengaduan selama bulan Februari 2024			
Untuk pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bulan Februari 2024 nilai TL nya mencapai 100%								

Pada Bulan Maret Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
1	Kecamatan Cilincing	Jalan	1		1	Kelurahan Pegangsaan Dua	Sampah	20
2	Kelurahan Koja	Parkir Liar	1		2	Kelurahan Pejagalan	Sampah	11
3	Kecamatan Pademangan	Gangguan dan Kebisingan	1		3	Kelurahan Semper Timur	Jalan	10
4	Kelurahan Ancol	Pencemaran Lingkungan	1		4	Kelurahan Kelapa Gading Timur	Sampah	9
5	Kelurahan Kalibaru	Sampah	1		5	Kelurahan Sukapura	Parkir Liar	8
6	Kelurahan Kebon Bawang	Saluran Air, Kali/Sungai	1		6	Kelurahan Sunter Agung	Sampah	8
7	Kelurahan Semper Barat	Jaringan Listrik	1		7	Kelurahan Sunter Jaya	Parkir Liar	8
8	Kelurahan Sunter Agung	Transportasi Publik	1		8	Kelurahan Tugu Utara	Jalan	8
9	Kelurahan Tugu Utara	Penanganan Banjir	1		9	Kelurahan Pejagalan	Jalan	7
10	Kota Administrasi Jakarta Utara	Pungutan Liar	1		10	Kelurahan Penjaringan	Sampah	5
Untuk pengaduan masyarakat dengan **jumlah aduan yang tertinggi** adalah **Kel Pegangsaan Dua** dengan jumlah **32** aduan (10.45%) dari jumlah **306** total pengaduan selama bulan Maret 2024					Pengaduan masyarakat yang tertinggi adalah terkait dengan **Sampah** dengan jumlah **104** aduan (33.98%) dari jumlah **306** total pengaduan selama bulan Maret 2024			

Untuk pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bulan Maret 2024 nilai TL nya mencapai 95,18%

Pada Bulan April Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
1	Kelurahan Semper Barat	Parkir Liar	1		1	Kelurahan Kamal Muara	Sampah	67
2	Kelurahan Pegangsaan Dua	Sampah	1		2	Kelurahan Sunter Agung	Sampah	59
3	Kelurahan Semper Timur	Jalan	1		3	Kelurahan Cilincing	Pungutan Liar	36
4	Kelurahan Kelapa Gading Barat	Sampah	1		4	Kelurahan Tanjung Priok	Jalan	35
5	Kelurahan Pejagalan	Keluhan Fasilitas Gedung	1		5	Kelurahan Kapuk Muara	Sampah	23
6	Kelurahan Marunda	Sampah	1		6	Kelurahan Cilincing	Bantuan Sosial	20
7	Kelurahan Sukapura	Sampah	1		7	Kelurahan Kapuk Muara	Gangguan Kebisingan	18
8	Kelurahan Tajung Priok	Sampah	1		8	Kelurahan Sukapura	Sampah	17
9	Kelurahan Sunter Jaya	Sampah	1		9	Kelurahan Papanggo	Sampah	11
10	Kelurahan Tugu Utara	Sampah	1		10	Kelurahan Kalibaru	Sampah	10
Untuk pengaduan masyarakat dengan **jumlah aduan yang tertinggi** adalah **Kelurahan Sunter Jaya** dengan jumlah **35** aduan (10.3%) dari jumlah **323** total pengaduan selama bulan April 2024					Pengaduan masyarakat yang tertinggi adalah terkait dengan **Sampah** dengan jumlah **170** aduan (52.63%) dari jumlah **323** total pengaduan selama bulan April 2024			
Untuk pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bulan April 2024 nilai TL nya mencapai 99,94%								

Pada Bulan Mei Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
1	Kelurahan Semper Barat	Parkir	0		1	Kelurahan Sukapura	Timbunan Sampah	36
2	Kelurahan Pejagalan	Sampah	0		2	Kota Adm. Jakarta Utara	Polisi Tidur	32
3	Kelurahan Kalibaru	Sampah	0		3	Kelurahan Rawa Badak Utara	Parkir Liar	27
4	Kelurahan Pademangan Timur	Sampah	0		4	Kecamatan Cilincing	Fasilitas Umum	26
5	Kelurahan Tugu Utara	Parkir	0		5	Kelurahan Sungai Bambu	Sampah	25

Pada Bulan Mei Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
6	Kecamatan Penjaringan	Fasos Fasum	0		6	Kelurahan Kebon Bawang	Gangguan Kebisingan	25
7	Kelurahan Kamal Muara	Rumput Liar	0		7	Kelurahan Koja	Tanaman	22
8	Kelurahan Warakas	Parkir Liar	0		8	Kelurahan Sunter Agung	Parkir Liar	18
9	Kelurahan Marunda	Pedagang Kaki Lima	0		9	Kelurahan Sunter Jaya	Sampah	17
10	Kelurahan Pegangsaan Dua	Sampah	0		10	Kelurahan Semper Timur	Saluran Air	14
Untuk pengaduan masyarakat dengan **jumlah aduan yang tertinggi** adalah **Kel Pegangsaan Dua** dengan jumlah **32** aduan (8.46%) dari jumlah **378** total pengaduan selama bulan Mei 2024					Pengaduan masyarakat yang tertinggi adalah terkait dengan **Sampah** dengan jumlah **151** aduan (39.94%) dari jumlah **323** total pengaduan selama bulan Mei 2024			
Untuk pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bulan Mei 2024 nilai TL nya mencapai 100%								

Pada Bulan Juni Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
1	Kelurahan Semper Barat	Parkir	0		1	Kelurahan Sukapura	Timbunan Sampah	36
2	Kelurahan Pejagalan	Sampah	0		2	Kota Adm. Jakarta Utara	Polisi Tidur	32
3	Kelurahan Kalibaru	Sampah	0		3	Kelurahan Rawa Badak Utara	Parkir Liar	27
4	Kelurahan Pademangan Timur	Sampah	0		4	Kecamatan Cilincing	Fasilitas Umum	26
5	Kelurahan Tugu Utara	Parkir	0		5	Kelurahan Sungai Bambu	Sampah	25
6	Kecamatan Penjaringan	Fasos Fasum	0		6	Kelurahan Kebon Bawang	Gangguan Kebisingan	25
7	Kelurahan Kamal Muara	Rumput Liar	0		7	Kelurahan Koja	Tanaman	22
8	Kelurahan Warakas	Parkir Liar	0		8	Kelurahan Sunter Agung	Parkir Liar	18
9	Kelurahan Marunda	Pedagang Kaki Lima	0		9	Kelurahan Sunter Jaya	Sampah	17
10	Kelurahan Pegangsaan Dua	Sampah	0		10	Kelurahan Semper Timur	Saluran Air	14
Untuk pengaduan masyarakat dengan **jumlah aduan yang tertinggi** adalah **Kel Pegangsaan Dua** dengan jumlah **31** aduan (8.56%) dari jumlah **249** total pengaduan selama bulan Juni 2024					Pengaduan masyarakat yang tertinggi adalah terkait dengan **Sampah** dengan jumlah **151** aduan (39.94%) dari jumlah **249** total pengaduan selama bulan Juni 2024			

Untuk pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bulan Juni 2024 nilai TL nya mencapai 100%

Pada Bulan Juli Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
1	Kelurahan Tugu Utara	Parkir Liar	0		1	Kelurahan Kebon Bawang	Parkir Liar	46
2	Kelurahan Tugu Selatan	Parkir Liar	0		2	Kelurahan Kapuk Muara	Parkir Liar	38
3	Kelurahan Sungai Bambu	Gangguan Kebisingan	0		3	Kelurahan Koja	Sampah	27
4	Kelurahan Cilincing	Jalan	0		4	Kelurahan Sukapura	Sampah	24
5	Kelurahan Lagoa	Taman	0		5	Kelurahan Kelapa Gading Barat	Taman	22
6	Kecamatan Kelapa Gading Timur	Gangguan Kebisingan	0		6	Kecamatan Semper Timur	Parkir Liar	21
7	Kelurahan Semper Barat	Sampah	0		7	Kelurahan Sukapura	Sampah	18
8	Kelurahan Sunter Agung	Sampah	0		8	Kelurahan Kebon Bawang	Parkir Liar	18
9	Kelurahan Pademangan Barat	Fasilitas Gedung Pemda			9	Kelurahan Kebon Bawang	Keluhan Pelayanan	14
10	Kelurahan Pegangsaan Dua	Tumpahan Oli	0		10	Kelurahan Tugu Utara	Parkir Liar	12
Untuk pengaduan masyarakat dengan **jumlah aduan yang tertinggi** adalah **Kelurahan Sunter Jaya** dengan jumlah **31** aduan (8.13%) dari jumlah 381 total pengaduan selama bulan Juli 2024					Pengaduan masyarakat yang tertinggi adalah terkait dengan **Sampah** dengan jumlah **113** aduan (29.65%) dari jumlah **381** total pengaduan selama bulan Juli 2024			

Untuk pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bulan Juli 2024 nilai TL nya mencapai 100%

Pada Bulan Agustus Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
1	Kecamatan Kelapa Gading	Fasilitas Gedung Pemda	0		1	Kelurahan Cilincing	Sampah	27
2	Kelurahan Ancol	Sampah	0		2	Kelurahan Kebon Bawang	Parkir Liar	24
3	Kelurahan Cilincing	Parkir Liar	0		3	Kelurahan Lagoa	Pohon	20
4	Kelurahan Cilincing	Parkir Liar	0		4	Kelurahan Sukapura	Sampah	19
5	Kelurahan Kalibaru	Jalan	0		5	Kecamatan Semper Barat	Sampah	16

Pada Bulan Agustus Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
6	Kecamatan Kamal Muara	Sampah	0		6	Kecamatan Semper Timur	Parkir Liar	14
7	Kelurahan Kapuk Muara	Sampah	0		7	Kelurahan Sunter Agung	Pencemaran Lingkungan	14
8	Kelurahan Kelapa Gading Barat	PPSU	0		8	Kelurahan Sunter Jaya	Pohon	13
9	Kelurahan Kelapa Gading Timur	Gangguan Kebisingan	0		9	Kelurahan Tanjung Priok	Jalan	11
10	Kelurahan Kelapa Marunda	Parkir Liar	0		10	Kelurahan Kapuk Muara	Sampah	10
Untuk pengaduan masyarakat dengan **jumlah aduan yang tertinggi** adalah **Kelurahan Sunter Jaya** dengan jumlah **28** aduan (8.7%) dari jumlah 319 total pengaduan selama bulan Agustus 2024					Pengaduan masyarakat yang tertinggi adalah terkait dengan **Sampah** dengan jumlah **134** aduan (42%) dari jumlah **319** total pengaduan selama bulan Agustus 2024			
Untuk pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bulan Agustus 2024 nilai TL nya mencapai 100%								

Pada Bulan September Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
1	Kecamatan Kelapa Gading	Fasilitas Gedung Pemda	0		1	Kelurahan Cilincing	Sampah	74
2	Kelurahan Ancol	Sampah	0		2	Kelurahan Kebon Bawang	PPSU	30
3	Kelurahan Cilincing	Parkir Liar	0		3	Kelurahan Pejagalan	Gangguan Kebisingan	30
4	Kelurahan Cilincing	Parkir Liar	0		4	Kelurahan Sukapura	Sampah	27
5	Kelurahan Kalibaru	Jalan	0		5	Kelurahan Sunter Agung	Sampah	25
6	Kecamatan Kamal Muara	Sampah	0		6	Kota Adm. Jakarta Utara	Jalan	23
7	Kelurahan Kapuk Muara	Sampah	0		7	Kelurahan Pegangsaan Dua	Jalan	16
8	Kelurahan Kelapa Gading Barat	PPSU	0		8	Kelurahan Papanggo	Fasilitas Gedung Pemda	13
9	Kelurahan Kelapa Gading Timur	Gangguan Kebisingan	0		9	Kelurahan Penjaringan	Pohon	12
10	Kelurahan Kelapa Marunda	Parkir Liar	0		10	Kelurahan Kamal Muara	Sampah	12
Untuk pengaduan masyarakat dengan **jumlah aduan yang tertinggi** adalah **Kelurahan Pejagalan** dengan jumlah **31** aduan (10.54%) dari jumlah **294** total pengaduan selama bulan September 2024					Pengaduan masyarakat yang tertinggi adalah terkait dengan **Sampah** dengan jumlah **119** aduan (40,47%) dari jumlah **294** total pengaduan selama bulan September 2024			
Untuk pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bulan September 2024 nilai TL nya mencapai 99,99%								

Pada Bulan Oktober Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
1	Kelurahan Cilincing	Kebisingan	0		1	Kelurahan Sunter Jaya	Pelayanan, Sampah, Fasilitas Gedung Pemda	188
2	Kelurahan Kalibaru	Arus Lalu Lintas	0		2	Kelurahan Kapuk Muara	Sampah, Jalan	174
3	Kecamatan Kamal Muara	Sampah	0		3	Kelurahan Cilincing	Gangguan Kebisingan, Sampah	166
4	Kelurahan Cilincing	Parkir Liar	0		4	Kelurahan Sukapura	Parkir Liar, Saluran Air/Sungai	124
5	Kelurahan Kapuk Muara	Sampah	0		5	Kelurahan Sunter Agung	Jaringan Listrik, Pohon, Sampah	95
6	Kecamatan Kebon Bawang	Fasilitas Gedung Pemda	0		6	Kantor Walikota Jakarta Utara	Keluhan Pelayanan, Arus Lalu Lintas	88
7	Kelurahan Kelapa Gading Barat	Perizinan	0		7	Kelurahan Semper Barat	Sampah, Ormas, Penanganan Kebakaran	83
8	Kelurahan Kelapa Gading Timur	Sampah	0		8	Kelurahan Rorotan	Gangguan Kebisingan	68
9	Kelurahan Lagoa	Konflik Sosial	0		9	Kelurahan Pejagalan	Gangguan Kebisingan Sampah	65
10	Kelurahan Kelapa Marunda	Fasilitas Gedung Pemda	0		10	Kelurahan Tugu Selatan	PPSU, UMKM	40
Untuk pengaduan masyarakat dengan **jumlah aduan yang tertinggi** adalah **Kelurahan Sunter Jaya** dengan jumlah **28** aduan (7,07%) dari jumlah **396** total pengaduan selama bulan Oktober 2024					Pengaduan masyarakat yang tertinggi adalah terkait dengan **Sampah** dengan jumlah **160** aduan (40,40%) dari jumlah **396** total pengaduan selama bulan Oktober 2024			
Untuk pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bulan Oktober 2024 nilai TL nya mencapai 98,96%								

Pada Bulan November Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
1	Kecamatan Koja	Arus Lalu Lintas	0		1	Kelurahan Pademangan Barat	Sampah	29
2	Kecamatan Penjaringan	Konflik Sosial	0		2	Kelurahan Papanggo	Parkir Liar	23
3	Kelurahan Kalibaru	Perizinan	0		3	Kelurahan Pegangsaan Dua	Sampah	30
4	Kelurahan Kamal Muara	Penanganan Banjir	0		4	Kelurahan Pejagalan	Sampah	58
5	Kelurahan Kelapa Gading Barat	PPSU	0		5	Kelurahan Penjaringan	Penanganan Banjir	27

Pada Bulan November Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
6	Kelurahan Lagoa	Keluhan Pelayanan	0		6	Kelurahan Pluit	Sampah	31
7	Kelurahan Rawa Badak Selatan	Perizinan	0		7	Kelurahan Rawa Badak Selatan	Gangguan Kebisingan	30
8	Kelurahan Semper Barat	Gangguan Kebisingan	0		8	Kelurahan Sukapura	Keluhan Fasilitas Gedung Pemda	100
9	Kelurahan Sunter Jaya	Saluran Air	0		9	Kelurahan Sunter Jaya	Parkir Liar	66
10	Kelurahan Sungai Bambu	Gangguan Kebisingan	0		10	Kelurahan Tugu Selatan	Keluhan Fasilitas Gedung Pemda	43
Untuk pengaduan masyarakat dengan **jumlah aduan yang tertinggi** adalah **Kel Pegangsaan Dua** dengan jumlah **38** aduan (10,46%) dari jumlah **363** total pengaduan selama bulan November 2024					Pengaduan masyarakat yang tertinggi adalah terkait dengan **sampah** dengan jumlah **159** aduan (43,80%) dari jumlah **396** total pengaduan selama bulan November 2024			
Untuk pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bulan November 2024 nilai TL nya mencapai 100%								

Pada Bulan Desember Tahun 2024								
Waktu Tindak Lanjut (TL) Tercepat					Waktu Tindak Lanjut (TL) Terlama			
No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)		No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Waktu TL (Jam)
1	Kecamatan Semper Barat	Arus Lalu Lintas	0		1	Kelurahan Papanggo	Sampah	50
2	Kecamatan Kapuk Muara	Parkir Liar	0		2	Kelurahan Kebon Bawang	Jalan	44
3	Kelurahan Kebon Bawang	Sampah	0		3	Kecamatan Tanjung Priok	Gangguan Kebisingan	28
4	Kelurahan Kelapa Gading Barat	Parkir Liar	1		4	Kelurahan Sunter Jaya	Sampah	23
5	Kelurahan Lagoa	Parkir Liar	2		5	Kelurahan Penjaringan	Sampah	22
6	Kelurahan Marunda	Sampah	3		6	Kelurahan Sukapura	Keluhan Pelayanan	22
7	Kelurahan Pegangsaan Dua	Fasilitas Gedung Pemda	4		7	Kelurahan Sungai Bambu	PPSU	19
8	Kelurahan Pejagalan	Arus Lalu Lintas	5		8	Kelurahan Tanjung Priok	Sampah	14
9	Kelurahan Rawa Badak	Pohon	6		9	Kelurahan Semper Timur	Sampah	13
10	Kelurahan Sukapura	Pencemaran Lingkungan	6		10	Kelurahan Lagoa	Sampah	12
Untuk pengaduan masyarakat dengan **jumlah aduan yang tertinggi** adalah **Kelurahan Pejagalan** dengan jumlah **35** aduan (10,05%) dari jumlah **348** total pengaduan selama bulan Desember 2024					Pengaduan masyarakat yang tertinggi adalah terkait dengan **sampah** dengan jumlah **139** aduan (39,94%) dari jumlah **348** total pengaduan selama bulan Desember 2024			
Untuk pengaduan masyarakat tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara bulan Desember 2024 nilai TL nya mencapai 99,98%								

d. Daftar Kecamatan/Kelurahan dengan Tindak Lanjut (TL) tidak mencapai target pada tahun 2024, yaitu :

Tabel 3.36. Daftar Kecamatan/Kelurahan dengan Tindak Lanjut (TL) tidak mencapai target pada tahun 2024

No	Nama UKPD	Rincian Masalah	Nilai TL	Keterangan
1	Kelurahan Sunter Agung	Sampah	60	April 2024
2	Kelurahan Kamal Muara	Sampah	80	April 2024
3	Kecamatan Cilincing	Keluhan Pelayanan	60	Oktober 2024
4	Kelurahan Kapuk Muara	Sampah	80	Desember 2024

e. Dalam penanganan pengaduan masyarakat ada kendala yang dihadapi yang mempengaruhi capaian kinerja yaitu :

1. Masih adanya UKPD merespons pengaduan yang masuk di atas waktu respons time yaitu 6 jam. Respons time di sini dilihat dari waktu pengaduan masuk ke akun UKPD sampai dengan admin CRM UKPD mendisposisikan, mengkoordinasikan atau menggunakan fitur ticketing dalam aplikasi CRM salah satunya menggunakan Estimasi Waktu Selesai (EWS) yaitu memper-panjang waktu tindak lanjut pengaduan terkait pengaduan yang tindak lanjutnya memerlukan waktu lebih lama.
2. Masih ada beberapa UKPD membutuhkan waktu yang lama dalam proses koordinasi tindak lanjut pengaduan yaitu waktu antara aduan didisposisikan dari admin UKPD kepada petugas yang akan melakukan tindak lanjut ditandai dari aduan dalam status koordinasi menjadi status proses pada aplikasi CRM.

f. Saran, yaitu :

1. Dalam Penanganan pengaduan masyarakat hal sangat penting adalah bagaimana kecepatan dan ketepatan perangkat SKPD dalam merespons pengaduan sesuai dengan

kewenangan masing-masing SKPD/UKPD serta kesesuaian tindaklanjut yang dilaporkan dengan permasalahan yang dilaporkan oleh warga.

2. Penanganan pengaduan masyarakat sangat mempengaruhi terhadap capaian kinerja kepala SKPD. Salah satu indikator kinerja Walikota sebagai kepala SKPD adalah persentase capaian dalam penanganan pengaduan masyarakat sebesar 10% dari total kinerja untuk eselon II (Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota) dan 20% untuk eselon III dan IV.
3. Rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi CRM yang dilakukan secara berkala serta memaksimalkan komunikasi dalam WA grup CRM tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara, diharapkan menjadi sarana untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh UKPD di bawah Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dalam penanganan pengaduan masyarakat.
4. Koordinasi dan sinergitas yang baik antara SKPD sangat menentukan proses penanganan pengaduan baik dari sisi kecepatan waktu penanganan dan ketepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
5. Untuk UKPD yang lambat dalam menyelesaikan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang memberi dampak turunnya capaian kinerja dalam bentuk kurangnya TKD untuk eselon II, III dan IV di SKPD Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dapat memperbaiki kinerja dan melaporkan permasalahan atau kendala yang dihadapi yang menyebabkan lambatnya tindak lanjut.

23) Capaian Indikator Kinerja Kedua puluh tiga :

Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Indikator kinerja kedua puluh satu ini merupakan ukuran dari Sasaran Operasional yang kedua yaitu Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN OPERASIONAL						
21	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100%	TL Aduan Masyarakat (CRM)

Indikator kinerja Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sumber data dari Strategi Komunikasi.

Pengukuran Kinerja :

Metode Pengukuran :

Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%.

Sumber Data :

Arahan Gubernur (e-Kinerja)

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

a. Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur (target 100%, realisasi 100%)

   Persentase ini menilai Jumlah Realisasi Tindak Lanjut Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan arahan lain) dibagi Jumlah Tindak Lanjut Arahan Gubernur dikali 100%. Nilai realisasi Kota Administrasi Jakarta Utara adalah 100%. Capaian operasional pada indikator ini telah mencapai 100%, adapun Tindak Lanjut yang telah di tindak lanjuti sebanyak 11 (sebelas) arahan gubernur baik yang bersifat Informasi maupun yang membutuhkan tindak lanjut dan (100%).

Tabel 3.37. Realisasi Tindak Lanjut Arahan Gubernur Tahun 2024

No.	ID Arahan	Tanggal	Isi Arahan	Target Selesai	Status TL	Status Validasi
1	6137	26 Nov 2024	Pikirkan jangka panjang pemanfaatan kolong jembatan dan kolong tol. Kolong jembatan dan kolong tol diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ruang publik atau Ruang Terbuka Hijau (RTH), tidak sebagai hunian	31 Jan 2025	Belum TL	
2	6136	26 Nov 2024	Para Walikota untuk berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Sosial terkait relokasi warga. Saya sepakat melakukan relokasi warga pada hari Sabtu dan Minggu ini di beberapa wilayah. Komunikasikan (pelaksanaan relokasi) pada Hari Jumat.	17 Jan 2025	Selesai	
3	6134	26 Nov 2024	Arahan yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta adalah untuk menyelesaikan permasalahan warga penghuni Kolong Jembatan di Pademangan dan Penjaringan serta warga penghuni Kolong Tol di sekitar Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Namun, setelah Pemprov DKI Jakarta menyampaikan perkembangan data tindak lanjut arahan tersebut (penataan kawasan), Menteri PKP meminta untuk menyusuri seluruh wilayah DKI Jakarta.		Informasi	
4	6110	05 Des 2024	Para Perangkat Daerah agar mengantisipasi segala potensi-potensi bencana hingga akhir tahun. Para asisten agar mengkoordinasikan ke jajarannya masing-masing agar Perangkat Daerah langsung bergerak. BPBD harus selalu siap siaga. Dinas Sosial agar segera mempersiapkan perbekalan dan bansos. Jika curah hujan tinggi pada saat hari kerja, lakukan koordinasi dengan stakeholder lain terkait kemungkinan WFH (work from home). Aspem, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, seluruh Walikota/Bupati, agar segera memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar terkait evakuasi dini saat terjadi banjir. Harapannya, dashboard prediksi 3 jam sebelum hujan yang diinisiasi oleh BMKG bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air bisa di-launching sebelum tahun baru sehingga dapat segera digunakan untuk memprediksi titik-titik hujan di jalan tertentu. Perangkat Daerah terkait agar berkoordinasi langsung dengan BMKG untuk percepatan.		Informasi	

No.	ID Arahan	Tanggal	Isi Arahan	Target Selesai	Status TL	Status Validasi
5	6104	25 Nov 2024	- Jajaran Pemprov DKI komitmen untuk bersikap netral dalam Pilkada DKI dan Pj Gubernur DKI selalu menekankan netralitas kepada seluruh jajaran Pemprov DKI pada penyelenggaraan pilkada DKI di berbagai kesempatan. - Untuk kesiapan TPS di setiap wilayah agar dilaporkan pada besok sore oleh Para Walikota dan Bupati kepada Pj Gubernur DKI. - Hari pemungutan suara bukan hari libur untuk Dinas Dukcapil DKI dan agar tetap buka kantornya. Pada tanggal 26 Februari agar para petugas Dinas Dukcapil masuk sampai dengan pukul 22.00 WIB. - Terkait rekayasa cuaca, Sekda, Aspem, BPBD agar pastikan tindak lanjuti mengenai rekayasa cuaca dan cermati betul apakah akan melakukan atau tidak, dan agar sesuai regulasi untuk anggarannya serta apakah siap jika dilakukan dengan mekanisme swakelola. - Terkait TPS Rawan Banjir, pastikan ada skenario, walaupun ramalan cuaca intensitas sedang, namun perlu disiapkan Plan A dan Plan B-nya. - Para Walikota untuk mengantisipasi untuk lokasi-lokasi TPS yang rawan banjir. Plt. Kadis SDA dan Plh. Kepala BPBD juga agar turut mengecek kesiapannya. - Untuk lokasi TPS di wilayah rawan konflik agar menjadi perhatian bagi semua jajaran dalam rangka kesiapan Pilkada DKI. - Untuk sisa-sisa Alat Peraga Kampanye (APK) agar terus diturunkan dan dipatrolikan bersama KPU dan Bawaslu. Cek juga APK yang di kampung-kampung yang masih belum diturunkan. - Cek kembali pohon-pohon yang ada potensi rantingnya patah, tumbang. - Pada tanggal 27 November setelah kita menyoblos kita akan pantau beberapa titik di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sekda untuk dapat membagi tugas kepada para kepala OPD. - Terkait permintaan ketua KPU DKI, Kepala Dinas Pendidikan agar menyiapkan tempat untuk pemilihan di sekolah seperti di halaman, lapangan, selasar. Jika bersifat kondisional dapat menggunakan ruangan sekolah, serta dapat menggunakan RPTRA. - Jajaran Pemprov DKI, KPU dan Bawaslu DKI, serta Kanwil Kemenkumham DKI siap untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, 27 November 2024.		Informasi	

No.	ID Arahan	Tanggal	Isi Arahan	Target Selesai	Status TL	Status Validasi
6	6075	28 Okt 2024	1. Kepala Dinas PPAPP agar mengkoordinir penyelenggaraan acara Peringatan Hari Ibu Tingkat Nasional pada tanggal 8 Desember 2024 di Monas. 2. Komitmen (dukungan) dalam Rapat hari ini harus diteruskan. Saya berharap ada follow up konkret dari arahan-arahan yang disampaikan. 3. Saya berharap, kita mampu bersinergi dan berkolaborasi untuk menyukseskan acara tersebut, seperti Pemprov DKI Jakarta telah menyukseskan kegiatan-kegiatan PKK/Posyandu sebelumnya. 4. Sebelum penyelenggaraan acara tanggal 8 Desember 2024, akan ada rangkaian kegiatan lainnya yaitu operasi katarak. Kegiatan ini membutuhkan dukungan dari Pemprov DKI Jakarta dan TP PKK DKI Jakarta dan TP PKK Pusat. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD harus dimantapkan. 5. Pada acara tanggal 8 Desember 2024, Para Walikota/Bupati agar menyiapkan dan memenuhi kuota 15.000 kader PKK/Posyandu. Persiapkan juga kader PKK/Posyandu yang akan datang dari kota satelit. 6. Terkait mobilisasi peserta, kita perlu memikirkan untuk transportasi serta konsumsi yang ditanggung oleh masing-masing Walikota/Bupati. 7. Terkait kostum para peserta, kita akan menunggu arahan dari Ketum PKK. 8. Pada saat pelaksanaan acara akan diadakan pasar murah. BUMD terkait agar berkoordinasi bersama stakeholder lainnya, libatkan para Walikota/Bupati sehingga ada banyak booth. 9. Kadis. Dukcapil, agar membuka layanan adminduk pada acara tersebut, berupa pencetakan KTP dan layanan capil lainnya. Koordinasikan dengan Dirjen Dukcapil serta para Walikota/Bupati. 10. Dinas Kesehatan juga dapat mengadakan layanan pemeriksaan kanker serviks. 11. Agar suasana acara lebih meriah, kita dapat menambahkan doorprize. Doorprize terdiri dari hadiah besar (1 atau 2 macam saja), dan doorprize yang merakyat, bisa berupa buku tabungan berisi Rp.500.000. Saya pribadi juga akan menyumbang doorprize.		Informasi	

No.	ID Arahan	Tanggal	Isi Arahan	Target Selesai	Status TL	Status Validasi
			Jangan hanya membebani doorprize dari satu pihak, ajak pihak lainnya untuk berpartisipasi. Doorprize untuk tabungan ini agar diutamakan. 12. Terkait hal-hal yang bersifat besar seperti ukuran panggung, MC, hiburan, kita menunggu arahan Ketum PKK. 13. Dinas Kebudayaan bisa menyiapkan tarian yang bersemangat dan kekinian. 14. Dinas Parekraf agar menyiapkan Abnon untuk menyambut para peserta. 15. Jajaran BUMD agar ikut mensupport acara, tidak hanya sebatas perihal doorprize. 16. Kepala Biro Pemerintahan serta para Walikota/Bupati agar memastikan massa datang tepat waktu sesuai dengan kuota tiap wilayah serta mengikuti rangkaian acara hingga selesai. 17. Terkait mitigasi cuaca, pastikan pada saat pelaksanaan acara tidak hujan tetapi juga tidak panas. 18. Satpol PP agar memastikan keamanan di lokasi acara, berkoordinasi dengan aparat keamanan. 19. Dinas Perhubungan agar membuat rekayasa lalu lintas serta menyiapkan kantong-kantong parkir yang tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. 20. Terkait Pasar Murah, agar Dinas PPKUKM, BP BUMD, dan Dinas KPKP memikirkan lokasi serta mekanisme pembayarannya, terkait dengan adanya kesepakatan bahwa tidak ada transaksi menggunakan uang di lokasi acara. 21. Dinas Kesehatan agar menyiagakan tim medis serta sarana prasarana kesehatan pada di sekitar lokasi acara maupun titik konsentrasi massa sesuai kebutuhan dan juga mengoordinasikan terkait operasi katarak gratis. 22. Dinas Lingkungan Hidup agar menempatkan fasilitas toilet mobile di lokasi acara sesuai kebutuhan. Pastikan seluruh area kembali bersih setelah acara. 23. Antisipasi kehadiran Ibu Wakil Presiden, koordinasi dengan TP PKK tingkat nasional serta protokol Istana terkait pengaturan keprotokolan dan hospitality-nya. Pj Ketua PKK Provinsi DKI Jakarta juga akan berkoordinasi dengan Ibu Niken Tomsi Tohir beserta jajaran TP PKK Pusat. 24. Saya meminta agar seluruh jajaran TP PKK turut menyukseskan acara ini.			

No.	ID Arahan	Tanggal	Isi Arahan	Target Selesai	Status TL	Status Validasi
			25. Dinas Kominfotik agar mempublish serta mensosialisasikan acara ini, buat strategi komunikasi yang efektif sehingga seluruh masyarakat dapat terinformasi.			
7	6073	29 Okt 2024	Arahan terkait penganggaran dan realisasi APBD: a. Semua proyek yang dianggarkan tahun 2024 harus selesai pada Desember 2024. b. Pengadaan alat-alat tahun 2025 terkait pengendalian banjir agar dilakukan percepatan/pendahuluan. Petakan pengadaan alat yang bisa dilakukan percepatan (pra DPA) yang dapat dimulai pada bulan November 2024.		Informasi	
8	6072	29 Okt 2024	Arahan penanggulangan banjir: a. Seluruh perangkat daerah terkait agar berkomitmen dan bersinergi dalam implementasi penanggulangan banjir. Kepala OPD dan Walikota agar melakukan upaya antisipasi pada titik-titik genangan (perempatan ITC Fatmawati, underpass BNN, Cempaka Putih, UoB, dll). b. Dalam waktu dua sampai tiga bulan ke depan perlu melakukan antisipasi konkret dalam menghadapi risiko terjadinya curah hujan seperti pada tahun 2020 (siklus lima tahunan). c. Para asisten agar mengoordinasikan perangkat daerah sesuai dengan cakupan tugas masing-masing dan bekerja dalam sinergi penanggulangan banjir. d. Bersama kita lakukan peninjauan lapangan pada titik-titik rawan banjir dan genangan. Biro KDH agar menjadwalkan peninjauan lapangan berkoordinasi dengan para asisten. e. Perlu kesiapsiagaan dari seluruh perangkat daerah dan pihak terkait lainnya (pemerintah pusat, TNI, Polri). Agendakan rapat Forkopimda mengenai persiapan Musim Penghujan sebelum penyelenggaraan Apel Kesiapsiagaan. f. Asisten agar mengagendakan Apel Kesiapsiagaan menghadapi Musim Penghujan pada pekan depan di tingkat provinsi, kota administrasi, dan kabupaten administrasi. Atur waktu, tempat, dan format acaranya. Apel ini bukan acara seremonial semata, tetapi berfungsi untuk menyiapkan kesiagaan seluruh pihak terkait.		Informasi	

No.	ID Arahan	Tanggal	Isi Arahan	Target Selesai	Status TL	Status Validasi
			g. Terkait prediksi puncak hujan pada Februari 2025, BPBD agar berkoordinasi dengan BMKG mengenai rekayasa cuaca dan pastikan anggarannya tersedia. h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar melakukan reviu terhadap Pergub No. 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 sesuai kondisi terkini.			
9	6972	27 Agt 2024	Terkait acara Penyuluhan Anti Narkoba bagi Siswa se DKI Jakarta: a. Acara penyuluhan Anti Narkoba akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 di Velodrom Jakarta pukul 10.00 WIB dan akan dihadiri oleh Ibu Negara. Jumlah peserta penyuluhan sebanyak 5.000 siswa. Para Walikota (melalui sudin-sudinnya) per wilayah agar menghadirkan sebanyak 1.000 siswa ke lokasi kegiatan. b. Dinas PPAPP menyiapkan kegiatan di dalam venue. Untuk sound system di tempat acara agar dicek terlebih dahulu. Dinas PPAPP agar mengatur detail teknis acara penyuluhan anti narkoba lebih lanjut bersama OPD terkait. c. Dinas Tamhut agar merapikan dekorasi di dalam dan di luar ruangan acara. Lokasi acara agar bersih dan didekorasi. d. BPBUMD bersama Dirut Transjakarta dan Dirut Jakpro agar membantu pelaksanaan acara dengan mengatur konsumsi makan siang dan snack bagi peserta. e. Kasatpol PP agar mengatur keamanannya, serta mengatur UMKM agar rapi dan bersih dalam berdagang. f. Dinas Kebudayaan agar menyiapkan tarian selamat datang. g. Dinas Parekraf mengatur kehadiran abang none Jakarta. h. Dinas LH membersihkan sepanjang rute yang dilalui oleh Ibu Negara. i. Bagian Persidangan Biro KDH Setda agar memasukkan tentang Prabu (Pelajar Duta Trantibum) Jakarta yang sudah dikukuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta, ke dalam sambutan Pj Gubernur. j. Kepala Dinas Pendidikan agar menghadirkan siswa yang sudah dikukuhkan menjadi Prabu Jakarta. Dipersilahkan mereka membaur dan menggunakan atribut rompi Prabu Jakarta agar mudah dikenali. k. Dinas Perhubungan agar mengerahkan bus-bus sekolah untuk mobilisasi siswa dan merapikan lalu lintasnya.		Informasi	

No.	ID Arahan	Tanggal	Isi Arahan	Target Selesai	Status TL	Status Validasi
10	5813	08 Jan 2024	BKD agar lebih selektif dalam menerima permohonan mutasi masuk ASN dari instansi lain, terutama jika bermasalah di instansi sebelumnya. Sekarang sedang proses perpanjangan kontrak PJLP. Hati-hati terhadap pungli. Umumkan ke seluruh PJLP, jika ada yang melakukan pungli agar melapor. Penempatan Lurah agar dilakukan dengan mempertimbangkan domisili yang bersangkutan. BKD agar mengumpuikan para ASN yang berlatar belakang arsitek agar bisa mendesain gedung yang menarik.		Informasi	
11	5794	08 Jan 2024	Gunakan media sosial dengan bahasa yang sopan untuk menjawab/menjelaskan kepada masyarakat jika terdapat kasus. Rekan-rekan Kepala Perangkat Daerah lain juga agar membantu menjelaskan kepada masyarakat.		Informasi	

24) Capaian Indikator Kinerja Kedua puluh empat :

Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Indikator kinerja kedua puluh satu ini merupakan ukuran dari Sasaran Operasional yang ketiga yaitu Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
	SASARAN OPERASIONAL						
21	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100%	Inspektorat (e-Kinerja)

Indikator kinerja Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) telah dilaksanakan dengan realisasi sesuai target sebesar 100, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Sumber data dari Inspektorat (e-Kinerja).

Pengukuran Kinerja :

Metode Pengukuran :

(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD di bawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOTA PENERIMAAN

Nomor STS : 3230283223

Harap diterima uang Sebesar	:	Rp. 214.674.232,00
(dengan huruf)	:	Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah
Tahun Setor	:	2023
Tanggal Bayar	:	2023/12/22 00:00:00
Nomor Setor (STS)	:	Z 028337/SP2D/XII/2023
SKPD Penyetor	:	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Alamat Penyetor	:	JAKARTA
SKPD Penerima	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO	Kode Rekening	Uraian Rincian Penerimaan	Jumlah
1	4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan JASA KONSTRUKSI REHAB TOTAL KANTOR LURAH KEBON BAWANG TA 2022	Rp. 214.674.232,00
		Jumlah	**Rp. 214.674.232,00**

Kode Validasi	:	23PUTA02000000631
Tanggal Validasi	:	2023/12/22 13:18:57
Nomor Setor	:	Z 028337/SP2D/XII/2023
Nilai	:	Rp. 214.674.232,00
NTPD	:	2312096836
Loket	:	JAKARTA UTARA

Jakarta, 22 December 2023

Menandatangani,
Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota - Jakarta Utara dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu,

Iwan Kurniawan
196706051996031003

BERITA ACARA RENCANA KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH
PENYELESAIAN TLHP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

Bertanda tai kasi sampaikan progres penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta s.d TW I Tahun 2024

NO	PENILAIAN PERKIN		TW II		PENYELESAIAN TLHP BPK RI	HASIL VERIFIKASI OLEH INSPECTORAT		
	URAIAN		Jumlah	(Nilai (Rp)	TINDAK LANJUT SKPD	Sesuai	Tidak	Catatan
1	Jumlah Rekomendasi Awal (Saldo TLHP BPK RI per TW IV Tahun 2022 yang Belum Selesai Ditindaklanjuti)		10	842.303.571,39	**1. LHP Atas LKPD 2022 Kabupaten/Pemerintah Pekerjaan atas 29 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada sepuluh OPD Kelurahan Dikecamatan Dewila, Inventaris No.A7 Rekomendasi BPK menyimpulkan Gubernur DKI Jakarta agar memerintah dan:** b. Walikota Jakarta Utara memagih denda keterlambatan senilai Rp. 1,112,859,293,96 kepada penyedia dan menyetorkan ke Kas Daerah telah dilaksanakan dengan membuat setoran dengan nomor SSS TSX00225 sebesar Rp 710,576,845 tanggal 18 Desember 2023. **diulisi 0,5**	✓		Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi
2	Tambahan Rekomendasi (Jika ada LHP Baru)		0	0,00	**2. LHP PSU yang berasal dari pemeriksaan kewajiban yang bersumber dari Pihak Ketiga s.d Laporan Keuangan Semester I TA 2022, Temuan 2.0, 2.1:** Rekomendasi BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan Kepala BPAD dan Walikota Administrasi Jakarta Utara Untuk berkoordinasi dengan TPTW Kota Jakarta Utara dan Suku Dinas Marga Jakarta Utara untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi atas keseluruhan hasil atas temuan PBB Hasil pemeriksaan PT SMA dengan hasil untuk Jalan Provinsi pada KHLA Suku Dinas Marga Jakarta Utara, telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Suku Dinas Dinas Marga Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 7006/KS.03 tanggal 24 Maret 2024 **diulisi 1**			
3	Jumlah Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti		10	842.303.571,39	**3. LHP PSU yang berasal dari pemeriksaan kewajiban yang bersumber dari Pihak Ketiga s.d Laporan Keuangan Semester I TA 2022, Temuan 3.1 a.** Rekomendasi BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Agar: a. Memerintahkan Walikota Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara agar segera melakukan penagihan kepada setiap pengadaan BAST dengan PPTPTOPR yang belum ditagih sesuai dengan kewajibannya dan melaporkan progres secara rutin dalam bentuk laporan triwulanan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan BAST ke PT NKRE, **diulisi 0,15**			
4	Target (Jumlah penagihan yang direncanakan secara riil dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Persentase	50%		**4. LHP PSU yang berasal dari pemeriksaan kewajiban yang bersumber dari Pihak Ketiga s.d Laporan Keuangan Semester I TA 2022, Temuan 3.2** Rekomendasi BPK Memerintahkan Walikota Jakarta Utara untuk menginstruksikan TPTW Jakarta Utara melakukan pemeriksaan pembayaran atas pengadaan dan penagihan atas kewajiban TPTPTOPR sesuai dengan BAST kewajiban sesuai dengan kesepakatan, telah ditindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi dengan pengembang dan instansi terkait mengenai tertunda BPK dengan mencantumkan undangan, daftar hadir dan notulen rapat, sedang dalam proses penagihan dan kontrak, **diulisi 0,35**			
		Jumlah	4,00	210.576.843,00	**5. LHP PSU yang berasal dari pemeriksaan kewajiban yang bersumber dari Pihak Ketiga s.d Laporan Keuangan Semester I TA 2022, Temuan 3.3** BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar : a. Memerintahkan Walikota Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat untuk melakukan TPTW untuk mendata kekurangan atas pekerjaan pengadaan dan kewajiban yang mencakup jenis, volume dan kualitas dan melakukan pemantauan penagihannya kepada kewajiban sampai BAST (Berdistribusi), telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan BAST PT. SA, **diulisi 0,25**			
5	Realisasi (Hasil yang dicapai setiap triwulan)	Persentase	25,00%	25,00%	**6.LHP PSU yang berasal dari pemeriksaan kewajiban yang bersumber dari Pihak Ketiga s.d Laporan Keuangan Semester I TA 2022, Temuan 3.4** Rekomendasi BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan: a. Kepala BPAD dan Walikota kota administrasi Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat untuk berkoordinasi melakukan inventarisasi keberadaan aset PSU yang tidak diketahui dan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat PT. SA, **diulisi 0,5**			
		Jumlah	1	210.576.843,00	**7. LHP PSU yang berasal dari pemeriksaan kewajiban yang bersumber dari Pihak Ketiga s.d Laporan Keuangan Semester I TA 2022, Temuan 3.5** Rekomendasi BPK RI memerintahkan Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan: a. Walikota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat supaya memerintahkan TPTW melakukan penagihan sertifikat sampai dengan sertifikat dikeluarkan dan atas nama pemprov DKI Jakarta, telah ditindaklanjuti dengan surat penagihan Walikota Jakarta Utara kepada Kepala Suku Dinas **diulisi 0,5**			
6	Capaian (Realisasi penagihan dibandingkan dengan rencana/target)	Persentase	100,00%	100,00%	**8. LHP LKPD 2018 BPK Pemanfaatan dan Pengurusan Aset Fasos dan Fasum Belum Optimal,** BPK memberikan Gubernur agar memerintahkan Kepala BPAD untuk berkoordinasi dengan Walikota di masing-masing wilayah kota administrasi dalam mengadakan aset kewajiban pengembang/developer agar SHGB dan melakukan proses pensertifikatan pada 114 bidang tanah yang dimohon menjadi sertifikat atas nama Pemprov DKI Jakarta, telah ditindaklanjuti dengan surat penagihan Walikota Jakarta Utara kepada di pengembang **diulisi 0,25**			
7	Capaian Akhir Perjanjian Kinerja	Persentase	25,00%					

Keterangan :
- Rekomendasi Awal adalah jumlah rekomendasi yang belum selesai di Triwulan pertama (TW I) yang telah masuk tahun 2023
- Target adalah Jumlah Rekomendasi yang harus dicapai yang ditagihkan setiap bln atau dalam satu triwulan sehingga mencapai 80% dari Jumlah Rekomendasi.
- Apabila Realisasi Target Triwulan tidak mencapai 80% dari Jumlah Rekomendasi Rekomendasi atau verifikasi Perjanjian Kinerja Triwulan IV Kolom bisa 100% sejajar realisasi triwulanan (TW IV) mencapai target triwulanan
- Realisasi adalah Jumlah Rekomendasi yang selesai di Triwulan berjalan setiap minggu.
- Capaian adalah persentase Realisasi terhadap Target. Bila Realisasi melebihi Target maka Capaian tetap 100%.
- Penambahan Rekomendasi pada triwulan berjalan (Indikasi LHP baru) yang akan mengubah atau rekomendasi yang belum di ts., tidak mengubah persentase target yang telah ditetapkan

Pelaksana Verifikator
Pemantauan Tindak Lanjut

Intan Fanda Kolinah
NIP. 196508171996012002

Yaya Mulyana
NIP. 197206131998031009

Mengetahui :
Inspektur Pembantu I
Selaku Verifikator

Anis Wibowo
NIP. 197704021998111001

Jakarta, April 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

Ir. Ali Mamana Hakim, S.IP., M.Si
NIP. 197204261991011001

BERITA ACARA RENCANA KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH
PENYELESAIAN TLHP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta s.d TW I Tahun 2024

NO	PENELAAN PERSIP		TW II		PENYELESAIAN TLHP BPK RI	HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT		
	URAIAN		Jumlah	Nilai (Rp)	TINDAK LANJUT SKPD	Selesai	Belum	Catatan
1	Jumlah Rekomendasi Awal (Sisa TLHP BPK RI per TW IV Tahun 2022 yang Belum Selesai Ditindaklanjuti)		10	842.307.371,00	**1. LHP Atas LKPD 2022 Ketertiberkatan Penyelesaian Pekerjaan atas 21 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada opadak OPD Kecuali Ditindaklanjuti Dendo, Nomor No.3-7 Rekomendasi BPK menyarankan Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan:** b. Walikota Jakarta Utara mengali denda keterlambatan sesuai Rp. 1,112,895,895,50 kepada penyedia dan menyetorkan ke Kas Daerah, telah ditindaklanjuti dengan mentransfer sebesar dengan nomor SSD XI3600223 sebesar Rp. 248,576,000 tanggal 18 Desember 2023 **status 0,5**	4		Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi
2	Tindaklanjut Rekomendasi (Masuk LHP Baru)		0	0,00	**2. LHP PSU yang berasal dari pemeriksaan keuangan yang bersumber dari Pihak Ketiga s.d Laporan Keuangan Semester I TA 2023, Temuan 3.1 b.** Rekomendasi BPK menyarankan Gubernur DKI Jakarta agar : c. Memerintahkan Walikota Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara agar segera melakukan pengadaan lapangan parkir sesuai dengan RAKT dan dituangkan pengaturan SBPP/SBPB yang belum mencantumkan lampirannya dan mengendalikan pengaturan secara rutin dalam bentuk laporan triwulanan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan DAKT ke PT SMOTI, **status 0,25**			
3	Jumlah Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti		10	842.307.371,00	**4. LHP PSU yang berasal dari pemeriksaan keuangan yang bersumber dari Pihak Ketiga s.d Laporan Keuangan Semester I TA 2023, Temuan 3.2** Rekomendasi BPK menyarankan Walikota Jakarta Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Utara untuk berkoordinasi dengan TPSW Kota Jakarta Utara dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Utara untuk melakukan pengadaan lapangan parkir sesuai dengan RAKT dan dituangkan pengaturan SBPP/SBPB yang belum mencantumkan lampirannya dan mengendalikan pengaturan secara rutin dalam bentuk laporan triwulanan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan DAKT ke PT SMOTI, **status 0,25**			
4	Target: Persentase penyelesaian yang direncanakan secara rutin dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Persentase	25%		**5. LHP PSU yang berasal dari pemeriksaan keuangan yang bersumber dari Pihak Ketiga s.d Laporan Keuangan Semester I TA 2023, Temuan 3.3** BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar : a. Memerintahkan Walikota Jakarta Timur, Jakarta Timur dan Jakarta Barat untuk mempertimbangkan TPSW untuk mendaftarkan aset pelabuhan pembangunan dan lengkapan yang menunjang jasa, sesuai dan berdasar dan melakukan pemanfaatan pertinggaran dan lengkapan sesuai DAKT dituangkan, telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan DAKT PT. SA, **status 0,25**			
		Jumlah	0,00	210.576.843,00	**6. LHP PSU yang berasal dari pemeriksaan keuangan yang bersumber dari Pihak Ketiga s.d Laporan Keuangan Semester I TA 2023, Temuan 3.8** Rekomendasi BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan: a. Kepala BPAD dan Walikota kota administrasi Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat untuk berkoordinasi melakukan inventarisasi lebih lanjut aset PSU yang tidak dikuasai dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan aset PT. SA, **status 0,5**			
5	Realisasi (Jlmlnl yang diselesaikan setiap triwulan)	Persentase	25,00%	25,00%	**7. LHP PSU yang berasal dari pemeriksaan keuangan yang bersumber dari Pihak Ketiga s.d Laporan Keuangan Semester I TA 2023, Temuan 3.9** Rekomendasi BPK RI merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan: a. Walikota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat agar memerintahkan TLHW melakukan pengadaan sertifikat sesuai dengan sertifikat dikoordinasikan atas nama Pemprov DKI Jakarta, telah ditindaklanjuti dengan surat permohonan Walikota Jakarta Utara kepada Gubernur dengan **status 0,5**			
		Jumlah	4	210.576.843,00	**8. LHP LKPD 2018 BPK Pemeriksaan dan Pengawasan Aset Pasar dan Rumah Susun (Optional)** BPK menyarankan Gubernur agar memerintahkan Kepala BPAD untuk berkoordinasi dengan Walikota di masing-masing wilayah kota administrasi dalam rangka melakukan pengurusan/pengadaan SHPT untuk menyelesaikan proses penerbitan pada 114 bidang tanah yang diserahkan sampai saat ini atas nama Pemprov DKI Jakarta, telah ditindaklanjuti dengan surat permohonan Walikota Jakarta Utara kepada Gubernur **status 0,75**			
6	Capaian (Realisasi penyelesaian dibandingkan dengan rencana/target)	Persentase	100,00%	100,00%				
7	Capaian Akhir Pendaftaran Pelaporan Kinerja	Persentase	25,00%					

Keterangan :
- Rekomendasi Awal adalah jumlah rekomendasi yang belum selesai di Ditindaklanjuti atas LHP yang telah audit tahun 2023.
- Target adalah Jumlah Rekomendasi yang harus diupaya yang diselesaikan setiap triwulan dalam satu tahun sehingga mencapai 50% dari jumlah Rekomendasi.
- Apabila Realisasi Target Total di akhir tahun tidak mencapai 50% dari Jumlah Rekomendasi maka sesuai Perjanjian Kinerja Triwulan IV tidak bisa 100% maka yang realisasi triwulanan (TW IV) dikurangi target triwulanan.
- Realisasi adalah Jumlah Rekomendasi yang selesai di Ditindaklanjuti setiap triwulan.
- Capaian adalah persentase Realisasi terhadap Target. Nilai Realisasi triwulan Target maka Capaian setiap 100%.
- Permintaan Rekomendasi pada triwulan berjalan (Jaknya LHP baru) yang akan menambah sisa rekomendasi yang belum di TL, tidak mengubah parameter target yang sudah ditetapkan.

Petugas Verifikator
Pemantauan Tindak Lanjut

Inter Frida Rotasoh
NIP. 196508171996032002

Yaya Maryana
NIP. 197206131998031009

Mengetahui :
Inspektur Pembantu I
Selaku Verifikator

Andi Siliwoso
NIP. 197704021998111001

Jakarta, April 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

Dr. Ali Maskur Hakim, S.IP., M.Si
NIP. 197204261991111001

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOTA PENERIMAAN

Nomor STS : 3230283223

Harap diterima uang Sebesar	:	Rp. 214.674.232,00
(dengan huruf)	:	Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah
Tahun Setor	:	2023
Tanggal Bayar	:	2023/12/22 00:00:00
Nomor Setor (STS)	:	2.028337/SP2D/XII/2023
SKPD Penyetor	:	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Alamat Penyetor	:	JAKARTA
SKPD Penerima	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO	Kode Rekening	Uraian Rincian Penerimaan	Jumlah
1	4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan JASA KONSTRUKSI REHAB TOTAL KANTOR LURAH CEBON BAWANG TA 2022	Rp. 214.674.232,00
		Jumlah	**Rp. 214.674.232,00**

Jakarta, 22 December 2023

Menandatangani,

(.....M REFFY M.....)

NIP 198203282001001100

PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA - JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU

REKAP POTONGAN

NOMOR SP2D	:	2.028337/SP2D/XII/2023
SKPD / UKPD	:	50120000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
YANG BERHAK	:	PT. ARMEKON NADA SABOLAK Jl. Ketapang Raya Blok Dd19 No. 02, Pondok Pekayon Indah, Kelurahan Pekayon Jaya, Kota Bekasi
NPWP	:	844388453432000
NOMOR SPM	:	0000290/SPM/50120000/XII/2023
JUMLAH SPM	:	Rp 242.532.721,00

JENIS POTONGAN	JUMLAH (Rp)
Denda Keterlambatan	214.674.232
PPN 11%	24.034.775
PPH PS 4 Ayat 2	3.823.714

JUMLAH POTONGAN	: Rp	242.532.721,00
JUMLAH DIBAYARKAN	: Rp	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

NOMOR : 2 028337/SP2D/XII/2023

SP2D-LS

Nomor SPM : 0000290/SPM/50120000/XII/2023
Tanggal SPM : 20 Desember 2023
SKPD / UKPD : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Jl. Laksda Yos Sudardo No. 27-29 Tg. Priok Jakarta Utara

Dari : Kuasa BUD
Tahun Anggaran : 2023

Bank / Pos : BANK DKI JAKARTA UTARA
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Rekening Nomor : 20102216052
Uang sebesar : Rp. 0.00
Terbilang : *Nol Rupiah*

Kepada : PT. ARMEKON NADA SABOLAK
Jl. Ketapang Raya Blok Dd19 No. 02, Pondok Pekayon Indah, Kelurahan Pekayon Jaya, Kota Bekasi
Pimpinan : MARUDUT SINAGA
NPWP : 944388453432000
No Kontrak : 207/-76.342/004/XII/2022

Nama Bank : PT. BANK DKI
No. Rekening : 51116046975
Atas Nama : PT ARMEKON SADA NABOLAK

Untuk Keperluan / Pekerjaan : PEMBAYARAN HUTANG DAERAH PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI REHAB TOTAL KANTOR LURAH KEBON BAWANG TA 2022, BERDASARKAN ADENDUM KONTRAK NO 207/-

Pembebanan pada :
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kode Rekening :

No	Uraian	Jumlah
1	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	242,532,721
	Jumlah	242,532,721

Potongan :

No	Uraian	Jumlah
1	Denda Keterlambatan	214,674,232
2	PPN 11 % : 11%	24,034,775
3	PPH PS 4 Ayat 2 : 1,75 %	3,823,714
	Jumlah Potongan	242,532,721.00

SP2D yang dibayarkan :

Jumlah yang diminta : Rp 242,532,721.00
Jumlah Potongan : Rp 242,532,721.00
Jumlah yang dibayarkan : Rp 0.00
Uang Sejumlah : *Nol Rupiah*

Jakarta, 22 Desember 2023
Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
Selaku
Kuasa Bendahara Umum Daerah

Iwan Kurniawan
NIP. 196706051996031003

Printed by SIPD DKI Telah Dinandatangani di tanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lembar 1 untuk Penerima Hasil
Lembar 2 untuk KPKN
Lembar 3 untuk Pemberi Hasil

PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA - JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU

BUKTI POTONGAN PPh Pasal 4 Ayat 2

NAMA WAJIB PAJAK : PT. ARMEKON NADA SABIOLAK
N P W P : 944388453432000
ALAMAT : JL. KETAPANG RAYA BLOIK DD19 NO. 02, PONDOK PEKAYON INDAH, KELURAHAN
JUMLAH IMBALAN BRUTO : Rp. 242,532,721.00

PENGHASILAN

1.	PEKERJAAN KONTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA KUALIFIKASI KECIL ATAU SERTIFIKAT	1.75 %	
2.	PEKERJAAN KONTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR ATAU SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA UNTUK USAHA ORANG	2.65 %	
3.	PEKERJAAN KONTRUKSI TERINTEGRASI YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA	2.65 %	
4.	JASA KONSULTANSI KONTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA ATAU SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA UNTUK USAHA ORANG PERSEORANGAN	3.5 %	
5.	PEKERJAAN KONTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA ATAU SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA UNTUK USAHA ORANG PERSEORANGAN	4 %	
6.	PEKERJAAN KONTRUKSI TERINTEGRASI YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA	4 %	
7.	JASA KONSULTANSI KONTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA ATAU SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA UNTUK USAHA ORANG PERSEORANGAN	6 %	
8.	SEWA TEMPAT,TANAH,RUANGAN DAN BANGUNAN	10 %	
9.	PENGHASILAN BRUTO TERTENTU SESUAI PP 23/2018	0.5 %	
10.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	2.5 %	
		Rp.	3,823,714.00

Nomor SP2D : 2 028337/SP2D/XII/2023
SKPD / UKPD : 50120000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
A l a m a t : JL. Laksda Yos Sudardo No. 27-29 Tg. Priok Jakarta Utara
NPWP :

Jakarta, 22 Desember 2023

Kasubbid Akuntansi dan Kas Daerah SBPK
Kota - JAKUT

Imas Noor Arafah
NIP. 197012151998032006

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 1 Tahun sebelumnya

Pada Sub bab ini membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.38. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	93,79	108,1%	93,79	96,80	102,72%
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	93,79	108,1%	93,79	96,80	102,72%
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,5	95,28	107,66%	95,28	97,22	102,04%
4		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	85	92,3	108,59%	92,30	96,38	104,42%
5	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	-	-	-	100	100	100%
6	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	100	100%	100	100	100%
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya	100	100	100%	100	100	100%
8	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggula-ngan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	-	-	-	100	100	100%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
9	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati	100	100	100%	100	100	100%
10	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	-	-	-	100	100	100%
11	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerin-tahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100%	100	100	100%
12	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerin-tahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	100	100%	100	100	100%
13	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas (Sub.KSD 17)	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Peruma-han dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	100	100	100%	-	-	-
14	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja (Sub.KSD 6)	Persentase penyele-saian rencana aksi KSD Akselerasi Pertum-buhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	100	100	100%	-	-	-
	SASARAN KHUSUS							
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	95,47	119,3%	80	96,44	120,55%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
2	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	100	100%	100	100	100%
3	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	100%	100	100	100%
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	100	100%	100	100	100%
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program	100	100	100%	100	100	100%
6	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	100%	100	100	100%
7	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	100	100	100%	3.25	3.25	100%
8	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	96,91	136,5%	71	89,81	126%
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	96,77	105,2%	92	96	104%
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	3 (WTP)	3	100%	-	-	-
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	100	100%	-	-	-
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	87,25	106,4%	-	-	-

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
13	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100	100	100%	-	-	-
14	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	100	100	100%	-	-	-
	SASARAN OPERASIONAL							
1	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100	99,7	99,7%	100	99,87	99,87%
2	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100%	100	100	100%
3	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	100	100	100%	100	100	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dan e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 serta LKIP Tahun 2023

Keterangan :

	Indikator Kinerja Utama Jakarta Utara
	Ada Indikator Kinerja pada tahun 2024, tetapi tidak ada pada tahun 2023
	Ada Indikator Kinerja pada tahun 2023, tetapi tidak ada pada tahun 2024

Dilihat pada tabel perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2024 dengan tahun 2023 di atas, dapat dilaporkan bahwa :

a. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi

Indikator ini merupakan Tujuan Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu "Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan optimal" perhitungan didapatkan dari Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan

kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi,

Pejabat Administrator yang mengampu Indikator ini yaitu: Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Utara dan Para Kepala Bagian.

Untuk sasaran strategis yang pertama ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	93,79	108,1%	93,79	96,80	102,72%
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	93,79	108,1%	93,79	96,80	102,72%

a.1. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (Unsur Kecamatan)

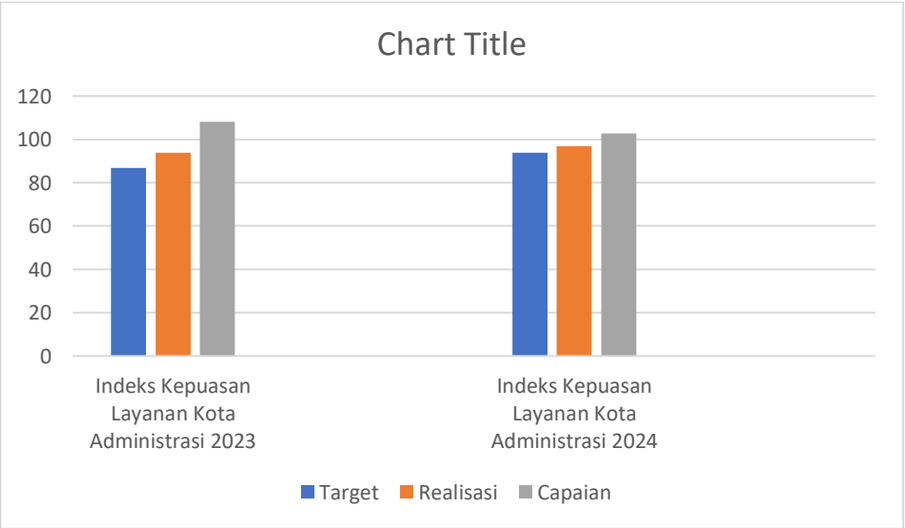

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja pertama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (Unsur Kecamatan), pada tahun 2023 ada karena Renstra baru (tahun 2023 s.d 2026) dengan target pada tahun 2023 sebesar 86,75 dan terjadi kenaikan target pada tahun 2024 menjadi sebesar 93,79.

Untuk Realisasi indikator kinerja pertama ini pada tahun 2023 melebihi target sebesar 93,785 dari target 86,75, sehingga memperoleh capaian sebesar 108,1%. Sama halnya dengan tahun 2024, realisasi melebihi target sebesar 96,80 dari target 93,79, sehingga memperoleh capaian sebesar 102,27%.

Hal tersebut menggambarkan bahwa rasa kepuasan layanan kota administrasi (unsur kecamatan) terhadap kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara mengalami peningkatan, di mana hal tersebut menjadi indikasi positif bahwa Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara terus berbenah dalam meningkatkan kepuasan layanan kota administrasi.

a.2. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (Unsur Kota Adm.)

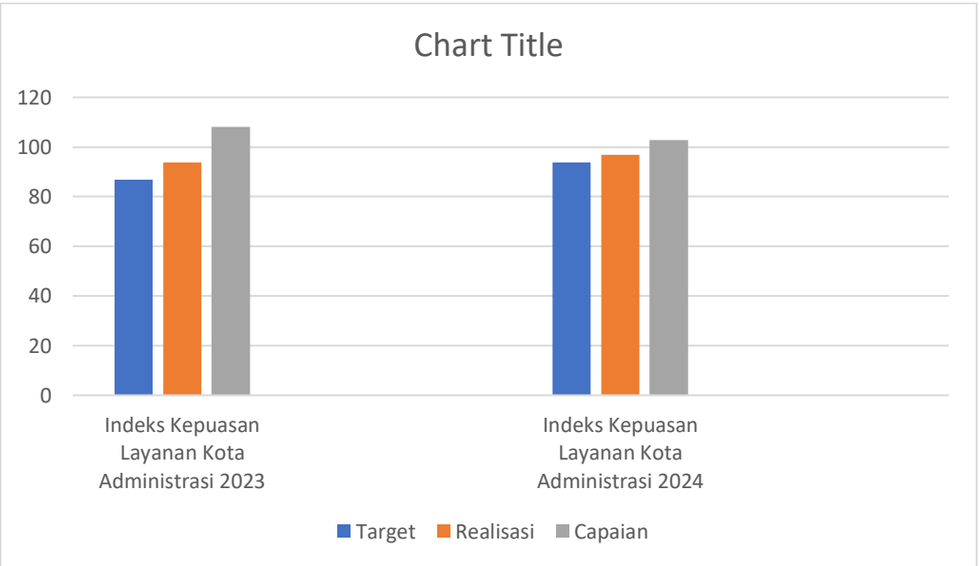

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja pertama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (Unsur Kota Administrasi), pada tahun 2023 ada karena Renstra baru (tahun 2023 s.d 2026) dengan target pada tahun 2023 sebesar 86,75 dan terjadi kenaikan target pada tahun 2024 menjadi sebesar 93,79.

Untuk Realisasi indikator kinerja pertama ini pada tahun 2023 melebihi target sebesar 93,785 dari target 86,75, sehingga memperoleh capaian sebesar 108,1%. Sama halnya dengan tahun 2024, realisasi melebihi target sebesar 96,80 dari target 93,79, sehingga memperoleh capaian sebesar 102,27%.

Hal tersebut menggambarkan bahwa rasa kepuasan layanan kota administrasi (unsur Kota Administrasi) terhadap kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara mengalami peningkatan, di mana hal tersebut menjadi indikasi positif bahwa Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara terus berbenah dalam meningkatkan kepuasan layanan kota administrasi.

b. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

Indikator ini merupakan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu "Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal" perhitungan didapatkan dari Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, di mana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut:

a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99;
b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60;
c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30;
d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).

Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.

Sumber Data :

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei.

Pejabat Administrator yang mengampu Indikator ini yaitu: Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Utara dan Para Kepala Bagian.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penye-lenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,5	95,28	107,66%	95,28	97,22	102,04%

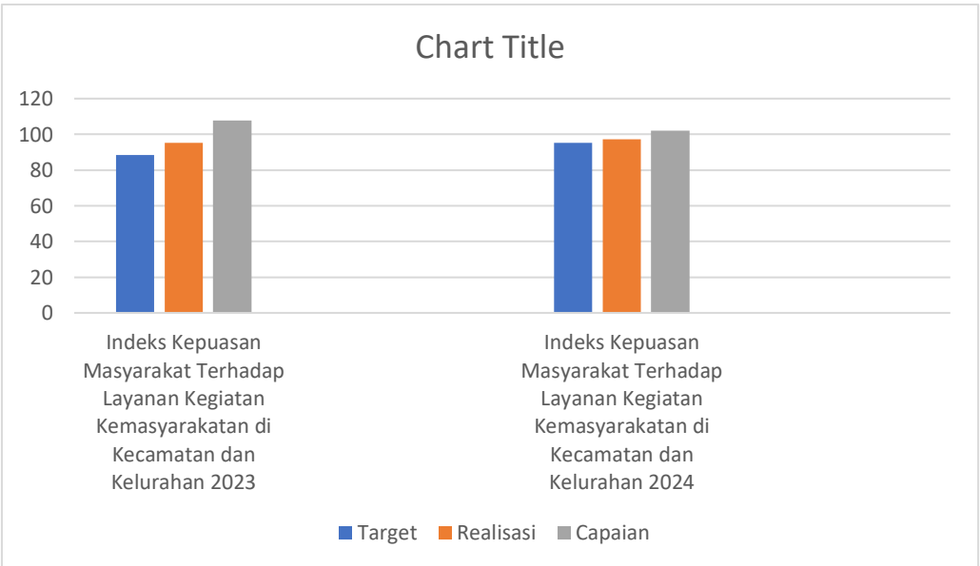

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja ketiga pada tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, terlihat target pada tahun 2023 sebesar 88,5 dan terjadi kenaikan target pada tahun 2024 menjadi sebesar 95,28.

Untuk indikator kinerja ketiga pada tahun 2024, terlihat realisasi pada tahun 2023 melebihi target sebesar 93,785 dari target 86,75, sehingga memperoleh capaian sebesar 108,1%. Sama halnya dengan tahun 2024, realisasi melebihi target sebesar 97,22 dari target 95,28, sehingga memperoleh capaian sebesar 102,04%.

Hal tersebut menggambarkan bahwa rasa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara mengalami peningkatan, di mana hal tersebut menjadi indikasi positif bahwa Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara terus berbenah dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

c. Indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

Indikator ini juga merupakan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu “Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal” perhitungan didapatkan dari Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penye-lenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	85	92,3	108,59%	92,30	96,38	104,42%

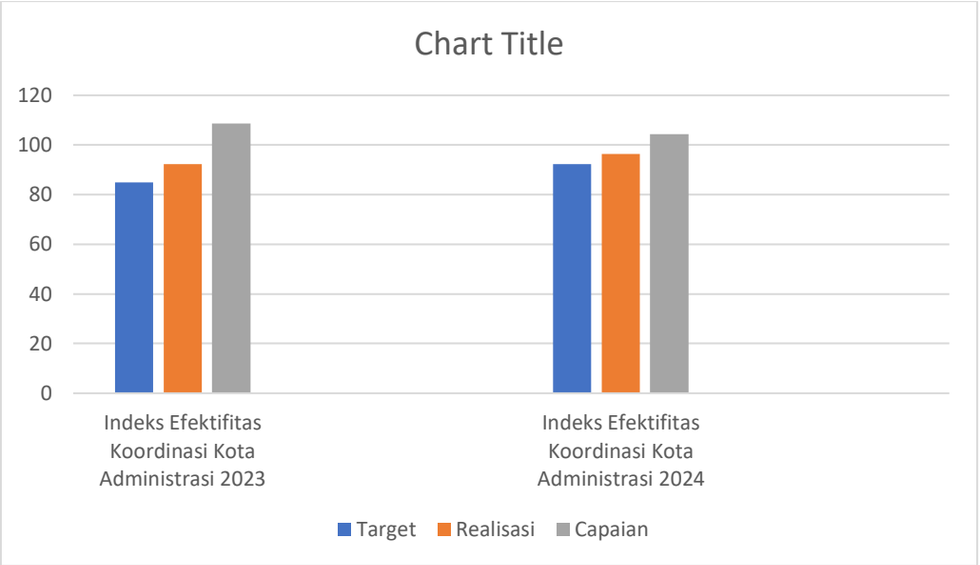

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja keempat yaitu Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi pada tahun 2023 timbul target karena Renstra baru (tahun 2023 s.d 2026) dengan target pada tahun 2023 sebesar 85 dan terjadi kenaikan target pada tahun 2024 menjadi sebesar 92,30.

Untuk indikator kinerja keempat pada tahun 2024, terlihat realisasi pada tahun 2023 melebihi target sebesar 92,30 dari target 85, sehingga memperoleh capaian sebesar 108,59%. Sama halnya dengan tahun 2024, realisasi melebihi target sebesar 96,38 dari target 92,30, sehingga memperoleh capaian sebesar 104,42%.

NO	KECAMATAN	TW 1 2024						TW 2 2024						TW 3 2024					
		Nilai_Dimensi Kapasitas pemerintahan Birokrasi	Nilai_Dimensi kapasitas pemerintahan sosial	Nilai	responden	target	response rate	Nilai_Dimensi Kapasitas pemerintahan Birokrasi	Nilai_Dimensi kapasitas pemerintahan sosial	Nilai	responden	target	response rate	Nilai_Dimensi Kapasitas pemerintahan Birokrasi	Nilai_Dimensi kapasitas pemerintahan sosial	Nilai	responden	target	response rate
10	KECAMATAN CILINCING - JAKUT	59.02	38.72	98.54	18	19	100%	59.70	39.85	98.55	18	19	100%	50	40	100.00	19	19	100.00%
14	KECAMATAN KOJA - JAKUT	59.07	39.83	98.50	18	18	100%	58.82	39.11	97.73	15	17	88%	58.22	40	98.22	17	18	94.44%
24	KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT	58.44	39.11	97.50	18	18	100%	58.85	39.70	98.50	18	18	100%	58.28	38.81	97.09	19	19	100.00%
29	KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT	57.98	38.33	96.29	16	21	76%	58.00	38.46	96.46	18	21	90%	55.81	37.48	93.30	18	21	85.71%
40	KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT	55.13	38.32	96.45	16	16	100%	58.50	39.00	97.50	16	16	100%	58.33	39	97.33	16	16	100.00%
44	KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT	54.81	38.19	93.00	14	14	100%	56.62	37.71	94.33	14	14	100%	56.52	38.35	96.08	13	14	92.86%
	INDEKS KEPUASAN LAYANAN MASYARAKAT	57.64	38.25	95.89				58.48	38.97	97.37				58.09	38.91	97			
		346.83	229.52	575.35				350.38	233.84	584.23				348.56	233.44	582.02			
		57.6381	38.2535	95.8916				58.3971	38.9741	97.3712				58.0933	38.9067	97.0033			

Sumber : Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Utara, 2024

d. Indikator kinerja Program Sub Kegiatan Strategis Daerah (Sub KSD)

Sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 selain berasal dari Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Utara juga berasal dari Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, di mana Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi Penanggung Jawab beberapa Sub KSD maupun terlibat dalam keberhasilan Sub KSD yang menjadi tanggung jawab SKPD lainnya.

Tabel 3.39. Monitor Kegiatan Strategis Daerah 2024

No	Kode	Nama Sub Kegiatan	Sasaran RPD	Keterangan
1	KSD24B3K1S1	Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	
2	KSD24B4K4S10	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	
3	KSD24B3K8S19	Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	
4	KSD24B3K1S2	Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	
5	KSD24B3K8S20	Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	
6	KSD24B1K10S23	Transformasi Digital	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	
7	KSD24B1K10S24	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	
8	KSD24B1K10S25	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	

Capaian Kota Administrasi Jakarta Utara pada indikator KSD ini mencapai 100%, hal ini dikarenakan Kota Administrasi Jakarta Utara berhasil dalam :

1) Terbitnya SK Walikota untuk Penetapan Loksem di Waduk Sunter Selatan;
2) Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat;
3) Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembangunan dan terbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPR/IPPT di sekitar lokasi pembangunan trotoar;
4) Pendataan estimasi jumlah KK terdampak pembangunan tanggul NCICD Klaster Muara Angke;
5) Penataan RW Kumuh sebagai *Pilot Project* di Kelurahan Pegangsaan Dua RW 03;
6) Tertatanya 124 Kawasan Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara;
7) Penataan Kawasan GOR Bahtera Jaya dan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang;
8) Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah;
9) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025;
10) Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah;
11) Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu;
12) Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah;
13) Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025;
14) Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024.

Hal-hal yang dapat dilaporkan untuk Indikator kinerja Program Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD) adalah sebagai berikut :

d.1. Terbitnya SK Walikota untuk Penetapan Loksem di Waduk Sunter Selatan

Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara. Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Terbitnya SK Walikota untuk Penetapan Loksem di Waduk Sunter Selatan, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Terbitnya SK Walikota untuk Penetapan Loksem di Waduk Sunter Selatan. KSD ini dilaksanakan pada 1 triwulan dengan Kode B06 untuk Triwulan II.

Tabel 3.40. Indikator Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir Tahun 2023 dan 2024

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1	TA24-B06	Penetapan Loksem	100%	100%	Pada Tahun 2023, Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir belum terbit, sehingga belum dapat dibandingkan.
					Pada Tahun 2024, Terbit SK Walikota Nomor e-0060 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Sementara (Loksem) Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (PKL) Danau Sunter di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	-	-	-	100	100	100%

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja kelima yaitu Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir pada tahun 2023 belum timbul dan belum bisa dibandingkan pada tahun 2024 yang mempunyai target sebesar 100 dengan realisasi sebesar 100 sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

d.2. Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat.

Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara. Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat.

KSD ini dilaksanakan pada 4 triwulan dengan Kode B03 untuk Triwulan I, Kode B06 untuk Triwulan II, Kode B09 untuk Triwulan III dan Kode B12 untuk Triwulan IV.

Tabel 3.41. Indikator Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 dan 2024

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1	TA24-B03	Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	100%	100%	Pada Tahun 2023, Tidak ada target di Triwulan I. Pada Tahun 2024, - Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0160/PU.04.00 tanggal 20 Maret 2024. - Detail terkait progres pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang sebagaimana telah diunggah dalam pranala berikut https://bit.ly/KK_BiroPemerintahan.
2	TA24-B06	Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	100%	100%	Pada Tahun 2023, - Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 10 B.06 membahas program kegiatan untuk penanganan wilayah kantong-kantong kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0358/ PU.04.00 tanggal 22 Juni 2023. Yang dilakukan : - Koordinasi intens antara Stakeholder yang terlibat. - Pembinaan terhadap kader Posyandu Lansia dalam melakukan penyuluhan Kesehatan. - Kader Posyandu mendatangi rumah balita yang tidak datang pada saat penimbangan di Posyandu (jemput bola).

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
					Pada Tahun 2023, - Memberikan penyuluhan tentang ASI, Status Gizi Balita, MPASI, Imunisasi dan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak. - Perlu adanya sosialisasi terkait permintaan data.
					Tahun 2024, - Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0302/ PU.04.00 tanggal 12 Juni 2024. - Detail terkait progres pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang sebagaimana telah diunggah dalam pranala berikut https://bit.ly/KK_BiroPemerintahan.
3	TA24-B09	Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	100%	100%	Pada Tahun 2023, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 10 B.09 membahas program kegiatan untuk penanganan wilayah kantong-kantong kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0555/ PU.04.00 tanggal 25 September 2023. Yang dilakukan : - Koordinasi intens antara Stakeholder yang terlibat. - Melaksanakan program kegiatan dan anggaran yang bersumber dari Dana Desa/CSR/NGO/ APBD atau dana lainnya di tingkat kabupaten/kota. - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan PPKE yang dilakukan oleh lintas OPD. - Bersurat kepada Dinas Kominfotik dan Bappeda terkait permintaan data.

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
					Tahun 2024, - Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0484/PU.04.00 tanggal 17 September 2024. - Detail terkait progres pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang sebagaimana telah diunggah dalam pranala berikut https://bit.ly/KK_BiroPemerintahan.
4	TA24-B12	Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	100%	100%	Pada Tahun 2023, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 10 B.12 membahas program kegiatan untuk penanganan wilayah kantong-kantong kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023 kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0742/PU.04.00 tanggal 13 Desember 2023. Yang dilakukan : - Koordinasi intens antara Stakeholder yang terlibat. - Melaksanakan program kegiatan dan anggaran yang bersumber dari Dana Desa/CSR/NGO/ APBD atau dana lainnya di tingkat kabupaten/kota. - Melakukan Pembinaan terhadap kader Posyandu Lansia dalam melakukan penyuluhan Kesehatan. - Kader Posyandu mendatangi rumah balita yang tidak datang pada saat penimbangan di Posyandu (jemput bola). - Memberikan penyuluhan tentang ASI, Status Gizi Balita, MPASI, Imunisasi dan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak. - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan PPKE yang dilakukan oleh lintas OPD.

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
					Tahun 2024, - Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0641/PU.04.00 tanggal 16 Desember 2024. - Detail terkait progres pelaksanaan sub kegiatan dan rencana aksi penunjang sebagaimana telah diunggah dalam pranala berikut https://bit.ly/KK_BiroPemerintahan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	100	100%	100	100	100%

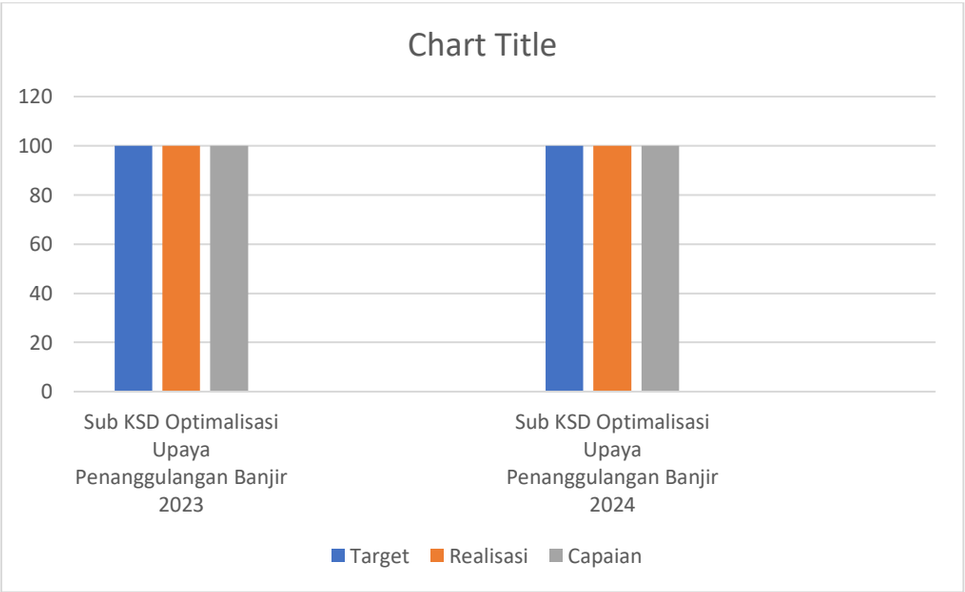

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja keenam pada tahun 2024 yaitu Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan konsisten (tidak terjadi penurunan) pada tahun 2024 tetap sebesar 100.

Demikian halnya untuk realisasi, baik pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian masyarakat sudah menyadari akan pentingnya mengikuti kegiatan posyandu Lansia dan penimbangan balita di Posyandu RW, sehingga terhadap kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara mengalami peningkatan, di mana hal tersebut menjadi indikasi positif bahwa Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara terus berbenah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan, sehingga Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dapat teratasi.

d.3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembangunan dan terbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPR/IPPT di sekitar lokasi pembangunan trotoar

Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara. Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembangunan dan terbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPR/IPPT di sekitar lokasi pembangunan trotoar, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembangunan dan terbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPR/IPPT di sekitar lokasi pembangunan trotoar. KSD ini dilaksanakan pada 1 triwulan dengan Kode B06 untuk Triwulan II.

Tabel 3.42. Indikator Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya Tahun 2023 dan 2024

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1	TA24-B06	• Terbitnya hasil inventarisasi dan penagihan SIPPT/IPPR/IPPT di sekitar lokasi pembangunan trotoar (Mei 2024) • Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi pembangunan trotoar dan kelengkapannya (Juni 2024)	100%	100%	Pada Tahun 2023, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil kegiatan Koordinasi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 19 B.06 kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan surat : - Nomor e-0326/PU.10.00 Hal Monitoring dan Evaluasi tanggal 12 Juni 2023. - Nomor e-0349/PU.10.00 Hal Monitoring dan Evaluasi tanggal 22 Juni 2023. - Nomor e-0010/PU.10.00 Hal Laporan Progres Kegiatan Strategis Daerah Nomor 19 (KSD19) (B06) tanggal 26 Juni 2023. Tahun 2024, - Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Target B-06 KSD tentang Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Rencana Aksi Penyelesaian Complete Street di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0198/PU.10.01 tanggal 23 April 2024. - Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Target B-06 KSD tentang Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0306/PU.10.00 tanggal 13 Juni 2024.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya	100	100	100%	100	100	100%

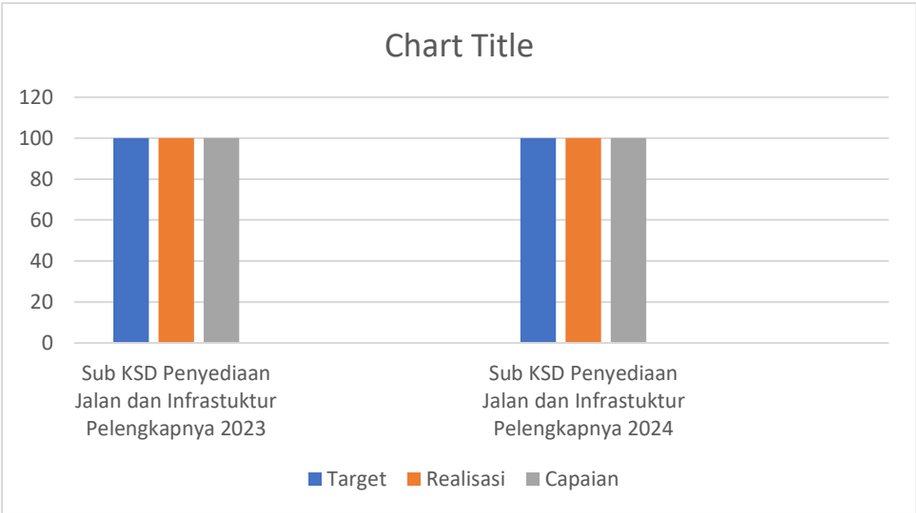

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja ketujuh pada tahun 2024 yaitu Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya, terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan konsisten (tidak terjadi penurunan) pada tahun 2024 tetap sebesar 100.

Demikian halnya untuk realisasi, baik pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat sudah menyadari akan pentingnya ketertiban umum (penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan menindaklanjuti pengaduan dan keluhan masyarakat), sehingga terhadap kinerja Kota Administrasi Jakarta

Utara mengalami peningkatan, di mana hal tersebut menjadi indikasi positif bahwa Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara terus berbenah dalam meningkatkan ketertiban umum.

d.4. Pendataan estimasi jumlah KK terdampak pembangunan tanggul NCICD Klaster Muara Angke

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Pendataan estimasi jumlah KK terdampak pembangunan tanggul NCICD Klaster Muara Angke, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Pendataan estimasi jumlah KK terdampak pembangunan tanggul NCICD Klaster Muara Angke. KSD ini dilaksanakan pada 1 triwulan dengan Kode B03 untuk Triwulan I.

Tabel 3.43. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Tahun 2023 dan 2024

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1	TA24-B03	Pendataan estimasi jumlah KK terdampak pembangunan tanggul NCICD Klaster Muara Angke disampaikan ke Biro PLH dan ditembuskan ke DPRKP dan DSDA (Maret)	100%	100%	Pada Tahun 2023, Tidak ada target. Pada Tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan KSD B.03 pendataan KK terdampak pembangunan tanggul NCICD Klaster Muara Angke di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0163/ PU.04.00 tanggal 22 Maret 2024.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggula-ngan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	-	-	-	100	100	100%

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja kedelapan yaitu Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu pada tahun 2023 belum timbul dan belum bisa dibandingkan pada tahun 2024 yang mempunyai target sebesar 100 dengan realisasi sebesar 100 sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

Kota Administrasi Jakarta Utara telah melaksanakan pendataan terdapat 576 Kepala Keluarga (KK) sesuai dengan surat Lurah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 112/pu.04.00 tanggal 21 Maret 2024 hal Data Warga Terdampak Pembangunan Tanggul.

d.5. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100	100	100%	100	100	100%

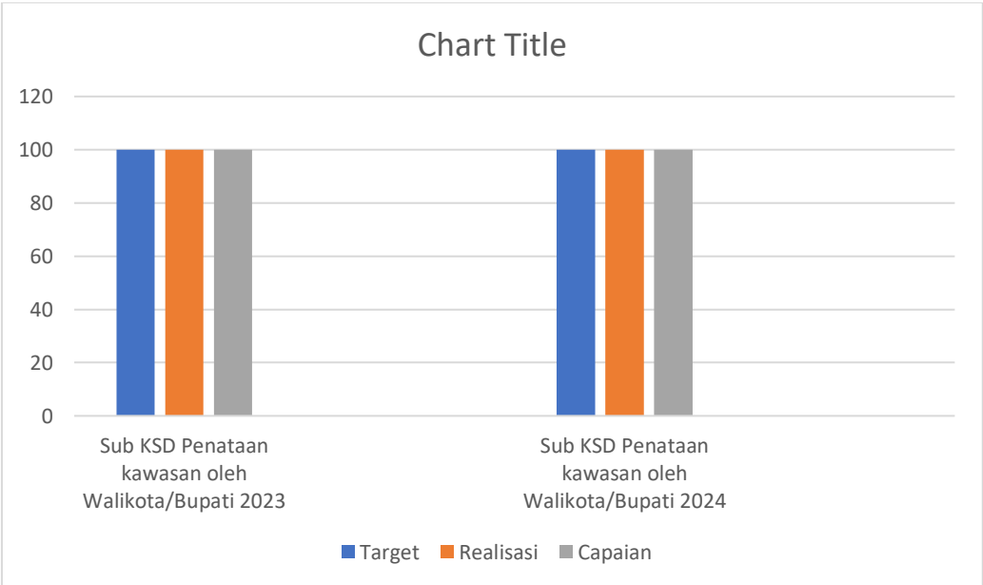

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja kesembilan pada tahun 2024 yaitu Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati, terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan konsisten (tidak terjadi penurunan) pada tahun 2024 tetap sebesar 100.

Demikian halnya untuk realisasi, baik pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat sudah menyadari akan pentingnya penataan kawasan yang teratur di kelurahan, sehingga terhadap kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara

mengalami peningkatan, di mana hal tersebut menjadi indikasi positif bahwa Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara terus berbenah dalam meningkatkan penataan kawasan kelurahan.

Tabel 3.44. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan Kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati Tahun 2023 dan 2024

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
Kriteria Keberhasilan : Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di Kelurahan Pegangsaan Dua RW 03					
1	TA24-B06 TA24-B12	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan RW Kumuh sebagai *Pilot Project* di Jakarta Utara	100%	100%	Pada Tahun 2023, Tidak ada target Pada Tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan laporan Nota Dinas Laporan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) B06 Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di Kelurahan Pegangsaan Dua RW 03 kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan surat : - Nomor e-0008/PU.04.00 tanggal 21 Juni 2024. - Nomor e-0639/PU.04.00 tanggal 13 Desember 2024.
Kriteria Keberhasilan : Tertatanya 124 Kawasan Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara					
2	TA24-B03 TA24-B06 TA24-B09 TA24-B12	Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 31 Lokasi	100%	100%	Pada Tahun 2023, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan nota dinas kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan surat : - Nomor e-0008/ PU.04.00 Hal Laporan Penataan Kawasan Kelurahan Triwulan I Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023. - Nomor e-0013/PU.04.00 Hal Laporan Penataan Kawasan Kelurahan Triwulan II Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023. - Nomor e-0553/PU.04.00 Hal Laporan Penataan Kawasan Kelurahan Triwulan III Tahun 2023 tanggal 22 September 2023.

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
					- Nomor e-0037/PU.04.00 Hal Laporan Penataan Kawasan Kelurahan Triwulan IV Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023.
					Pada Tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan nota dinas kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan surat : - Nomor e-0164/PU.04.00 tanggal 25 Maret 2024. - Nomor e-0318/PU.04.00 tanggal 21 Juni 2024. - Nomor e-0509/PU.04.00 tanggal 25 September 2024. - Nomor e-0651/PU.04.00 tanggal 23 Desember 2024.
Kriteria Keberhasilan : Penataan Kawasan GOR Bahtera Jaya dan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang					
3	TA24-B06 TA24-B12	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan di Jakarta Utara	100%	100%	Pada Tahun 2023, Tidak ada target
					Pada Tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan nota dinas kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan surat : - Nomor e-0337/PU.04.00 tanggal 28 Juni 2024. - Nomor e-0638/PU.04.00 tanggal 13 Desember 2024.

d.5.1. Penataan RW Kumuh sebagai *Pilot Project* di Kelurahan Pegangsaan Dua RW 03

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Penataan RW Kumuh sebagai *Pilot Project* di Kelurahan Pegangsaan Dua RW 03, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Penataan RW Kumuh sebagai *Pilot Project* di Kelurahan Pegangsaan Dua RW 03. KSD ini dilaksanakan pada 2

triwulan dengan Kode B06 untuk Triwulan II dan Kode B12 untuk Triwulan IV.

Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara akan menjadikan RW 03 Kelurahan Pegangsaan Dua Program Kampung Iklim (Proklim) yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat supaya bisa beradaptasi dengan Pengendalian Perubahan Iklim. Adapun beberapa kegiatan Program Kampung Iklim yaitu :

- Pengelolaan sampah dan limbah padat;
- Pengalahan dan pemanfaatan limbah cair;
- Penghijauan hutan rakyat.

d.5.2. Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 31 Lokasi

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 31 Lokasi, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 31 Lokasi. KSD ini dilaksanakan pada 4 triwulan dengan Kode B03 untuk Triwulan I, Kode B06 untuk Triwulan II, Kode B09 untuk Triwulan III dan Kode B12 untuk Triwulan IV.

Kota Administrasi Jakarta Utara telah melakukan kegiatan Penataan Kawasan Kelurahan dengan baik atas kerja sama dengan Unit Perangkat Kerja Daerah (UKPD) terkait serta melibatkan masyarakat.

Terlaksananya Program Penataan Kawasan berbasis Kelurahan Triwulan IV Tahun 2024 di 31 Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan progres yang sudah mencapai 100%. Total penataan kawasan sejak dimulai tahun 2022 sudah mencapai 279 lokasi penataan kawasan dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 2022 31 lokasi penataan kawasan;
b. Tahun 2023 124 lokasi penataan kawasan;
c. Tahun 2024 124 lokasi penataan kawasan.

d.5.3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan di Jakarta Utara

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan di Jakarta Utara, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan di Jakarta Utara. KSD ini dilaksanakan pada 2 triwulan dengan Kode B06 untuk Triwulan II dan Kode B12 untuk Triwulan IV.

Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai perkembangan dan peningkatan penataan yaitu :

1. Penataan Kawasan GOR Bahtera Jaya;
   a. GOR Bahtera merupakan aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat di KIB Gelanggang Remaja Jakarta Utara (GRJU);
   b. Ditahun 2025 akan dilakukan Penataan di Kawasan GOR Bahtera yaitu berupa peninggian akses jalan menuju GOR Bahtera (Jalan Ketel) yang selama ini sering tergenang air dan sudah dianggarkan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Penataan Kawasan Ruang Bawah Jalan Toi Layang;
   a. Penataan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang dilaksanakan di jalan Yos Sudarso (depan Polres Metro Jakarta Utara) dan di Jalan Jampea (Depan RSUD Koja) oleh Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara. Program Penataan Kawasan tersebut akan dibangun taman, sarana olahraga dan ruang interaksi warga;
   b. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan ditahun 2025 oleh Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.

d.6. Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah. KSD ini dilaksanakan pada 1 triwulan dengan Kode B12 untuk Triwulan IV.

Tabel 3.45. Indikator Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital Tahun 2023 dan 2024

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1	TA24-B12	Rancangan Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah	100%	100%	Pada Tahun 2023, Tidak ada target
					Pada Tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Dokumen Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat 2404/OT.05.00 tanggal 24 Desember 2024.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	-	-	-	100	100	100%

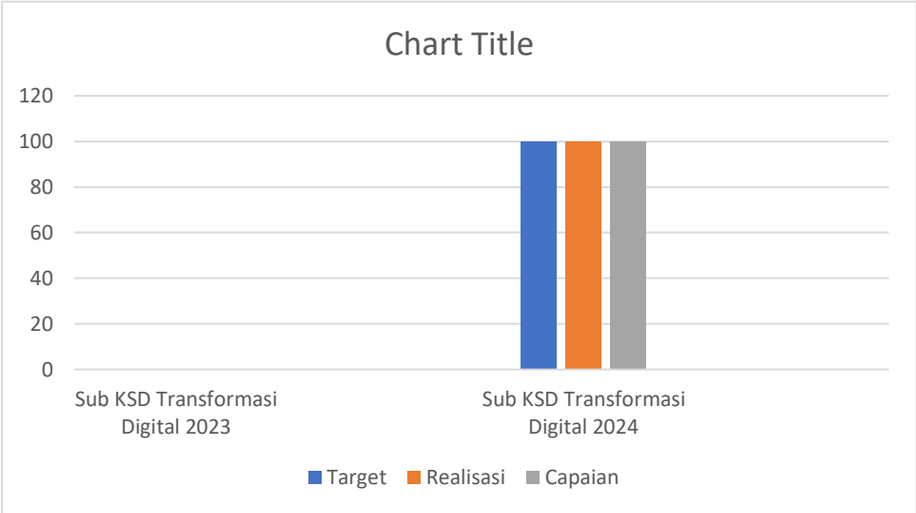

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja kesepuluh yaitu Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital pada tahun 2023 belum timbul dan belum bisa dibandingkan pada tahun 2024 yang mempunyai target sebesar 100 dengan realisasi sebesar 100 sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

Dalam Fakta Integritas Manajemen Risiko SPBE Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 Nomor : 2405/OT.05.00 yaitu :

a) Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Walikota menyatakan bahwa:
    1) Penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
    2) Rencana penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
    3) Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

d.7. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100%	100	100	100%

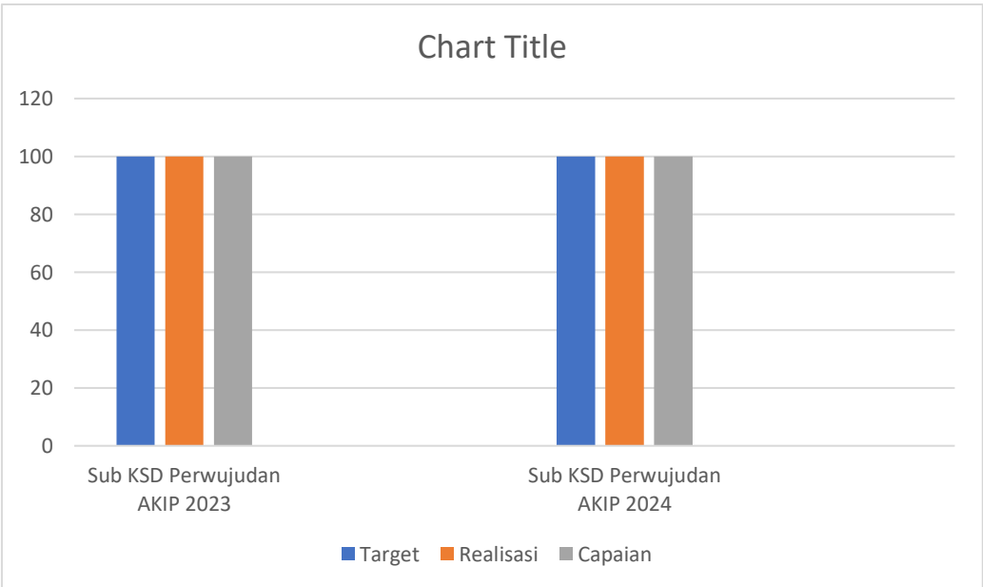

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja kesebelas pada tahun 2024 yaitu Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan konsisten (tidak terjadi penurunan) pada tahun 2024 tetap sebesar 100.

Demikian halnya untuk realisasi, baik pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

Tabel 3.46. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati Tahun 2023 dan 2024

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
Kriteria Keberhasilan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025					
1	TA24-B03 TA24-B06 TA24-B09	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2). 1. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024. 2. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2024. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2025 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2024).	100%	100%	Pada Tahun 2023, - Para Pejabat Kota Administrasi Jakarta Utara telah menandatangani Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) Tahun 2023. - Dokumen evaluasi dan LKIP tercapai 100%. - Para Pejabat Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyusun Rancangan Cascading Kinerja dan Matriks Peran Hasil Perangkat Daerah (eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Perencana tahun 2024) pada bulan Agustus 2023 (B09). - Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, telah selesai dan tercapai 100%. Pada Tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Laporan pegawai yang telah menyusun SKP awal tahun 2024 kepada Yth. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan surat : - Nomor surat 600/KG.05.00 tanggal 10 Juni 2024. - Nomor 830/RB.02.03 tanggal 31 Juli 2024.
Kriteria Keberhasilan : Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah					
2	TA24-B03 TA24-B06	Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2023. 1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2024.	100%	100%	Pada Tahun 2023, - Dokumen evaluasi tercapai 100%. - Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, telah selesai dan tercapai 100%.

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
	TA24-B09 TA24-B12	2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2024. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024. 1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2024. 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2024.			Pada Tahun 2024, - B.03, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyampaikan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023 kepada Yth. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. - B.06, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyelesaikan Laporan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) untuk Triwulan I Tahun 2024. - B.09, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyelesaikan Laporan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) untuk Triwulan II Tahun 2024. - B.12, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyelesaikan Laporan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) untuk Triwulan III Tahun 2024. - B.12, Kota Administrasi Jakarta Utara juga telah menyelesaikan Laporan Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2024.
Kriteria Keberhasilan : Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu					
3	TA24-B03	Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	100%	100%	Pada Tahun 2023, - Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, telah selesai dan tercapai 100%. - Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id, telah selesai dan tercapai 100%. Pada Tahun 2024, B.03, Kota Administrasi Jakarta Utara telah berhasil tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
Kriteria Keberhasilan : Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah					
4	TA24-B09	Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	100%	100%	Pada Tahun 2023, Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, telah selesai dan tercapai 100%. Pada Tahun 2024, B.09, Kota Administrasi Jakarta Utara telah berhasil tersusunnya Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

d.7.1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025. KSD ini dilaksanakan pada 3 triwulan dengan Kode B03 untuk Triwulan I, Kode B06 untuk Triwulan II dan Kode B09 untuk Triwulan III.

d.7.2. Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah. KSD ini dilaksanakan pada 4 triwulan dengan Kode B03 untuk Triwulan I, Kode B06 untuk Triwulan

II, Kode B09 untuk Triwulan III dan Kode B12 untuk Triwulan IV.

d.7.3. Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu. KSD ini dilaksanakan pada 1 triwulan dengan Kode B03 untuk Triwulan I.

d.7.4. Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. KSD ini dilaksanakan pada 1 triwulan dengan Kode B09 untuk Triwulan III.

d.8. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerin-tahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerin-tahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	100	100%	100	100	100%

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja kedua belas pada tahun 2024 yaitu Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta, terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan konsisten (tidak terjadi penurunan) pada tahun 2024 tetap sebesar 100.

Demikian halnya untuk realisasi, baik pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

Tabel 3.47. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023 dan 2024

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
Kriteria Keberhasilan : Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025					
1	TA24-B03	Laporan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN PJLP Tahun 2025 sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022.	100%	100%	Pada Tahun 2023, Tidak ada target

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
					Pada Tahun 2024, B.03, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyusun Laporan Analisis Jenis Pekerjaan, Beban Kerja, dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Kota Administrasi Jakarta Utara, kepada Yth. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor surat e-0024/KG.01.00 tanggal 27 Maret 2024.
Kriteria Keberhasilan : Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024					
2	TA24-B06 TA24-B12	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 90%. TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 95%	100%	100%	Pada Tahun 2023, B.06, TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Realisasi sesuai target capaian sebesar 100%. B.09, Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022. Realisasi sesuai target capaian sebesar 100%. B.12, TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Realisasi sesuai target capaian sebesar 100%.
					Pada Tahun 2024, - B.06, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyelesaikan Berita Acara Kegiatan Strategis Daerah per tanggal 3 Juni 2024, TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 90%. - B.12, Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyelesaikan Berita Acara Kegiatan Strategis Daerah per tanggal 3 Juni 2024, Berita Acara Hasil Verifikasi Inspektorat. Catatan untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi hasil pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%.

d.8.1. Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025. KSD ini dilaksanakan pada 1 triwulan dengan Kode B03 untuk Triwulan I.

d.8.2. Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. KSD ini dilaksanakan pada 2 triwulan dengan Kode B06 untuk Triwulan II dan Kode B12 untuk Triwulan IV.

e. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	% penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Peruma-han dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	100	100	100%	-	-	-

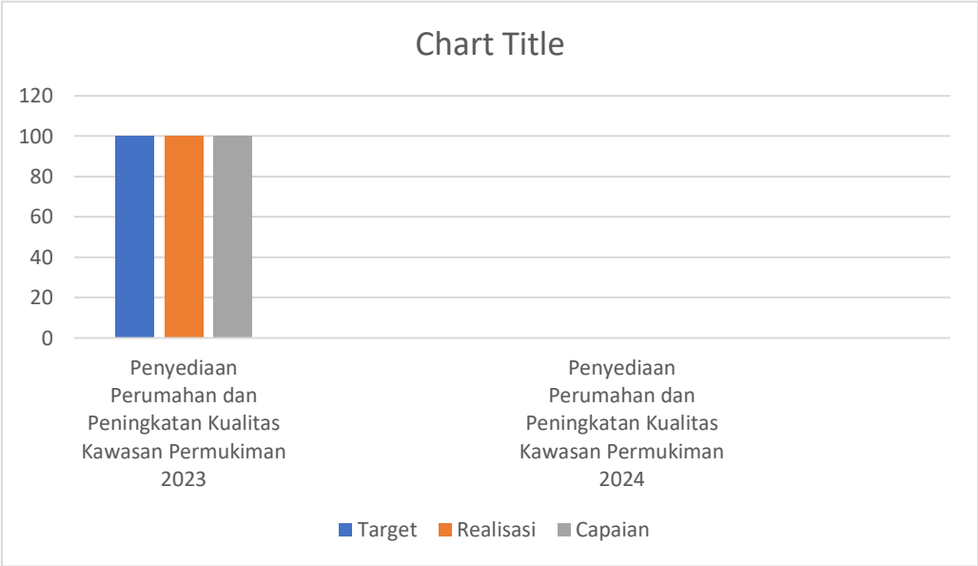

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator pada tahun 2023 yaitu Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman pada tahun 2024 tidak ada (dihilangkan), sehingga tidak dapat diperbandingkan. Sementara, terlihat realisasi pada tahun 2023 sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

f. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertum-buhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN STRATEGIS							
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja (Sub.KSD 6)	Persentase penyele-saian rencana aksi KSD Akselerasi Pertum-buhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	100	100	100%	-	-	-

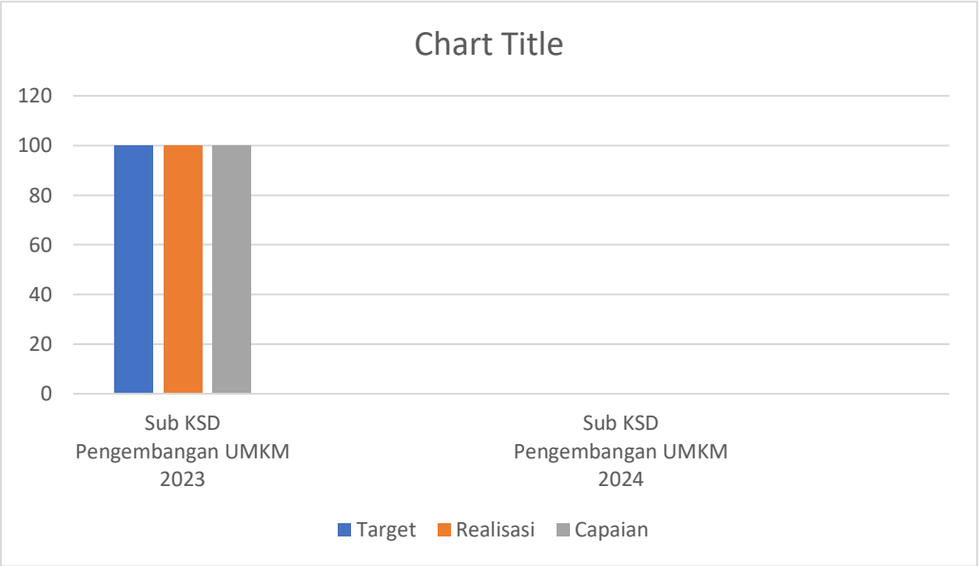

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator pada tahun 2023 yaitu Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM pada tahun 2024 tidak ada (dihilangkan), sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Sementara, terlihat realisasi pada tahun 2023 sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

g. Indikator Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	95,47	119,3%	80	96,44	120,55%

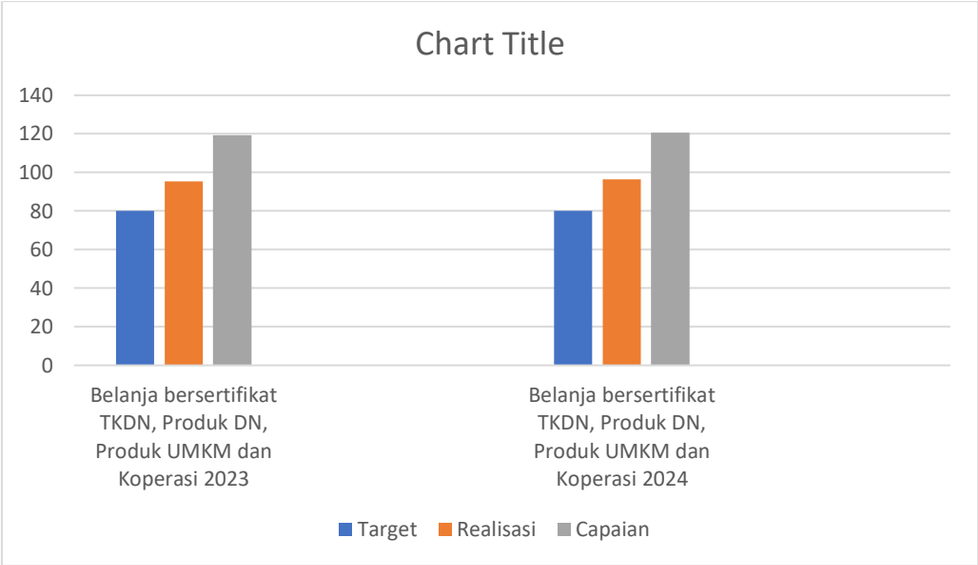

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja pertama sasaran khusus pada tahun 2024 yaitu Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri mempunyai target sama sebesar 80, tetapi dengan hasil realisasi berbeda pada tahun 2023 sebesar 95,47 dan terjadi kenaikan realisasi pada tahun 2024 menjadi sebesar 96,44.

Terlihat realisasi pada tahun 2023 dan 2024 sama-sama melebihi target, sehingga memperoleh capaian untuk tahun 2023 sebesar 119,3% dan untuk tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 120,55%.

h. Indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	100	100%	100	100	100%

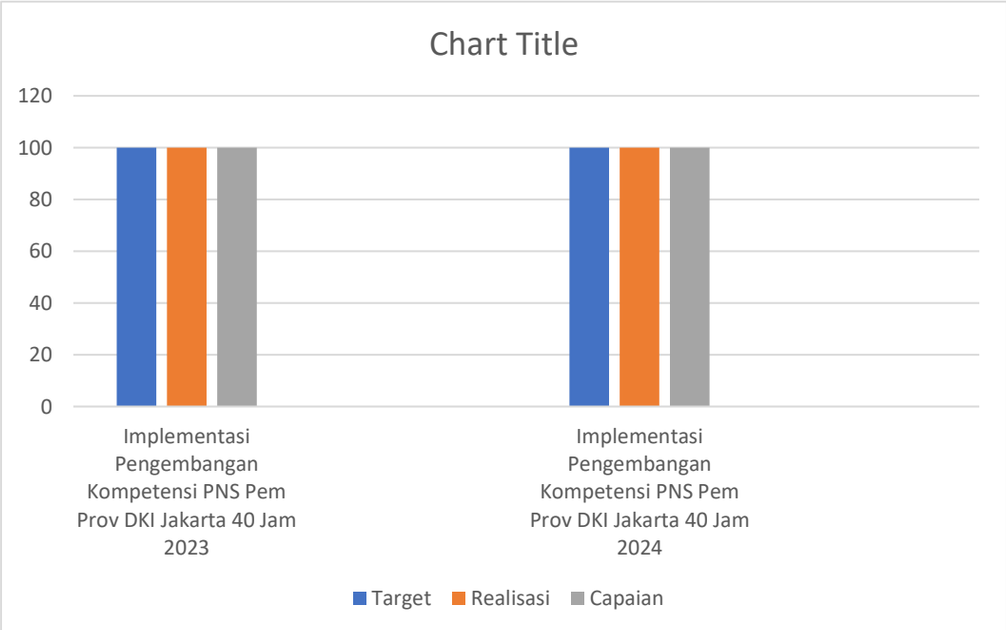

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja kedua sasaran khusus pada tahun 2024 yaitu Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun, terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan konsisten (tidak terjadi penurunan) pada tahun 2024 tetap sebesar 100. Demikian halnya untuk realisasi, baik pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

i. Indikator Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	100%	100	100	100%

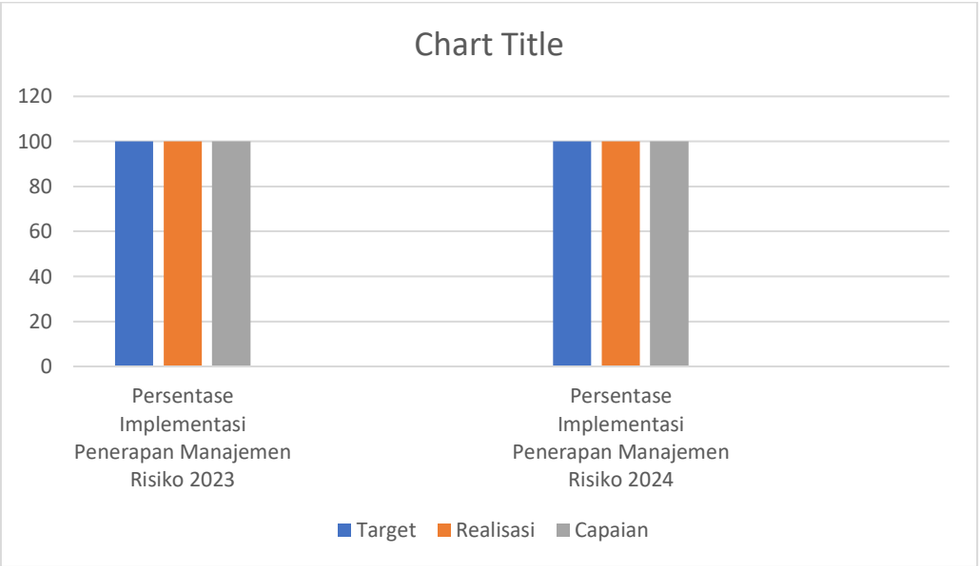

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja ketiga sasaran khusus pada tahun 2024 yaitu Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan konsisten (tidak terjadi penurunan) pada tahun 2024 tetap sebesar 100. Demikian halnya untuk realisasi, baik pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

j. Indikator Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	100	100%	100	100	100%

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja keempat sasaran khusus pada tahun 2024 yaitu Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan konsisten (tidak terjadi penurunan) pada tahun 2024 tetap sebesar 100. Demikian halnya untuk realisasi, baik pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

k. Indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program	100	100	100%	100	100	100%

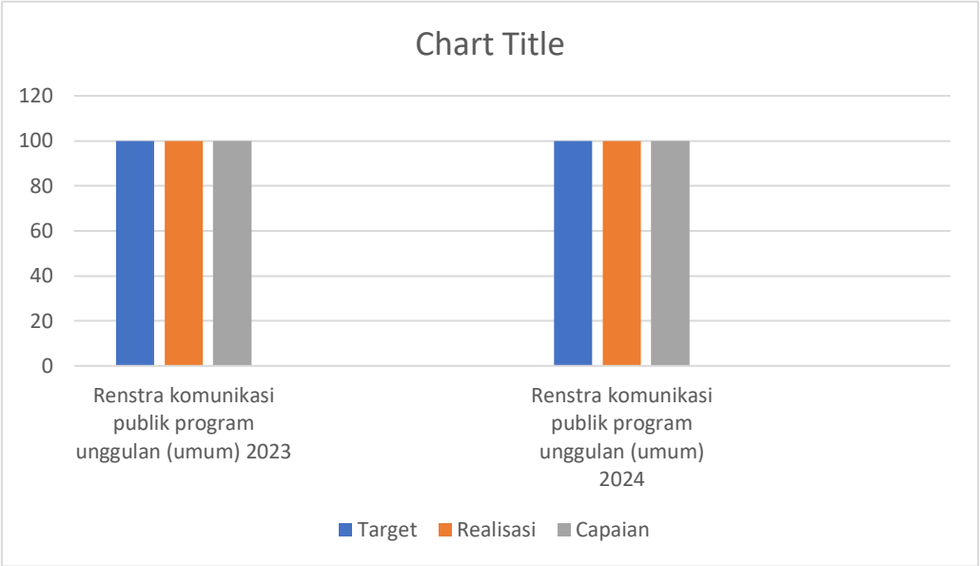

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja kelima sasaran khusus pada tahun 2024 yaitu Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program, terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan konsisten (tidak terjadi penurunan) pada tahun 2024 tetap sebesar 100. Demikian halnya untuk realisasi, baik pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

I. Indikator Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	100%	100	100	100%

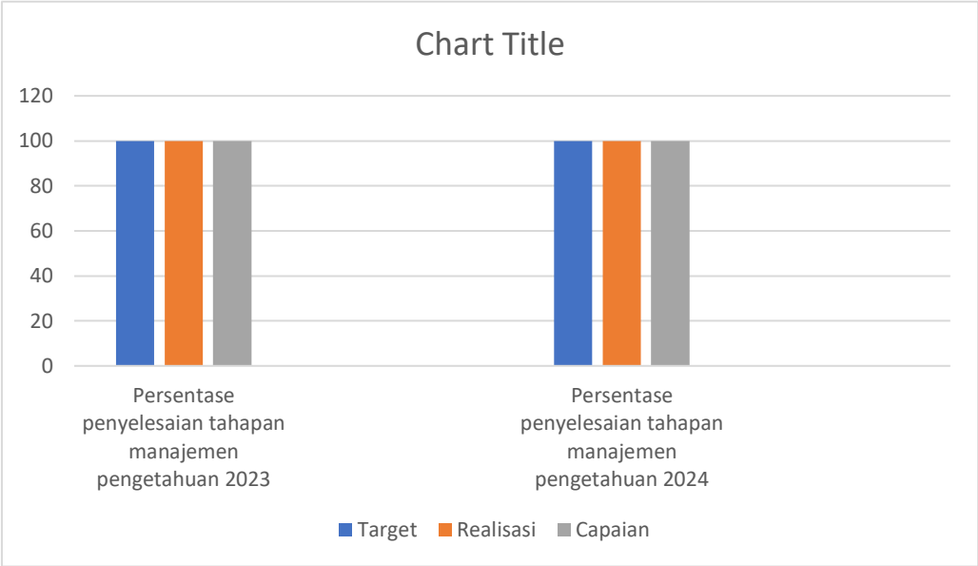

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja keenam sasaran khusus pada tahun 2024 yaitu Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan, terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan konsisten (tidak terjadi penurunan) pada tahun 2024 tetap sebesar 100. Demikian halnya untuk realisasi, baik pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

m. Indikator Nilai kualitas data SDI

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	100	100	100%	3.25	3.25	100%

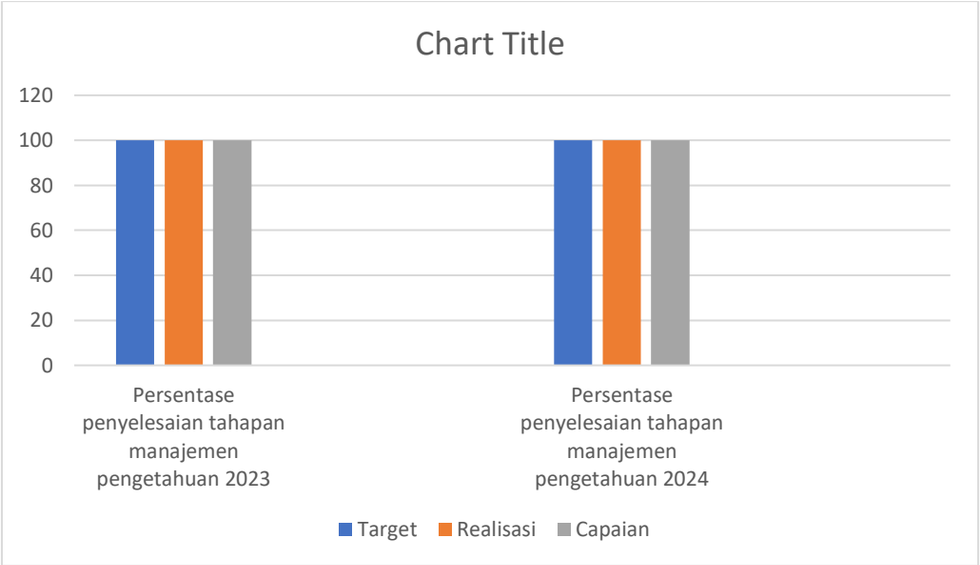

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja ketujuh sasaran khusus pada tahun 2024 yaitu Nilai kualitas data SDI, terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan pada tahun 2024 berubah nilai menjadi 3,25.

Pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target dengan masing-masing realisasi tahun 2023 sebesar 100, dan pada tahun 2024 sebesar 3,25. Sehingga memperoleh capaian sebesar masing-masing 100%.

n. Indikator Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	96,91	136,5%	71	89,81	126%

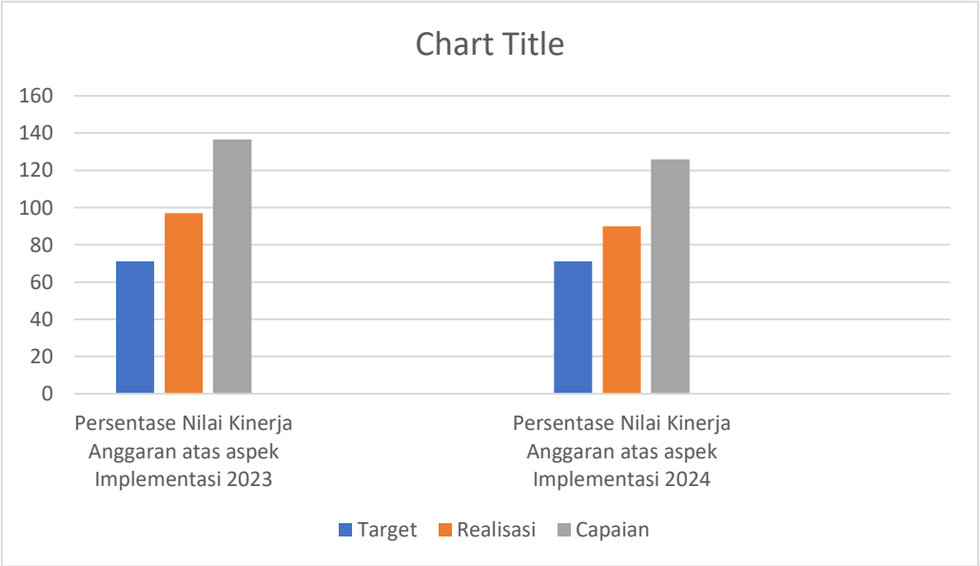

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja kedelapan sasaran khusus pada tahun 2024 yaitu Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi, terlihat target pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 mempunyai nilai yang sama sebesar 71.

Meskipun realisasi melebihi target, pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 96,91 sehingga memperoleh capaian sebesar 136,5% dan realisasi tahun 2024 sebesar 89,81 sehingga memperoleh capaian sebesar 126%.

o. Indikator Survei Kepuasan Layanan Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	96,77	105,2%	92	96	104%

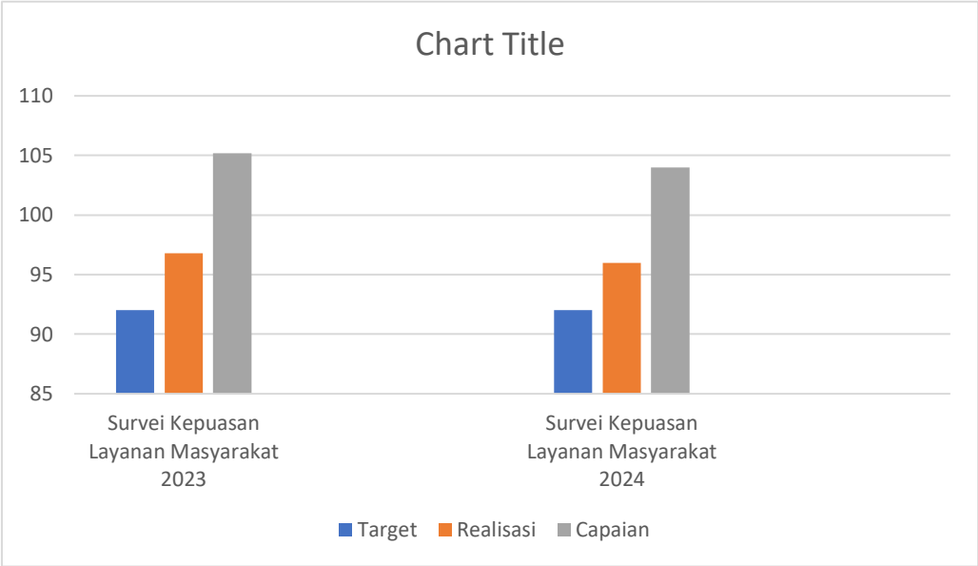

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja kesembilan sasaran khusus pada tahun 2024 yaitu Survei Kepuasan Layanan Masyarakat, terlihat target pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 mempunyai nilai yang sama sebesar 92.

Meskipun realisasi melebihi target, pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 96,77 sehingga memperoleh capaian sebesar 105,2% dan realisasi tahun 2024 sebesar 96 sehingga memperoleh capaian sebesar 104%.

p. Indikator Opini laporan Keuangan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	3 (WTP)	3	100%	-	-	-

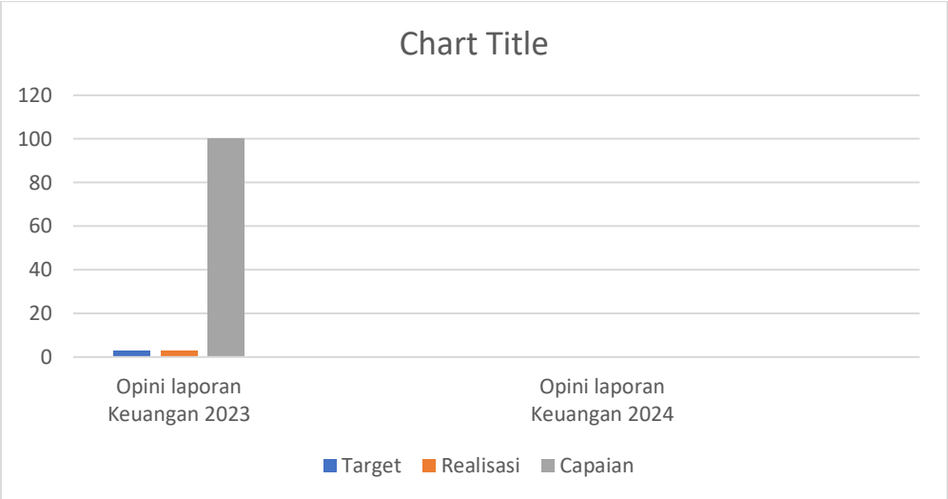

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja sasaran khusus pada tahun 2024 yaitu Opini laporan Keuangan, terlihat target pada tahun 2024 tidak ada target atau dihilangkan.

Sementara pada tahun 2023 mempunyai realisasi sesuai target yaitu sebesar 3, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

q. Indikator Persentase Pemanfaatan E-Order

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	100	100%	-	-	-

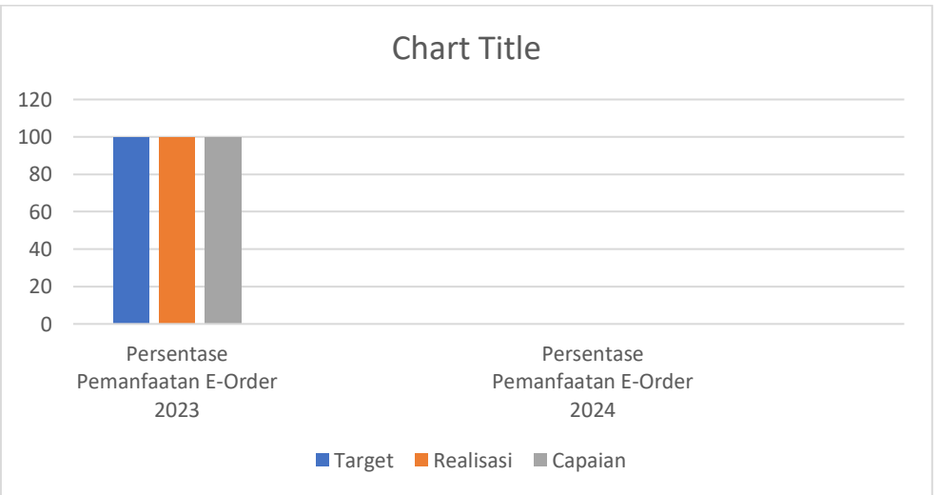

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja sasaran khusus pada tahun 2023 yaitu Persentase Pemanfaatan E-Order, terlihat target pada tahun 2024 tidak ada target atau dihilangkan.

Sementara pada tahun 2023 mempunyai realisasi sesuai target yaitu sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

r. Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	87,25	106,4%	-	-	-

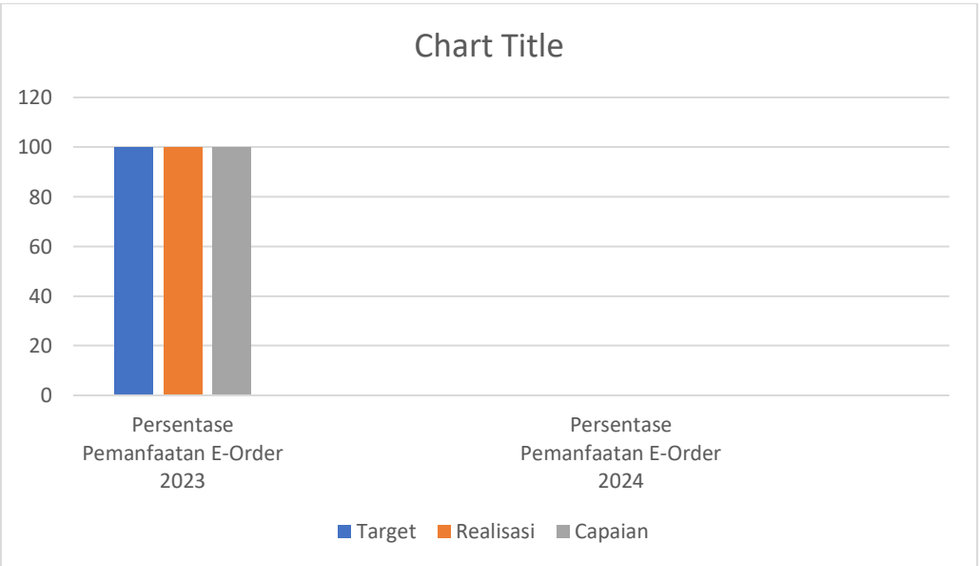

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja sasaran khusus pada tahun 2023 yaitu Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, terlihat target pada tahun 2024 tidak ada target atau dihilangkan.

Sementara pada tahun 2023 mempunyai realisasi melebihi target yaitu sebesar 87,25 dari target 82, sehingga memperoleh capaian sebesar 106,4%.

s. Indikator Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100	100	100%	-	-	-

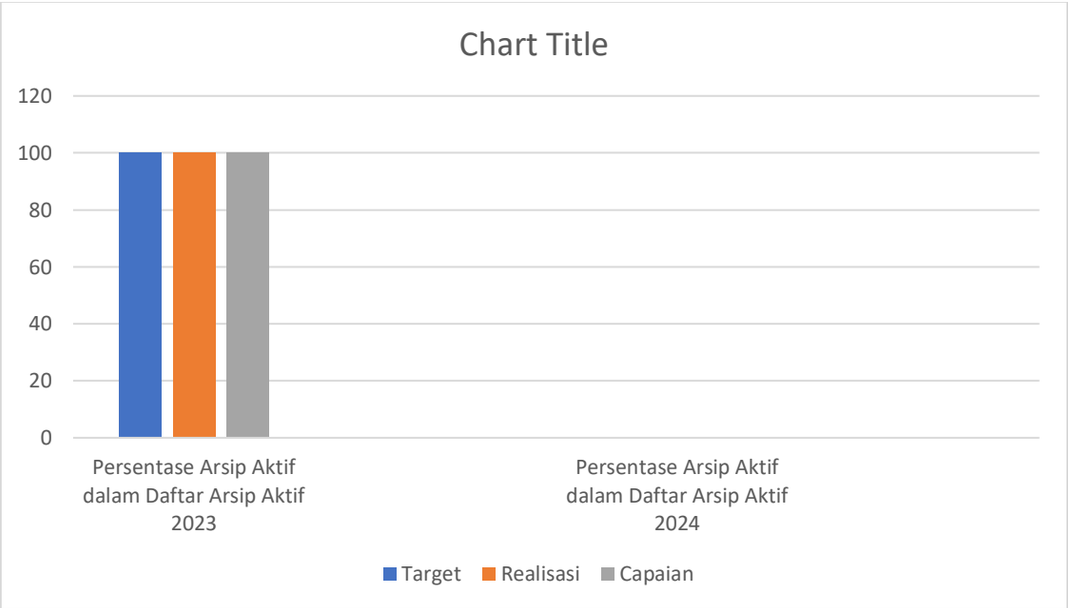

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja sasaran khusus pada tahun 2023 yaitu Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif, terlihat target pada tahun 2024 tidak ada target atau dihilangkan. Sementara pada tahun 2023 mempunyai realisasi sesuai target yaitu sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

t. Indikator Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	100	100	100%	-	-	-

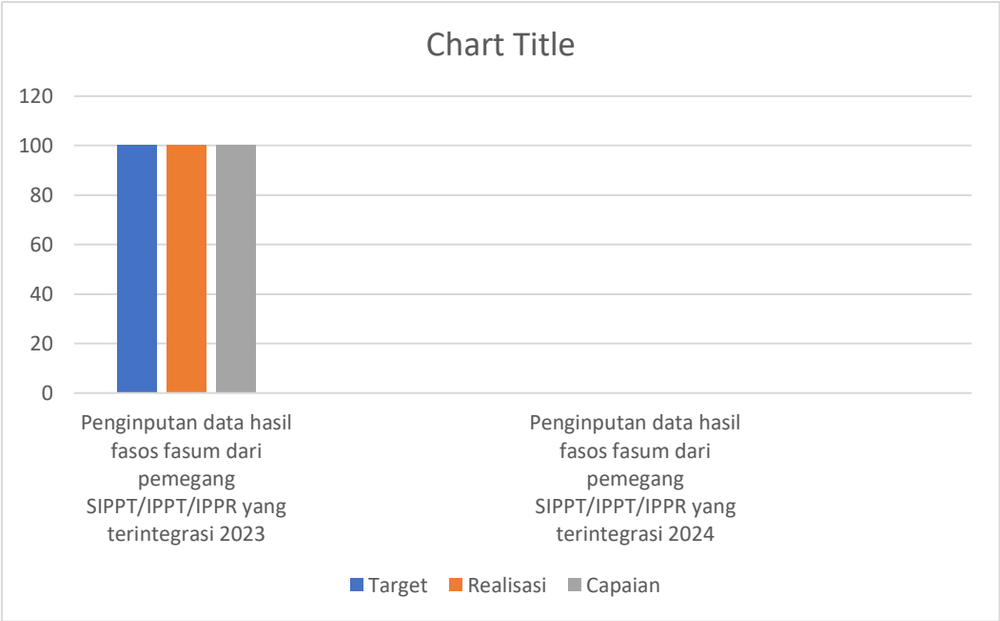

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja sasaran khusus pada tahun 2023 yaitu Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU, terlihat target pada tahun 2024 tidak ada target atau dihilangkan.

Sementara pada tahun 2023 mempunyai realisasi sesuai target yaitu sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

u. Indikator Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN OPERASIONAL							
1	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100	99,7	99,7%	100	99,87	99,87%

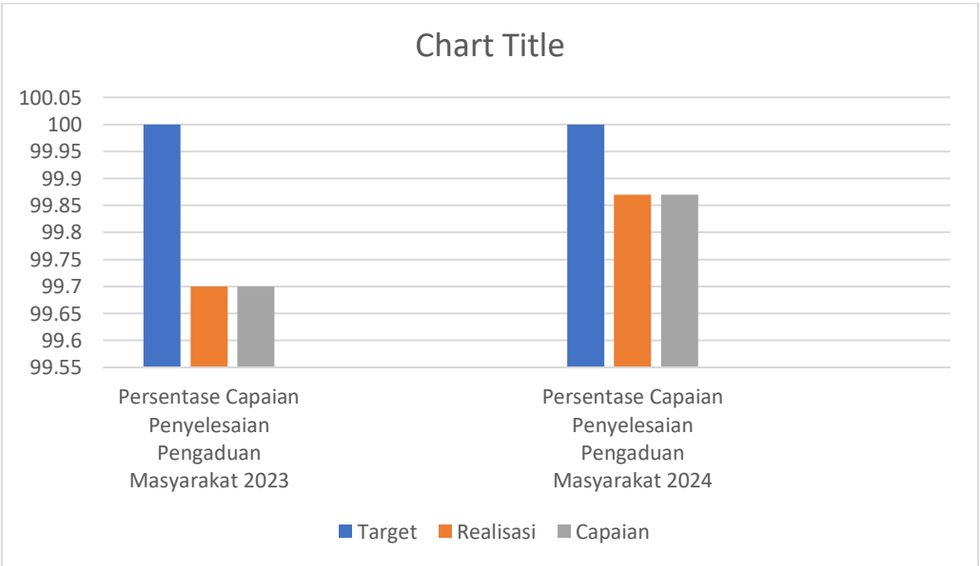

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja pertama sasaran operasional pada tahun 2024 yaitu Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat mempunyai target sama dengan tahun 2023 sebesar 100, tetapi dengan hasil realisasi berbeda pada tahun 2023 sebesar 99,7 dan terjadi kenaikan realisasi pada tahun 2024 menjadi sebesar 99,87.

Terlihat realisasi pada tahun 2023 dan 2024 sama-sama kurang dari target, sehingga memperoleh capaian untuk tahun 2023 sebesar 99,7% dan untuk tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 99,87%.

v. Indikator Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100%	100	100	100%

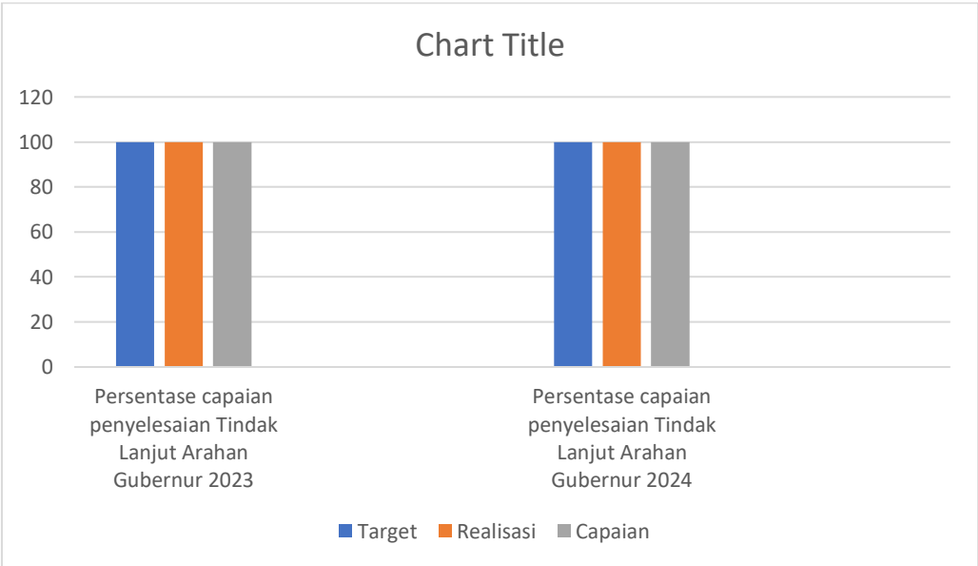

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja kedua sasaran operasional pada tahun 2024 yaitu Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur, terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan konsisten (tidak terjadi penurunan) pada tahun 2024 tetap sebesar 100. Demikian halnya untuk realisasi, baik pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

w. Indikator Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Reali-sasi	Capaian %	Target	Reali-sasi	Capaian %
	SASARAN KHUSUS							
1	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	100	100	100%	100	100	100%

Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa Indikator kinerja ketiga sasaran operasional pada tahun 2024 yaitu Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK), terlihat target pada tahun 2023 sebesar 100 dan konsisten (tidak terjadi penurunan) pada tahun 2024 tetap sebesar 100. Demikian halnya untuk realisasi, baik pada tahun 2023 dan tahun 2024 indikator telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

3. Perbandingan Target dengan Realisasi Selama 5 Tahun

Pada Sub bab ini membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.48. Perbandingan Antara Target Kinerja, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	SASARAN STRATEGIS																	
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	-	-	-	86,75	93,79	-	-	-	93,785	96,80	-	-	-	108,1%	102,72%
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Kecamatan	Nilai	-	-	-	86,75	93,79	-	-	-	93,785	96,80	-	-	-	108,1%	102,72%
3	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	86	86	88,5	88,5	95,28	88,59	93,85	94,81	95,275	97,22	103%	109%	107%	107,66%	102,04%
4		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	-	-	-	85	92,3	-	-	-	92,3	96,38	-	-	-	108,59%	104,42%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	%	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100%
6	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100		-	-	-	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggula-ngan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	%	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100%
9	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%
10	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	%	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	% penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100%	100%
12	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100%	100%
	SASARAN KHUSUS																	
13	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	%				80	80				95,47	96,44				119,3%	120,55%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%
16	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%
19	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	%	-	-	-	100	3,25	-	-	-	100	3,25	-	-	-	100%	100%
20	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	%	-	-	-	71	71	-	-	-	96,91	89,81	-	-	-	136,5%	126%
21	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Nilai	90	93	-	92	92	90,40	92,36	-	96,77	96	100,44%	99,31%	-	105,2%	104%
	SASARAN OPERASIONAL																	
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,87	100%	100%	100%	100%	99,87%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,87	100%	100%	100%	100%	99,87%
24	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	%	25	25	25	100	15	25	25	25	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : *Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dan e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024*

Dilihat pada tabel perbandingan 5 (lima) tahun ke belakang dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi di atas, dapat dilaporkan bahwa :

a. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi.

Untuk sasaran strategis yang pertama ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

a.1. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (Unsur Kecamatan)

Pada Renstra lama (tahun 2017 s.d 2022) belum ada Indikator kinerja pertama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (Unsur Kecamatan) dan timbul karena Renstra baru (tahun 2023 s.d 2026) jadi mempunyai target pada tahun 2023 dan 2024.

Realisasi indikator kinerja pertama pada tahun 2023 melebihi target sebesar 93,79 dari target 86,75, sehingga memperoleh capaian sebesar 108,1%. Sama halnya dengan realisasi indikator kinerja pertama pada tahun 2024 melebihi target sebesar 96,80 dari target 93,79 sehingga memperoleh capaian sebesar 102,72%.

a.2. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (Unsur Kota Adm.)

Pada Renstra lama (tahun 2017 s.d 2022) belum ada Indikator kinerja kedua yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (Unsur Kecamatan) dan timbul karena Renstra baru (tahun 2023 s.d 2026) jadi mempunyai target pada tahun 2023 dan 2024.

Realisasi indikator kinerja kedua pada tahun 2023 melebihi target sebesar 93,79 dari target 86,75, sehingga memperoleh capaian sebesar 108,1%. Sama halnya dengan realisasi indikator kinerja pertama pada tahun 2024 melebihi target sebesar 96,80 dari target 93,79 sehingga memperoleh capaian sebesar 102,72%.

b. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.

Lain halnya dengan indikator kinerja ketiga yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, yaitu :

b.1. Target

Mempunyai target pada tahun 2020 dan tahun 2021 masing-masing sebesar 86 dan terjadi kenaikan target tahun 2022 dan tahun 2023 masing-masing menjadi sebesar 88,5. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan target kembali menjadi sebesar 95,28.

b.2. Realisasi

Realisasi sejak tahun 2021 s.d tahun 2024 telah terjadi kenaikan dan telah melebihi target masing-masing sebesar :

Tahun 2020 = 88,59

Tahun 2021 = 93,85

Tahun 2022 = 94,81

Tahun 2023 = 95,275 dan

Tahun 2024 = 97,22

b.3. Capaian

Karena realisasi indikator kinerja ketiga yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan pada tahun 2020 s.d tahun 2024 telah melebihi target sehingga memperoleh capaian di atas 100%.

c. Indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi.

Indikator kinerja keempat yaitu Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi, pada Renstra lama (tahun 2017 s.d 2022) belum ada Indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi dan timbul karena Renstra baru (tahun 2023 s.d 2026) jadi mempunyai target pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Realisasi indikator kinerja keempat Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing melebihi target, yaitu pada tahun 2023 realisasi melebihi target menjadi sebesar 92,3 dari target 85, sehingga memperoleh capaian sebesar 108,59%. Sama halnya dengan pada tahun 2024 realisasi melebihi target menjadi sebesar 96,38 dari target 92,3, sehingga memperoleh capaian sebesar 104,42%.

d. Indikator kinerja Program Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

Sub KSD merupakan sebagai pendukung Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

d.1. Ada sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja yang termasuk dalam Program Sub Kegiatan Strategis Daerah (Sub KSD) yaitu :

d.1.1. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir;

d.1.2. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

d.1.3. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya;

d.1.4. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggula-ngan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu;

d.1.5. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati;

d.1.6. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital;

d.1.7. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

d.1.8. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta.

d.2. Dengan keterangan sebagai berikut :

d.2.1. Pada Renstra lama (tahun 2017 s.d 2022) belum timbul target untuk kedelapan indikator tersebut di atas. Sejak terbitnya Renstra baru (tahun 2023 s.d 2026) ada 5 (lima) indikator mempunyai target pada tahun 2023 dan tahun 2024 dengan target masing-masing sebesar 100%, yaitu :

d.2.1.1. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

d.2.1.2. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya;

d.2.1.3. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati;

d.2.1.4. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

d.2.1.5. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta.

d.2.2. Sementara pada Renstra baru (tahun 2023 s.d 2026) ada 3 (tiga) indikator tidak mempunyai target pada tahun 2023 dan hanya pada tahun 2024 mempunyai target masing-masing sebesar 100%, yaitu :

d.2.2.1. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir;

d.2.2.2. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggula-ngan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu;

d.2.2.3. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital.

d.2.3. Untuk realisasi, pada tahun 2023 dan tahun 2024 dengan realisasi masing-masing sebesar 100%.

d.2.4. Sehingga memperoleh capaian untuk 8 (delapan) Sub KSD pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing sebesar 100%.

e. Indikator kinerja pada Sasaran Khusus.

e.1. Indikator kinerja ketiga belas yaitu Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, pada tahun 2020 s.d. tahun 2022 belum ada target.

Sebaliknya pada tahun 2023 dan tahun 2024 ada target masing-masing sebesar 80, dengan realisasi telah melebihi target yaitu pada tahun 2023 realisasi melebihi target menjadi sebesar 95,47 dari target 80, sehingga memperoleh capaian sebesar 119,3%. Sama halnya dengan pada tahun 2024 realisasi melebihi target menjadi sebesar 96,44 dari target 80, sehingga memperoleh capaian sebesar 120,55%.

e.2. Indikator kinerja keempat belas pada tahun 2024 yaitu Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun.

Sementara pada tahun 2023, Indikator kinerja Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya 20 Jam Pelajaran per tahun.

Pada tahun 2020 s.d. tahun 2022 belum ada target. Target timbul pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing sebesar 100.

Realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah mencapai target untuk realisasi masing-masing sebesar 100%, sehingga masing-masing Indikator kinerja mendapat capaian sebesar 100%.

e.3. Sama halnya dengan Indikator kinerja kelima belas yaitu Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2020 s.d. tahun 2022 belum ada target. Target timbul pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing sebesar 100.

Realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah mencapai target untuk realisasi masing-masing sebesar 100%, sehingga masing-masing Indikator kinerja mendapat capaian sebesar 100%.

e.4. Indikator kinerja keenam belas yaitu Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, pada tahun 2020 s.d. tahun 2022 belum ada target. Target timbul pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing sebesar 100.

Realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah mencapai target untuk realisasi masing-masing sebesar 100%, sehingga masing-masing Indikator kinerja mendapat capaian sebesar 100%.

e.5. Indikator kinerja ketujuh belas yaitu Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respons perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program, pada tahun 2020 s.d. tahun 2024 mempunyai target. masing-masing sebesar 100.

Realisasi pada tahun 2020 s.d. tahun 2024 telah mencapai target untuk realisasi masing-masing sebesar 100%, sehingga masing-masing Indikator kinerja mendapat capaian sebesar 100%.

e.6. Indikator kinerja kedelapan belas yaitu Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan, pada tahun 2020 s.d. tahun 2022 belum ada target. Target timbul pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing sebesar 100.

Realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah mencapai target untuk realisasi masing-masing sebesar 100%, sehingga masing-masing Indikator kinerja mendapat capaian sebesar 100%.

e.7. Indikator kinerja kesembilan belas yaitu Nilai kualitas data SDI, pada tahun 2020 s.d. tahun 2022 belum ada target. Target timbul pada tahun 2023 sebesar 100 dan target tahun 2024 sebesar 2,25.

Realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah mencapai target untuk realisasi pada tahun 2023 sebesar 100%, sehingga mendapat capaian sebesar 100%, demikian halnya realisasi pada tahun 2024 telah mencapai target untuk realisasi pada tahun 2023 sebesar 3,25, sehingga mendapat capaian sebesar 100%.

e.8. Indikator kinerja kedua puluh yaitu Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi, pada tahun 2020 s.d. tahun 2022 belum ada target.

Sebaliknya pada tahun 2023 dan tahun 2024 ada target masing-masing sebesar 71, dengan realisasi telah melebihi target yaitu pada tahun 2023 realisasi melebihi target menjadi sebesar 96,91 dari target 71, sehingga memperoleh capaian sebesar 136,5%. Sama halnya dengan pada tahun 2024 realisasi melebihi target menjadi sebesar 89,81 dari target 80, sehingga memperoleh capaian sebesar 136,5%.

f. Indikator kinerja pada Sasaran Operasional.

f.1. Indikator kinerja kedua puluh dua yaitu Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, pada tahun 2020 s.d. tahun 2024 mempunyai target dan masing-masing sebesar 100.

Realisasi pada tahun 2020 s.d. tahun 2023 telah mencapai target untuk realisasi masing-masing sebesar 100%, sehingga masing-masing Indikator kinerja mendapat capaian sebesar 100%.

Sedangkan untuk tahun 2024 mempunyai realisasi kurang dari target sebesar 99,87 target 100, sehingga mendapat capaian sebesar 99,87%.

f.2. Indikator kinerja kedua puluh tiga yaitu Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur, pada tahun 2020 s.d. tahun 2024 mempunyai target dan masing-masing sebesar 100.

Realisasi pada tahun 2020 s.d. tahun 2024 telah mencapai target untuk realisasi masing-masing sebesar 100%, sehingga masing-masing Indikator kinerja mendapat capaian sebesar 100%.

f.3. Indikator kinerja kedua puluh empat yaitu Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK), pada tahun 2020 s.d. tahun 2024 mempunyai target dan masing-masing sebesar 100.

Realisasi pada tahun 2020 s.d. tahun 2024 telah mencapai target untuk realisasi masing-masing sebesar 100%, sehingga masing-masing Indikator kinerja mendapat capaian sebesar 100%.

Berikut ini adalah tabel kemajuan capaian strategis, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.49. Tabel Kemajuan Capaian Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=(4/5)*100
	SASARAN STRATEGIS				
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	102,72%	89,5	1,15
2	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	102,17%	88,8	1,15
3	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	104,42%	88,5	1,18

Berdasarkan Tabel Kemajuan Capaian Strategis di atas, yang dapat disampaikan adalah :

a. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (IKLK)

IKLK tahun 2024 mempunyai target sebesar 93,79 dengan realisasi sebesar 96,80 sehingga memperoleh capaian sebesar 103,21%. Target Akhir IKLK tahun 2026 dari Renstra sebesar 89,5.

Tingkat Kemajuan = (Capaian 2024/Target Akhir 2026) x 100
= (103,21% / 89,5) x 100
= 1,153

Jadi tingkat kemajuan IKLK tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 1,15.

b. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

IKM tahun 2024 mempunyai target sebesar 95,28 dengan realisasi sebesar 97,22 sehingga memperoleh capaian sebesar 102,04%. Target Akhir IKM tahun 2026 dari Renstra sebesar 88,8.

Tingkat Kemajuan = (Capaian 2024/Target Akhir 2026) x 100
= (102,04% / 88,8) x 100
= 1,149

Jadi tingkat kemajuan IKM tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 1,15.

c. Indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi (IEK) Kota Administrasi

IEK tahun 2024 mempunyai target sebesar 92,30 dengan realisasi sebesar 96,38 sehingga memperoleh capaian sebesar 104,42%. Target Akhir IEK tahun 2026 dari Renstra sebesar 88,5.

Tingkat Kemajuan = (Capaian 2024/Target Akhir 2026) x 100
= (104,42% / 88,5) x 100
= 1,179

Jadi tingkat kemajuan IEK tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 1,18.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Pada Sub bab ini membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.50. Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja Sasaran Tahun 2024							
		Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta						Daerah Luar Jakarta	
		Jakarta Utara	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan 1000	Kecamatan Kemuning Palembang	Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	97,22	98,98	96,18	96,80	97,91	95,93	95,00	80,39

Sumber : Laporan SKM Tahun 2024

Dilihat pada tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain di atas, dapat dilaporkan bahwa :

Perbandingan Realisasi Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2024 dilihat dari 8 (delapan) Kota/Kabupaten yang berbeda, terdapat bervariasi nilai yang diperoleh, untuk perbandingan realisasi Indikator Kinerja untuk tahun 2024 dilihat dari 6 (enam) Kota/Kabupaten yang berbeda (Kota Administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten Pulau Seribu), terdapat bervariasi nilai yang diperoleh, mempunyai nilai realisasi di atas 90, yaitu:

a. Kota Administrasi Jakarta Utara IKM (97,22).
b. Kota Administrasi Jakarta Pusat IKM (98,98).
c. Kota Administrasi Jakarta Barat IKM (96,18).
d. Kota Administrasi Jakarta Selatan IKM (96,80).
e. Kota Administrasi Jakarta Timur IKM (97,91).
f. Kabupaten Kepulauan Seribu IKM (95,93).

Dan ada 2 kota yang juga diperbandingkan yaitu Kecamatan Kemuning Palembang dengan realisasi sebesar 91,50 dan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebesar 80,39.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ke 8 (delapan) Kota/Kabupaten tersebut diatas, sama-sama memerlukan satu periode pelaksanaan, dengan didukung oleh data kuisioner SKM, data calon responden, data jumlah penerima layanan dan laporan pelaksanaan SKM tahun 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut antara lain yaitu :

a. Efisiensi waktu dan ketepatan tanggapan terhadap keluhan.
b. Mempercepat proses perolehan informasi layanan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Baru sebagian petugas yang diberikan pelatihan khusus terkait service excellent.
b. Belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah akan menjadi prioritas perbaikan. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi merupakan keberhasilan.

Ke 8 (delapan) Kota/Kabupaten tersebut diatas, juga melakukan analisa dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan.

Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Untuk melakukan perbaikan telah dilakukan antara lain :

a. Memperbanyak pemberian informasi dari berbagai media kepada masyarakat mengenai layanan gratis atau dengan biaya/tarif yang telah ditetapkan baik di lobi PTSP maupun website.
b. Memastikan terdapatnya informasi yang cukup mengenai prosedur layanan dari masing-masing layanan PTSP pada website dan media sosial.
c. Memberikan reward bagi petugas layanan dengan prestasi terbaik yang diukur dengan ketepatan waktu pelayanan.
d. Memberikan kompensasi kepada masyarakat yang merasakan kekecewaan terhadap keterlambatan pelayanan yang diberikan petugas layanan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Standar Nasional Tahun 2024 di atas, pada kolum 9 dan 10 Kota Administrasi Jakarta Utara membandingkan dengan Kecamatan Kemuning Palembang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, karena nilai Indikator Kinerja IKM kecil dibandingkan dengan 6 (enam) Kota Administrasi yang lain, yaitu :

Tabel 3.51. Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Kecamatan Kemuning Palembang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024			% Capaian	GAP
			Kota Adm JU	Kecamatan Kemuning Palembang	Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya		
1	2	3	4	5	6	7=(4/5)*100	8=4-5
1	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	97,22			102,34%	2,22%
	Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan perangkat daerah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perangkat Daerah		95,00			
2	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	97,22			120,94%	16,83%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM Sekretariat DPRD			80,39		

Dilihat pada tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Kecamatan Kemuning Palembang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 di atas, dapat dilaporkan bahwa :

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

1. **Kota Administrasi Jakarta Utara**

   Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan pada Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai realisasi melebih target sebesar 97,22 dari yang ditentukan sebesar 95,28 sehingga memperoleh capaian sebesar 102,04%.

   Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

   Adapun unsur layanan yang di survei di antaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).

   Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.

2. **Kecamatan Kemuning Palembang**

   Indikator Kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perangkat Daerah pada Kecamatan Kemuning Palembang mempunyai realisasi kurang dari target sebesar 91,50 dari yang ditentukan sebesar 95,00 sehingga memperoleh capaian sebesar 96,32%.

   Indikator Kinerja ini merupakan kegiatan yang belum mencapai 100% pada Kecamatan Kemuning Palembang, meskipun hampir semua capaian kinerja kegiatan telah terealisasi sesuai target.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Kemuning Palembang di masa mendatang, beberapa hal yang harus dilakukan adalah :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama Kelurahan dan Kecamatan, Kecamatan dengan Instansi terkait dan Kecamatan dengan Pemegang Kepentingan Lainnya.
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pembangunan untuk Masyarakat khususnya di lingkungan Kecamatan Kemuning Palembang.
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, baik pengetahuan maupun keterampilan.

3. Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Indikator Kinerja Nilai IKM Sekretariat DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya mempunyai realisasi melebihi dari target sebesar 80,39 dari yang ditentukan sebesar 80,30 sehingga memperoleh capaian sebesar 100,11%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 menggunakan kriteria penilaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja da Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan capaian kinerja menunjukan angka yang sangat tinggi.

Indikator kinerja ini merupakan Indikator sasaran yang kedua Nilai IKM Sekretariat DPRD yang menunjukan capaian yang positif.

Pencapaian indikator kinerja didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Kenaikan realisasi dan capaian kinerja juga didukung oleh optimalnya kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam memaksimalkan waktu dan anggaran yang terbatas.

Untuk Indikator Kinerja Nilai IKM Sekretariat DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 telah mengalami perubahan, perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, maka untuk perencanaan kinerja yang didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja mengikuti alur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun untuk tingkat pencapaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 telah mencapai target, karena setiap rencana yang diusulkan pada pelaksanaannya telah terpenuhi secara maksimal.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Kegagalan berkebalikan dengan keberhasilan. Apa makna kegagalan? Jawaban paling sederhana adalah ketidakberhasilan. Tidak berhasil berarti pula tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Karena adanya target untuk dapat dipakai sebagai pengukur suatu keberhasilan.

Maka dari itu selalu ada kriteria-kriteria sebagai parameter guna menentukan, apakah suatu target telah tercapai atau belum tercapai. Dari logika ini dapatlah ditarik suatu pengertian, kegagalan adalah tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Itu berarti, ketiadaan target akan meniadakan pula kegagalan. Maksudnya, tidaklah dapat dinyatakan gagal tentang sesuatu bilamana tidak memiliki target yang diharapkan.

Tabel 3.52. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Reali-sasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93,79	96,80	102,72	Keberhasilan : - Penilaian kualitas pelayanan administrasi lebih transparan, akuntabel, dan responsif. - Petugas secara konsisten menunjukkan empati kepada masyarakat yang berkunjung. - Memberikan pelayanan informasi yang benar.	- Sebagian besar lembaga pemerintah atau organisasi administrasi publik lainnya menyediakan layanan publik. - Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan masyarakat lebih baik. - Memantau dan mengendalikan program kerja.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Reali-sasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						- Masyarakat mulai peduli dan bisa menentukan layanan seperti apa yang mereka inginkan. Kegagalan : - Status pelayanan nampaknya kurang mendapat perhatian serius, ditandai dengan proses pelayanan yang cenderung rumit dan memakan waktu. - Kualitas pelayanan bukan dari sudut pandang penyedia jasa tetapi dari sudut pandang pelanggan, karena pelangganlah yang menjadi konsumen dan mempersepsikan layanan yang diberikan serta mengevaluasi dan menentukan kualitas layanan.	- Melakukan peninjauan kualitas secara berkala di kantor kecamatan penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat dan menetapkan standar. - Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan tidak berbelit-belit dan tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam pelaksanaannya. - Menyederhanakan proses administratif, responsif terhadap pernyataan masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. - Membuat sistem yang mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat, sehingga menjamin tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi.
2	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasya-rakatan di Kecamatan dan Kelurahan	95,28	97,34	102,17	Keberhasilan : Terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2024. Kegagalan : - Hasil Kerja Petugas masih belum di rasa maksimal oleh masyarakat. - Prosedur layanan belum dibuatkan prosedur layanan terbaru dengan memangkas beberapa langkah pelayanan. - Persyaratan belum adanya keseragaman persyaratan pelayanan di kelurahan-kelurahan.	- Melakukan pembinaan kepada Kader Jumantik. - Sosialisasi Produk Layanan.Monitoring dan Evaluasi. - Berkoordinasi dengan Kelurahan dan pihak terkait. - Mempersiapkan peningkatan Sarana Pelayanan. - Membuat prosedur layanan terbaru dengar memanfaatkan teknologi digital. - Melakukan Pembinaan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas dan kinerja petugas. - inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Reali-sasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
3	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	92,3	96,38	104,42	- Terukurnya kepuasan pelayanan koordinasi. - Teridentifikasi keluhan mitra koordinasi (Para Unit Kerja Perangkat Daerah).	Terpetakan kelebihan dan kekurangan pelayanan koordinasi, sehingga dapat memformulasikan rencana tindak lanjut dan perbaikannya.

Penjelasan analisa atas pelaksanaan IKU :

a. Hasil analisis terhadap evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang telah dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu :

a.1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I pada tanggal 1 April sampai dengan 7 Mei 2024, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Nilai IKM pada 7 (tujuh) bidang layanan yang telah disurvei dan melalui proses perhitungan, maka terbitlah nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar **97,10** melebihi target sebesar 95,28. Mutu Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara masuk dalam Kategori "***A***" atau setara dengan Kinerja Unit Pelayanan berpredikat "**Sangat Baik**".

a.2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II pada tanggal 12 sampai dengan 30 Agustus 2024, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Nilai IKM pada 7 (tujuh) bidang layanan yang telah disurvei dan melalui proses perhitungan, maka terbitlah nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar **97,34** melebihi target sebesar 95,28. Mutu Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara masuk dalam Kategori "***A***" atau setara dengan Kinerja Unit Pelayanan berpredikat "**Sangat Baik**".

Keberhasilan terlihat dengan realisasi yang melebihi target yang telah ditentukan, sehingga memperoleh capaian lebih dari 100%.

Dengan 4 (empat) indikator kinerja dapat menunjang 3 (tiga) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Kota Administrasi.

b. Hasil analisis terhadap evaluasi Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi telah dilaksanakan dan melebihi target sebesar 96,38 dari target sebesar 92,30, dengan capaian sebesar 104,42%. Keberhasilan terlihat dengan tercapainya target yang telah ditentukan.

Dengan 5 (lima) indikator kinerja dapat menunjang 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Kota Administrasi.

6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis atas penggunaan sumber daya adalah menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan Indikator Kinerja Utama SKPD dibutuhkan Sumber Daya Manusia (sudah dibahas dalam Bab I), Dana Sarana dan Prasarana, dan lain-lain. Sumber daya yang dijelaskan di sini adalah Sumber Daya Dana (Realisasi Anggaran) yaitu :

Tabel 3.53. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Utara

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
1	**REALISASI ANGGARAN**	Pemakaian Anggaran harus sama dengan Anggaran yang telah disiapkan.	Anggaran yang terserap sebesar 97,10%	Anggaran tidak terserap dikarenakan beberapa hal antara lain: a. Terdapat kekosongan jabatan struktural dan fungsional dikarenakan adanya PNS yang meninggal dan pensiun, dan belum terisi hingga akhir Desember 2024 sehingga mempengaruhi besaran listing Gaji, TPP Beban Kerja, TPP Prestasi dan Tunjangan PPh. Jumlah PNS per 1 Januari 2024 adalah sebanyak 403 Orang, dan Pejabat PLT sebanyak 37 orang. Sedangkan jumlah PNS per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 389 Orang, dengan Pejabat PLT sebanyak 26 Orang.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan review tahunan.

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
				b. Terdapat 3 orang PPPK sejak bulan Mei 2024, dan tidak seluruh tunjangan dapat terserap karena sesuai dengan jabatan dan jumlah anggota keluarga dari masing-masing PPPK. c. Efisiensi sisa anggaran sesuai kebutuhan. d. Belanja makan minum dilaksanakan sesuai kebutuhan kegiatan. e. PMT Posyandu Balita dan Lansia tidak dilaksanakan di bulan Ramadhan. f. Honor Ke-13 Jumantik pada beberapa kelurahan tidak dibayarkan karena masih terdapat kasus DBD. g. Pembayaran Gaji PPSU/PJLP sesuai dengan rekapitulasi absensi dan jumlah eksisting PJLP (terdapat PJLP yang meninggal/ berhenti/mengundurkan diri). h. Tidak terdapat bencana, atau penanganan oleh Dinas Sosial. i. Pembangunan fisik Kantor Lurah Sukapura terlaksana 100%, sisa anggaran efisiensi hasil negosiasi. j. Pengadaan videotron terlaksana 100%, sisa anggaran efisiensi hasil negosiasi.	

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.54. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN STRATEGIS						
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang memberikan Perbaikan Layanan Publik serta Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi (unsur Kecamatan)	103,21%	-			
2		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	103,21%	-			
1	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	102,04%	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	INDEKS KEPUASAN TERHADAP PENGELOLAAN KELURAHAN (PENYELENGGARAAN RT, RW, LMK DAN FKDM)	98,77%	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan dalam Program Pengelolaan Kecamatan menunjang Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
					INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PPSU		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU dalam Program Pengelolaan Kecamatan menunjang Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PKK, POSYANDU, JUMANTIK, DAN RPTRA	96,91%	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menunjang Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KETERTIBAN UMUM	93,63%	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum dalam Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menunjang Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	104,42%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE GEDUNG KANTOR DAN RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI DALAM KONDISI BAIK	94,81%	Persentase Gedung Kantor Dan Rumah Dinas Di Lingkungan Kota Administrasi Dalam Kondisi Baik dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menunjang Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
					INDEKS KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menunjang Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
				PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	NILAI EFEKTIVITAS KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN	94,36%	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dalam Program Pengelolaan Kota Administrasi menunjang Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
					NILAI EFEKTIVITAS KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan dalam Program Pengelolaan Kota Administrasi menunjang Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
					NILAI EFEKTIVITAS KOORDINASI BIDANG ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat dalam Program Pengelolaan Kota Administrasi menunjang Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

Sumber : e-Monev Kota Administrasi Jakarta Utara, 2024

Analisis Keberhasilan Sasaran Strategis

Hasil yang telah disampaikan pada realisasi Sasaran Strategis di atas, dapat disimpulkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Utara dikatakan berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan antara lain :

1. Tersampaikannya tujuan dan sasaran organisasi, hal ini dibuktikannya dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat Kelurahan.
2. Disediakannya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan, dibuktikan dengan adanya Anggaran yang mencukupi untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut.
3. Diberikannya reward dan punishment terkait pelaksanaan Perjanjian Kinerja Reward diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan bagi Kelurahan dan Kecamatan yang berhasil pencapai target Kinerjanya Punishment berupa surat peringatan terhadap yang tidak berhasil mencapai target kinerjanya.
4. Program dan kegiatan penunjang layanan terealisasi dengan baik. Program dan kegiatan serta pagu yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Kunci Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang realisasinya jauh di atas target yang ditetapkan.
5. Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sangat membantu Kota Administrasi Jakarta Utara dalam mencapai berapa target indikator tujuan dan sasaran.
6. Faktor pendukung keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Utara salah satunya adalah inovasi yang semakin memudahkan dalam mendapatkan layanan Administrasi.

KEBERHASILAN

Dianggap berhasil jika kegiatan telah dilaksanakan dan tercapai sesuai target 100%.

Untuk mencapai suatu keberhasilan seharusnya membutuhkan manajemen, atau tatanan tindakan sebagai langkah-langkah strategik agar target yang diharapkan tersebut tercapai. Manajemen yang memiliki target sasaran menjadi sangat *urgen*, itu berarti kemampuan di bidang manajemen tidak dapat lagi dipandang sebagai kebutuhan nomor dua, lebih dari itu ketrampilan ini justru menempati *prioritas* utama bagi setiap yang ingin berhasil. Singkatnya, dalam kerangka mencapai suatu keberhasilan, disyaratkan adanya keterampilan manajemen yang sesuai dengan target, sasaran dan tujuan yang diharapkan. Tidak terpenuhinya tiga hal tersebut, dapat dipastikan bakal mengakibatkan kegagalan.

Keberhasilan yang terjadi dalam kinerja disebabkan :

a. Adanya sistem, mekanisme dan prosedur serta persyaratan yang dibangun dalam memberikan pelayanan sangatlah mudah dan tidak butuh waktu lama dalam menindaklanjuti setiap warga yang membutuhkan pelayanan.
b. Adanya pemahaman masyarakat dalam prosedur permohonan setiap pelayanan di Kantor Kelurahan, sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan pelayanan.
c. Cepat tanggapnya pemerintah dalam merespons pengaduan.
d. Pemerintah pada saat melakukan penertiban selalu dengan pendekatan persuasif.
e. Adanya kerja sama semua pihak seluruh unsur aparatur Kelurahan yaitu Lurah, ASN, PJLP, RT, RW dan perangkat wilayah lain.
f. Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan apa yang dikerjakan para petugas dirasa sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
g. Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik.
h. Semua kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, sudah adanya penetapan zonasi bekerja.
i. Adanya pelayanan gratis, tidak ada pungutan selama menjalankan pelayanan.
j. Telah dilakukan pembinaan secara rutin, dan setiap pagi sore melakukan patroli rutin.
k. Masyarakat yang melanggar mendapatkan penjelasan yang baik dari pemerintah sehingga paham dan bersedia diberikan sanksi.

KEGAGALAN/HAMBATAN

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, kalimat tersebut sering muncul untuk membangkitkan semangat seseorang dalam berusaha dan diharapkan dapat bangkit dari kegagalan dan meraih kesuksesan. Kegagalan sendiri dapat dikatakan sebagai suatu hal yang terjadi karena ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan suatu hasil dari usaha yang telah dilakukan.

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, jika mampu terus berusaha memperbaiki kinerja selama pencapaian target, maka kesuksesan akan dicapai. Selain itu, perlu diingat bahwa proses dalam pencapaian kesuksesan ini akan memberikan dampak pada hasil yang diperoleh nantinya. Sehingga harus dilakukan proses satu persatu dengan baik, memperbaikinya jika ada yang salah, dan terus bersabar.

Dengan begitu akan bangkit dari kegagalan dan siap meraih kesuksesan.

Kegagalan yang terjadi dalam kinerja biasanya disebabkan :

a. Kurangnya kerja sama antara aparatur Kelurahan yaitu Lurah, ASN, PJLP, RT, RW dan perangkat wilayah yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
b. Kurangnya koordinasi baik dari warga masyarakat dengan petugas maupun dari aparaturnya.
c. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya jumlah Petugas, untuk menangani Sarana Prasarana.
d. Petugas kurang melayani masyarakat dengan baik, sikap petugas yang terkadang kurang sopan dan ramah di mana merupakan keharusan dalam standar pelayanan kelurahan.
e. Petugas kurang cekatan, kurang sigap dan kurang peka dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
f. Tindak lanjutnya tidak langsung dilaksanakan oleh petugas pelayanan.
g. Minimnya evaluasi, pembinaan dan pelatihan.
h. Kondisi lingkungan Kelurahan yang berbeda dengan Kelurahan lain, butuh penanganan lebih sehingga memakan waktu lebih lama.
i. Penanganan sarana di wilayah yang sangat luas untuk mencapai kegiatan di wilayah perlu waktu yang maksimal.
j. Petugas tidak selalu bisa bertemu dengan warga yang mengadu.

k. Padatnya lingkungan warga mengakibatkan petugas kewalahan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
l. Kurangnya pengetahuan warga tentang sistem, mekanisme dan prosedur serta persyaratan pelayanan sehingga persyaratan untuk mendapatkan pelayanan dianggap sulit.
m. Kesadaran warga yang masih kurang terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah mereka.
n. Masyarakat kurang puas karena waktu yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan kurang cepat.
o. Masih adanya ketidakpuasan dari hasil tindak lanjut petugas.

SOLUSI MENGATASI KEGAGALAN :

Ada beberapa opsi atau langkah dalam mengatasi kegagalan untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai berikut :

a. Penyusunan Anggaran tahun yang akan datang, seharusnya berpedoman awal pada serapan kebutuhan anggaran tahun ini.
b. Perlu dilakukan antisipasi kebutuhan baik yang diperlukan dan yang tidak diperlukan sehingga perkiraan serapan tidak terlalu jauh dengan realisasi anggaran.
c. Seluruh UKPD/SKPD wajib memperhatikan setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sehingga tidak terlewat dan penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan.
d. Sumber Daya Manusia yang mumpuni, yang cukup, kemampuan dan keterampilan yang dimilik petugas sangat berdampak pada cepatnya waktu penyelesaian pelayanan.
e. Untuk pelayanan pada prinsipnya sudah melakukan prinsip pelayanan prima yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional serta partisipatif.
f. Adanya pembinaan kepada petugas secara rutin dan diadakan evaluasi kinerja petugas serta penilaian kinerja.
g. Harus berkoordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

INOVASI PENDUKUNG KEBERHASILAN

Inovasi adalah suatu perubahan yang baru berupa ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang sifatnya spesifik, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.

Sebelum membahas tentang inovasi pendukung tentang keberhasilan, perlu diketahui mengenai faktor pendukung keberhasilan inovasi dahulu, yaitu :

Untuk menjadi sukses dan tangguh melalui inovasi, maka harus menerapkan beberapa hal berikut :

a. Harus mampu berpikir secara Kreatif, yaitu dengan berani keluar dari kerangka bisnis yang sudah ada, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
b. Juga harus bisa membaca arah perkembangan dunia usaha. Misalnya, saat ini sedang maraknya penggunaan Teknologi Informasi dalam dunia bisnis.
c. Harus dapat menunjukkan nilai lebih dari produk yang dimilikinya, agar konsumen tidak merasa produk yang ditawarkan terlalu mahal.
d. Perlu menumbuhkan sebuah kerja sama tim, sikap leadership, kebersamaan dan membangun hubungan yang baik dengan antar pegawai.
e. Harus mampu membangun personal *approach* yang baik dengan lingkungan sekitarnya dan tidak cepat berpuas diri dengan apa yang telah diraihnya.
f. Harus selalu meng-*upgrade* ilmu yang dimilikinya untuk meningkatkan hasil usaha yang dijalankannya. Hal ini dapat ditempuhnya dengan cara membaca buku-buku, artikel, internet, ataupun bertanya pada yang ahlinya.
g. Harus bisa menjawab tantangan masa depan dan mampu menjalankan konsep manajemen dan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk mempelajari segala situasi bisnis atau usaha yang cepat berkembang dan berubah sangat cepat. Untuk itu perlunya daya kreativitas yang tinggi, analisis yang baik, intuisi yang tajam,

kemampuan *networking* yang mendukung, serta strategi jitu dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya.

Permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kegiatan adalah modal usaha minim, pengelolaan sumber daya manusia yang kurang tepat dan kurangnya inovasi produk/pelayanan.

Oleh karena itu bagaimana solusi menangani permasalahan tersebut, yaitu dengan mencari akar permasalahan di setiap kasus dan mengedepankan faktor-faktor yang bisa mendukung keberhasilan usaha. Maka faktor yang paling utama pendukung keberhasilan adalah sikap, motivasi dan novasi.

Solusi tanpa disadari, permasalahan sebetulnya bisa di atasi dengan solusi yang tampak di depan mata. Hanya saja kadang terlalu fokus pada permasalahan sehingga tidak mencari akar masalahnya. Bahkan solusi ini tidak hanya menjadi solusi permasalahan tapi bisa mendukung keberhasilan.

Inovasi wajib ada untuk mendukung program/kegiatan agar tidak tertinggal dengan zaman yang cepat berubah. Inovasi tidak harus berangkat dari ide yang besar, bisa melakukannya dari ide-ide kecil seperti menciptakan produk atau layanan yang cocok dengan tren yang sedang naik daun. Dengan begitu, masyarakat akan semakin tertarik dan menganggap bahwa pemerintah daerah peduli dengan selera masyarakat. Maka inovasi pendukung keberhasilan yang telah dilakukan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah :

a. Menciptakan teknologi untuk membantu kebutuhan informasi.
b. Menciptakan sarana dan prasarana lebih modern.
c. Menciptakan produk yang lebih efektif.

B. Capaian Keuangan

Capaian kinerja, pada Kota Administrasi Jakarta Utara secara keseluruhan dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan pada setiap kriteria. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya dan tervalidasi. Konsistensi hasil analisis capaian kinerja dengan hasil pada setiap kriteria penilaian dipastikan dengan cara melakukan pengecekan kembali hasil (dari Pengukuran Kinerja) pada setiap kriteria dan kesesuaiannya dengan hasil analisis.

Anggaran Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024 mengalami APBD perubahan sehingga pagu anggaran awal, anggaran perubahan, dan realisasi program menjadi :

Tabel 3.55. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024

No	Program	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.458.354.046	1.440.311.478	1.348.596.324	93,63%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	94.075.997.465	92.276.522.160	89.427.956.776	96,91%
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	428.689.045.944	422.383.255.544	417.205.271.281	98,77%
4	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	2.245.537.127	2.343.696.571	2.211.578.325	94,36%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	296.502.165.240	295.692.919.379	280.335.647.458	94,81%
	Total	**822.971.099.822**	**814.136.705.132**	**790.529.050.164**	**97,10%**

Sumber : Bagian P2Keuangan Setko Adm. Jakarta Utara, 2024

Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024 dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024 adalah :

Tabel 3.56. Realisasi Anggaran dari Indikator Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024

No	UKPD	Anggaran Perubahan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	% Realisasi Terhadap Target	% Realisasi Terhadap APBD
1	**Kota Administrasi Jakarta Utara**	262.623.279.786	262.623.279.786	250.909.160.271	95,54%	95,54%
2	Kecamatan Cilincing	1.874.583.429	1.874.583.429	1.840.066.215	98,16%	98,16%
3	Kelurahan Cilincing	13.666.885.974	13.666.885.974	13.530.918.556	99,01%	99,01%

No	UKPD	Anggaran Perubahan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	% Realisasi Terhadap Target	% Realisasi Terhadap APBD
4	Kelurahan Kalibaru	14.549.643.974	14.549.643.974	14.426.242.927	99,15%	99,15%
5	Kelurahan Marunda	16.944.822.607	16.944.822.607	16.494.082.598	97,34%	97,34%
6	Kelurahan Rorotan	17.790.515.767	17.790.515.767	17.395.930.497	97,78%	97,78%
7	Kelurahan Semper Barat	24.826.447.672	24.826.447.672	24.421.787.782	98,37%	98,37%
8	Kelurahan Semper Timur	12.908.657.302	12.908.657.302	12.724.077.980	98,57%	98,57%
9	Kelurahan Sukapura	14.903.961.705	14.903.961.705	14.706.845.499	98,68%	98,68%
10	Kecamatan Kelapa Gading	2.299.623.212	2.299.623.212	2.214.965.748	96,32%	96,32%
11	Kelurahan Kelapa Gading Barat	23.172.741.458	23.172.741.458	22.067.566.043	95,23%	95,23%
12	Kelurahan Kelapa Gading Timur	23.763.645.735	23.763.645.735	23.102.924.508	97,22%	97,22%
13	Kelurahan Pegangsaan Dua	27.943.864.114	27.943.864.114	27.346.580.353	97,86%	97,86%
14	Kecamatan Koja	2.100.349.955	2.100.349.955	2.058.322.149	98,00%	98,00%
15	Kelurahan Koja	13.617.108.407	13.617.108.407	13.355.185.454	98,08%	98,08%
16	Kelurahan Lagoa	17.085.209.335	17.085.209.335	16.776.929.832	98,20%	98,20%
17	Kelurahan Rawa Badak Selatan	11.166.556.366	11.166.556.366	11.090.628.110	99,32%	99,32%
18	Kelurahan Rawa Badak Utara	14.902.834.650	14.902.834.650	14.371.291.766	96,43%	96,43%
19	Kelurahan Tugu Selatan	11.004.657.144	11.004.657.144	10.837.291.078	98,48%	98,48%
20	Kelurahan Tugu Utara	20.101.071.439	20.101.071.439	19.634.572.226	97,68%	97,68%
21	Kecamatan Pademangan	2.005.772.872	2.005.772.872	1.980.797.602	98,75%	98,75%
22	Kelurahan Ancol	13.089.767.900	13.089.767.900	12.643.053.359	96,59%	96,59%

No	UKPD	Anggaran Perubahan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	% Realisasi Terhadap Target	% Realisasi Terhadap APBD
23	Kelurahan Pademangan Barat	18.706.300.452	18.706.300.452	18.378.608.617	98,25%	98,25%
24	Kelurahan Pademangan Timur	14.988.972.796	14.988.972.796	14.668.533.906	97,86%	97,86%
25	Kecamatan Penjaringan	2.477.742.651	2.477.742.651	2.310.747.242	93,26%	93,26%
26	Kelurahan Kamal Muara	10.538.457.264	10.538.457.264	10.323.745.794	97,96%	97,96%
27	Kelurahan Kapuk Muara	13.111.801.114	13.111.801.114	12.748.289.727	97,23%	97,23%
28	Kelurahan Pejagalan	19.413.077.679	19.413.077.679	18.985.115.838	97,80%	97,80%
29	Kelurahan Penjaringan	21.023.025.760	21.023.025.760	20.907.857.125	99,45%	99,45%
30	Kelurahan Pluit	23.103.022.723	23.103.022.723	22.792.034.001	98,65%	98,65%
31	Kecamatan Tanjung Priok	2.220.937.834	2.220.937.834	2.150.640.614	96,83%	96,83%
32	Kelurahan Kebon Bawang	17.079.181.771	17.079.181.771	16.763.111.903	98,15%	98,15%
33	Kelurahan Papanggo	17.687.999.951	17.687.999.951	17.378.826.680	98,25%	98,25%
34	Kelurahan Sungai Bambu	13.441.009.213	13.441.009.213	13.234.617.874	98,46%	98,46%
35	Kelurahan Sunter Agung	25.713.549.965	25.713.549.965	24.488.826.695	95,24%	95,24%
36	Kelurahan Sunter Jaya	22.427.888.969	22.427.888.969	21.878.947.164	97,55%	97,55%
37	Kelurahan Tanjung Priok	15.679.488.763	15.679.488.763	15.521.195.438	98,99%	98,99%
38	Kelurahan Warakas	14.182.247.424	14.182.247.424	14.068.730.993	99,20%	99,20%
	TOTAL	814.136.705.132	814.136.705.132	790.529.050.164	97,10%	97,10%

Sumber : monev.bapedadki.net

Berdasarkan Tabel 3.23 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pada SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 97,10%.

Gambar 3.3. Grafik Progres Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Kota Administrasi Jakarta Utara
s.d Bulan Desember Tahun 2024

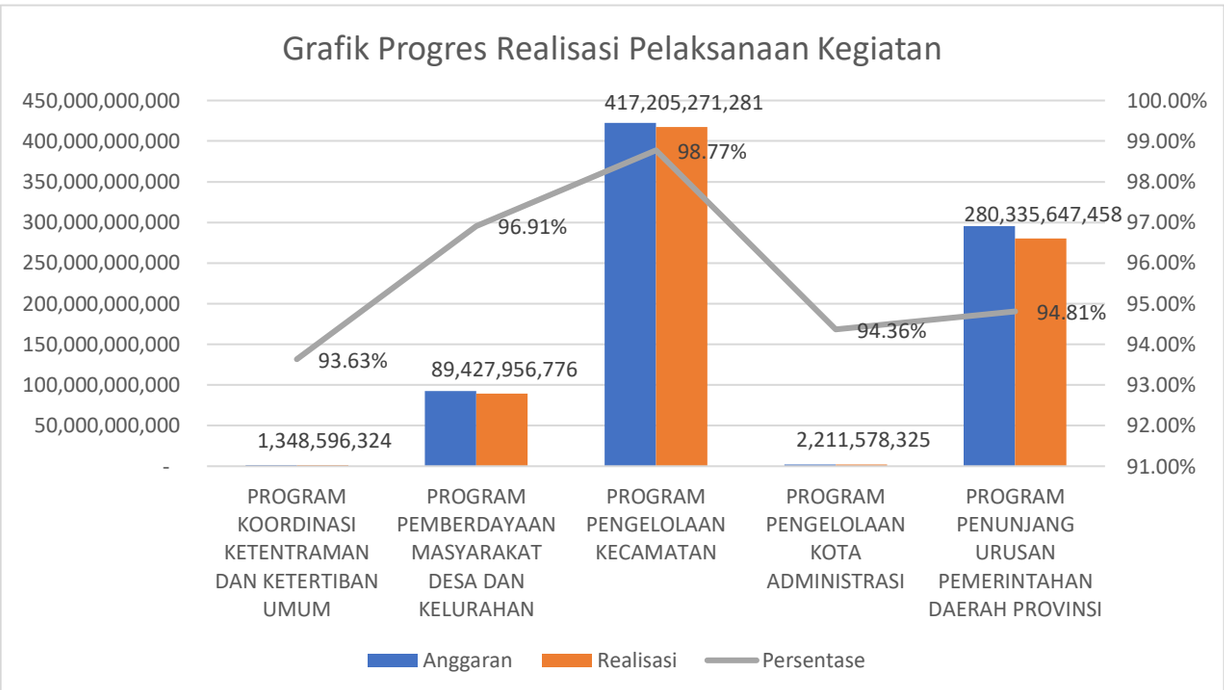

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024 dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024 adalah :

Tabel 3.57. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Indikator 2024				Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Rata-Rata Capaian (Max 100%)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	100,00%	100%	1.440.311.478	1.348.596.324	93,63%	6,37%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pkk, Posyandu, Jumantik, Dan Rptra	4	4	100,00%	100%	92.276.522.160	89.427.956.776	96,91%	3.09%
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4	4	100,00%	100%	422.383.255.544	417.205.271.281	98,77%	1,23%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	100,00%					
4	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	86	98,095	114,06%	100%	2.343.696.571	2.211.578.325	94,36%	14,99%
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	86	97,625	113,52%					
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat	86	92,38	107,42%					

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Indikator 2024				Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Rata-Rata Capaian (Max 100%)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Gedung Kantor Dan Rumah Dinas Di Lingkungan Kota Administrasi Dalam Kondisi Baik	95	95	100%	100%	295.692.919.379	280.335.647.458	94,81%	5,19%
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100%					
	Total	**Total**					**814.136.705.132**	**790.529.050.164**	**97,10%**	

Sumber : Bagian P2Keuangan Setko Adm. Jakarta Utara, 2024

C. Inovasi

Inovasi mendukung program/kegiatan agar tidak tertinggal dengan zaman yang cepat berubah. Inovasi tidak harus berangkat dari ide yang besar, bisa melakukannya dari ide-ide kecil seperti menciptakan produk atau layanan yang cocok dengan tren yang sedang naik daun. Dengan begitu, masyarakat akan semakin tertarik dan menganggap bahwa pemerintah daerah peduli dengan selera Masyarakat.

Inovasi yang dapat disampaikan antara lain :

1. Inovasi Terbaru dalam Program Kesehatan Jakarta Utara

   Salah satu inovasi terbaru dalam program kesehatan Jakarta Utara adalah penerapan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Dengan adanya aplikasi mobile atau website kesehatan, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi tentang fasilitas kesehatan terdekat, jadwal dokter, dan bahkan melakukan konsultasi medis secara online. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

2. Inovasi Publikasi Kontak

   Informasi Publik. Inovasi Pendaftaran Pengajuan Kursi Roda dan Alat Bantu Dengar di Jakarta Utara Tahun 2024. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

3. Aplikasi Absensi PPSU Kelurahan Koja

   Dalam hal tersebut kami membuat Inovasi “Aplikasi Absensi PPSU Kelurahan Koja” secara digital.

   Kehadiran karyawan adalah aspek penting yang berkontribusi terhadap produktivitas dan efisiensi organisasi. Namun, sistem absensi konvensional sering kali tidak efisien, rentan terhadap kecurangan, dan tidak praktis dalam menghadapi skenario kerja jarak jauh. "Aplikasi Absensi PPSU Kelurahan Koja" merupakan aplikasi absensi inovatif yang dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi terkini.

   Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

4. Inovasi Roster Hijau Kelurahan Sunter Jaya

Sampah residu menjadi salah satu bahan tambahan dalam pembuatan Roster.

Berawal dari pilah sampah yang sudah dilaksanakan oleh warga di RW 001 Kelurahan Sunter Jaya didapati banyak sampah yang berupa bungkus makanan ringan, bungkus kopi sachet, bungkus deterjen, bungkus bumbu penyedap, kantong kresek dan kantong plastik lainnya berahir di tempat sampah.

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

D. Penghargaan / Prestasi

Prestasi yang diperoleh dan diberikan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Meraih Penghargaan Piala Adipura tahun 2023 untuk kategori kota metropolitan

   Penghargaan Piala Adipura tahun 2023 untuk kategori kota metropolitan diraih atas keberhasilan Pemerintah Kota Jakarta Utara menjaga kebersihan dan mengelola lingkungan perkotaan. Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

2. Meraih Penghargaan Anugerah Kalpataru

   Anugerah Kalpataru kembali merapat ke Jakarta Utara tepat di Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024. Jika sebelumnya penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI diraih warga Kecamatan Koja, Dani Arwanto dengan kategori perintis pada 2023, Anugerah Kalpataru tahun 2024 diraih Dindin Komarudin dengan kategori pembina

   Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

3. Meraih Penghargaan Zona Hijau dari Ombudsman RI

Suku Dinas Sosial Jakarta Utara mencatat pencapaian luar biasa di akhir tahun 2024 dengan berhasil meraih penghargaan Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) dari Ombudsman RI, berkat nilai kepatuhan mencapai 96,49.

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

4. Meraih Juara 2 Tk. Regional II Lomba Kelurahan

Kelurahan Sunter Jaya berhasil meraih Juara 2 dalam Lomba Kelurahan Tingkat Regional Wilayah II Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Prestasi ini dicapai melalui acara Temu Karya Nasional Penganugerahan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tahun 2024, yang digelar di Gedung Ksirarnawa, Kompleks Art Center Bali, Denpasar, Bali.

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

5. Meraih Penghargaan Tiga ULE di Jakarta Utara

Tiga Unit Layanan Evaluasi (ULE) di lingkup Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu Kecamatan Kelapa Gading, Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara, dan RSUD Koja meraih piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI terkait hasil nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2023.

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

6. Meraih Juara di Jakarta Madrasah Competition (JMC) 2024

Empat siswa MAN 5 Jakarta Utara berhasil meraih juara dalam ajang bergengsi Jakarta Madrasah Competition (JMC) tahun 2024 yang diadakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.

Kompetisi ini merupakan salah satu acara tahunan terbesar yang diikuti oleh berbagai madrasah dari seluruh wilayah Jakarta baik madrasah negeri maupun swasta.

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

7. Memberikan Penghargaan Untuk Enam Pemenang Lomba JAKBEE

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim menyerahkan piala penghargaan dan hadiah kepada para juara Lomba Jakarta Baznas Bazis Entrepreneur Empowerment (JAKBEE) Business Plan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2024 di Lobi Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu (4/12).

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

8. Memberikan Apresiasi IKRA dan Baca Jakarta Semester 2

Keseruan Konser Literasi di Perpustakaan Jakarta Utara: Apresiasi IKRA dan Baca Jakarta Semester 2.

Perpustakaan Jakarta Utara berhasil menyelenggarakan acara yang penuh warna dan kegembiraan, yaitu Konser Literasi. Acara ini merupakan bentuk penghargaan kepada para peserta program IKRA (Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara) dan Baca Jakarta Semester 2 yang telah berkontribusi besar dalam memajukan literasi di wilayah Jakarta Utara.

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

9. Kader dan Posyandu Berprestasi Tahun 2024 di Jakarta Utara

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara memberikan penghargaan kepada pemenang lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Tahun 2024. Penghargaan diserahkan langsung Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim.

Informasi lengkap dan dokumentasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan laporan Tahun 2024 ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai jabaran dari visi, misi, tujuan dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajarannya telah dapat diselenggarakan dengan baik.
2. Berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota.
3. Nilai pengukuran Kepuasan Layanan Kota Administrasi tahun 2024 sebesar 96,8 dari nilai target sebesar 93,79.
4. Hasil pengukuran Nilai Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi tahun 2024 sebesar 96,28 dari nilai target sebesar 92,3.
5. Nilai pengukuran Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 97,22 melebihi nilai target sebesar 95,28.

6. Hasil Rencana Aksi Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 ada sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja semuanya telah dilaksanakan dengan realisasi mencapai target sebesar 100%. Sub KSD merupakan sebagai pendukung indikator kinerja utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara. Adapun Sub KSD yang diamanatkan kepada Kota Administrasi Jakarta Utara adalah :
   1) Penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir;
   2) Penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
   3) Penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya;
   4) Penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu;
   5) Penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati;
   6) Penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital;
   7) Penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
   8) Penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta.

7. Terdapat 9 (sembilan) Indikator Sasaran Khusus Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dan ada 3 (tiga) Indikator yang memiliki capaian lebih dari 100%, yaitu :
   1) Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
   2) Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi;
   3) Survei Kepuasan Layanan Masyarakat.

Adapun capaian Indikator Sasaran Khusus lainnya telah memenuhi target sebesar 100%.

8. Ada 3 (tiga) Sasaran Operasional Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 yaitu Indikator Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat mencapai 99,87%. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur dan Indikator Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) telah mencapai 100%.
9. Tidak terdapat masalah yang signifikan dalam memenuhi kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, namun demikian Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajarannya akan berupaya keras untuk meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.
10. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan, hampir seluruh indikator kinerja berhasil diwujudkan dengan baik. Terlihat dukungan seluruh Suku Dinas, Bagian, Kecamatan maupun Kelurahan mewujudkan kinerja yang telah ditargetkan.

B. Saran

Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan agar mencapai tujuan, adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan berkesinambungan ke depan untuk Rencana Strategis.
2. Perbaikan pelayanan, melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat harus terus dievaluasi dan ditingkatkan, seperti :
   a. Seluruh pelayanan yang diberikan untuk masyarakat bersifat gratis (tidak dipungut bayaran) hal ini sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para pekerja di larang keras meminta imbalan kepada warga.
   b. Untuk pelayanan pada prinsipnya sudah melakukan prinsip pelayanan prima yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional serta partisipatif.
   c. Prosedur dan persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah didapatkan, dan akses untuk melaporkan suatu perkara lebih mudah dan terjangkau.

3. Perekrutan petugas/kader ditingkatkan dengan penilaian kompetensi yang lebih baik, seperti :
   a. Sumber Daya Manusia yang mumpuni, yang cukup, kemampuan dan keterampilan yang dimilik petugas sangat berdampak pada cepatnya waktu penyelesaian pelayanan.
   b. Kejelasan tupoksi petugas pelayanan, mengetahui tupoksinya masing-masing dan sudah adanya penetapan zonasi bekerja.
   c. Adanya pembinaan kepada petugas secara rutin dan diadakan evaluasi kinerja petugas.
   d. Dalam melaksanakan pekerjaan petugas pelayanan secara rutin harus dilaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja yang akan menentukan apakah yang bersangkutan akan diperpanjang kontraknya ataupun dihentikan.
   e. Diterapkan kedisiplinan dan tanggungjawab.
   f. Seleksi penerimaan petugas pelayanan harus dilaksanakan secara ketat tidak hanya pengetahuan dan ketrampilan melaksanakan pekerjaan namun juga sikap dan perilaku selama melaksanakan seleksi turut menentukan kelulusannya.
   g. Sarana prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik.

4. Peningkatan kinerja serta koordinasi antar pihak terkait untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun depan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 ini dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta motivasi untuk menjadi lebih baik lagi.

NYAMPLUNG-BURUNG RAJA UDANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Naskah Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Maulana Hakim
Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,
Heru Budi Hartono	Ali Maulana Hakim NIP 197204261991011001

Target Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Ali Maulana Hakim
NIP : 197204241991011001
Jabatan : Wali Kota
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Keterangan
Sasaran Strategis										
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pusat yang memberikan Pelayanan Layanan Publik serta Pemenuhan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang urusan Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jakservis	N/A	93,785	N/A	93,785	93,785	Nilai
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang urusan Kota Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jakservis	N/A	93,785	N/A	93,785	93,785	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Keterangan
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) menggambarkan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang diteliti dan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang disurvei dalam layanan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengendalian Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, BPPKA, dan Penyelenggaraan Kelestarian Lingkungan Hidup, serta kepuasan terhadap penyelenggaraan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan KKDM). Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka nilai 1 (satu) hingga dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,32, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,33 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian dubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil kepuasan seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Sumber data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jakarunet	N/A	90,275	N/A	91,275	90,275	Nilai
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap OPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metoda Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi dilapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi OPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala OPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (data-data) dari Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jakarunet	N/A	92,3	N/A	92,3	92,3	Nilai
Sasaran Strategis										
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon pemangku daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Definisi : a. Persentase terselenggaranya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Pemangku Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metoda Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Pemangku Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu a. Aspek Kelepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Kelepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] / (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Kelepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Sensus Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi : Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Sensus Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran : Nilai diambil dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem JakartaWi	92	N/A	92	N/A	92	Nilai
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dan hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembendayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (meratul Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang dimanfaatkan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dan hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data a. Bijdox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD	N/A	30	N/A	60	90	Persen
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 5 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat.bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024 Metode Pengukuran : (Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 : 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%) Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan Pintar BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km.bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km.bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan Kesiapan/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : (Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)) x 100% Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah di verifikasi oleh Inspektorat Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
11	Terusapanya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 185 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi: a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan paju anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksi apbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran sehorusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran sehorusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang berhasil untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data: a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) paju anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan mempertimbangkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bdkk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bdkk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 50 = Rendah > 50 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	IN/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dan jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum dilindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hatono

Jakarta, Januari 2024
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Provinsi DKI Jakarta,

Ali Maulana Hakim
NIP. 19720426199101001

Inovasi Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

Inovasi mendukung program/kegiatan agar tidak tertinggal dengan zaman yang cepat berubah. Inovasi tidak harus berangkat dari ide yang besar, bisa melakukannya dari ide-ide kecil seperti menciptakan produk atau layanan yang cocok dengan tren yang sedang naik daun. Dengan begitu, masyarakat akan semakin tertarik dan menganggap bahwa pemerintah daerah peduli dengan selera Masyarakat.

Inovasi yang dapat disampaikan antara lain :

1. Inovasi Terbaru dalam Program Kesehatan Jakarta Utara

Inovasi terbaru dalam program kesehatan Jakarta Utara menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Program-program inovatif ini dirancang untuk memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Jakarta Utara.

Salah satu inovasi terbaru dalam program kesehatan Jakarta Utara adalah penerapan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. **Dengan adanya aplikasi mobile atau website kesehatan**, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi tentang fasilitas kesehatan terdekat, jadwal dokter, dan bahkan melakukan **konsultasi medis secara online**.

Menurut dr. Andi Kurniawan, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Utara, “Inovasi dalam program kesehatan sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan adanya teknologi informasi, kami berharap dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta Utara.”

Selain itu, inovasi terbaru dalam program kesehatan Jakarta Utara juga melibatkan kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan kesehatan. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat memberikan akses kesehatan yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat Jakarta Utara.

Menurut Prof. Dr. Siti Aisyah, pakar kesehatan masyarakat, “Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dengan adanya inovasi dalam program kesehatan, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat Jakarta Utara.”

Dengan adanya inovasi terbaru dalam program kesehatan Jakarta Utara, diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjalankan program-program inovatif ini. Semoga Jakarta Utara dapat menjadi contoh yang baik dalam penerapan inovasi dalam program kesehatan bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

2. Inovasi Publikasi Kontak

Informasi Publik, Inovasi Pendaftaran Pengajuan Kursi Roda dan Alat Bantu Dengar di Jakarta Utara Tahun 2024, dengan informasi sebagai berikut :

3. Usulan Inovasi

Ada 2 (dua) usulan Inovasi Publik, Inovasi Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan informasi sebagai berikut :

a. Berdasarkan surat Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0587/PU.04 tanggal 13 November 2024 Hal Usulan Inovasi Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hal-hal yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

Dalam Lampiran I Surat Sekretaris Kota, tertulis bahwa :

Usulan : Inovasi Kelurahan Koja

1) Profil Inovasi

Pada tahun 2021 hingga 2022, pandemi COVID-19 telah mendorong banyak organisasi dan perusahaan untuk mengadopsi sistem absensi digital guna memastikan keamanan dan kesehatan para karyawan. Beberapa latar belakang terciptanya aplikasi absensi PPSU Kelurahan Koja dalam menghadapi pandemi COVID-19 antara lain :

a) Kebutuhan akan Sistem Absensi yang Aman dan Efisien;
b) Penerapan Protokol Kesehatan;
c) Fleksibilitas Kerja;
d) Pengurangan Kontak Fisik.

Dalam hal tersebut kami membuat Inovasi “Aplikasi Absensi PPSU Kelurahan Koja” secara digital.

Kehadiran karyawan adalah aspek penting yang berkontribusi terhadap produktivitas dan efisiensi organisasi. Namun, sistem absensi konvensional sering kali tidak efisien, rentan terhadap kecurangan, dan tidak praktis dalam menghadapi skenario kerja jarak jauh. "Aplikasi Absensi PPSU Kelurahan Koja" merupakan aplikasi absensi inovatif yang dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi terkini.

2) Nama Inovasi

Aplikasi Absensi PPSU Kelurahan Koja.

3) **Dibuat oleh**

Heru Kurniawan (PPSU Admin Kelurahan Koja).

4) **Jenis Inovasi**

Digital.

5) **Bentuk Inovasi Daerah**

Aplikasi.

6) **Tujuan Inovasi Daerah**

Dengan tujuan ini, inovasi dalam bentuk aplikasi absensi PPSU Kelurahan Koja secara digital dapat membantu pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, transparan, dan produktif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

7) **Manfaat Yang Diperoleh**

Terdapat 2 unsur manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu unsur internal dan eksternal.

Internal :

Dapat memantau Absensi atau jam kerja PPSU Kelurahan Koja sesuai aturan yang berlaku dan Data dicatat secara otomatis dan akurat, mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan waktu kerja.

Eksternal :

Peningkatan produktivitas PPSU Kelurahan Koja melalui manajemen waktu yang lebih baik dapat meningkatkan output dan kualitas Pelayanan dimasyarakat.

8) **Hasil Inovasi**

Aplikasi Absensi PPSU Kelurahan Koja.

9) **Waktu Uji Coba Inovasi Daerah**

Uji coba Inovasi Aplikasi PPSU Kelurahan Koja dijalankan akhir Bulan Desember 2021

10) Waktu Implementasi

01 Januari 2022 s.d sekarang

11) INDIKATOR INOVASI

No	Indikator SPD	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Regulasi Inovasi Daerah	✓		Regulasi yang mendukung lahirnya inovasi tersebut
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	✓		Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah (SK Pengelola Inovasi/ SK TIM)
3.	Dukungan anggaran	✓		Anggaran Inovasi daerah dalam APBD dengan Tahapan penerapan (Penyediaan sarana, prasarana, SDM, dan layanan, bimbingan teknis, urusan jenis layanan). Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran
4.	Penggunaan IT	✓		Penggunaan IT dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan
5.	Bimbingan Teknis Inovasi	✓		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi pelaksana inovasi Daerah
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD		✓	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah
7.	Keterlibatan aktor inovasi	✓		Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah
8.	Pelaksana Inovasi Daerah	✓		Penetapan tim pelaksana inovasi daerah (SK TIM)

No	Indikator SPD	Ada	Tidak	Keterangan
9.	Jejaring Inovasi	✓		Jumlah Perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi
10.	Sosialisasi Inovasi Daerah	✓		Penyebarluasan informasi kebijakan Inovasi daerah
11.	Pedoman teknis	✓		Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book atau sejenisnya
12.	Kemudahan informasi layanan	✓		Kemudahan mendapatkan informasi layanan
13.	Replikasi	✓		Inovasi daerah telah direplikasi oleh daerah lain (diluar Provinsi DKI Jakarta)
14.	Kecepatan inovasi	✓		Kemudahan mendapatkan informasi layanan (Proposal inovasi yang menunjukkan wktu pembuatan inovasi)
15.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	✓		Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna (SOP)
16.	Penyelesaian layanan pengaduan	✓		Rasio Pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi kelurahan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainya terkait layanan inovasi
17.	Online sistem	✓		Perangkat Jaringan prosedur yang dibuat secara daring
18.	Kemanfaatan inovasi	✓		Jumlah Pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah

No	Indikator SPD	Ada	Tidak	Keterangan
19.	Monitoring dan evaluasi inovasi daerah	✓		Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah
20.	Kualitas inovasi daerah	✓		Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video inovasi daerah

Dalam Lampiran II Surat Sekretaris Kota, tertulis bahwa :

Usulan : Inovasi Roster Hijau Kelurahan Sunter Jaya

1) Profil Inovasi

Berawal dari pilah sampah yang sudah dilaksanakan oleh warga di RW 001 Kelurahan Sunter Jaya didapati banyak sampah yang berupa bungkus makanan ringan, bungkus kopi sachet, bungkus deterjen, bungkus bumbu penyedap, kantong kresek dan kantong plastik lainnya berahir di tempat sampah. Ini menjadi keresahan dan salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi dan mengurai sampah tersebut dengan cara mengolahnya menjadi barang kreatif yang memiliki nilai jual misalnya Tas, Tempat Tisu dan Tikar dari bungkus Kopi. Akan tetapi kami sadari hanya sampah dari produk tertentu yang dapat kami olah dan setelah barang tersebut rusak akan menjadi sampah yang harus berahir di tempat pembuangan sampah ahir. Bank Sampah Puspa Cindra Kana dan Corporate Social Responbility (CSR) yaitu Astra Internasional yang berkolaborasi dengan Rebricks mengadakan pelatihan pembuatan Roster dari bahan sampah plastik tertolak dan sampai sekarang selain produksi Roster.

2) Nama Inovasi

Roster Hijau.

3) Dibuat oleh

RW 01 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara.

4) Jenis Inovasi

Non Digital.

5) Bentuk Inovasi Daerah

Sampah residu menjadi salah satu bahan tambahan dalam pembuatan Roster.

6) Tujuan Inovasi Daerah

- Membuat sampah menjadi berkah.
- Menyadarkan masyarakat akan kebersihan lingkungan.
- Mengurangi dan mengurai sampah residu.

7) Manfaat Yang Diperoleh

Terdapat 2 unsur manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu unsur internal dan eksternal.

Internal :

- Memberi manfaat atau nilai tambah pada sampah residu.
- Menjadi salah satu sumber pendapatan di Bank Sampah.

Eksternal :

- Dengan menggunakan Roster Hijau berarti secara aktif ikut mengurangi sampah residu.
- Ikut Aktif dalam menciptakan perekonomian hijau dengan menjual Roster Hijau yang manfaatkan sampah residu.

8) Hasil Inovasi

Aplikasi Absensi PPSU Kelurahan Koja.

- Daur ulang sampah residu menjadi Kain Perca menjadi Keset, Tas, Bros, Tiker.
- Pot dari Galon air mineral.
- Sampah tertolak menjadi campuran Roster.
- Tutup Botol menjadi Papan Plastik.

9) Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

25 Sepember 2011.

10) Waktu Implementasi

30 September 2011.

11) INDIKATOR INOVASI

No	Indikator SPD	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Regulasi Inovasi Daerah	✓		Regulasi yang mendukung lahirnya inovasi tersebut
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	✓		Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah (SK Pengelola Inovasi/ SK TIM)
3.	Dukungan anggaran	✓		Anggaran Inovasi daerah dalam APBD dengan Tahapan penerapan (Penyediaan sarana, prasarana, SDM, dan layanan, bimbingan teknis, urusan jenis layanan). Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran
4.	Penggunaan IT	✓		Penggunaan IT dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan
5.	Bimbingan Teknis Inovasi	✓		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi pelaksana inovasi Daerah
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD		✓	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah
7.	Keterlibatan aktor inovasi	✓		Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah
8.	Pelaksana Inovasi Daerah	✓		Penetapan tim pelaksana inovasi daerah (SK TIM)

No	Indikator SPD	Ada	Tidak	Keterangan
9.	Jejaring Inovasi	✓		Jumlah Perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi
10.	Sosialisasi Inovasi Daerah			Penyebarluasan informasi kebijakan Inovasi daerah
11.	Pedoman teknis	✓		Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book atau sejenisnya
12.	Kemudahan informasi layanan	✓		Kemudahan mendapatkan informasi layanan
13.	Replikasi	✓		Inovasi daerah telah direplikasi oleh daerah lain (diluar Provinsi DKI Jakarta)
14.	Kecepatan inovasi	✓		Kemudahan mendapatkan informasi layanan (Proposal inovasi yang menunjukkan wktu pembuatan inovasi)
15.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	✓		Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna (SOP)
16.	Penyelesaian layanan pengaduan	✓		Rasio Pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi kelurahan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainya terkait layanan inovasi
17.	Online sistem	✓		Perangkat Jaringan prosedur yang dibuat secara daring
18.	Kemanfaatan inovasi	✓		Jumlah Pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah

No	Indikator SPD	Ada	Tidak	Keterangan
19.	Monitoring dan evaluasi inovasi daerah	✓		Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah
20.	Kualitas inovasi daerah	✓		Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video inovasi daerah

Penghargaan/Prestasi Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

Penghargaan/Prestasi yang diperoleh dan atau diberikan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Meraih Penghargaan Piala Adipura tahun 2023 untuk kategori kota metropolitan

Kota Jakarta Utara meraih Piala Adipura tahun 2023 untuk kategori kota metropolitan.

Kota Jakarta Utara kembali meraih penghargaan Piala Adipura setelah penantian panjang 12 tahun. Penghargaan Piala Adipura tahun 2023 untuk kategori kota metropolitan diraih atas keberhasilan Pemerintah Kota Jakarta Utara menjaga kebersihan dan mengelola lingkungan perkotaan.

Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana mengatakan, Penghargaan ini membuktikan perjuangan semua pihak menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Jakarta Utara.

Jakarta Utara menerima Piala Adipura tahun 2023 adalah suatu proses panjang. Kalau dilihat dari sejarahnya terakhir kali Jakarta Utara mendapatkan piala Adipura di tahun 2011 berarti sudah cukup lama. Semua ini mengapresiasi semua pihak yang terus berkomitmen dan konsisten untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah, dan rapi.

Tidak cuma pemerintah, stakeholder lainnya termasuk masyarakat sendiri turut berperan dalam memperbaiki kualitas hidup di Jakarta Utara. Selalu menerapkan hidup bersih, tertib, dan peduli terhadap lingkungan maka penghargaan ini optimis didapat.

Sekarang ini, kualitas lingkungan di Jakarta Utara mengalami peningkatan yang signifikan dimana warga masyarakat sudah mulai peduli dan guyub untuk menjaga lingkungannya. Adapun meraih Piala Adipura tahun 2023 ini mendapat sambutan meriah di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

Selesai mengikuti pemberian penghargaan di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Piala Adipura dibawa ke Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara. Piala Adipura disambut meriah oleh para petugas kebersihan, pejabat, dan jajaran lainnya di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

2. Meraih Penghargaan Anugerah Kalpataru

Jika sebelumnya penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI diraih warga Kecamatan Koja, Dani Arwanto dengan kategori perintis pada 2023, Anugerah Kalpataru tahun 2024 diraih Dindin Komarudin dengan kategori pembina.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara mengucap syukur sekaligus terima kasih kepada KLHK RI yang kembali memberikan anugerah Kalpataru kepada warganya. Diharapkan anugerah ini dapat mengetuktularkan orang atau kelompok di Jakarta Utara yang lain untuk senantiasa aktif terhadap pelestarian alam dan sosial.

Anugerah ini dilihat dari sejauh mana proses yang panjang yang dijalani penerima, yang tentunya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosialnya

Abah Dindin, sapaan Dindin Komarudin, yang berkomitmen kuat terhadap pelestarian alam dan sosial melalui Yayasan Kumala dengan konsep sirkural 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sejak tahun 2003 silam. Tidak sendiri, Abah Dindin turut mengajak anak jalanan menjalani itu semua demi perubahan stigma negatif terhadap anak asuhnya darikaum marjinal.

Proses pelestarian lingkungan hidup dan sosial ini tidak berhenti dengan adanya Anugerah Kalpataru, tapi ini proses yang berkelanjutan (Sustainable). Mudah-mudahan akan ada lagi warga Jakarta Utara (Jakarta) yang menerima anugerah ini ke depannya karena penghargaan ini bukan upaya sendiri, tapi upaya kolektif dari seluruh elemen pentahelix (Pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media).

Penghargaan ini merupakan kerja keras bersama termasuk anak asuh (kaum marjinal) yang dibina Abah Dindin sejak merintis Yayasan Kumala pada tahun 2003 silam. Pesan, memberikan manfaat untuk lingkungan kita meski dari hal terkecil. Semoga ini memberikan dampak domino yang positif bagi semuanya.

3. Meraih Penghargaan Zona Hijau dari Ombudsman RI

Suku Dinas Sosial Jakarta Utara mencatat pencapaian luar biasa di akhir tahun 2024 dengan berhasil meraih penghargaan Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) dari Ombudsman RI, berkat nilai kepatuhan mencapai 96,49. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara “ Semarak Utara Sejuta Pesona” yang berlangsung, di Halaman Plaza Barat Kantor Walikota Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024.

Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Rizqon Hermawan, menerima penghargaan ini sebagai pengakuan atas dedikasi dan komitmen dalam menyediakan pelayanan publik yang prima dan sesuai dengan standar kepatuhan.

Capaian ini diharapkan, menjadi dorongan bagi seluruh UKPD di wilayah Jakarta Utara untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik. Sebagai penutup tahun, penghargaan ini menjadi simbol harapan baru untuk langkah yang lebih maju demi kesejahteraan masyarakat di tahun mendatang.

4. Meraih Juara 2 Lomba Kelurahan Tk. Regional II

Kelurahan Sunter Jaya berhasil meraih Juara 2 dalam Lomba Kelurahan Tingkat Regional Wilayah II Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Prestasi ini dicapai melalui acara Temu Karya Nasional Penganugerahan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tahun 2024, yang digelar di Gedung Ksirarnawa, Kompleks Art Center Bali, Denpasar, Bali, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024.

Raihan ini menjadi kebanggaan kedua bagi Kota Administrasi Jakarta Utara, setelah pada tahun 2023, Kelurahan Pegangsaan Dua juga meraih prestasi di ajang yang sama.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, bersama Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi, dan Kepala Bagian Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Muhammad Alwi, turut hadir dalam acara tersebut untuk memberikan dukungan. Selain itu, Lurah Sunter Jaya, Eka Persilian Yeluma, dan Ketua TP PKK Kelurahan Sunter Jaya, Widi Afianti, juga turut mendampingi dalam momen prestisius ini.

5. Meraih Juara di Jakarta Madrasah Competition (JMC) 2024

Empat siswa MAN 5 Jakarta Utara berhasil meraih juara dalam ajang bergengsi Jakarta Madrasah Competition (JMC) tahun 2024 yang diadakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024.

Kompetisi ini merupakan salah satu acara tahunan terbesar yang diikuti oleh berbagai madrasah dari seluruh wilayah Jakarta baik madrasah negeri maupun swasta. Tujuan utama dari kompetisi ini adalah untuk mendorong siswa madrasah mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Kompetisi ini meliputi berbagai kategori, mulai dari sains, seni dan keterampilan keagamaan. Tahun ini, JMC diikuti oleh lebih dari 100 madrasah dengan total peserta mencapai 2.614 siswa.

Dari berbagai kategori yang dipertandingkan, empat siswa berhasil meraih juara pada kategori sains dan keagamaan. Keempat siswa tersebut diantaranya adalah Zikril Nur Hakim berhasil meraih juara 1 bidang kimia pada kategori sains, Ahmad Fajar Nugroho berhasil meraih juara 3 bidang keagamaan pada kategori sains, Haditya Sukma Wijaya berhasil meraih juara 3 bidang MTQ Putra, dan Ayla Salwa Oktadina berhasil meraih juara 3 bidang MTQ Putri kategori keagamaan.

Berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi teman-teman untuk mengharumkan nama MAN 5 Jakarta Utara, dan adalah contoh nyata bahwa kerja keras dan ketekunan pasti membuahkan hasil, dan berharap prestasi ini bisa memotivasi siswa lain untuk terus berprestasi di bidang masing-masing.

Jakarta Madrasah Competition tahun ini ditutup dengan penuh kebanggaan dan harapan bagi seluruh peserta. Para pemenang mendapatkan penghargaan berupa medali, sertifikat, serta uang pembinaan yang diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi mereka lebih lanjut.

6. Tiga ULE di Jakut Raih Penghargaan

Tiga Unit Layanan Evaluasi (ULE) di lingkup Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu Kecamatan Kelapa Gading, Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara, dan RSUD Koja meraih piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI terkait hasil nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB RI, Herman menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada ULE terbaik di lingkup Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

Sedangkan acara penyerahan piagam penghargaan bagi ULE terbaik berlangsung di The Hotel Sultan & Residence Jakarta, Rabu (31/1). Tentunya, penghargaan yang telah diraih akan menjadi penyemangat baru bagi para penyelenggara pelayanan publik dalam mengoptimalkan layanan masyarakat.

7. Penghargaan Untuk Enam Pemenang Lomba JAKBEE

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim menyerahkan piala penghargaan dan hadiah kepada para juara Lomba Jakarta Baznas Bazis Entrepreneur Empowerment (JAKBEE) Business Plan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2024 di Lobi Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024.

Adapun daftar para pemenang lomba JAKBEE 2024 sebagai berikut, untuk Juara I diraih oleh Tim Cheers Up dari SMKN 12 dengan produk bento cake, Juara II Tim Crocrown PKBM Urban Huffazh dengan produk kerajinan tangan, Juara III Tim Duta Lingkungan SMAN 13 dengan produk lilin aromaterapi dari minyak jelantah.

Selanjutnya, Juara Harapan I dimenangkan oleh Tim Gotchagirls SMK Hang Tuah 1 dengan produk panana, Juara Harapan II Tim Noastara SMAN 75 dengan produk Tteokku, dan Juara Harapan III Tim Jakrips SMAN 110 dengan produk prohatisera.

"Selamat kepada semuanya, ini akan menjadi contoh baik dan awal bagi kalian untuk berkarir. Berprestasi itu bisa di jalur pendidikan dan bisnis. Tekuni, tapi yang utama adalah belajar kalau bisa berjalan beriringan sehingga prestasi dapat dan bisnis pun berjalan," ungkap Ali Maulana Hakim didampingi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Utara, Muhammad Andri.

Walikota pun membuka kesempatan kepada seluruh peserta Lomba JAKBEE 2024 untuk bisa ikut pembinaan dengan sudin terkait sehingga produk yang dihasilkan bisa dikurasi dan masuk kedalam program JakPreneur. "Mereka akan dibina di tingkat kota untuk lebih mudah dalam memasarkan produknya. Quality control produk yang dihasilkan harus dijaga terus sehingga nantinya juga bisa dipasarkan di Galeri Dekranasda dan Coffe & Book Difabis Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Koordinator Wilayah Baznas Bazis Jakarta Utara, Wisnu Cakraningrat mengatakan bahwa juara Lomba JAKBEE Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara akan kembali mengikuti Lomba JAKBEE Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada 5-6 Desember 2024 di Baznas Bazis DKI Jakarta. "Harapan kami, peserta Lomba JAKBEE 2024 bisa ikut serta dalam pembinaan tingkat kota kemudian kita juga berharap program JAKBEE bisa dilaksanakan setahun dua kali di tahun 2025," tuturnya.

Pelaksanaan Lomba JAKBEE 2024 yang mengangkat tema "Scale Up and Grow Your Bussiness Product" disambut antusias oleh para pelajar di Jakarta Utara. "Alhamdulillah, kami mendapatkan Juara I dalam Lomba JAKBEE 2024. Sebagai persiapan ke tingkat DKI, kita akan mengevaluasi kembali hasil kemarin dengan meningkatkan kesiapan produk seperti packaging dan pemasaran produknya," ujar anggota Tim Cheers Up dari SMKN 12 Jakarta, Putri.

8. Apresiasi IKRA dan Baca Jakarta Semester 2

Keseruan Konser Literasi di Perpustakaan Jakarta Utara: Apresiasi IKRA dan Baca Jakarta Semester 2.

Pada tanggal 28 November 2024, Perpustakaan Jakarta Utara berhasil menyelenggarakan acara yang penuh warna dan kegembiraan, yaitu **Konser Literasi**. Acara ini merupakan bentuk penghargaan kepada para peserta program **IKRA** (Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara) dan **Baca Jakarta** Semester 2 yang telah berkontribusi besar dalam memajukan literasi di wilayah Jakarta Utara.

Konser Literasi yang digelar di Perpustakaan Jakarta Utara tidak hanya tentang pemberian apresiasi, tetapi juga menjadi wadah untuk merayakan kekuatan literasi yang dapat menghubungkan berbagai kalangan. Suasana semakin meriah dengan penampilan seru yang memukau penonton, mulai dari musik yang menggetarkan hingga dongeng yang menginspirasi.

Acara ini juga dimeriahkan dengan kehadiran **Kak Aio**, seorang pendongeng yang tak hanya mampu menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan berharga melalui cerita-cerita menarik. Dengan gaya bercerita yang penuh energi, Kak Aio berhasil membawa para hadirin, terutama anak-anak, dalam perjalanan imajinatif yang menyenangkan. Dongeng yang dibawakan penuh makna, mendorong pentingnya nilai-nilai literasi yang dapat memperkaya kehidupan sehari-hari.

"Kami ingin memberikan apresiasi yang lebih kepada para peserta IKRA dan Baca Jakarta yang telah menunjukkan dedikasinya dalam dunia literasi. Konser Literasi ini menjadi ajang untuk merayakan kebersamaan dan semangat dalam mencintai buku serta budaya baca," ujar Kepala Perpustakaan Jakarta Utara dalam sambutannya.

Selain itu, pihak Perpustakaan Jakarta Utara juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan literasi yang telah diselenggarakan selama ini. Partisipasi aktif masyarakat dalam program-program literasi, seperti **IKRA** dan **Baca Jakarta**, menjadi bukti nyata bahwa minat baca di Jakarta Utara semakin berkembang.

Perpustakaan Jakarta Utara berharap, melalui kegiatan ini, semangat literasi semakin menggelora dan menjadikan budaya baca sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. "Terima kasih kepada semua yang telah bergabung dan mendukung acara ini. Kami sangat menantikan partisipasi Anda dalam kegiatan menarik lainnya yang akan hadir di tahun depan!" tambahnya.

Dengan berakhirnya acara hari ini, Perpustakaan Jakarta Utara menutup tahun ini dengan harapan dan semangat yang tinggi untuk terus mengembangkan kegiatan literasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sampai jumpa di tahun depan, dengan lebih banyak acara seru dan inspiratif! ????

9. Kader dan Posyandu Berprestasi Tahun 2024 di Jakarta Utara

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan penghargaan kepada pemenang lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Tahun 2024. Penghargaan diserahkan langsung Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim.

Juara 1 Posyandu terbaik diraih Posyandu Melati 4, RW 04, Kelurahan Pademangan Timur; Juara 2 Posyandu Anggrek Bulan 1 RW 03, Kelurahan Lagoa; dan berhak atas Juara 3 Posyandu Kerang Hijau, RW 22, Kelurahan Pluit.

Kemudian, Juara 1 Kader Berprestasi dimenangkan Nuraini dari Posyandu Kerang Hijau, RW 22, Kelurahan Pluit; Juara 2 diraih Dwi Ratna Sari dari Posyandu RW 03, Kelurahan Kalibaru, dan Juara 3 diberikan kepada Mamik Susanti dari Posyandu Anggrek Bulan 1, RW 03, Kelurahan Lagoa.

Walikota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemenang lomba dan semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba ini berhubungan dengan program Kementerian Kesehatan RI dalam melaksanakan transformasi layanan primer yang difokuskan pada pendekatan siklus hidup dan pelayanan kesehatan melalui Posyandu.

"Posyandu mempunyai peran penting dalam pelayanan kesehatan. Para kader Posyandu juga menjadi garda terdepan dan ujung tombak sebagai deteksi dini kesehatan di wilayahnya," ujarnya, di Gedung Balai Yos Sudarso, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024.

Walikota berharap, dengan kehadiran kader di Posyandu ini dapat menjadi penggerak atau penyambung lidah antara masyarakat dengan petugas kesehatan. Kemudian, memberikan informasi tentang program Posyandu dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan secara aktif. "Selamat kepada semua pemenang, harus lebih ditingkatkan. Semoga kerja keras ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kader maupun masyarakat di wilayah mereka bertugas," ungkapnya.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Lisbeth Regina Panjaitan menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta tentang Apresiasi Kader dan Posyandu Berprestasi. Kegiatan ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan motivasi kader dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. "Penghargaan ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi yang sudah kita lakukan. Posyandu bersama TP PKK telah mendukung kegiatan-kegiatan kesehatan dan penurunan stunting," ucapnya.

Kepala Suku Dinas Kesehatan menuturkan, pemenang nantinya akan mewakili Jakarta Utara dalam lomba serupa di tingkat Provinsi. "Selamat dan semangat kepada pemenang. Mudah-mudahan kerja sama dalam melayani kesehatan masyarakat bisa terus ditingkatkan," kata Kasudin.